

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR
TAHUN 2025**





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

(Lembaran)...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB II
KERANGKA RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

Pembangunan...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
- a. penyusunan Rencana Strategis;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Umum Daerah;
- BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- BAB V Penutup.

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan kooordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1). ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;

d. ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

- d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

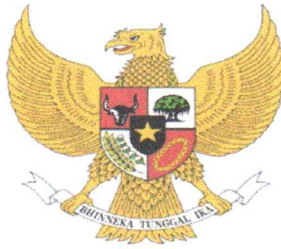
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/55/5/2025)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR .6. TAHUN..2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2029

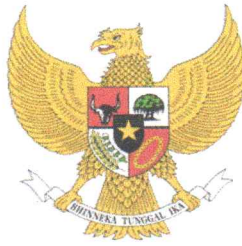
I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan RKPD.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergi, harmonis dan berkesinambungan.

Ruang lingkup RPJMD meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan Perubahan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9-

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Prinsip RPJMD meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2025-2029;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2025-2029;
- c. sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 termasuk dalam menentukan program prioritas;
- e. sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- g. sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-10-

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, dengan penuh rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029” ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, identifikasi permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, serta perumusan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, baik berupa saran, kritik, maupun masukan selama proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Kutai Timur, September 2025

Tim Penyusun
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-4
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD.....	I-4
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD	I-4
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dan RKPD	I-5
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dan RTRW	I-6
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dan Dokumen KLHS.....	I-6
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Induk Sektoral	I-7
1.3.7 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Induk Sektoral	I-78
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4.1 Maksud.....	I-9
1.4.2 Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-11
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-18
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	II-22
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-26
2.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	II-27
2.1.1.7 Demografi	II-30
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-36
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-36
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua	II-54
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata.....	II-59
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-62
2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	II-64



2.1.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif..	II-68
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-71
2.1.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-71
2.1.3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	II-72
2.1.3.3	Transformasi Digital.....	II-75
2.1.3.4	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-76
2.1.3.5	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	II-77
2.1.3.6	Stabilitas Ekonomi Makro	II-79
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum.....	II-80
2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II-80
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	II-83
2.1.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan ..	II-85
2.1.4.4	Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah.....	II-88
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	II-139
2.2.1	Realisasi APBD	II-140
2.2.1.1	Pendapatan Daerah	II-143
2.2.1.2	Belanja Daerah.....	II-146
2.2.1.3	Pembiayaan.....	II-149
2.2.2	Neraca Keuangan Daerah	II-152
2.2.3	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030.....	II-158
2.2.4	Potensi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	II-165
2.2.5	Kebijakan Percepatan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah Melalui Mekanisme Tahun Jamak (<i>Multi Years</i>).....	II-166
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-166
2.3.1	Permasalahan	II-167
2.3.2	Isu - Isu Strategis.....	II-180
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		III-1
3.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	III-1
3.1.1	Visi dan Misi	III-1
3.1.2	Tujuan dan Sasaran	III-26
3.2	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-32
3.2.1	Strategi	III-32
3.2.2	Arah Kebijakan Kabupaten Kutai Timur 2025-2029	III-80
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-85
3.2.4	Dukungan Program Unggulan RPJMD Kutai Timur 2025-2029 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029.....	III-116
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....		IV-1



4.1	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-155
4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-155
4.2.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).....	IV-156
BAB V PENUTUP		V-1
5.1	Pedoman Transisi.....	V-1
5.2	Kaidah Pelaksanaan	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan.....	II-2
Tabel 2.2	Kondisi Topografi Kabupaten Kutai Timur.....	II-5
Tabel 2.3	Sungai Terpanjang di Kabupaten Kutai Timur.....	II-7
Tabel 2.4	Formasi Geologis Utama Kabupaten Kutai Timur	II-9
Tabel 2.5	Kawasan Bukit Karst Kabupaten Kutai Timur	II-9
Tabel 2.6	Prakiraan Curah Hujan Bulan November 2024 s.d. Januari 2025	II-11
Tabel 2.7	Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-25
Tabel 2.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....	II-26
Tabel 2.9	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024.....	II-27
Tabel 2.10	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2019-2024	II-30
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024	II-32
Tabel 2.12	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	II-33
Tabel 2.13	Perbandingan Indikator Kependudukan Tahun 2020-2024.....	II-34
Tabel 2.14	Proyeksi Jumlah Penduduk Kutai Timur Tahun 2025-2029 (ribuan).....	II-34
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rp)	II-37
Tabel 2.16	Distribusi PDRB ADHB Tahun 2020-2024 (%).....	II-39
Tabel 2.17	Pertumbuhan PDRB ADHB Tahun 2019-2024 (%)	II-42
Tabel 2.18	Pemetaan Sektor Ekonomi Kutai Timur Tahun 2024	II-45
Tabel 2.19	Pemetaan Sektor Ekonomi Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.20	Perbandingan PDRB Per Kapita Tahun 2020-2024 (Juta Rp).....	II-47
Tabel 2.21	Indikator Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024	II-48
Tabel 2.22	Indikator Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.23	Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2.24	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2.25	Pola Pengeluaran Per Kapita Masyarakat (Rp/bulan) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	II-52
Tabel 2.26	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	II-54
Tabel 2.27	Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-55
Tabel 2.28	Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2024	II-61
Tabel 2.29	Jumlah Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kutai Timur	II-64
Tabel 2.30	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur 2024	II-71
Tabel 2.31	Produktivitas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2.32	Rasio Sektor Industri Pengolahan, Sektor Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024 (%)	II-73



Tabel 2.33 Aplikasi Digital Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	II-75
Tabel 2.34 Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur Menurut Pengeluaran (%)	II-76
Tabel 2.35 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022	II-78
Tabel 2.36 <i>Tax Ratio</i> Kabupaten Kutai Timur 2020-2024 (%).....	II-80
Tabel 2.37 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2023-2024	II-81
Tabel 2.38 Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	II-84
Tabel 2.39 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024.....	II-88
Tabel 2.40 APK dan APM SD/Sederajat 2023/2024.....	II-89
Tabel 2.41 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Jenjang SD/Sederajat hingga SMA/Sederajat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023/2024	II-90
Tabel 2.42 Rasio Jenjang Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023/2024.....	II-91
Tabel 2.43 Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Kutai Timur 2024	II-96
Tabel 2.44 Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2023 dan 2024	II-97
Tabel 2.45 Sarana Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.....	II-98
Tabel 2.46 Status Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2.47 Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024.....	II-100
Tabel 2.48 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.49 Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (M ²) Tahun 2024 (%)	II-101
Tabel 2.50 Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2024 (%).....	II-102
Tabel 2.51 Sebaran Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tahun 2024.....	II-103
Tabel 2.52 Penyelesaian Tindak Kejahatan (%).....	II-104
Tabel 2.53 Kegiatan Demonstrasi Tahun 2024.....	II-105
Tabel 2.54 Jumlah Rumah Tangga Penerima Bansos Pangan Tahun 2021-2024.....	II-106
Tabel 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka dan TPAK Tahun 2020-2024 (%).....	II-108
Tabel 2.56 Sebaran Pencemaran di Kecamatan Tahun 2024	II-112
Tabel 2.57 Potensi Ekonomi Desa di Kutai Timur Tahun 2024.....	II-115
Tabel 2.58 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022-2024	II-118
Tabel 2.59 Muat-Bongkar Pelabuhan Kutai Timur Tahun 2022-2024	II-118
Tabel 2.60 Jumlah Base Transceiver Station (BTS) di Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel 2.61 Status Sinyal Internet di Kutai Timur Tahun 2024	II-120
Tabel 2.62 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2024	II-123
Tabel 2.63 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2024	II-123
Tabel 2.64 Potensi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	II-130
Tabel 2.65 Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2024 (Ton).....	II-130
Tabel 2.66 Jumlah Wisatawan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.67 Produksi Padi di Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	II-13434
Tabel 2.68 Produksi Buah-buahan Tahun 2024 (Kuintal)	II-13434
Tabel 2.69 Produksi Beberapa Perkebunan Tahun 2024 (Ton).....	II-13535



Tabel 2.70 Bentuk Badan Usaha di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024	II-13636
Tabel 2.71 Realisasi APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp)	II-14242
Tabel 2.72 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp).....	II-14444
Tabel 2.73 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp).....	II-14747
Tabel 2.74 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp).....	II-15050
Tabel 2.75 Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2024 (dalam Rp)	II-15353
Tabel 2.76 Rata-rata Pertumbuhan Aset.....	II-15555
Tabel 2.77 Analisis Neraca Kabupaten Kutai Timur	II-15757
Tabel 2.78 Proyeksi Keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp)....	II-1599
Tabel 2.79 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp).....	II-16363
Tabel 2.80 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp).....	II-16363
Tabel 2.81 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	II-16767
Tabel 2.83 Isu Strategis Kabupaten Kutai Timur	II-18181
Tabel 3.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Kutai Timur.....	III-2
Tabel 3.2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kutai Timur Periode Lima Tahun Pertama	III-7
Tabel 3.3 Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029	III-18
Tabel 3.4 Sinkronisasi Dukungan Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Nasional	III-21
Tabel 3.5 Sinkronisasi Dukungan Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	III-23
Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur	III-28
Tabel 3.7 Strategi Pemenuhan Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD Kutai Timur	III-37
Tabel 3.8 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029	III-81
Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	III-87
Tabel 3.10 Pemetaan (<i>mapping</i>) antara Program Unggulan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029.....	III-117
Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2030	IV-15656
Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur	IV-15757



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek.....	I-5
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi, dan Nasional	I-6
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Kutai Timur	II-2
Gambar 2.2	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur	II-15
Gambar 2.3	Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-16
Gambar 2.4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur.....	II-16
Gambar 2.5	Luas Perkebunan Sawit Kabupaten Kutai Timur (Ha)	II-17
Gambar 2.6	Produksi Crude Palm Oil (CPO) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024... ..	II-18
Gambar 2.7	Ketercapaian Air Minum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%).....	II-23
Gambar 2.8	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-23
Gambar 2.9	Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	II-24
Gambar 2.10	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kutai Timur.....	II-26
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2024 (Jiwa).....	II-31
Gambar 2.12	Perkembangan Pertumbuhan PAD, LPE, Pertumbuhan Pendapatan, dan PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur	II-41
Gambar 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur 2019-2024 (%)	II-43
Gambar 2.14	Hubungan Pendapatan Per Kapita, Gini Ratio, dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024.....	II-50
Gambar 2.15	Proporsi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.....	II-53
Gambar 2.16	Angka Stunting Tahun 2021-2024 (%).....	II-55
Gambar 2.17	Indeks Keluarga Sehat 2023.....	II-58
Gambar 2.18	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2024	II-60
Gambar 2.19	Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024.....	II-60
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024.....	II-62
Gambar 2.21	Gambaran Cakupan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-63
Gambar 2.22	Gambaran Cakupan Penerima (KK) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-63
Gambar 2.23	Gambaran Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-68
Gambar 2.24	Gambaran Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-69
Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.27	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%).....	II-71



Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-73
Gambar 2.29 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-74
Gambar 2.30 Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024.....	II-77
Gambar 2.31 Struktur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).....	II-86
Gambar 2.32 Kualifikasi Pendidik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.....	II-91
Gambar 2.33 Usia Guru di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	II-91
Gambar 2.34 Angka Kesakitan Tahun 2024 (%).....	II-93
Gambar 2.35 Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2024 (%)	II-94
Gambar 2.36 Tingkat Capaian Vaksinasi Balita Tahun 2024 (%)	II-95
Gambar 2.37 Kondisi Kesehatan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	II-99
Gambar 2.38 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2021-2024.....	II-109
Gambar 2.39 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%)	II-110
Gambar 2.40 Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 (%)	II-114
Gambar 2.41 Penggunaan Alat KB Perempuan Usia 15-49 Tahun 2024.....	II-116
Gambar 2.42 Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%).....	II-117
Gambar 2.43 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2023	II-121
Gambar 2.44 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Tahun 2023	II-122
Gambar 2.45 Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	II-128
Gambar 3.1 Keselarasan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur	III-9
Gambar 3.2 Hubungan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur	III-17
Gambar 3.3 Skema Keterkaitan Antara Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Misi Provinsi dan Nasional.....	III-25
Gambar 3.4 Sinkronisasi Misi RPJPD Kutai Timur 2025-2045 dan Misi RPJMD Kutai Timur 2025-2029	III-26
Gambar 3.5 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029	III-27
Gambar 3.6 Keselarasan Tujuan RPJMD Kutai Timur 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	III-32
Gambar 3.7 Agenda/Tahapan Pembangunan Tahunan Kutai Timur 2025-2029	III-33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029, yaitu pasangan Drs. Ardiasyah Sulaiman, M.Si dan H. Mahyunadi, SE., M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah.

Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Pelaksanaan Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir; dan
7. Penetapan.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai setelah kepala dan wakil kepala daerah dilantik. Proses ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah. Rancangan Awal RPJMD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik

yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Kutai Timur sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dan menjadi Rancangan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkan Perda Kabupaten Kutai Timur tentang RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029.

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029. RPJMD. Kebijakan terkait penggunaan/pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur tahun 2015-2035, sementara menunggu peraturan terbaru terkait dengan rencana dan tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang telah memasuki proses pembahasan DPRD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kutim Nomor 14 Tahun 2025. Selain itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 juga menjadikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 sebagai acuan. Dengan demikian, kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur tetap selaras dengan kebijakan Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur lainnya.

RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun. Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 tidak lepas dari RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029. Hal tersebut membawa konsekuensi adanya hubungan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antar dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD

RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045. Secara substantif, isi RPJMD 2025-2029 merupakan turunan perencanaan dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Timur 2025-2045.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD

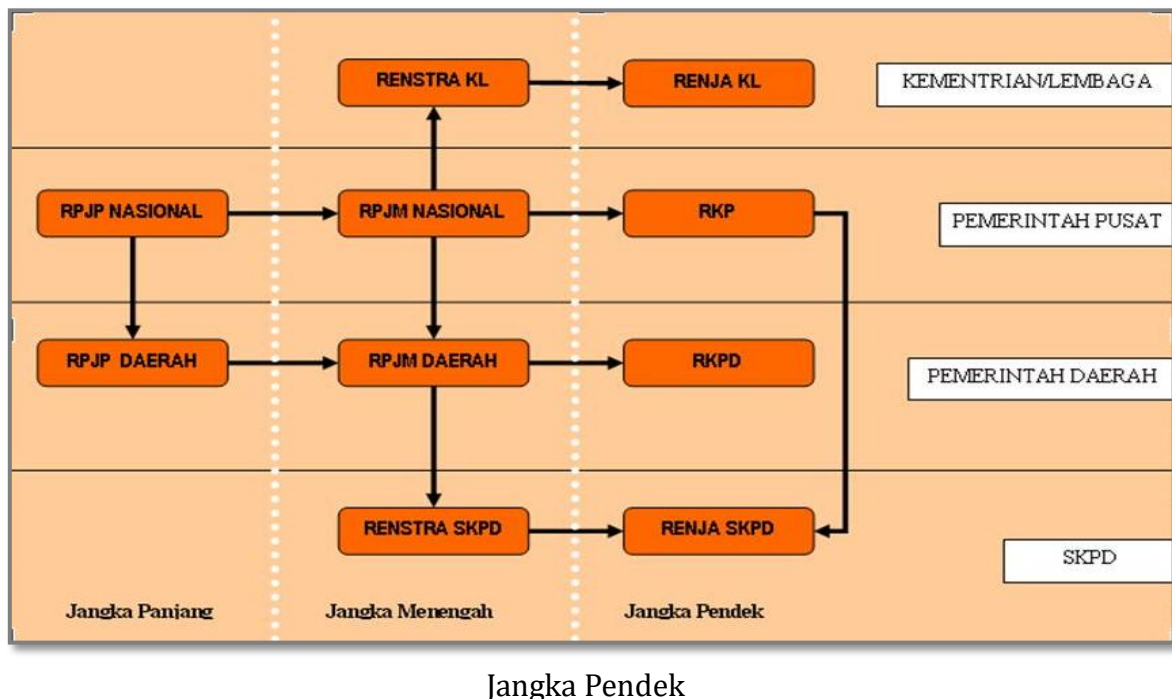
Proses penyusunan RPJMD dilakukan selaras dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rancangan akhir Renstra PD harus sudah disahkan paling lambat satu bulan setelah RPJMD disahkan. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) yang terdapat dalam RPJMD dirumuskan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait dan disinkronkan melalui penyusunan Renstra PD dan karenanya juga terdapat dalam Renstra PD dan sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban Perangkat Daerah terkait. Program yang ada pada RPJMD selanjutnya didetilkan lebih

lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan oleh Perangkat Daerah ke dalam dokumen Renstra PD.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dan RKPD

Tahapan pencapaian RPJMD diimplementasikan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadikan indikator kinerja dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai pedoman dalam menentukan indikator kinerja dan program pembangunan pada tahun berkenaan. Selanjutnya program ini didetilkan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan anggarannya pada tahun bersangkutan. Dalam RKPD ini dimungkinkan untuk dilakukan penajaman prioritas program tahunan, sehingga pencapaian tujuan lebih fokus, efisien, dan efektif sesuai dengan kondisi terkini daerah pada tahun tersebut dan arahan dari pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Proses penajaman dan sinkronisasi program pembangunan ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang.

Gambar 1.1 Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan



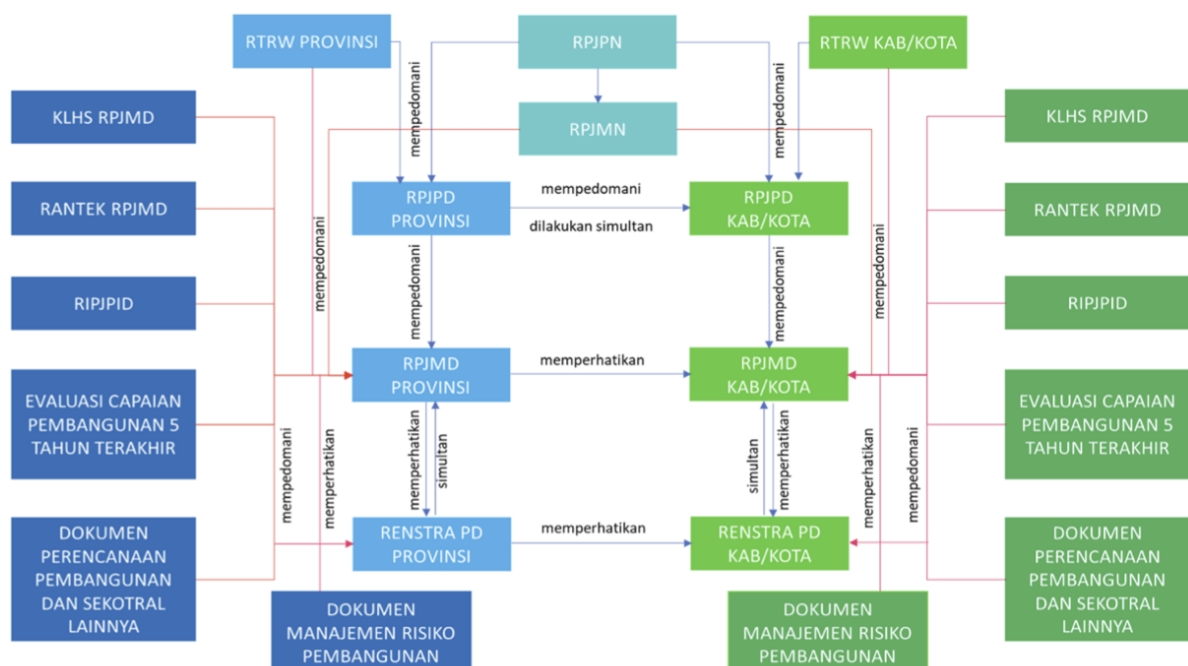
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dan RTRW

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Kutai Timur yang telah disusun sebelumnya. Pembangunan secara fisik sebagai implementasi RPJMD dilaksanakan dengan mengikuti RTRW yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin sinkronisasi dan harmonisasi antar wilayah pembangunan, serta memperhatikan keselarasan atau harmonisasi antara Kabupaten Kutai Timur dengan daerah lain.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dan Dokumen KLHS

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD harus mencakup KLHS. Dokumen KLHS harus telah tersedia sebelum rancangan teknokratik RPJMD.

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi, dan Nasional



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman utama pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, termasuk penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagai fondasi transformasi ekonomi, tata kelola pemerintah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) menjadi dokumen perencanaan pendukung yang memiliki keterkaitan strategis dengan RPJMD, karena memuat arah kebijakan, strategi, dan tahapan pembangunan IPTEK daerah secara lebih komprehensif dan terarah.

Hubungan antara kedua dokumen tersebut bersifat saling melengkapi dan memperkuat, RPJMD menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah secara makro dan lintas sektor termasuk visi mengenai peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi, digitalisasi, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Sementara itu, RIPJPID memberikan peta jalan teknis yang merinci langkah operasional untuk mendorong kemampuan riset, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan inovasi di berbagai sektor prioritas daerah.

Dalam proses perencanaan, RPJMD menjadi dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan RIPJPID agar seluruh arah kebijakan pengembangan IPTEK tetap selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Sebaliknya, keberadaan RIPJPID membantu memperkuat implementasi RPJMD melalui penyediaan analisis kebutuhan, rekomendasi inovasi, dan solusi teknologi yang dapat menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, peningkatan produktivitas sektor ekonomi unggulan, pengembangan ekosistem riset dan inovasi, serta pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, integrasi antara RPJMD dan RIPJPID memastikan bahwa pembangunan IPTEK di Kutai Timur tidak berjalan secara terpisah, tetapi terhubung dengan agenda nasional seperti transformasi digital, penguatan sistem inovasi daerah, dan kebijakan riset nasional. Penyelarasan ini memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan program dan kegiatan perangkat daerah, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan digitalisasi pemerintahan, pengembangan teknologi industri, inovasi pelayanan publik, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan atau penelitian.

Dengan demikian, hubungan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 dan RIPJPID mencerminkan upaya menghadirkan arah pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, berbasis data, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan IPTEK. Kehadiran RIPJPID memperkaya substansi RPJMD melalui strategi teknis dan roadmap yang jelas, sementara RPJMD memberikan kerangka kebijakan utama yang memastikan seluruh inisiatif pengembangan IPTEK berkontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Integrasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, pelayanan publik yang efektif, serta pembangunan ekonomi dan sosial yang berdaya saing dan berkelanjutan.

1.3.7 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Induk Sektor

RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen rencana induk sektoral yang disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan pada bidang-bidang tertentu, sementara RPJMD berperan sebagai dokumen payung yang menyatukan arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Beberapa dokumen sektoral yang menjadi acuan penting antara lain Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPKPID) sebagai pedoman pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis Iptek, Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) sebagai arah pengembangan destinasi, industri, dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang mengarahkan perencanaan dan pengelolaan penyediaan air minum berkelanjutan bagi masyarakat, serta berbagai dokumen rencana induk sektoral lainnya seperti Rencana Induk Transportasi dan Rencana Induk Energi Daerah.

Selain itu, RPJMD Kutai Timur juga memiliki hubungan yang kuat dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). Dokumen ini memuat arah kebijakan pembangunan Iptek yang mendukung pengembangan riset, inovasi, dan sektor-sektor unggulan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD perlu diselaraskan dengan tujuan, sasaran, dan strategi yang terdapat dalam RIPJPID, serta mengelaborasi strategi tersebut dengan pendekatan ekosistem riset dan inovasi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Pembangunan

ekosistem riset dan inovasi daerah dimaksudkan untuk memperkuat daya saing, mendukung pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Sinergi antara RPJMD dengan dokumen rencana induk sektoral, termasuk RIPJPID, memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, dan konsisten. RPJMD memberikan kerangka besar pembangunan, sementara rencana induk sektoral memberikan detail teknis implementasi pada bidang-bidang tertentu. Untuk itu, RPJMD Kutai Timur Tahun 2025–2029 juga perlu didukung dengan penerapan manajemen risiko pembangunan yang berfungsi mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan, sehingga implementasi pembangunan daerah dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kutai Timur 2025-2029.

1.4.2 Tujuan

- 1) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
- 2) Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2025-2029;
- 3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2025-2029;
- 4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 5) Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar waktu, antarruang dan antar fungsi pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Kutai Timur yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Dalam bab ini juga terdapat gambaran keuangan Daerah yang memuat tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 beserta proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 serta memuat permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 serta strategi, arah kebijakan, dan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini diuraikan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Kutai Timur yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 31.239,84 kilometer persegi. Secara administratif, Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau)
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang), Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Karam (Kabupaten Kutai Kartanegara)
3. Sebelah Timur: Selat Makassar dan Laut Sulawesi
4. Sebelah Barat: Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara), serta Kecamatan Kayan Hilir (Kabupaten Malinau)

Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil dari proses pemekaran Kabupaten Kutai, yang diresmikan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Saat ini, wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur mencakup 18 kecamatan, 2 kelurahan, dan 139 desa. Sejarah pemekaran dari 5 kecamatan menjadi 18 kecamatan menunjukkan dinamika perkembangan wilayah yang signifikan.

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Muara Wahau yaitu 4.997,83 km² atau 16% dari total wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Muara Wahau memiliki 10 desa sehingga rata-rata luas setiap desa adalah 499,78 km². Bila dilihat dari rata-rata luas per desa, maka Kecamatan Busang memiliki desa dengan rata-rata paling luas yaitu 593,51 km² karena meski luasnya lebih kecil dibandingkan Kecamatan Muara Wahau yaitu 3.561,07 km² namun hanya memiliki 6 desa.

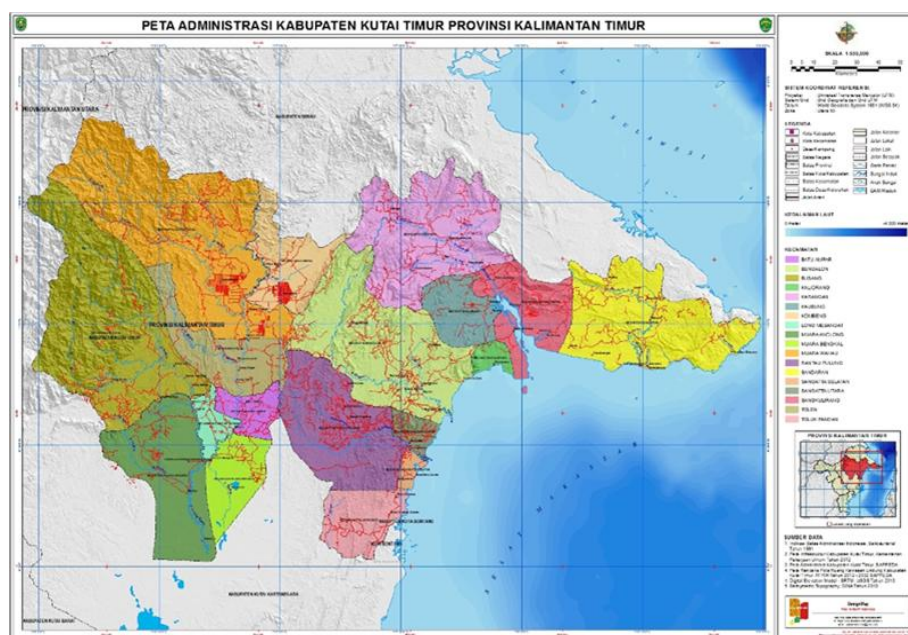
Kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Kaliorang yaitu 302,93 km² atau hanya 0,97% dari luas Kabupaten Kutai Timur, serta yang memiliki 7 desa. Dari semua kecamatan, hanya Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan yang memiliki kelurahan yaitu masing-masing satu kelurahan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Muara Ancalong	2.289,84	7,33	9	-
Busang	3.561,07	11,40	6	-
Long Mesangat	238,37	0,76	7	-
Muara Wahau	4.997,83	16,00	10	-
Telen	1.783,08	5,71	8	-
Kongbeng	1.101,24	3,53	7	-
Muara Bengkal	758,8	2,43	7	-
Batu Ampar	759,01	2,43	7	-
Sangatta Utara	333,56	1,07	3	1
Bengalon	3.429,36	10,98	11	-
Teluk Pandan	926,04	2,96	6	-
Sangatta Selatan	1.201,06	3,84	3	1
Rantau Pulung	916,04	2,93	9	-
Sangkulirang	1.630,38	5,22	15	-
Kaliorang	302,93	0,97	7	-
Sandaran	2.829,54	9,06	9	-
Kaubun	578,44	1,85	8	-
Karangan	3.603,23	11,53	7	-
Kutai Timur	31.239,84	100,00	139	2

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Kutai Timur

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2016

Secara astronomis Kabupaten Kutai Timur berada di antara garis lintang 10°52'39" Utara hingga 00°02'10" Selatan dan garis bujur 118°58'19" Timur hingga 115°56'26" Timur. Dari perspektif geografis, Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, dan Selat Makassar, memberikan posisi strategis yang signifikan serta keanekaragaman geografis yang kaya. Posisi strategis ini mendukung interaksi regional dan pengembangan ekonomi yang lebih luas. Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas dengan wilayah-wilayah sekitar, yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perdagangan dan mobilitas penduduk.

Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur memberikan keunggulan strategis yang mendukung interaksi dengan wilayah lain. Beberapa poin strategis tersebut antara lain:

1. Terletak pada poros regional lintas trans Kalimantan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Utara dengan jalur Kabupaten Nunukan – Malinau – Bulungan (Kota Tanjung Selor) – Berau (Kota Tanjung Redeb) – Kota Samarinda – Kota Balikpapan – Provinsi Kalimantan Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Barat.
2. Terletak pada poros pertumbuhan ekonomi kawasan ekonomi terpadu SASAMBA (Samarinda – Samboja – Balikpapan) dan kawasan segitiga pertumbuhan Bontang – Sangatta – Muara Wahau dan Sangkulirang.
3. Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur memiliki garis pantai sepanjang 587,62 Km, yang terletak dalam wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, serta bagian laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kabupaten Kutai Timur ini menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

Wilayah Kutai Timur terdiri dari daratan dan perairan, terdiri dari wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan gunung/pegunungan yang jumlahnya 8 (delapan) gunung dan yang tertinggi adalah Gunung Menyapa dengan ketinggian mencapai 2.000 mpl. Sedangkan wilayah perairan berupa laut/ pantai, sungai dan danau, untuk sungai terdapat di seluruh kecamatan namun yang terpanjang Sungai Kedang Kepala terletak di Kecamatan Muara Wahau dengan panjang 319 km.

2.1.1.1.1 Topografi

Topografi daerah Kutai Timur sangat beragam, dengan kombinasi dataran, bukit, pegunungan, dan wilayah pantai yang terdapat dalam satu kabupaten. Ketinggian tanah di wilayah ini bervariasi mulai dari 0 hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dibagi menjadi dua, yaitu wilayah dengan kemiringan di bawah 15% dan wilayah dengan kemiringan di atas 15%.

Sebanyak 2.516.233 hektar (sekitar 76,37% dari luas total lahan) termasuk dalam kategori wilayah dengan kemiringan di atas 15%. Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40 persen cukup luas dan tersebar di seluruh wilayah, terutama di sisi barat laut kabupaten ini, di mana ketinggiannya mencapai lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut ini cenderung berbukit hingga bergunung, dengan kemiringan yang cukup tajam, sehingga sangat rentan terhadap bencana alam dan erosi. Kondisi ini sebagian besar berada di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Berau, seperti Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau, dan Muara Ancalong. Ketiga kecamatan ini terletak di pegunungan kapur, dengan sebagian besar wilayah berupa pegunungan (1.608.915 hektar) dan perbukitan (1.429.922,5 hektar).

Sementara itu, wilayah dataran di ketiga kecamatan ini mencakup 536.212,5 hektar, termasuk daratan, rawa, dan perairan sungai dan danau. Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan kelerengan di bawah 15 persen (<2 s.d. 15), merupakan kawasan yang relatif datar dan landai. Kabupaten Kutai Timur memiliki wilayah dataran seluas 778.686 ha (23,63 persen). Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Muara Bengkal, Muara Ancalong serta sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Kecamatan Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur dan bukit Karst. Pegunungan dan perbukitan mempunyai areal paling luas yaitu masing-masing 1.608.915 ha dan 1.429.922,25 ha. Kabupaten Kutai Timur memiliki gunung sebanyak 8 buah. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Menyapa, dengan ketinggian mencapai 2000 m. Selain pegunungan dan perbukitan, wilayah ini juga memiliki dataran landai seluas 536.212,5 ha yang terdiri dari daratan, rawa serta sungai dan danau.

Di sisi lain, ada juga wilayah yang relatif datar dan landai (dengan kemiringan kurang dari 15%) yang terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, Muara Bengkal, Muara Ancalong, serta sebagian wilayah Muara Wahau dan Sangkulirang. Wilayah dengan kondisi ini sebagian besar terletak di sisi timur wilayah Kabupaten Kutai Timur, dengan ketinggian antara 0 hingga 7 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki kemiringan yang lebih landai, rawa mudah tergenang, dan merupakan daerah endapan. Namun, sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur tetap memiliki kemiringan di atas 15 persen.

Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Kutai Timur

No	Sistem Lahan	Deskripsi Umum	Kemiringan (derajat)	Luas (ha)
1	Bakunan	Lembah-lembah kecil di antara perbukitan	< 2	15.717
2	Gambut	Rawa-rawa gambut yang dalam dengan permukaan umumnya lengkung	< 2	31.199
3	Kajapah	Dataran lumpur didaerah pasang surut di bawah bakau dan nipah	< 2	25.84
4	Klaru	Dataran banjir yang selalu tergenang	< 2	16.831
5	Sebangau	Jalur kelokan sungai-sungai besar dengan tanggul yang lebar	< 2	14.161
6	Kahayan	Dataran pantai/sungai yang tergabung	2 s/d 8	19.097
7	Kapor	Dataran karst yang berombak mengandung karst kecil- kecil	2 s/d 8	30.394
8	Lawangguang	Dataran batuan berombak hingga bergelombang	2 s/d 8	434.835
9	Pakau	Teras-teras berpasir berombak	2 s/d 8	188.834
10	Sungai Medang	Dataran vulkanik bergelombang	9 s/d 15	1.778
11	Gunung Baju	Dataran karst berbukit kecil	16 s/d 25	111.691
12	Teweh	Dataran batuan endapan berbukit kecil	16 s/d 25	809.91
13	Beriwit	Kuesta-kuesta bergunung batupasir dengan arah lereng tertoreh	26 s/d 40	35.058
14	Tewai Baru	Dataran bukit kecil dengan punggung terjal sejajar	26 s/d 40	95.545
15	Maput	Perbukitan batuan bukan endapan yang tidak simetris	41 s/d 60	530.667
16	Mantalat	Kelompok punggung panjang batuan endapan, dengan arah lereng	41 s/d 60	3.194

No	Sistem Lahan	Deskripsi Umum	Kemiringan (derajat)	Luas (ha)
17	Pendereh	Pegunungan batuan endapan yang tidak teratur	41 s/d 60	738.127
18	Bukit Pandan	Kelompok punggung gunung batuan bukan endapan	> 60	32.027
19	Batu Ajan	Gunung-gunung apitertoreh dengan pola drainase radial	> 60	2.604
20	Lohai	Kelompok punggung gunung yang panjang dan sempit	> 60	39.891
21	Okki	Punggung-punggung dan gunung karst yang curam	> 60	117.519

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur, 2021

2.1.1.1.2 Hidrologi

Wilayah perairan di Kabupaten Kutai Timur berupa laut/pantai, sungai dan danau. Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat di seluruh kecamatan. Sungai terpanjang adalah Sungai Kedang Kepala yang terletak di Kecamatan Muara Wahau, dengan panjang 319 km. Terdapat dua Danau yang terletak di Kecamatan Mura Bengkal yaitu Danau Ngayau dengan luas 1.900 ha dan Danau Karang seluas 750 ha. Wilayah pantai berada di sebelah Timur Kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut. Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat. Selama ini, wilayah Pantai Teluk Lombok dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai media perairan marikultur komoditi perikanan seperti tambak ikan dan udang, budidaya rumput laut dan budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA).

Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat hampir di seluruh kecamatan. Menurut peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) pada tahun 2016, Kabupaten Kutai Timur memiliki kurang lebih 282 sungai, dengan total panjang 6.151,9 km, di antaranya sebanyak 63 sungai besar dengan panjang 3.353,6 km. Terdapat 12 sungai terpanjang di Kutai Timur, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Sungai Terpanjang di Kabupaten Kutai Timur

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Telen	334,00
2	Sungai Bengalon	235,50
3	Sungai Kelinjau	206,50
4	Sungai Wahau	187,50
5	Sungai Antan	176,50
6	Sungai Sangatta	159,50
7	Sungai Manubar	153,40
8	Sungai Senyur	121,80
9	Sungai Marah	112,30
10	Sungai Karangan	110,30
11	Sungai Kedang Kepala	93,50
12	Sungai Pesah	82,90
Panjang Sungai (Total)		1.973,70

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur, 2021

Sungai Mahakam, Sungai Kedang Kepala, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyur, Sungai Sesayap, Sungai Telen, dan Sungai Wahan memiliki peran penting sebagai sumber penyedia air bersih bagi masyarakat, serta berfungsi sebagai jaringan transportasi air yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah pedalaman di Kalimantan Timur. Hal ini terjadi karena aksesibilitas darat ke beberapa daerah pedalaman di Kalimantan Timur terbatas, sehingga sungai-sungai ini menjadi jalur vital untuk distribusi sumber daya dan layanan ke daerah-daerah tersebut.

Selain sungai yang mengalir melintasi wilayahnya, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki beberapa danau yang tersebar di berbagai kecamatan, yang penting untuk dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kecamatan Muara Bengkal memiliki 4 danau, yaitu: (1) Danau Gelombang 7,56 ha; (2) Danau Ngayantua seluas 1.900ha; (3) Danau Padam Api seluas 511,36 ha; (4) Danau Karang dengan luas 750 ha. Kecamatan Muara Ancalong juga memiliki 3 danau, yaitu: (1) Danau Empaif seluas 6,46 ha; (2) Danau Kliring seluas 9,90 Ha; (3) Danau Setepus seluas 7,25 ha. Kecamatan Teluk Pandan memiliki Danau Redan seluas 6,66 ha. Sumber mata air lainnya yang juga menyerupai danau, dan masih dalam proses identifikasi nama, di

antaranya: (1) Danau Tapal Kuda seluas 353,43 ha; dan (2) Danau/situ seluas 1.661,82 ha.

2.1.1.1.3 Geologi

Kondisi geologi Wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kompleks dengan adanya interaksi antara 3 Lempeng Utama, yakni Lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Asia. Terdapat banyak potensi mineral yang dimiliki seperti batu bara, minyak dan gas bumi, emas, dan lain-lain. Secara umum, formasi geologi yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Endapan Alluvium yang banyak ditemukan di wilayah bantaran maupun wilayah paparan banjir dan dataran dari endapan sungai dan danau. Sedangkan, formasi yang paling sering ditemukan adalah Formasi Pamaluan, Mentarang, dan Balikpapan. Secara geologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh Formasi Pemaluan (disusun oleh batu pasir kuarsa dengan sisipan batu lempung, batu gamping serpihan dan batu lava) yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang terdapat di sepanjang pantai. Selain itu, terdapat juga endapan batuan tersier dan batuan endapan kuartir dalam formasi batuan endapan, terutama batuan kwarsa dan batuan liat. Jenis tanah yang ditemukan di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol, dan litosol. Selain itu, juga terdapat jenis tanah lain seperti aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning, yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Banyak faktor yang memengaruhi kemampuan tanah di wilayah ini. Semakin banyak faktor penghambat seperti lereng yang curam, akan berdampak pada ketersediaan air yang rendah, dan kondisi ini juga rentan terhadap erosi. Karena berbagai faktor ini, kemampuan tanah di wilayah tersebut menjadi rendah.

Berdasarkan aspek geologi, wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur tersusun dari 21 jenis formasi, namun 9 yang terluas sebagai berikut:

Tabel 2.4 Formasi Geologis Utama Kabupaten Kutai Timur

No	Sistem Lahan	Luas (Ha)
1	Dataran Alluvium	19.097
2	Dataran	1.505.176
3	Jalur Kelokan	14.161
4	Lembah	12.372
5	Rawa	138.994
6	Rawa Pasang Surut	25.840
7	Perbukitan	534.765
8	Pegunungan	975.938
9	Teras-terras	70.105

Sumber: RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

Di Kabupaten Kutai Timur secara geologis juga terdapat kawasan karst. Luasan bukit karst tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 140K/40/MEM/2019 Tanggal 30 Juli 2019. Dalam Surat Keputusan yang terakhir ditetapkan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki 17 zona bentangan alam bukit karst.

Tabel 2.5 Kawasan Bukit Karst Kabupaten Kutai Timur

No	Kawasan Bukit Karst	Luas (ha)
1	Batu Aji	3.538,80
2	Batu Lepoq	6.496,00
3	Batu Onyen	6.681,59
4	Batu Thayib	44,76
5	Batu Tumok	16,47
6	Gunung Gergaji	5.832,58
7	Karangan	27.756,10
8	Kongbeng	90,65
9	Kulat	12.846,91
10	Mandu Dalam	370,52
11	Pengadan	997,52
12	Sandaran	56.255,08

No	Kawasan Bukit Karst	Luas (ha)
13	Sekerat	9.052,60
14	Susuk	30.020,19
15	Teluk Bakung	2,235.50
16	Tepian Terap	498,01
17	Tutunambo Nyere	9.191,03
Total Luas Bukit Batu Karst		171.924,31

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur, 2021

2.1.1.1.4 Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki iklim tropis khas Indonesia, dengan suhu udara rata-rata 26°C dengan perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5° sampai 7°C. Jumlah curah hujan antara 2.000 hingga 4.000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130 hingga 150 hari/tahun. Kutai Timur mengalami dua pola musim yang jelas, yaitu musim kemarau yang berlangsung dari Mei hingga Oktober, dan musim hujan yang mendominasi dari November hingga April. Kondisi iklim ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi lainnya, yang harus disesuaikan dengan karakteristik musim yang ada. Periode-periode ini menjadi ciri khas yang berulang setiap tahun, dan di antaranya terdapat transisi musim yang terjadi pada beberapa bulan tertentu.

Berdasarkan data historis curah hujan Stasiun Metrologi Samarinda, Kabupaten Kutai Timur mengalami curah hujan menengah dan tinggi. Curah hujan dengan intensitas menengah yaitu 201-300 mm/bulan terjadi di Kabupaten Kutai Timur bagian timur, sedangkan curah hujan intensitas tinggi yaitu 301-400 mm/bulan terjadi di Kabupaten Kutai Timur bagian barat.

Tabel 2.6 Prakiraan Curah Hujan Bulan November 2024 s.d. Januari 2025

Curah Hujan (mm/bulan)		Kabupaten / Kota
Rendah	0 – 20	-
	21 – 50	-
	51 – 100	-
Menengah	101 – 150	-
	151 – 200	-
	201 – 300	Berau bagian timur Kutai Timur bagian timur Bontang Samarinda Balikpapan Penajam Paser Utara Kutai Barat bagian selatan Paser Kutai Kartanegara bagian timur
Tinggi	301 – 400	Berau bagian barat Kutai Timur bagian barat Kutai Kartanegara bagian barat Kutai Barat bagian utara Mahakam Ulu bagian selatan
	401 – 500	-
Sangat Tinggi	> 500	-

Sumber: Stasiun Metrologi Samarinda, BMKG, 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Potensi tersebut terlihat dari beberapa aspek terutama pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, serta pariwisata. Dalam hal pertambangan, Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Selain batu bara, kekayaan sumber daya alam lain yang tersimpan di antaranya adalah minyak bumi, serta beberapa mineral seperti granit, pasir kuarsa, lempung, batu gamping, dan masih banyak lagi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur tertuang dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015-2035. Dalam RTRW tersebut telah diatur dan direncanakan penggunaan lahan sesuai pola RTRW. Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur dikelompokkan menjadi beberapa kawasan sebagai berikut:

- Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Sandaran, dan Kecamatan Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 327.825,87 ha.
- Kawasan resapan air meliputi Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Telen kurang lebih 852,84 ha.

- c) Kawasan lindung gambut, yaitu Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 24.175,86 ha
- d) Ruang Terbuka Hijau perkotaan terdapat di kawasan perkotaan kabupaten seluas kurang lebih 2.100,06 ha atau 30%.
- e) Kawasan Konservasi Mangrove meliputi beberapa wilayah Kecamatan di pesisir pantai seluas kurang lebih 12.218,52 ha.
- f) Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kutai yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 143.265,13 ha.
- g) Kawasan cagar alam yaitu Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, meliputi Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 44.963,55 ha.
- h) Kawasan lindung geologi yaitu kawasan lindung karst di Kecamatan Karangan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran dengan luas kurang lebih 149.225,47 ha.
- i) Kawasan Konservasi merupakan kawasan konservasi laut di Pulau Birah-birahan dengan luas kurang lebih 33,88 ha.
- j) Kawasan Suaka Alam merupakan kawasan Suaka Alam Kabupaten dengan luas kurang lebih 194.726,64 ha.
- k) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bengalon, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 492.814,79 ha.
- l) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 540.841,50 ha.
- m) Kawasan industri direncanakan di Kecamatan Bengalon seluas kurang lebih 6.042,89 ha, Kecamatan Kaliorang seluas kurang lebih 2.607,59 ha, Kecamatan

- Kongbeng seluas kurang lebih 6.187,98 ha, Kecamatan Muara Wahau seluas kurang lebih 49,15 ha, dan Kecamatan Sangkulirang seluas kurang lebih 3.623,53 ha.
- n) Kawasan Industri yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan seluas kurang lebih 557,34 ha.
 - o) Kawasan industri di bagian wilayah hulu Kabupaten Kutai Timur, yaitu kawasan industri pengolahan batubara dengan sarana dan prasarana pendukungnya direncanakan di Kecamatan Kongbeng seluas kurang lebih 2.071,31 ha.
 - p) Kawasan perkebunan yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 1.117.760,96 ha.
 - q) Kawasan pertanian pangan seluas kurang lebih 138.344,38 ha, dan Kawasan peternakan yang berada di Kecamatan Sandaran, Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Karangan seluas kurang lebih 10.497,59 ha.
 - r) Kawasan permukiman perdesaan meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Muara Bengkal seluas kurang lebih 59.206,55 ha.
 - s) Kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Sangatta Utara dengan luas kurang lebih 13.979,91 ha, Kecamatan Kongbeng dengan luas kurang lebih 2.294,52 ha, Kecamatan Long Mesangat dengan luas kurang lebih 26,40 ha, Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 6.624,33 ha, Kecamatan Muara Wahau dengan luas kurang lebih 3.760,72 ha, Kecamatan Sangkulirang dengan luas kurang lebih 2.237,50 ha, serta di Kecamatan Sangatta Selatan dengan luas kurang lebih 1.750,68 ha.

- t) Tubuh air yang merupakan bentuk-bentuk tubuh perairan darat dan pemanfaatannya direncanakan dan/atau dilestarikan seluas kurang lebih 24.331,51 ha.
- u) Kawasan peruntukan pariwisata pantai di Kecamatan Kecamatan Bengalon seluas lebih kurang 230,33 ha dan Kecamatan Sangatta Selatan seluas lebih kurang 51,37 ha

Pengembangan industri hilir di Kabupaten Kutai Timur perlu diprioritaskan agar potensi sumber daya alamnya dapat dikelola untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan menciptakan perluasan lapangan kerja. Beberapa sektor yang menjadi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

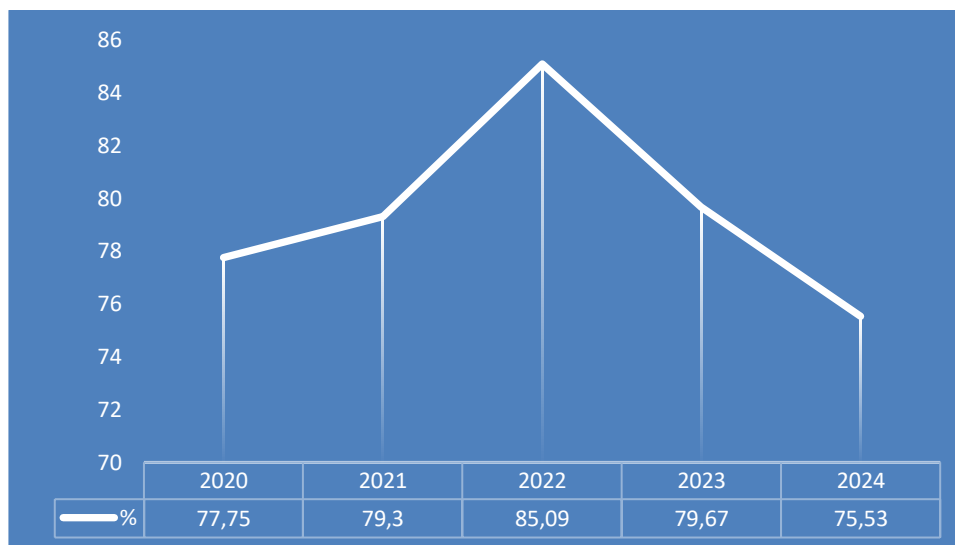
2.1.1.2.1 Pertambangan

Kabupaten Kutai Timur memiliki cadangan sumber daya alam melimpah, khususnya batu bara. Sebagian besar wilayahnya menyimpan potensi tambang yang telah lama menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Keberadaan tambang batu bara di Kutai Timur menjadi salah satu penyumbang devisa negara sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Aktivitas pertambangan batu bara di Kutai Timur tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memunculkan tantangan dalam aspek lingkungan dan sosial. Di satu sisi, industri tambang telah mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan daerah, serta tumbuhnya sektor penunjang seperti transportasi, perdagangan, dan jasa. Namun di sisi lain, eksploitasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan terganggunya ekosistem.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan memiliki peran penting di dalam pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Timur. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kontribusi sektor pertambangan dan penggalan mencapai rata-rata 79,56% terhadap PDRB.

Gambar 2.2 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur



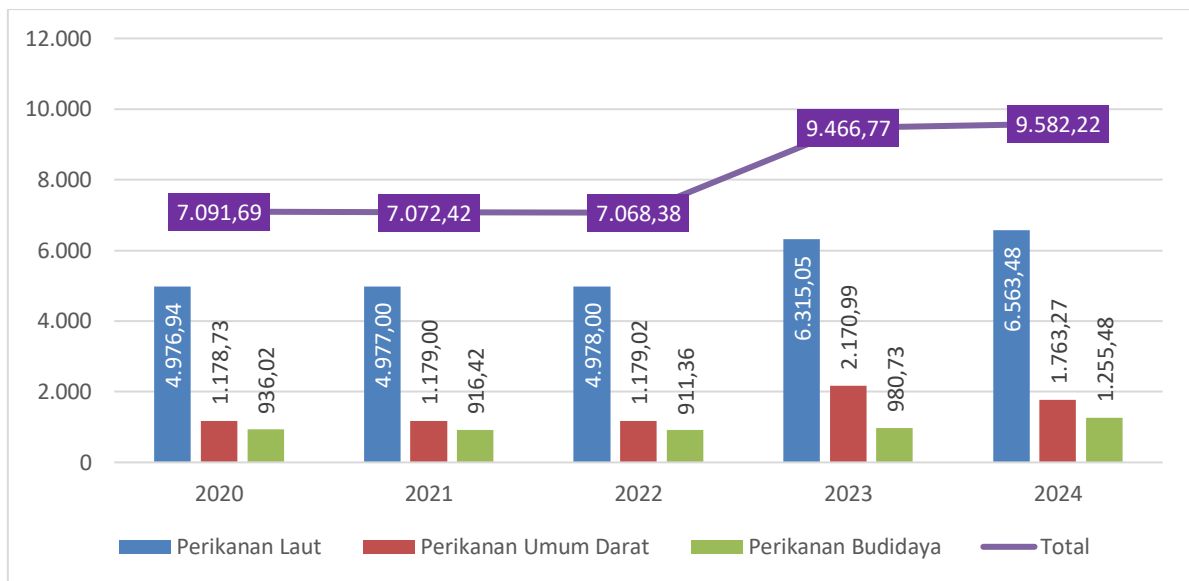
Berdasarkan data grafik di atas menunjukkan bahwa potensi pemanfaatan batu bara di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan kebijakan *phasing-out* pemanfaatan batu bara serta meningkatnya kontribusi sektor lain di antaranya sektor industri pengolahan. Kondisi ini juga akan mendorong peluang pengembangan energi hijau di antaranya sektor pertanian dalam arti luas.

2.1.1.2.2 Perikanan

Dalam hal sumber daya kelautan untuk mendukung ekonomi biru (*blue economy*), Kabupaten Kutai Timur juga memiliki potensi besar di bidang perikanan dan pariwisata. Kabupaten Kutai Timur memiliki bibir pantai yang panjang, produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Kutai Timur juga masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan dukungan kebijakan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Pun demikian dengan perikanan tangkap daratan, potensi Kabupaten Kutai Timur cukup besar untuk dikembangkan ke depannya.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi perikanan Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Adanya dukungan pemerintah daerah melalui pemberian bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana kepada kelompok nelayan dan pembudidaya.

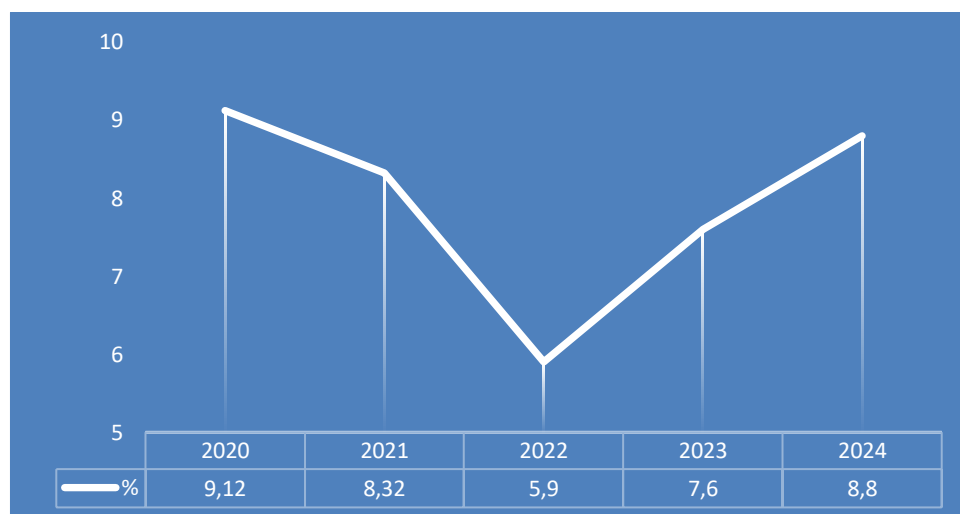
Gambar 2.3 Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



2.1.1.2.3 Pertanian

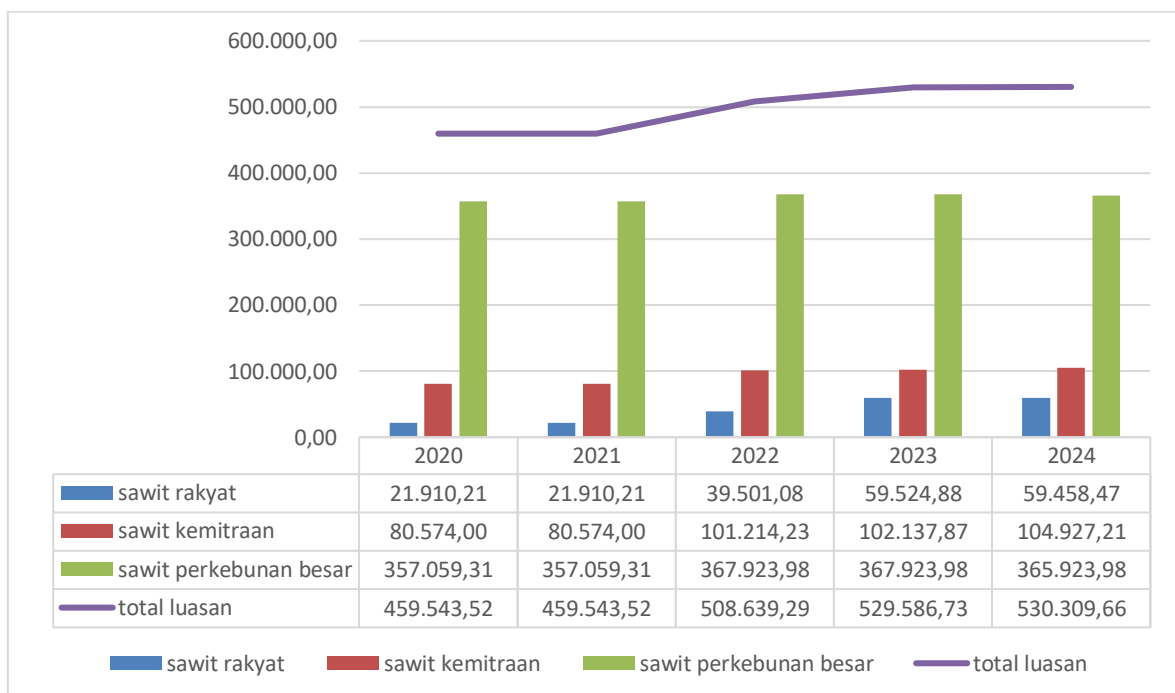
Dalam hal sektor pertanian, terdapat beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Kutai Timur di antaranya pisang, kelapa sawit, coklat/kakao, karet, lada, kopi, dan nanas. Selain itu Kabupaten Kutai Timur memiliki lebih dari 100.000 hektar Kawasan budidaya kehutanan yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan program Perhutanan Sosial guna meningkatkan produktivitas pertanian serta industri pengolahan.

Gambar 2.4 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur



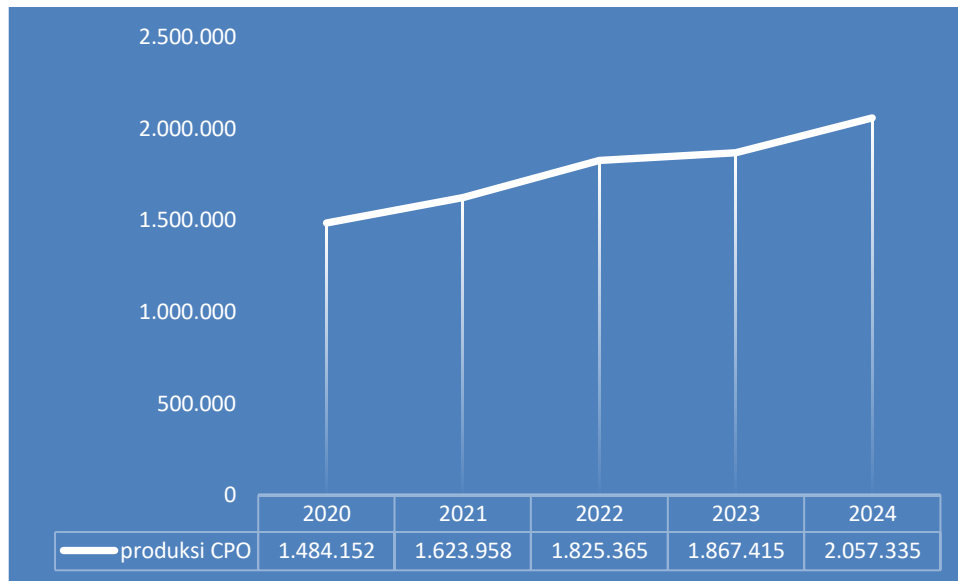
Potensi hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur merupakan sektor unggulan perkebunan yang sangat strategis. Hingga tahun 2024 luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur mencapai 530.310 Hektar, dengan rincian kebun sawit rakyat seluas 59.458,47 hektar, kebun sawit kemitraan seluas 104.927,21 hektar dan kebun sawit perkebunan besar seluas 365.923,98 hektar. Adapun kapasitas produksi *Crude Palm Oil* (CPO) hingga tahun 2024 mencapai 1.183.103 Ton.

Gambar 2.5 Luas Perkebunan Sawit Kabupaten Kutai Timur (Ha)



Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah penghasil *crude palm oil* (CPO) terbesar di Kalimantan Timur, dengan produksi penghasil *crude palm oil* (CPO) mencapai 2.057.335 ton di tahun 2024.

Gambar 2.6 Produksi Crude Palm Oil (CPO) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur 2024

2.1.1.2.4 Pariwisata

Kabupaten Kutai Timur salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, menyimpan potensi pariwisata yang kaya dan beragam. Wilayah ini memiliki keindahan alam yang memikat, mulai dari pesisir pantai, hutan tropis, hingga kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang unik. Posisi geografisnya yang strategis, dengan garis pantai yang panjang serta wilayah pegunungan dan pedalaman, menjadikan Kutai Timur sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman wisata lengkap.

Kabupaten Kutai Timur memiliki bentang alam yang terdiri dari garis pantai, pegunungan karst, wisata kehutanan hingga ekosistem bawah laut yang menakjubkan. Selain itu Kabupaten Kutai Timur memiliki keberagaman budaya yang memiliki nilai tinggi untuk dijadikan potensi pariwisata di antaranya cagar budaya Desa Wehea, Festival Budaya Lom Plai, Pelas Tanah Kutai dan Festival Budaya Ufah.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Secara konsepsional, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 memberikan batasan tentang Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) untuk Pembangunan sebagai kajian yang mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian

aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berbagai *stakeholder*, termasuk kalangan perguruan tinggi menyepakati identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia menggunakan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang dilakukan dalam Millenium Ecosystem Assessment–United Nation. Asumsinya, semakin tinggi jasa ekosistem semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Jasa ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (*land cover/land use*) sebagai penaksir atau proxy. Dengan demikian terdapat empat konsep penting dalam penyusunan daya dukung lingkungan. Beberapa batasan konsep di antaranya adalah :

- a) Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- b) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan batas ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan bentang alam, Daerah Aliran Sungai, Keanekaragaman Hayati dan sosial budaya (UU 32 Tahun 2009). Dalam operasionalisasinya penetapan ekoregion menggunakan pendekatan bentang lahan (*landscape*) dengan mengikuti sistem klasifikasi yang digunakan Verstappen. Selanjutnya jenis-jenis bentanglahan (*landscape*) akan dijadikan salah satu komponen penaksir atau proxy jasa ekosistem (*landscape based proxy*)
- c) Penutup Lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan

produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Dalam operasionalisasinya, digunakan sistem klasifikasi penutup lahan dari SNI 7645-2010, di mana jenis-jenis penutup lahan tersebut dijadikan salah satu komponen penaksir atau proxy jasa ekosistem (*landcover/landused based proxy*)

- d) Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrisi dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasi. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005)

Berdasarkan batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape based proxy* dan *landcover/landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan di antaranya adalah tentang ketersediaan air di Kabupaten Kutai Timur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kutai Timur mencapai 27,236,513,511.40 m³ tiap tahun sedangkan untuk kebutuhannya 10,855,094,887.05 m³ tiap tahun. Dalam lingkup kabupaten, status daya dukung air masih memenuhi karena nilai ketersediaan lebih besar dibandingkan kebutuhannya. Walaupun begitu, ada beberapa kecamatan yang kondisinya defisit seperti Kaliorang, Kaubun, Rantau Pulung dan Sangkulirang. Ambang batas penduduk yang mampu didukung dengan kondisi eksisting adalah 20 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk eksisting sebanyak 338.637 jiwa. Empat kecamatan yang kondisinya defisit juga memiliki nilai defisit terkait perbandingan antara ambang batas penduduk dengan kondisi penduduk dalam grid. Kabupaten Kutai Timur mampu menyediakan jasa ekosistem berupa Jasa Lingkungan Penyedia Air

(P1) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 2,60% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 26.873,28 Hektar), Rendah sebesar 33,84% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 121.551,88 Hektar), Sedang sebesar 61,93% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 375.835,98 Hektar), Tinggi sebesar 1,21% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 27.624,05 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0,41% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 2.672,83 Hektar).

Dalam hal jasa penyedia pangan, Kabupaten Kutai Timur mampu menyediakan jasa ekosistem berupa Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (P2) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 0,002% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 65,65 Hektar), Rendah sebesar 11,69% (didominasi Kecamatan Sandaran seluas 108.809,40 Hektar), Sedang sebesar 82,15% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 491.919,19 Hektar), Tinggi sebesar 5,71% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 68.116,68 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0,44 % (didominasi Kecamatan Bengalon seluas 4.077,07 Hektar).

Di sisi yang lain Kabupaten Kutai Timur memiliki kemampuan dalam menyediakan layanan ekosistem dalam bentuk Jasa Lingkungan Pencegahan Banjir (R3A), dengan sejumlah persentase dalam kategori kelas yang berurutan. Persentase ini berkisar dari Sangat Rendah sekitar 0,05%, yang terutama didominasi oleh wilayah Kecamatan Bengalon seluas 836,43 Hektar. Kemudian, kategori Rendah mencapai sekitar 3,76%, yang utamanya didominasi oleh Kecamatan Bengalon dengan luas wilayah mencapai 30.020,52 Hektar. Sementara kategori Sedang mencapai sekitar 2,98%, dengan Kecamatan Muara Ancalong menjadi wilayah dominan dengan luas mencapai 42.675,21 Hektar. Pada tingkat yang lebih tinggi, kategori Tinggi mencapai sekitar 30,61%, dengan dominasi terutama terdapat di Kecamatan Muara Wahau seluas 120.825,26 Hektar. Terakhir, kategori Sangat Tinggi mencapai sekitar 62,58%, dengan wilayah dominan utama juga terletak di Kecamatan Muara Wahau seluas 376.837,27 Hektar.

Kabupaten Kutai Timur juga memiliki kapasitas dalam menyediakan layanan ekosistem yang disebut Jasa Lingkungan Pencegahan Longsor (R3B). Persentase kategori-kategori kelas dalam jasa ini terdistribusi secara berurutan. Kategori Sangat Rendah mencapai sekitar 0,08%, dengan dominasi utama di Kecamatan Muara Ancalong yang mencakup luas wilayah sekitar 1.278,51 Hektar. Kemudian,

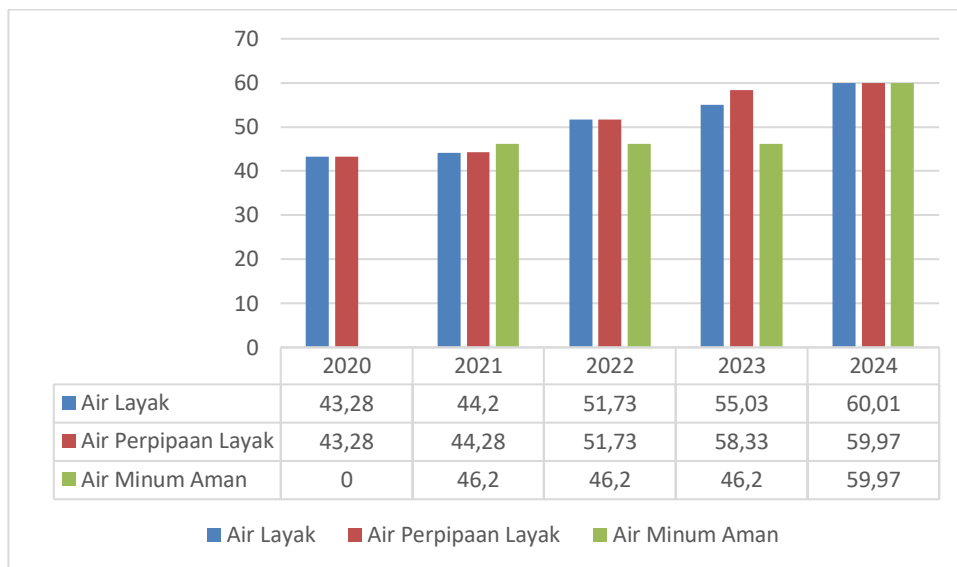
terdapat kategori Rendah sekitar 5,98%, dengan wilayah dominan juga berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong yang melibatkan area seluas 53.759,42 Hektar. Sementara itu, kategori Sedang mencapai sekitar 20,67%, yang didominasi oleh Kecamatan Muara Wahau dengan wilayah seluas 106.741,21 Hektar. Kategori Tinggi mencapai sekitar 12,76%, dengan wilayah dominan di Kecamatan Bengalon yang mencakup 41.537,60 Hektar. Kategori Sangat Tinggi mencapai sekitar 60,49%, dengan dominasi utama terdapat di Kecamatan Muara Wahau seluas 374.164,44 Hektar.

Dalam bidang yang lain Kabupaten Kutai Timur memiliki kemampuan dalam menyediakan layanan ekosistem yang dikenal sebagai Jasa Lingkungan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (R3C) dengan berbagai persentase kategori kelas yang berkembang secara berurutan. Kategori Sangat Rendah mencapai sekitar 0,14%, yang paling banyak terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yang mencakup luas wilayah sekitar 1.748,92 Hektar. Sementara itu, kategori Rendah mencapai sekitar 5,98%, dengan dominasi wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Muara Ancalong seluas 44.294,73 Hektar. Kategori Sedang mencapai sekitar 29,02%, dengan wilayah dominan terutama berlokasi di Kecamatan Muara Wahau seluas 117.754,75 Hektar. Kemudian, kategori Tinggi mencapai sekitar 63,79%, yang didominasi oleh Kecamatan Muara Wahau dengan luas wilayah mencapai 377.234,95 Hektar. Kategori Sangat Tinggi mencapai sekitar 1,07%, dengan wilayah terbesar berada di Kecamatan Sangkulirang seluas 14.397,77 Hektar.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Secara keseluruhan akses terhadap air bersih khususnya dari 3 sumber utama yang terdata dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data akses perpipaan layak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap cakupan pelayanan PDAM untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat. Kemudian akses Masyarakat terhadap air minum layak juga mengalami peningkatan seiring dengan ketersediaan fasilitas air kemasan di tengah Masyarakat.

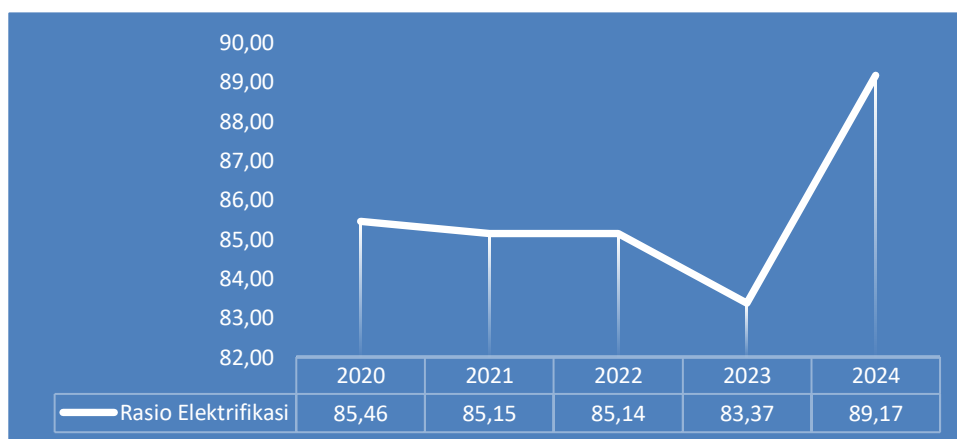
Gambar 2.7 Ketercapaian Air Minum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar. Meskipun demikian, tantangan dalam pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi isu utama, salah satunya adalah ketersediaan akses listrik yang merata ke seluruh wilayah. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan yang signifikan dari 85,46 menjadi 89,17.

Gambar 2.8 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2024

Secara kuantitatif, dari total lebih dari 119.000 sambungan rumah (SR) yang tercatat di Kutai Timur, sebagian besar sudah terhubung ke jaringan listrik PLN. Namun, masih terdapat sekitar 28 desa dari total 141 desa di kabupaten ini yang belum menikmati aliran listrik dari PLN dan bergantung pada sumber energi

alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), atau bahkan genset diesel mandiri yang biayanya cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Gambar 2.9 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan 2022, Badan Pangan Nasional

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan

indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Secara keseluruhan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan dari 73,13 menjadi 61,64. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Menurunnya Indeks Ketahanan Pangan di Kutai Timur menggambarkan potensi kerawanan dalam hal pangan dan hal ini memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat baik dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Dari ketiga aspek tersebut aspek terlemah Kutai Timur adalah aspek ketersediaan. Aspek ini menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan geologis Kutai Timur serta tingginya Indeks Risiko Bencana di Kutai Timur.

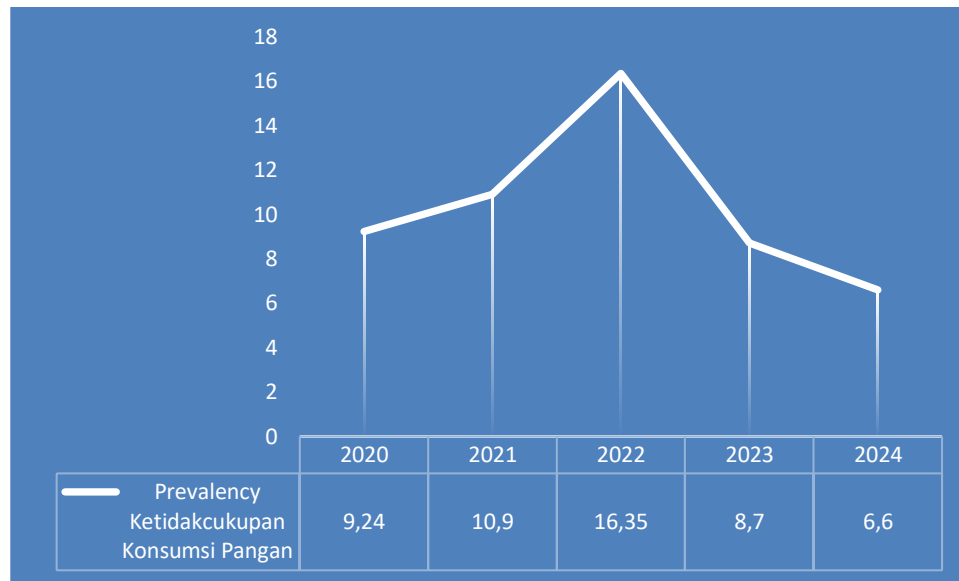
Tabel 2.7 Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur		Kalimantan Timur	
	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat
2020	73,13	255	77,68	9
2021	66,19	324	77,34	NA
2022	60,09	344	77,65	11
2023	65,76	324	79,89	NA
2024	61,64	N/A	80,10	NA

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Jika dilihat dari angka PoU (prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan) Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan (positif) sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dari angka 9,24 menjadi 6,6, artinya proporsi penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang kekurangan gizi (mengonsumsi pangan di bawah standar energi untuk hidup sehat) mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Secara sederhana, hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pangan dan gizi masyarakat, di mana lebih sedikit orang yang tidak mendapatkan energi dan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan dasar mereka atau semakin kecil angka PoU, itu berarti ada perbaikan, yaitu semakin sedikit penduduk yang mengalami kekurangan gizi.

Gambar 2.10 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kutai Timur



2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas menggambarkan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup antara lain tercermin melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH tersusun dari 3 indeks utama Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Secara statistik menunjukkan bahwa angka IKLH Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perbaikan yaitu dari 69,47 menjadi 75,85. Namun angka ini masih di bawah rata-rata IKLH Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan Kutai Timur dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah-tengah Pembangunan yang dilaksanakan.

Tabel 2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	69,47	75,25
2021	71,62	75,06
2022	72.48	74,46
2023	72.12	75,47
2024	75.85	76.63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Dalam hal lingkungan hidup yang berkualitas, pengelolaan sampah yang berkualitas merupakan aspek yang penting. Hingga kini, praktik pengelolaan sampah di Kutai Timur masih bertumpu pada mekanisme angkut dan buang tanpa pemilahan optimal di tingkat rumah tangga. Strategi pengumpulan belum menjangkau pemilahan sejak sumbernya, sehingga efisiensi dan volume yang dapat diolah masih terbatas.

Dari data menyebutkan bahwa potensi timbunan sampah di Kabupaten Kutai Timur meningkat cukup signifikan selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2021 sebesar 77.461,58 Ton sampai dengan 2024 yang mencapai 79.082,18 Ton. Kondisi ini diakibatkan pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada aktivitas masyarakat yang menimbulkan sampah.

Tabel 2.9 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024

Perihal	2021		2022		2023		2024	
	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur
Potensi Timbunan Sampah (ton)	77.461,58	666.303,37	77.674,37	791.828,97	77.706,13	809.331,65	79.082,18	835.108,87
Jumlah Pengurangan Sampah (ton)	15.598,70	123.893,74	10.041,04	151.652,25	407,45	146.220,80	7.390,65	125.587,71
Jumlah Penanganan Sampah (ton)	20,14	18,15	12,93	15,34	0,52	14,13	9,35	12,99
Sampah yang Dikelola (ton)	54.817,31	495.428,80	35.748,10	537.560,26	41.720,61	547.419,15	39.226,37	467.473,77
% Sampah Yang Dikelola	70,77	71,04	46,02	58,13	53,69	58,37	49,60	54,62
Sampah yang tidak Dikelola (ton)	70.416,01	619.322,55	45.789,14	689.212,51	42.128,06	693.639,94	46.617,02	593.061,47
% Sampah Tidak Dikelola	90,90	89,19	58,95	73,47	54,21	72,50	58,95	67,61

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kutai Timur

2.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi bencana yang signifikan, terutama dari bencana banjir. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur 2024-2028, banjir merupakan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi wilayah Kutai Timur. Kecamatan seperti Muara Ancalong dan Sangatta termasuk dalam kategori risiko banjir kelas tinggi, dengan total luas wilayah terdampak mencapai 523.476,36 hektar. Penyebab utama banjir adalah intensitas hujan yang tinggi serta topografi dataran rendah yang menyebabkan sungai-sungai di wilayah

ini meluap. Kerugian akibat banjir mencakup kerusakan infrastruktur, perumahan, serta lahan pertanian, yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan.

Cuaca ekstrem juga menjadi ancaman yang patut diwaspadai di Kabupaten Kutai Timur. Wilayah-wilayah seperti Kecamatan Sangatta Utara dan Sangkulirang tercatat memiliki potensi bencana cuaca ekstrem kelas tinggi. Cuaca ekstrem, yang biasanya berupa angin kencang dan hujan lebat, dipengaruhi oleh topografi dataran dan tutupan lahan yang kurang optimal, seperti lahan kosong dan hutan terbuka. Bencana ini menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi yang besar, terutama pada infrastruktur umum dan perumahan. Meski demikian, kapasitas mitigasi bencana cuaca ekstrem di beberapa wilayah masih tergolong rendah, sehingga risiko cuaca ekstrem harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan kebencanaan.

Kebakaran hutan dan lahan juga merupakan ancaman yang signifikan di Kabupaten Kutai Timur. Luas wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan mencapai lebih dari 2,8 juta hektar, dengan sebagian besar wilayah di kecamatan seperti Muara Wahau dan Bengalon berada dalam kategori risiko kebakaran hutan kelas tinggi. Aktivitas pembukaan lahan oleh manusia serta fenomena alam seperti El Nino merupakan faktor utama penyebab kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati.

Selain itu, tanah longsor menjadi salah satu ancaman di daerah pegunungan Kabupaten Kutai Timur, terutama di Kecamatan Muara Wahau yang memiliki wilayah rawan longsor terbesar. Tanah longsor dipicu oleh kondisi topografi dengan lereng yang curam, terutama pada wilayah pegunungan dengan elevasi tinggi. Bencana ini sering terjadi pada musim hujan ketika tanah yang tidak stabil bergerak turun akibat gaya gravitasi. Kerugian akibat tanah longsor meliputi kerusakan infrastruktur, perumahan, serta lahan pertanian. Kombinasi antara potensi bahaya tanah longsor yang tinggi dan kapasitas mitigasi yang rendah di wilayah ini membuat tanah longsor menjadi salah satu risiko prioritas.

Selain banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan tanah longsor, Kabupaten Kutai Timur juga menghadapi potensi ancaman dari bencana epidemi dan wabah

penyakit. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur 2024-2028, bencana ini masuk dalam kategori risiko rendah. Penyakit menular seperti demam berdarah dan malaria masih menjadi ancaman di beberapa kecamatan. Faktor penyebab meliputi kurangnya kesadaran dan kesiapan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menghadapi wabah penyakit. Meskipun risikonya rendah, upaya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk meminimalkan dampak dari potensi wabah yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Gelombang ekstrem dan abrasi juga menjadi ancaman yang signifikan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai, seperti Sangkulirang dan Sandaran, memiliki risiko moderat terhadap gelombang ekstrem dan abrasi. Bencana ini biasanya terjadi akibat siklon tropis yang menyebabkan gelombang laut tinggi dan merusak garis pantai. Faktor sepertiutupan vegetasi pesisir yang berkurang serta bentuk garis pantai turut memperbesar risiko abrasi. Dampak bencana ini meliputi kerusakan fisik pada infrastruktur pesisir dan pemukiman serta kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Selain itu, kekeringan juga menjadi salah satu ancaman bencana di Kabupaten Kutai Timur. Wilayah ini berisiko mengalami kekeringan, terutama selama fenomena *El Nino* yang menyebabkan curah hujan menurun drastis. Dampak kekeringan terutama dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sumber air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Kekeringan juga berdampak pada penurunan kualitas air bersih, yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Seluruh kecamatan di Kutai Timur termasuk dalam kategori risiko kekeringan sedang, dan kombinasi antara pertumbuhan penduduk serta perambahan hutan semakin memperparah risiko ini.

Selanjutnya, gempa bumi dan tsunami juga menjadi ancaman di Kabupaten Kutai Timur, meskipun risikonya tergolong rendah. Kabupaten Kutai Timur dilintasi oleh beberapa sesar aktif, seperti Sesar Mangkalihat dan Sesar Tarakan, yang memiliki potensi menyebabkan gempa bumi. Sementara itu, risiko tsunami juga ada di wilayah pesisir, terutama di kecamatan yang memiliki pantai berteluk dan muara

sungai dengan topografi landai. Kombinasi dari kondisi ini dapat memperbesar dampak tsunami jika terjadi.

Tabel 2.10 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB)
Tahun 2019-2024

Tahun	IKD	IRB	Kelas Risiko
2019	0,00	190	Tinggi
2020	0,00	190	Tinggi
2021	0,26	190	Tinggi
2022	0,38	181,57	Tinggi
2023	0,36	185,17	Tinggi
2024	0,42	173,36	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Kutai Timur 2024

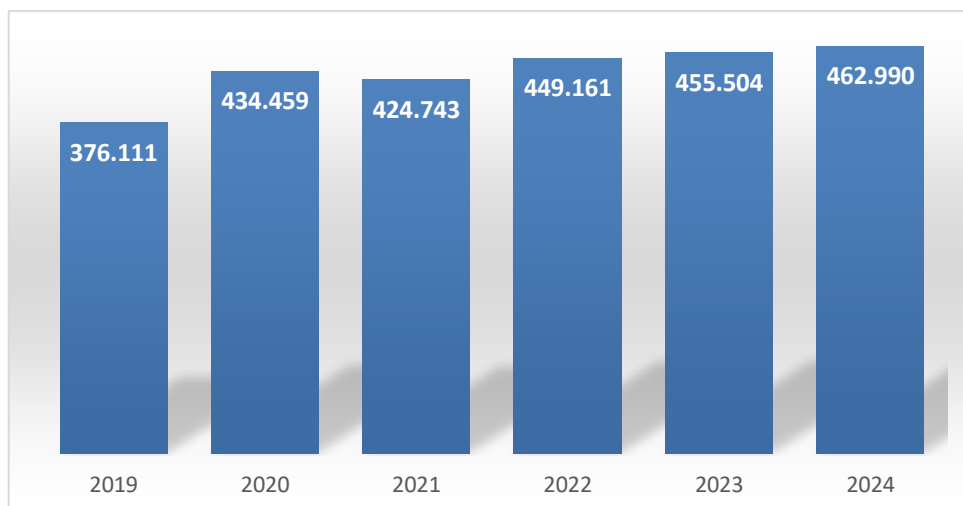
Data IKD dan IRB di Kabupaten Kutai Timur selama 2019-2024 menunjukkan pola yang konsisten dalam arti kenaikan IKD diikuti dengan penurunan IRB. Peningkatan nilai IKD mencerminkan peningkatan pengakuan dan pencatatan faktor-faktor kerentanan di Kabupaten Kutai Timur, sementara perubahan dalam IRB menunjukkan dinamika risiko bencana yang tetap tinggi namun sedikit berfluktuasi. Kelas risiko bencana selama 2019-2024 tetap berada pada kelas yang tinggi, meski pada 2023-2024 terjadi penurunan IRB yang cukup signifikan, sehingga perlu strategi mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mengurangi kerentanan dan risiko di masa mendatang. Penurunan IRB yang terjadi selama 2021-2022 menunjukkan keberhasilan upaya mitigasi, namun tahun 2023 IRB kembali naik dan kembali turun cukup drastis di tahun 2024. Penurunan di tahun 2024 tersebut mengindikasikan bahwa upaya mitigasi mengalami peningkatan, meskipun juga dapat disebabkan karena faktor alam yang mendorong penurunan nilai IRB.

2.1.1.7 Demografi

Penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 462.990 jiwa. Jumlah ini menunjukkan kenaikan bila dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 455.504 jiwa atau naik sebesar 1,64%. Selama 2019-2024 jumlah penduduk menunjukkan penurunan di tahun 2021 yaitu turun sebesar -2,24% sedangkan pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode tersebut terjadi pada

tahun 2020 yang mencapai 15,51%. Perubahan jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) kelahiran, (2) kematian, dan (3) migrasi atau perpindahan penduduk ke daerah lain. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi peluang sekaligus tantangan di masa depan. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi perlu diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia sehingga pertumbuhan penduduk menjadi potensi bagi Kutai Timur dalam mempercepat pembangunan daerah. Di sisi lain pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berpotensi menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius.

Gambar 2.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2024 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan kelompok umurnya, penduduk dengan usai di bawah lima tahun atau balita mencapai 8,35%; angka yang cukup tinggi dan memerlukan perhatian khususnya di bidang kesehatan balita. Bila usia sekolah mulai Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi adalah usia 5-24 tahun, jumlah penduduk kelompok usia tersebut mencapai 32,96% dan usia ini akan berpengaruh terhadap APK dan APM. Di sisi lain jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun mencapai 72,48%. Penduduk yang berusia lanjut (lansia) yaitu usia 65 ke atas tahun 2024 mencapai lebih dari 17.000 jiwa. Hal ini membutuhkan intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan aspek sosial, khususnya yang berusia 70 tahun ke atas.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2024

Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
0-4	19.740	51,06	18.930	48,97	38.660	8,35
5-9	17.650	51,62	16.540	48,38	34.190	7,38
10-14	19.350	51,53	18.200	48,47	37.550	8,11
15-19	20.800	52,22	19.030	47,78	39.830	8,60
20-24	21.770	53,03	19.280	46,97	41.050	8,87
25-29	22.210	53,88	19.000	46,09	41.220	8,90
30-34	23.330	53,68	20.130	46,32	43.460	9,39
35-39	23.100	54,17	19.540	45,83	42.640	9,21
40-44	19.790	54,03	16.840	45,97	36.630	7,91
45-49	17.360	53,83	14.890	46,17	32.250	6,97
50-54	14.650	55,56	11.710	44,41	26.370	5,70
55-59	11.150	57,77	8.150	42,23	19.300	4,17
60-64	7.330	57,22	5.480	42,78	12.810	2,77
65-69	4.550	56,88	3.450	43,13	8.000	1,73
70-74	2.690	58,61	1.900	41,39	4.590	0,99
75+	2.560	57,4	1.900	42,6	4.460	0,96
Kutai Timur	248.020	53,57	214.980	46,43	462.990	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Bila dilihat per kecamatan, Kecamatan Sangatta Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak dan paling padat, yaitu 28,93% penduduk dengan tingkat kepadatan 389 orang per km². Hal ini berbeda jauh dengan Kecamatan Sangatta Selatan yang memiliki proporsi penduduk 7,16% dengan tingkat kepadatan hanya 25 orang per km². Kecamatan Bengalon merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu 9,85% dengan tingkat kepadatan hanya 26 orang per km². Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Busang yaitu hanya 1,35% dan kecamatan ini juga memiliki tingkat kepadatan paling rendah yaitu 2 orang per km². Dengan demikian distribusi penduduk antar kecamatan di Kutai Timur belum merata. Hal ini menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan dan strategi konektivitas antarwilayah serta program pengembangan kecamatan.

Tabel 2.12 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Kecamatan	Proporsi (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Muara Ancalong	3,38	6,63
Busang	1,35	1,71
Long Mesangat	1,65	31,09
Muara Wahau	7,18	6,45
Telen	2,26	5,7
Kongbeng	7,13	29,08
Muara Bengkal	3,08	18,23
Batu Ampar	2,09	12,36
Sangatta Utara	28,93	389,28
Bengalon	9,89	12,95
Teluk Pandan	3,34	16,19
Sangatta Selatan	7,16	26,75
Rantau Pulung	3,29	16,14
Sangkulirang	5,61	15,43
Kaliorang	4,21	62,42
Sandaran	2,59	4,1
Kaubun	3,99	30,93
Karangan	2,86	3,56
Kutai Timur	100,00	14,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Data kependudukan antar wilayah di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kutai Timur cenderung menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 5,27 dan menurun menjadi 1,71 pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh urbanisasi yang tinggi dari wilayah luar Kabupaten Kutai Timur yang berdampak kepada perbedaan rasio jenis kelamin. Rasio Jenis Kelamin mencapai 115,4. Ini mencerminkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan. Selain itu pula berdampak kepada peningkatan kepadatan penduduk yang mencapai 15 orang per km².

Tabel 2.13 Perbandingan Indikator Kependudukan Tahun 2020-2024

Kutai Timur	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Ribu)	434,5	449,2	468,8	455,5	463,0
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	5,27	2,53	4,45	1,73	1,71
Persentase Penduduk (%)	11,54	11,79	12,15	11,65	11,44
Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)	14	14	15	14	15
Rasio Jenis Kelamin Penduduk	117,6	117,2	116,8	115,9	115,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Di tahun 2029 penduduk Kutai Timur diperkirakan mencapai 498.980 jiwa. Selama 2025-2029 rata-rata pertumbuhan mencapai 1,49% per tahun. Hasil proyeksi BPS menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk usia 65 ke atas cukup tinggi sehingga perlu diantisipasi dengan program dan kegiatan untuk penduduk usia non produktif tersebut. Proyeksi jumlah penduduk juga dijadikan sebagai salah satu dasar penyusunan program di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, energi, dan sebagainya,

Tabel 2.14 Proyeksi Jumlah Penduduk Kutai Timur Tahun 2025-2029 (ribuan)

Kelompok Usia	2025	2026	2027	2028	2029	Rata-rata Pertumbuhan (%)
0-4	41,24	41,07	40,92	40,77	40,63	-0,37
5-9	32,68	34,01	35,43	37,06	39,03	4,54
10-14	37,01	36,44	35,86	35,17	34,24	-1,93
15-19	39,49	39,12	38,71	38,25	37,73	-1,13
20-24	41,23	41,26	41,16	40,94	40,64	-0,36
25-29	41,19	41,35	41,66	42,04	42,37	0,71
30-34	43,26	43,03	42,74	42,47	42,29	-0,57
35-39	43,46	43,93	44,08	44,01	43,84	0,22
40-44	37,59	38,74	40,06	41,38	42,52	3,13
45-49	33,13	33,93	34,66	35,38	36,19	2,23
50-54	27,53	28,62	29,66	30,64	31,57	3,48
55-59	20,55	21,81	23,07	24,31	25,5	5,54
60-64	13,76	14,79	15,88	17,01	18,18	7,21
65-69	8,64	9,32	10,02	10,77	11,58	7,60
70-74	4,91	5,29	5,74	6,24	6,77	8,36
75+	4,72	4,99	5,26	5,56	5,91	5,78

Kelompok Usia	2025	2026	2027	2028	2029	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Jumlah	470,4	477,7	484,9	491,99	498,98	1,49

Sumber: SP2020, Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur adalah wilayah yang heterogen, yang dihuni dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Dalam konteks masyarakat adat, Kabupaten Kutai Timur memiliki suku asli yang telah berdiam sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Masyarakat adat di Kutai Timur memiliki kearifan lokal yang kaya dan bersejarah, yang tercermin dalam budaya dan tradisi mereka. Salah satu contoh penting adalah "Pelas Tanah", sebuah pesta adat yang diselenggarakan setiap tahun. Pelas Tanah memiliki akar sejarah yang mendalam, berawal dari tradisi kerajaan Kutai Martadipura, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri sejak sekitar abad ke-4. Kerajaan ini, dikenal juga sebagai Kutai Kartanegara ing Martadipura, memiliki sejarah yang merupakan salah satu yang tertua di Nusantara.

Selain itu, terdapat upaya khusus untuk mengembangkan dan memantapkan potensi budaya masyarakat adat Wehea Kelay di Kutai Timur sebagai destinasi wisata. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan destinasi wisata utama di Kutai Timur dengan fokus pada pengembangan wisata sosial budaya. Strategi pengembangannya meliputi studi kajian untuk mengembangkan potensi wisata budaya dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempromosikan destinasi wisata masyarakat adat Wehea Kelay.

Kedua aspek ini, Pelas Tanah dan pengembangan Wehea Kelay, menunjukkan bagaimana masyarakat adat Kutai Timur tidak hanya mempertahankan budaya mereka yang kaya, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dan mengintegrasikan warisan budaya tersebut ke dalam konteks modern, khususnya pariwisata, untuk mempromosikan dan melestarikan tradisi mereka.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian dalam kurun waktu 1 tahun. PDRB menggambarkan hasil akhir dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang dikelompokkan ke dalam 17 sektor atau lapangan usaha maupun dikelompokkan berdasarkan pengeluaran komponen pelaku ekonomi. Data 2020-2024 menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB Kutai Timur tahun 2024 mencapai sekitar 159 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 168 triliun atau turun sebesar -5,21%; tahun 2022-2023 bahkan turun hingga -20,29%.

Penurunan PDRB ADHB tahun 2023 dan 2024 tersebut disebabkan karena turunnya nilai PDRB ADHB sektor pertambangan dan penggalan yang cukup tajam dari 179,63 triliun di tahun 2022 menjadi 134,06 triliun di tahun 2023 atau turun sebesar -25,37%; dan di tahun 2024 kembali turun menjadi 120,46 triliun atau turun -10,14%. Penurunan ini terjadi akibat turunnya harga barang di sektor pertambangan dan penggalan di tahun 2023 dan 2024. Hal ini terlihat dari nilai PDRB ADHB sektor pertambangan dan penggalan yang menunjukkan kenaikan di tahun 2023 dari 80,14 triliun di tahun 2022 menjadi 86,55 triliun di tahun 2023 atau naik sebesar 8,00%; di tahun 2024 naik lagi menjadi 95,32 triliun atau naik sebesar 10,12%. PDRB ADHB dengan tahun dasar 2010 mengandung arti bahwa nilai output sektor pertambangan dan penggalan tahun 2023 dan 2024 dihitung dengan menggunakan harga tahun 2010. Dengan demikian sekalipun di tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan output sektor pertambangan dan penggalan, namun bila terjadi penurunan harga maka akan menyebabkan PDRB ADHB sektor tersebut juga menurun.



Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.537.387	11.366.917	12.460.886	12.783.082	14.031.353
Pertambangan dan Penggalian	89.850.254	108.984.972	179.628.767	134.057.967	120.461.014
Industri Pengolahan	4.107.441	4.616.395	5.378.676	5.419.382	6.924.547
Pengadaan Listrik dan Gas	15.697	16.052	17.524	21.913	27.708
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.033	17.486	18.910	21.327	24.368
Konstruksi	2.575.777	2.700.809	3.593.882	4.723.578	5.407.409
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.507.306	2.719.779	3.126.743	3.625.015	3.954.839
Transportasi dan Pergudangan	1.481.943	1.534.113	1.671.647	1.904.723	2.185.860
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	325.116	362.435	403.297	449.819	501.521
Informasi dan Komunikasi	356.189	361.689	397.007	442.990	502.145
Jasa Keuangan dan Asuransi	201.006	229.052	266.272	303.300	360.359
Real Estate	382.981	421.083	478.916	524.633	568.754
Jasa Perusahaan	87.890	89.920	100.218	113.024	130.115
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.203.208	1.151.450	1.302.508	1.392.686	1.702.997
Jasa Pendidikan	1.426.501	1.516.813	1.667.830	1.826.759	1.978.602
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	238.158	275.569	304.646	335.148	363.365
Jasa lainnya	242.775	253.042	283.755	326.178	372.277
PDRB	115.555.662	136.617.573	211.101.484	168.271.524	159.497.231

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2025

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mendominasi struktur PDRB bukan hanya di tahun 2024 saja, namun selama 2020-2024. Proporsi sektor ini selama 2020-2024 rata-rata mencapai 80,11%. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertanian dengan rata-rata 2020-2024 sebesar 7,87% dan yang ketiga adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi 3,28%. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian sangat tinggi sehingga membuat sektor lain tidak mudah untuk berkembang. Pengembangan sektor pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis atau hilirisasi sektor pertanian termasuk pengembangan Perkebunan yang mampu memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian pengembangan sektor pertanian mampu mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan.

Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 2,48% pada tahun 2024 dan pertumbuhan ADHK sektor perdagangan tahun 2024 cukup tinggi yaitu sebesar 7,66%. Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 memiliki kontribusi yang kecil yaitu 0,31% meski memiliki pertumbuhan yang tinggi di tahun 2024 yaitu 8,77%. Untuk mendorong sektor perdagangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum perlu strategi pengembangan industri pariwisata. Pengembangan pariwisata selain mendorong pengembangan UMKM juga akan mampu mendorong perkembangan sektor perdagangan.



Tabel 2.16 Distribusi PDRB ADHB Tahun 2020-2024 (%)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA PROPORSI 2020-2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,12	8,32	5,90	7,60	8,80	7,87
Pertambangan dan Penggalian	77,75	79,77	85,09	79,67	75,53	80,11
Industri Pengolahan	3,55	3,38	2,55	3,22	4,34	3,28
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Konstruksi	2,23	1,98	1,70	2,81	3,39	2,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,17	1,99	1,48	2,15	2,48	1,97
Transportasi dan Pergudangan	1,28	1,12	0,79	1,13	1,37	1,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,27	0,19	0,27	0,31	0,25
Informasi dan Komunikasi	0,31	0,26	0,19	0,26	0,31	0,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,17	0,13	0,18	0,23	0,17
Real Estate	0,33	0,31	0,23	0,31	0,36	0,30
Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,05	0,07	0,08	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,04	0,84	0,62	0,83	1,07	0,88
Jasa Pendidikan	1,23	1,11	0,79	1,09	1,24	1,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,20	0,14	0,20	0,23	0,18
Jasa lainnya	0,21	0,19	0,13	0,19	0,23	0,19
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

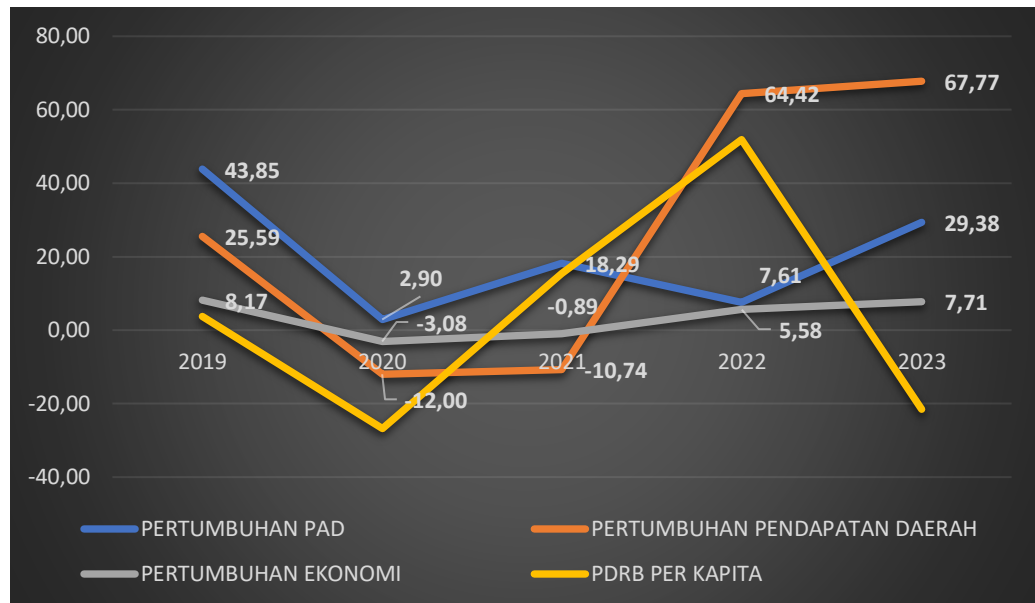
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2025

Pertumbuhan ekonomi 2024 adalah 9,82%; termasuk sangat tinggi karena lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,03%) dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (6,17%). Pertumbuhan ekonomi 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2023 yang besarnya 7,71%; maupun tahun 2022 yang besarnya 5,58%. Pertumbuhan ekonomi Kutai Timur selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Kutai Timur dalam menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, namun bila dihitung dengan menggunakan pendekatan harga berlaku (*current price*) nilai tersebut menunjukkan penurunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan harga konstan (*constant price*) pada tahun dasar (*base year*) tertentu.

Pertumbuhan ekonomi 2024 yang terbesar adalah sektor pengadaan listrik dan gas (25,42%) serta sektor industri pengolahan (21,77%). Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2020-2024 adalah 4,44%; sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor pengadaan Listrik dan gas sebesar 12,98% dan sektor industri pengolahan sebesar 4,65%. Meski kedua sektor tersebut tumbuh sangat tinggi, namun konstruksi terhadap PDBB relatif rendah, kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas tahun 2024 hanya 0,02% dan sektor industri pengolahan sebesar 4,34%. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tahun 2024 tergolong tinggi yaitu 10,12% artinya nilai *output* sektor ini menunjukkan kenaikan di tahun 2024 bila dihitung dengan harga tahun dasar yaitu 2010. Hal ini menjadi berbeda bila dihitung menggunakan pendekatan harga berlaku (*current price*), nilai sektor ini di tahun 2024 menunjukkan penurunan dibanding 2023, bukan karena output hasil tambang turun namun karena faktor penurunan harga di tahun 2024.

Pada periode 2020-2023 pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan pendapatan daerah dan PAD, artinya pendapatan daerah dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang perlu diperhatikan adalah besarnya dampak tersebut, kenaikan pendapatan daerah masih belum membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan ketepatan kebijakan dan strategi penggunaan pendapatan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.12 Perkembangan Pertumbuhan PAD, LPE, Pertumbuhan Pendapatan, dan PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2024 (diolah)

Transformasi ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi penting misalnya melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Pengembangan industri pengolahan yang berbasis sektor pertanian menjadi penting dalam rangka transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi akan mendorong pengembangan sektor perdagangan yang pada akhirnya berdampak pula pada pengembangan UMKM.

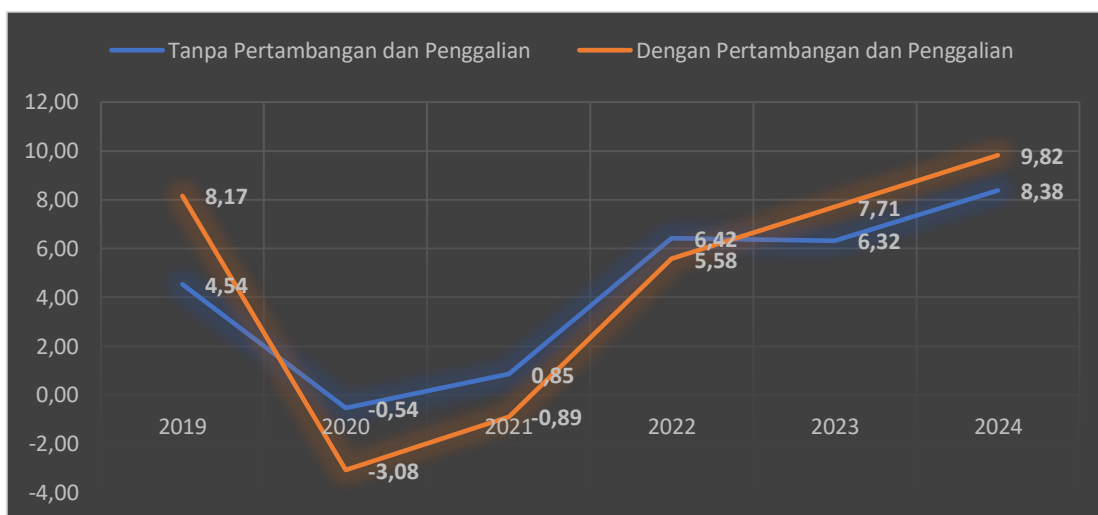
Tabel 2.17 Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2019-2024 (%)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,67	-0,93	2,53	2,37	1,11	1,32
Pertambangan dan Penggalian	-3,58	-1,25	5,40	8,00	10,12	4,47
Industri Pengolahan	-4,60	-1,54	5,31	1,87	21,77	4,65
Pengadaan Listrik dan Gas	14,57	2,28	6,01	21,70	25,42	12,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,59	4,18	6,93	11,51	7,21	6,13
Konstruksi	1,05	3,83	23,78	22,42	9,25	9,91
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,57	3,71	6,06	6,93	7,66	5,14
Transportasi dan Pergudangan	2,16	2,41	5,05	9,26	9,61	5,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,44	3,48	8,10	7,00	8,77	4,73
Informasi dan Komunikasi	5,43	7,47	7,44	6,82	10,70	6,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	3,69	5,39	9,91	14,38	6,39
Real Estate	2,21	0,17	4,78	4,75	5,08	3,44
Jasa Perusahaan	-2,86	3,62	6,35	8,77	9,50	4,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,22	-0,54	8,71	5,72	20,41	5,67
Jasa Pendidikan	1,76	2,71	5,18	4,92	5,73	4,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,69	13,02	2,08	5,15	4,58	8,21
Jasa lainnya	-1,36	0,75	6,51	8,26	8,22	4,72
PDRB	-3,08	-0,89	5,58	7,71	9,82	4,44

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2024 (diolah)

Bila Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dipisahkan antara “Dengan Pertambangan dan Penggalian” dengan “Tanpa Pertambangan dan Penggalian” maka terlihat bahwa selama 2023-2024 peran sektor pertambangan dan penggalian cukup signifikan. Hal ini terlihat dari perbedaan LPE di antara keduanya. Pada tahun 2024 misalnya, jika dihitung tanpa sektor pertambangan dan penggalian, maka LPE Kutai Timur sebesar 8,38% sementara jika dihitung dengan sektor pertambangan dan penggalian LPE Kutai Timur menjadi 9,82%. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2020-2022 yang menunjukkan bahwa LPE tanpa sektor pertambangan dan penggalian lebih tinggi dibandingkan LPE dengan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 secara global yang mempengaruhi perekonomian di berbagai negara termasuk Indonesia.

Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur 2019-2024 (%)



Bila PDRB Kutai Timur dipetakan berdasarkan PDRB Provinsi Kalimantan Timur, maka pada tahun 2024 hanya terdapat satu sektor yang menunjukkan baik proporsi maupun pertumbuhan Kutai Timur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sektor pertambangan dan penggalian (Kuadran 1). Sektor pertanian berada di Kuadran 2, yaitu proporsi tahun 2024 di Kutai Timur lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Timur, namun memiliki pertumbuhan yang lebih rendah. Cukup banyak sektor di Kutai Timur yang berada di Kuadran 3 yaitu proporsi lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Timur namun memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi; serta di Kuadran 4 yaitu baik proporsi maupun pertumbuhan di Kutai Timur lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur.

Bila dilihat dalam rentang periode 2020-2024, sektor pertambangan dan penggalian masih tetap berada di Kuadran 1. Rata-rata proporsi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kutai Timur selama 2020-2024 adalah 75,53% sedangkan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 38,38%. Rata-rata pertumbuhan selama 2020-2024 Kutai Timur pun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjadikan sektor pertambangan dan penggalian selama 2020-2024 masuk dalam Kuadran 1 yaitu masuk dalam kategori Maju. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian Kutai Timur unggul dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur.

KUADRAN 1	KUADRAN 2
MAJU Pertumbuhan Tinggi (+) Proporsi Tinggi (+)	TERTEKAN Pertumbuhan Rendah (-) Proporsi Tinggi (+)
KUADRAN 3	KUADRAN 4
POTENSIAL Pertumbuhan Tinggi (+) Proporsi Rendah (-)	TERTINGGAL Pertumbuhan Rendah (-) Proporsi Rendah (-)

Secara keseluruhan selama tahun 2024 maupun 2020-2024 masih cukup banyak sektor yang masuk di Kuadran 4 yaitu kategori Tertinggal, karena baik proporsi sektor tersebut terhadap PDRB maupun rata-rata pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berarti posisi sektor tersebut di Kutai Timur rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain (kabupaten dan kota) di Kalimantan Timur. Sektor yang masuk dalam Kuadran 4 selama periode 2020-2024 adalah sektor pertanian, sektor pengadaan air, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa kegiatan dan kegiatan sosial. Sektor lainnya masuk ke dalam Kuadran 3 yaitu Potensial karena meskipun memiliki proporsi yang lebih kecil namun memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga diharapkan dengan kebijakan dan strategi yang tepat akan mendorong sektor-sektor tersebut masuk ke dalam Kuadran 1.



Tabel 2.18 Pemetaan Sektor Ekonomi Kutai Timur Tahun 2024

LAPANGAN USAHA	PROPORSI		PERTUMBUHAN		POSISI KUTIM		KUADRAN
	KUTIM	PROV	KUTIM	PROV	PROPORSI	PERTUMBUHAN	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,80	8,66	1,11	2,37	+	-	2
B. Pertambangan dan Penggalian	75,53	38,38	10,12	6,75	+	+	1
C. Industri Pengolahan	4,34	18,26	21,77	0,26	-	+	3
D. Pengadaan Listrik dan Gas <i>Electricity & Gas</i>	0,02	0,07	25,42	16,41	-	+	3
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,05	7,21	7,71	-	-	4
F. Konstruksi	3,39	11,87	9,25	13,60	-	-	4
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,48	6,90	7,66	8,57	-	-	4
H. Transportasi dan Pergudangan	1,37	4,50	9,61	8,15	-	+	3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	1,12	8,77	11,67	-	-	4
J. Informasi dan Komunikasi	0,31	1,51	10,70	7,93	-	+	3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,23	1,94	14,38	6,70	-	+	3
L. Real Estat	0,36	0,81	5,08	5,88	-	-	4
M,N. Jasa Perusahaan	0,08	0,22	9,50	7,56	-	+	3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	2,21	20,41	16,44	-	+	3
P. Jasa Pendidikan	1,24	1,81	5,73	5,36	-	+	3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23	0,92	4,58	4,96	-	-	4
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,23	0,77	8,22	10,41	-	-	4

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

Tabel 2.19 Pemetaan Sektor Ekonomi Kutai Timur Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	PROPORSI		PERTUMBUHAN		POSISI KUTIM THD PROVINSI		KUADRAN
	KUTIM	PROV	KUTIM	PROV	PROPORSI	PERTUMBUHAN	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,72	8,03	1,36	1,46	-	-	4
B. Pertambangan dan Penggalian	80,87	45,83	3,37	2,56	+	+	1
C. Industri Pengolahan	3,10	17,59	1,52	1,51	-	+	3
D. Pengadaan Listrik dan Gas <i>Electricity & Gas</i>	0,01	0,05	10,64	8,37	-	+	3
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,05	5,92	5,92	-	-	4
F. Konstruksi	2,08	9,00	10,05	6,47	-	+	3
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,88	5,88	4,64	4,63	-	-	4
H. Transportasi dan Pergudangan	1,07	3,58	4,80	3,73	-	+	3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,97	3,94	3,83	-	-	4
J. Informasi dan Komunikasi	0,25	1,37	6,18	7,24	-	-	4
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	1,62	4,85	5,80	-	+	3
L. Real Estat	0,29	0,84	3,12	1,66	-	+	3
M,N. Jasa Perusahaan	0,06	0,20	3,32	2,71	-	+	3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,85	1,89	2,94	3,49	-	+	3
P. Jasa Pendidikan	1,04	1,68	4,01	3,50	-	+	3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	0,77	8,95	9,93	-	-	4
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,18	0,65	4,03	3,85	-	-	4

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

2.1.2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita tahun 2024 sebesar 344,493 juta; turun dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 369,42 juta. Penurunan tersebut terjadi akibat turunnya PDRB ADHB tahun 2024 (159,497 triliun) dibandingkan tahun 2023 (168,271 triliun) atau turun sebesar -5,21%; sementara jumlah penduduk 2023-2024 menunjukkan kenaikan. Penurunan juga pernah terjadi di tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19. PDRB per kapita Kutai Timur tahun 2023 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kab/kota lain di Kalimantan Timur; termasuk jauh lebih tinggi dibandingkan PDRB per kapita Kalimantan Timur yang mencapai 215,76 juta. Mengingat tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur PDRB, fluktuasi harga pertambangan dan penggalian dapat membuat kondisi perekonomian Kutai Timur rentan terhadap dinamika harga sektor pertambangan dan penggalian dunia.

PDRB per kapita Kutai Timur yang tinggi menggambarkan Tingkat kesejahteraan Masyarakat. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana distribusi pendapatan tersebut mampu dinikmati secara merata oleh seluruh Masyarakat. Tahun 2022 jumlah penduduk tumbuh sebesar 5,75% sementara PDRB ADHB tumbuh sebesar 54,52%. Hal ini menyebabkan PDRB per kapita tahun 2022 mengalami kenaikan yang drastis.

Tabel 2.20 Perbandingan PDRB Per Kapita Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	268,80	161,80
2021	310,29	183,16
2022	471,27	238,92
2023	369,42	215,76
2024	344,49	212,18

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

1.1.2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ukuran yang dipergunakan untuk menentukan seseorang miskin atau tidak adalah garis kemiskinan. Menurut BPS, garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum

makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan di Kutai Timur tahun 2024 adalah 753.332 per kapita per bulan yang berarti seseorang masuk dalam kategori miskin apabila memiliki pengeluaran di bawah 753.332 per orang per bulan. Jumlah penduduk miskin di Kutai Timur tahun 2023 adalah 37.040 dan naik di tahun 2024 menjadi 37.110. Meskipun jumlah penduduk miskin naik namun Tingkat kemiskinan di Kutai Timur menunjukkan penurunan dari 9,06% menjadi 8,81%. Penurunan Tingkat kemiskinan ini bukan disebabkan karena menurunnya jumlah penduduk miskin namun karena kenaikan jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk miskin itu sendiri.

Tabel 2.21 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk miskin (ribuan jiwa)	33.02	35.31	36.98	37.78	36.84	37.04	37,11
Tiingkat Kemiskinan (%)	9.22	9.48	9.55	9.81	9.28	9.06	8,81
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,49	1,9	2,02	1,64	2,33	1,2	1,4
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,41	0,55	0,63	0,44	0,78	0,28	0,24
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	543.442	569.449	610.858	626.492	659.136	714.241	753.332

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur

Tingkat kemiskinan Kutai Timur tahun 2023 merupakan yang tertinggi keempat di Kalimantan Timur. Indeks P1 di Kutai Timur tahun 2023 adalah 1,2; tertinggi kedua setelah Kutai Barat dan Indeks P2 adalah 0,28; tertinggi di Kalimantan Timur. Dengan demikian Kutai Timur menghadapi permasalahan dan tantangan yang relatif lebih berat dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur yaitu bagaimana agar penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan serta Upaya mengurangi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tersebut.

Di tahun 2024 tingkat kemiskinan Kutai Timur menunjukkan penurunan namun justru menjadi tertinggi ketiga se-Kalimantan Timur. Meskipun tingkat kemiskinan di Kutai Timur menurun, namun daerah lain juga menunjukkan penurunan. Indeks P2 yang di tahun 2023 menempati urutan pertama, di tahun 2024 menjadi urutan kedua akibat meningkatnya Indeks P2 Mahakam Ulu.

Tabel 2.22 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur		Kalimantan Timur	
	Tingkat Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)	Tingkat Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)
2020	9,55	610.858	6,10	662.302
2021	9,81	626.492	6,54	689.035
2022	9,28	659.136	6,31	728.208
2023	9,06	714.241	6,11	790.186
2024	8,81	753.332	5,78	833.955

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

1.1.2.1.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Selain kemiskinan, faktor ketimpangan distribusi pendapatan adalah hal penting kaitannya dengan kesejahteraan Masyarakat. Jika ketimpangan menggambarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok, maka ketimpangan menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima antar penduduk. Pendapatan per kapita yang tinggi disertai dengan ketimpangan yang rendah adalah dua hal yang menjadi tujuan utama setiap daerah. Sering kali pendapatan per kapita yang tinggi diikuti pula dengan Tingkat ketimpangan yang tinggi.

Salah satu ukuran yang menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan adalah gini ratio, semakin tinggi nilainya semakin timpang distribusi pendapatan. Nilai gini ratio Kutai Timur tahun 2024 adalah 0,283; dan angka ini adalah yang tertinggi keempat di Kalimantan Timur. Gini ratio Kutai Timur 2024 ini turun cukup tinggi dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 0,336. Di tahun 2024 Pemerintah daerah berhasil menurunkan Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan padahal di tahun 2023 gini rasio Kutai Timur masih yang tertinggi se-Kalimantan Timur. Ketimpangan 2024 di Kutai Timur ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur yang besarnya 0,310. Ketimpangan berkaitan antara lain dengan kemampuan masyarakat terhadap akses ekonomi yang tidak sama. Untuk itu perlu kebijakan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan terciptanya kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya di Kutai Timur termasuk akses terhadap sumber daya keuangan.

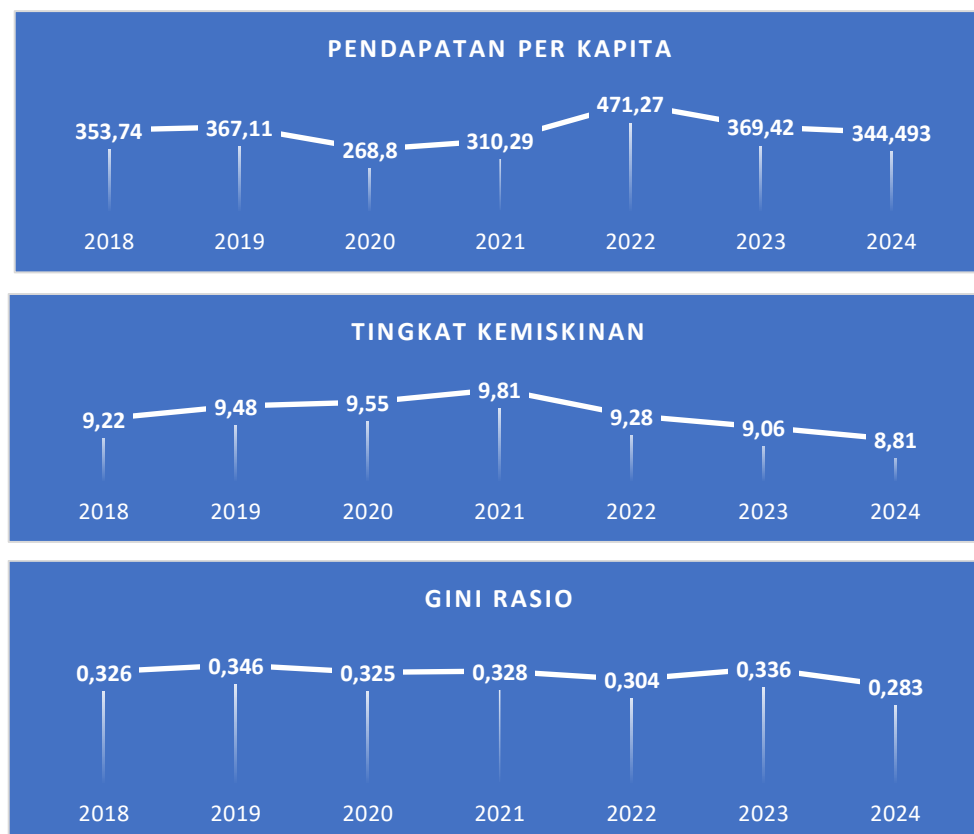
Bila diperbandingkan dengan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan, terlihat antara tingkat ketimpangan, tingkat kemiskinan, dan pendapatan per kapita ketiganya tidak menunjukkan relevansi yang kuat. Saat pendapatan per kapita turun misalnya, kemiskinan juga turun. Hal ini mengindikasikan bahwa akar masalah ketiganya adalah berbeda sehingga memerlukan *treatment* yang berbeda sesuai dengan akar masalahnya. Kenaikan pendapatan per kapita misalnya, tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan serta penurunan gini ratio.

Tabel 2.23 Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	0,325	0,328
2021	0,328	0,334
2022	0,304	0,327
2023	0,336	0,322
2024	0,283	0,321

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Gambar 2.14 Hubungan Pendapatan Per Kapita, Gini Ratio, dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024



2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menggambarkan Pembangunan sumber daya manusia di bidang Pendidikan, Kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi. Nilai IPM Kutai Timur 2024 sebesar 75,53 dan nilai ini peringkat ke-6 se Kalimantan Timur. Nilai IPM Kutai Timur masih lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kab/kota di Kalimantan Timur (76,92) dan jauh di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur (78,83). Nilai IPM Kutai Timur ini relatif kecil bila dibandingkan dengan besarnya PDRB, APBD, atau pendapatan per kapita.

Komponen UHH tahun 2024 sebesar 73,75 menduduki peringkat ke-4 se Kalimantan Timur dan masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Timur (75,03). Komponen UHH ini menggambarkan lamanya harapan hidup Masyarakat dari sisi Kesehatan. Peningkatan UHH perlu dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan.

Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	73	76,24
2021	73,81	76,88
2022	74,35	77,44
2023	74,98	78,2
2024	75,53	78,83

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

2.1.2.1.6 Pengeluaran Per Kapita Masyarakat

Di sisi pengeluaran per kapita per bulan, rata-rata pengeluaran Masyarakat per bulan untuk komoditas makanan adalah 999.528 per kapita per bulan sedangkan untuk non makanan sebesar 1.164.271. Rata-rata konsumsi Masyarakat per kapita per bulan adalah 2.163.799. Dengan demikian konsumsi non makanan lebih besar dibandingkan konsumsi makanan. Konsumsi makanan terbesar adalah untuk komoditas makanan dan minuman jadi, terutama untuk kelompok Masyarakat 20% teratas. Untuk konsumsi non makanan yang terbesar adalah pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri.

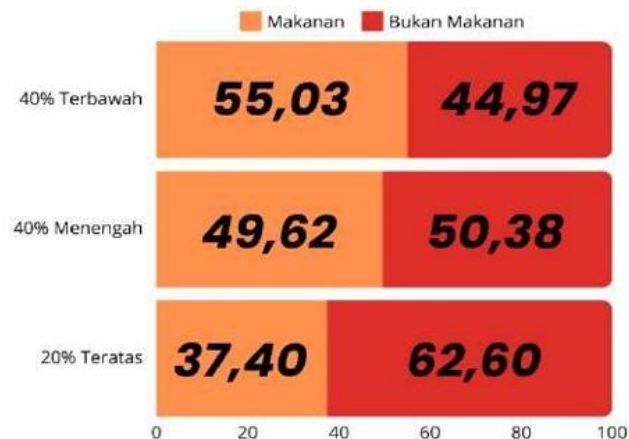
**Tabel 2.25 Pola Pengeluaran Per Kapita Masyarakat (Rp/bulan)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024**

Komoditas	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	Total Rata-rata Pengeluaran
1. Padi-padian	100.343	110.222	118.616	107.945
2. Umbi-umbian	4.959	9.771	10.422	7.973
3. Ikan/Udang/Cumi/Kerang	70.861	110.289	175.004	107.462
4. Daging	37.533	60.350	89.093	56.967
5. Telur dan Susu	33.942	47.826	80.528	48.819
6. Sayur-sayuran	55.310	75.186	99.769	72.148
7. Kacang-kacangan	13.059	15.997	25.073	16.639
8. Buah-buahan	27.980	59.631	125.425	60.139
9. Minyak dan Kelapa	15.347	19.876	28.141	19.718
10. Bahan Minuman	23.138	28.909	35.845	27.986
11. Bumbu-bumbuan	16.202	23.074	33.665	22.443
12. Bahan Makanan Lainnya	17.691	23.381	27.274	21.881
13. Makanan dan minuman jadi	159.755	298.585	513.906	286.114
14. Rokok dan Tembakau	103.749	165.730	177.763	143.293
Jumlah Makanan	679.869	1.048.828	1.540.524	999.528
15. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	357.504	602.229	1.110.632	606.091
16. Aneka Barang dan Jasa	116.930	229.919	575.924	254.023
17. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	20.613	47.740	91.554	45.652
18. Barang Tahan Lama	15.844	44.628	475.124	119.442
19. Pajak, Pungutan, dan Asuransi	43.041	103.569	187.591	96.155
20. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	1.558	NA	137.517	42.907
Jumlah Bukan Makanan	555.490	1.064.969	2.578.342	1.164.271

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur, 2024

Bila diperbandingkan antar kelompok Masyarakat, mereka yang masuk dalam kelompok 40% terbawah Sebagian besar pengeluaran adalah untuk makanan (55,03%) dibanding untuk non makanan (44,97%). Hal ini berbeda dengan Masyarakat yang masuk dalam kelompok 20% teratas; pengeluaran untuk makanan hanya 37,40% sementara untuk non makanan sebesar 62,60%. Hal ini berarti semakin Sejahtera Masyarakat pengeluaran untuk non makanan semakin besar.

Gambar 2.15 Proporsi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur



2.1.2.1.7 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan Pembangunan ekonomi yang diikuti dengan terjadinya penurunan Tingkat pengangguran, Tingkat kemiskinan, ketimpangan, termasuk peningkatan inklusivitas infrastruktur dan keuangan. Pembangunan ekonomi inklusif ini diukur dengan suatu indeks yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

- Indeks memiliki 3 pilar:

1) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

- Sub Pilar:

- Pertumbuhan Ekonomi
- Kesempatan Kerja
- Infrastruktur Ekonomi

2) Pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan

- Sub Pilar:

- Ketimpangan
- Kemiskinan

3) Perluasan akses dan kesempatan

- Sub Pilar:

- Kapabilitas Manusia
- Infrastruktur Dasar
- Keuangan Inklusif

Semakin tinggi nilai IPEI semakin tinggi pula derajat inklusivitas Pembangunan ekonomi. Nilai IPEI Kutai Timur sepanjang 2016-2021 menunjukkan tren kenaikan. Nilai IPEI sempat turun di tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid namun di tahun 2021 kembali naik. Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, nilai IPEI Kutai Timur ini adalah yang terkecil kedua setelah Mahakam Ulu. Hal ini menunjukkan hingga 2021 pembangunan ekonomi yang terjadi belum secara optimal mampu mendorong terciptanya pengurangan ketimpangan dan kemiskinan, serta peningkatan akses dan kesempatan. Data IPEI yang dikeluarkan Bappenas untuk level kabupaten/kota hanya tersedia hingga 2021.

Tabel 2.26 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2016	4,83	5,85
2017	5,03	6,04
2018	5,04	5,95
2019	5,23	6,22
2020	5,04	5,77
2021	5,18	6,24

Sumber: Bappenas RI

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan penduduk salah satunya dapat dilihat dari lamanya Usia Harapan Hidup (UHH). Lamanya UHH menunjukkan kualitas atau derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian UHH menggambarkan lamanya harapan hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat sedang derajat kesehatan masyarakat sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. UHH Kutai Timur tahun 2024 mencapai 73,75 tahun. Angka ini menduduki peringkat ke-4 se Kalimantan Timur namun masih lebih kecil dibandingkan UHH Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 75,03 tahun. Selama 2020-2024 posisi nilai UHH Kutai Timur tidak berubah yaitu tertinggi keempat se Kalimantan Timur.

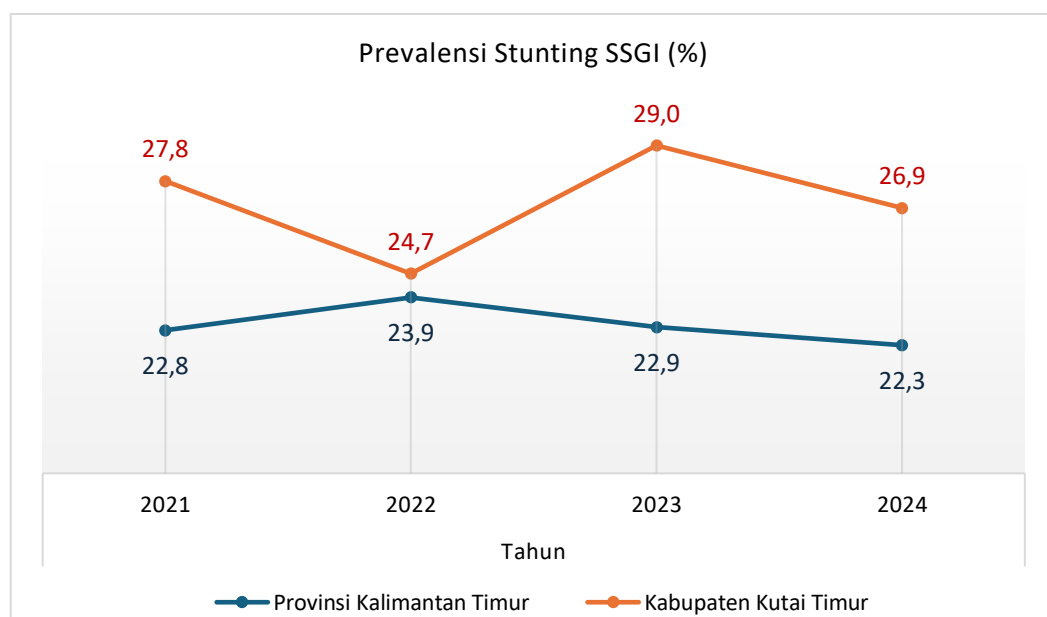
Tabel 2.27 Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 (Tahun)

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	73,16	74,33
2021	73,46	74,61
2022	73,47	74,62
2023	73,57	74,72
2024	73,75	75,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Aspek kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan sejak dini adalah terkait dengan stunting. Stunting merupakan salah satu bentuk masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu lama atau karena terjadinya infeksi secara berulang, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, tingkat produktivitas di masa depan, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa. Oleh karena itu, stunting menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa.

Gambar 2.16 Angka Stunting Tahun 2021-2024 (%)



Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan

Angka stunting di Kabupaten Kutai Timur selama 2021-2024 terlihat cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2022 sempat terjadi penurunan -3,1% dari 27,8% menjadi 24,7%. Namun, di tahun 2023 mengalami kenaikan +4,3% menjadi 29,0% disaat prevalensi stunting di tingkat Provinsi Kalimantan Timur mengalami sedikit penurunan. Tahun 2024 prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur mulai kembali mengalami penurunan -2,1% menjadi 26,9%; tertinggi ketiga setelah Kabupaten Penajam Paser Utara (32,0%) dan Kabupaten Kutai Barat (27,6%).

Kondisi kesehatan keluarga secara umum dapat dilihat dari nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator. Keduabelas indikator yang menjadi ukuran dari IKS adalah sebagai berikut:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

Tidak semata membatasi jumlah anak dalam keluarga, program KB juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat ASI yang cukup dan pola asuh yang optimal sehingga bisa menjadi anak yang sehat dan cerdas. Selain itu, program KB juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga dapat menjaga kesejahteraan keluarga.

2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang memadai akan mendukung proses persalinan yang aman dan minim risiko komplikasi kehamilan. Setelah melahirkan, ibu juga akan memiliki tempat untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya secara berkala. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan ibu dan anak jadi lebih terjamin.

3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

Imunisasi anak sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyakit yang bisa berakibat fatal seperti polio, campak, dan difteri. Untuk mendapatkan imunisasi wajib, keluarga bisa membawa anak ke posyandu, puskesmas, rumah sakit, maupun fasilitas medis lain yang menyediakannya.

4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

Keunggulan air susu ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi bayi memang sudah tidak diragukan lagi. ASI dapat melindungi bayi dari beragam penyakit serta mendukung perkembangan tubuh dan otaknya secara optimal, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Itulah sebabnya pemberian ASI eksklusif sangat berperan besar untuk membentuk keluarga sehat.

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Berat badan bayi perlu ditimbang setiap bulannya, sejak lahir sampai usia 5 tahun. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya, serta mendeteksi secara dini bilamana terdapat gangguan pada pertumbuhannya.

6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang dapat menurunkan kualitas hidup seseorang dan keluarganya. Tuberkulosis yang tidak ditangani dengan benar berisiko menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah dan penularan ke orang-orang terdekat. Maka dari itu, bila terdapat anggota keluarga yang mengalami gejala tuberkulosis, segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan.

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering terabaikan karena sering kali tidak memiliki gejala. Meski begitu, dampak yang terjadi akibat hipertensi bisa fatal, mulai dari serangan jantung hingga stroke. Oleh karena itu, bila terdapat anggota keluarga yang menderita hipertensi, ingatkan ia agar selalu menerapkan gaya hidup sehat, meminum obat secara teratur sesuai rekomendasi dokter, serta melakukan kontrol teratur.

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

Gangguan jiwa tidak hanya dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan, tapi juga keluarga penderitanya. Namun, sebenarnya hal ini dapat dicegah bila ditangani dengan baik dan sedini mungkin. Bila ada anggota keluarga yang memiliki tanda-tanda gangguan jiwa, seperti perubahan emosi atau perilaku, dampingi dan ajak dia untuk berobat ke psikiater guna mendapatkan penanganan yang tepat.

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Sudah kita ketahui bersama bahwa asap rokok mengandung banyak zat beracun bagi tubuh. Meskipun hanya satu orang yang merokok di rumah, asapnya bisa dihirup anggota keluarga lain dan membuat mereka menjadi perokok pasif.

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dengan menjadi anggota program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi finansial keluarga dapat tetap terjaga walau sedang membutuhkan biaya berobat.

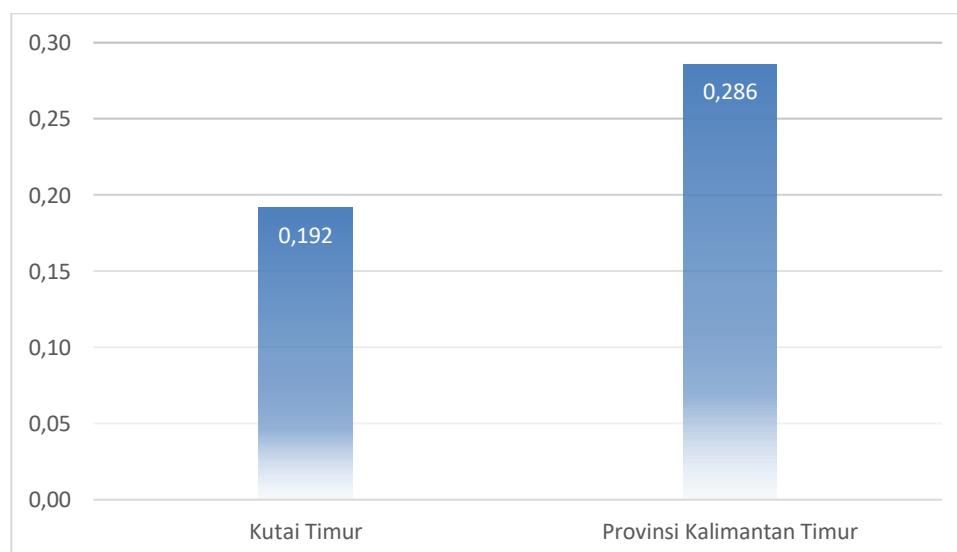
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

Sarana air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga dari berbagai penyakit infeksi. Untuk mewujudkan hal ini, pastikan sumber air yang dipakai di rumah tidak tergenang atau tercemar dengan berbagai kotoran maupun polutan.

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Memiliki akses sanitasi layak dan jamban sehat juga termasuk indikator penting dalam mewujudkan keluarga sehat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang disebabkan oleh buang air besar sembarangan, seperti tifus, cacingan, diare, atau disentri.

Gambar 2.17 Indeks Keluarga Sehat 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2024

IKS mencerminkan proporsi keluarga yang sehat di suatu wilayah dibandingkan dengan total jumlah keluarga yang ada. Nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1, dimana Keluarga Sehat jika nilai IKS $> 0,8$, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS $0,5 - 0,8$ dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS $< 0,5$.

Capaian IKS Kutai Timur tahun 2023 hanya 0,192 dan Provinsi Kalimantan Timur pada sebesar 0,286. Hal ini berarti termasuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat".

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

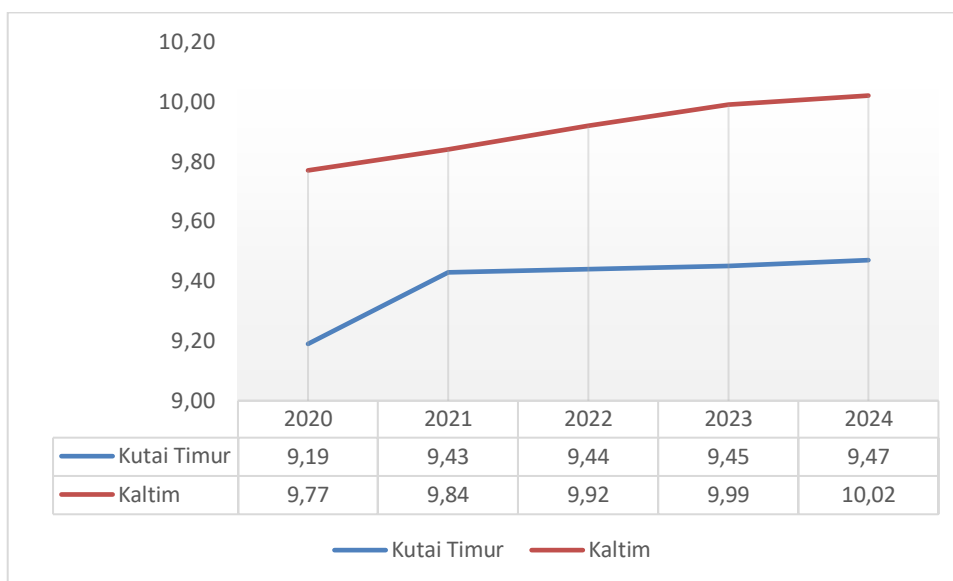
Pendidikan berkualitas yang merata ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta jaminan akses yang setara bagi semua anak bangsa. Hal ini mencakup upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan partisipasi sekolah, hingga memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat menempuh pendidikan tanpa hambatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas dan aksesibilitas pendidikan di suatu negara.

Di samping kesehatan, pendidikan juga menjadi faktor penting kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan penting untuk dikelola sejak dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi, meski kewajiban pemerintah kabupaten dibatasi hingga sekolah menengah pertama (SMP) sementara untuk SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam hal pendidikan sarana dan prasarana sekolah perlu mendapatkan perhatian, termasuk di dalamnya kebutuhan guru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan sehingga berdampak pada dua hal yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Semakin tinggi angka RLS dan HLS menunjukkan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan.

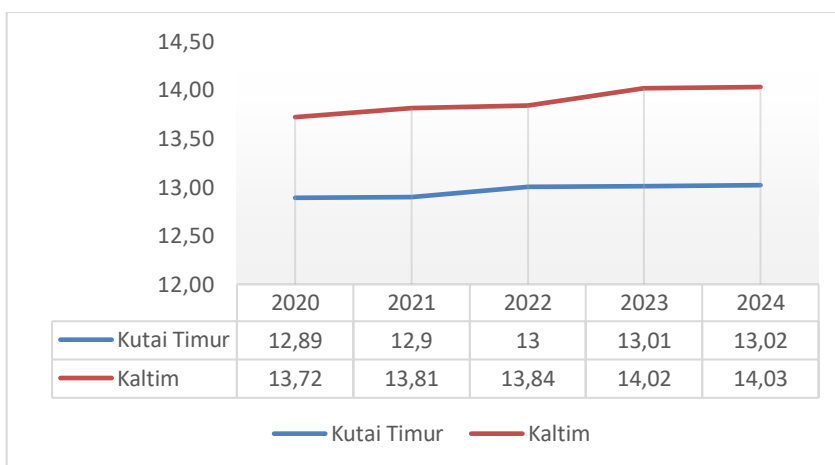
Gambar 2.18 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Nilai RLS di Kutai Timur masih berada di bawah RLS Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejalan dengan pembangunan sekolah baru dan rekrutmen tenaga Pendidikan di wilayah terpencil.

Gambar 2.19 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024



Nilai HLS di Kutai Timur masih berada di bawah rata-rata HLS Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejalan dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan, peningkatan kualitas pengajar/guru, pemberian bantuan dana pendidikan, hingga menanamkan pentingnya pendidikan untuk investasi di masa depan kepada masyarakat.

Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 311 Tahun 2022 bahwa kemampuan literasi dan numerasi adalah rerata kemampuan literasi dan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan *assessment* nasional dan rata-rata kompetensi literasi dan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di rapor pendidikan berdasarkan *assessment* nasional. Literasi dan numerasi merupakan pondasi utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Literasi tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengolah informasi, serta berpikir kritis terhadap berbagai bacaan. Sementara itu, numerasi merupakan kemampuan menggunakan konsep matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua aspek ini menjadi indikator penting untuk menilai mutu pendidikan di sekolah.

Tabel 2.28 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2024

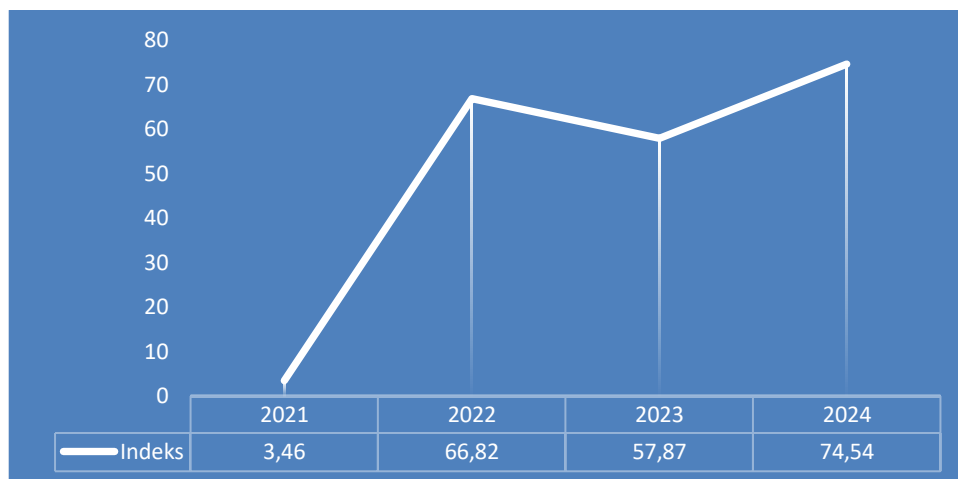
No	Indikator	Satuan	Capaian	
			2023	2024
1	Rerata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	65,87	71,76
2	Rerata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,71	65,84
3	Rerata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	73,10	78,65
4	Rerata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	67,39	72,85

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kutai Timur, 2025.

Aspek pendidikan yang juga penting adalah pembangunan literasi masyarakat. Perkembangan pembangunan literasi masyarakat diwujudkan melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) untuk mengukur usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dalam indeks ini terdapat 7 (tujuh) unsur Pembangunan literasi yang dijadikan sebagai pengukuran, yaitu : Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan Anggota perpustakaan.

Nilai IPLM Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan aksesibilitas perpustakaan hingga di tingkat desa serta pemenuhan koleksi buku bacaan di perpustakaan.

Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

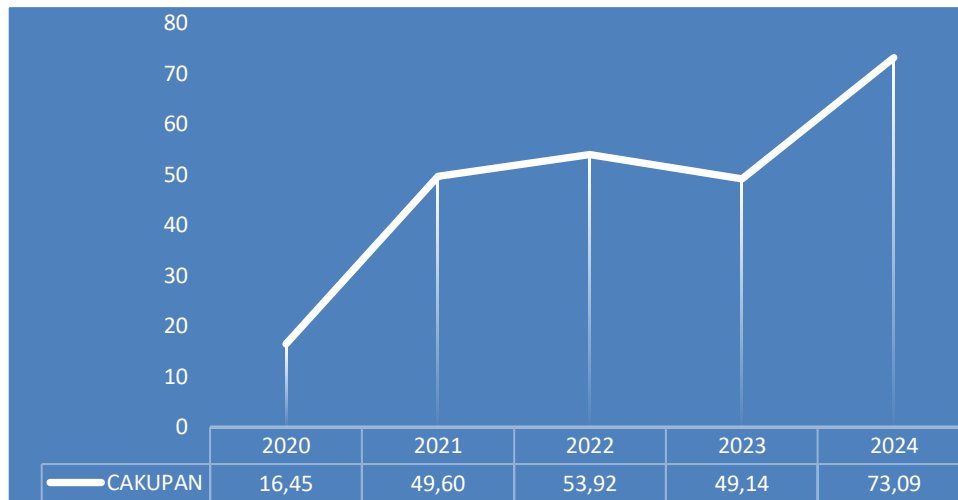
Perlindungan sosial menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan jaminan sosial pada masyarakat dalam bentuk jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Jaminan sosial kesehatan merupakan salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dasar bagi seluruh warga masyarakat. Program ini hadir untuk menjamin setiap orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya tinggi. Dengan adanya jaminan sosial kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih merata, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan produktif.

Selain jaminan sosial Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pada pekerja rentan. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen penting

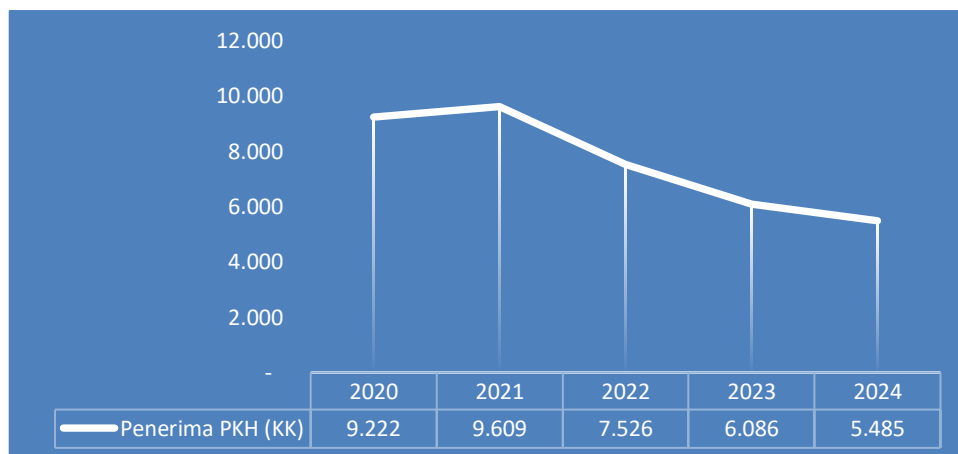
untuk melindungi pekerja dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat terjadi selama masa kerja maupun setelah pensiun. Program ini dirancang untuk memberikan rasa aman, kepastian, serta perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif.

Gambar 2.21 Gambaran Cakupan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia. PKH ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu. Seiring dengan menurunnya angka kemiskinan daerah, bantuan masyarakat miskin dalam bentuk program keluarga harapan (PKH) setiap tahun mengalami penurunan.

Gambar 2.22 Gambaran Cakupan Penerima (KK) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kebudayaan merupakan identitas dan jati diri bangsa yang tumbuh dari kearifan lokal serta diwariskan secara turun-temurun. Di tingkat daerah, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan yang patut dijaga, tetapi juga aset strategis yang dapat dikembangkan untuk memperkuat karakter masyarakat, mempererat persatuan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor kreatif dan pariwisata.

Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur diwujudkan dalam bentuk pelestarian tradisi, seni, bahasa, adat istiadat, hingga peninggalan sejarah yang bernilai tinggi.

Tabel 2.29 Jumlah Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kutai Timur

NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
1	Tulang manusia Liang Jon Tulang Manusia Kebobo	Liang Jon 2003-2006	3 Box Plastik Besar 3 Box Plastik Kecil	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
		Liang Kebobo 2006- 2007		
2	Sejumlah Tulang Binatang	Liang Jon 2003-2006	1 Box plastik besar	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
3	Temuan Gerabah	Goa-Goa Marang 1998 - 2007	1 Box plastik besar	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
		Goa-Goa Perondongan 1997-1998		
		Goa-Goa Pengadaan 1994-1995		
4	flakes Posteriori	Goa-Goa Marang 1998-2007	2 Box plastik besar	Dilestarikan (berada di Ga leri Kab.Kutai Timur)
		Goa-Goa Perondongan 1997-1998		
		Goa-Goa Pengadaan 1994-1995		
S	Temuan Lain	Goa-Goa Marang 1998-2007	1 Box besar	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
		Goa-Goa Perondongan 1997-1998		
		Goa-Goa Pengadaan 1994-1995		
6	Temuan Cangkang	Gaa-Goa Marang 1998-2007	4 Kardus	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
		Goa-Goa Perondongan 1997-1998		
		Goa-Goa Pengadaan 1994-1995		



NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
7	Gerabah	JON	2484	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
8	Gerabah	Keboboh	2329	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
9	Gerabah	Gudang Pecah	549	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
10	Gerabah	Abu	490	Dilestarikan (berada di Galen Kab.Kutai Timur)
11	Gerabah	Pecah Seribu	471	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
12	Gerabah	Batu Aji	410	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
13	Gerabah	Tengkorak	349	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
14	Gerabah	Tamrin	283	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
15	Gerabah	Ara Raya	244	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
16	Gerabah	Kairim	225	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
17	Gerabah	Ind	224	Oilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
18	Gerabah	Ilas Kecil	200	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
19	Gerabah	Ilas Madu	148	Diilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
20	Gerabah	Palangiran	146	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
21	Gerabah	Beloyot	81	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
22	Gerabah	Tewet	76	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
23	Gerabah	tebok	72	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
24	Gerabah	Unak	70	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.KMtai Timur)
25	Gerabah	Alan Bilan	41	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
26	Gerabah	Kamun	20	Dilestarikan tberada di Galeri Kab.Kutai Timur)
27	Gerabah	Lungun	19	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)



NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
28	Gerabah	Masri	12	Dilestarikan (berada di Galera Kab.Kutai Timur)
29	Gerabah	Akar Tebas	9	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
3D	Gerabah	Ampir Kosong	3	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
31	Gerabah	Jon	2484	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
32	Batu Gosok	Liang Jon	3	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
33	Pecahan Xampak Gosok	Liang Jon	1	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
34	Flakes Posteriori	Liang Jon	7	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
35	Tulang Monyet	Liang Jon	8 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
36	Gigi Beruang	Liang Jon	1 Gigi	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
37	Tanduk Kijang	Liang Jon	1 Tanduk	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
38	Tengkorak Kijang	Liang jon	1 Tengkorak	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
39	Industri Tulang	Liang Jon	4 Mikro Tulang	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
40	Tengkorak OS Frontale	Liang Jon	2 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
41	Alat untuk gambar	Goa Tebok Atas	10 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
42	Tanduk Kijang	Liang Jon	1	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
43	Manik-Manik Kauri	Liang Jon	30 Besar, 21 Sedang dan 103 Kecil	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
44	TA (3,5-4,6)	Liang Jon	8 Buah	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
45	Liang Jon 05/07	Liang Jon	4 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
46	Shell LJon 07	Liang Jon	2 set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
47	Mikro Manik	Liang Jon	4 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
48	Bowi Remontage	Goa Unak	1	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)



NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
49	Pegangan Satwa	Goa Unak	1	Dilestarikan (berada di Galeri Xab.Xutai Timur)
50	Wadah	Beragam	5	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
51	Pecahan gerabah	Goa Keboboh	12	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
S2	Pecahan gerabah	Goa Keboboh	7	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
S3	Pecahan Porselen	Goa Keboboh	2 Set	Dilestarikan [berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
54	Kerang	Goa Keboboh	1	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
55	Pecahan Gerabah	Liang Karim	1	Oilestarikan [berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
5G	PetahanGerabah	Liang Karim	19	Dilestarikan (berada di Galeri Kaü.Kutai Timur)
57	Pecahan Gerabah		4	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
58	Pecahan Gerabah		15	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
59	Goa Angin	Kongbeng Indah	1	Belum Dilestarikan
60	Fragmen Arca 1	Kongbeng Indah	1	Belum Dilestarikan
61	Fragmen Area 11	Kongbeng Indah	1	Belum Dilestarikan
62	Mesin Uap	Spaso Induk	1	Belum Dilestarikan
91	Rumah Camat	Kelinjau Ilir	1	Belum Dilestarikan
92	Lamin Datun	Kelinjau Ilir	1	Belum Dilestarikan
93	Rumah Peninggalan Belanda 1	Kelinjau Ilir	1	Belum Dilestarikan
94	Rumah Peninggalan Belanda 2	Kelinjau Ilir	1	Belum Dilestarikan
95	Rumah Peninggalan Belanda 3	Kelinjau Ilir	1	Belum Dilestarikan
96	Rumah Peninggalan Belanda	Benua Baru Ulu	1	Belum Dilestarikan
97	Situs Goa Angin	Juk Ayaq	1	Belum Dilestarikan
98	Makam Habib Hasan Al-Idrus(Habib Alam)		1	Belum Dilestarikan
99	Kawasan Karts Sangkulirang Mangaliat		1	Di Lestarikan (berada di Karst Sangkulirang)

NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
100	Tempayan	Liang Karim	1	Di Lestarikan (berada di Sangkulirang)
101	Kendi	Situs Keboboh	1	Di Lestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
102	Periuk	Situs Liang Jhon	1	Di Lestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
103	Mangkuk	Gua Unak	1	Di Lestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
104	Liang Jhon	Situs	1	Di Lestarikan (berada di Tepian Langsung Kec.Bengalon)
105	Gua Keboboh	Situs	1	Di Lestarikan (berada di Tepian Langsung Kec.Bengalon)
106	Liang Karim	Situs	1	Di Lestarikan (berada di Tepian Langsung Kec.Bengalon)

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kutai Timur, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

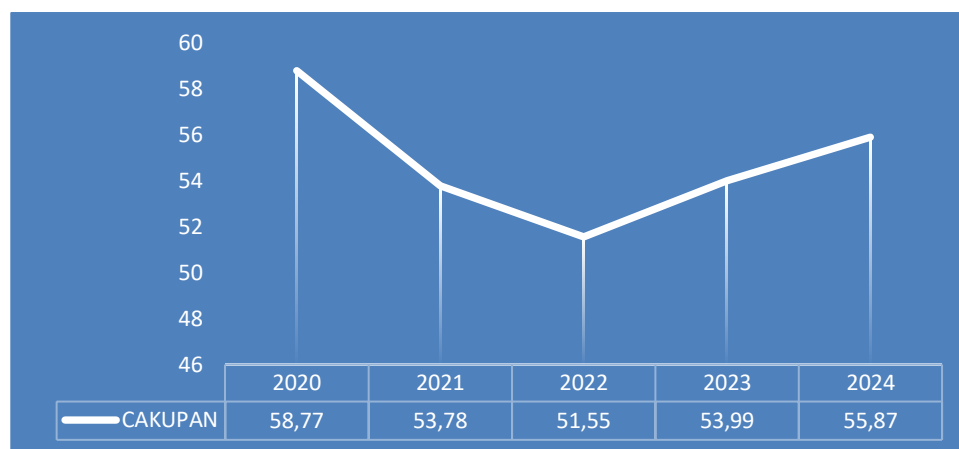
Pembangunan keluarga adalah upaya terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, mandiri, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pembangunan keluarga mencakup 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Gambar 2.23 Gambaran Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Pemberdayaan gender merupakan proses meningkatkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan, berpartisipasi, dan menikmati hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi. Untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan gender dapat digambarkan melalui pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

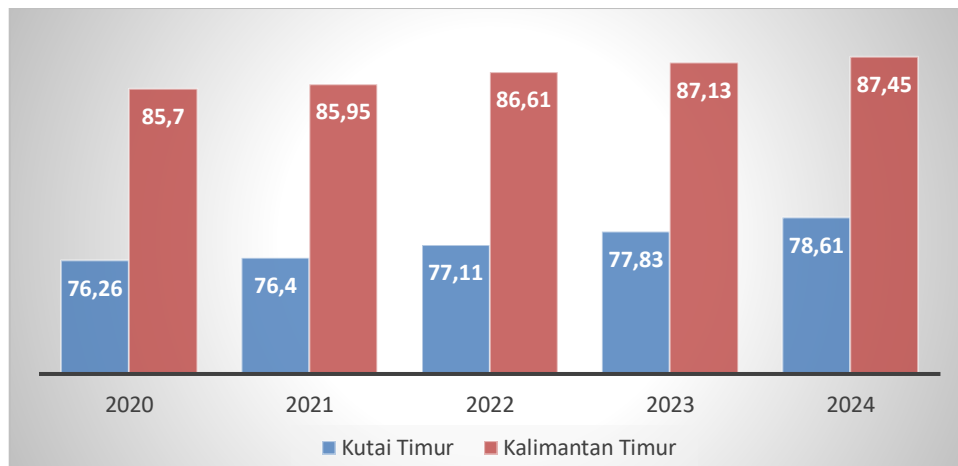
Gambar 2.24 Gambaran Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Pembangunan gender adalah upaya terencana dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang kehidupan, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Tujuannya bukan hanya memberi peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga memastikan keduanya dapat berpartisipasi aktif, memiliki akses setara terhadap sumber daya, serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan. Dengan pembangunan gender, diharapkan tercipta masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing, karena setiap individu—tanpa membedakan jenis kelamin—dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa. Untuk mengukur pembangunan gender dapat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Peningkatan IPG menjadi penting karena kesetaraan gender berkontribusi langsung pada kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta daya saing bangsa. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kebijakan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan,

serta peningkatan akses perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mempercepat pencapaian pembangunan yang adil dan inklusif.

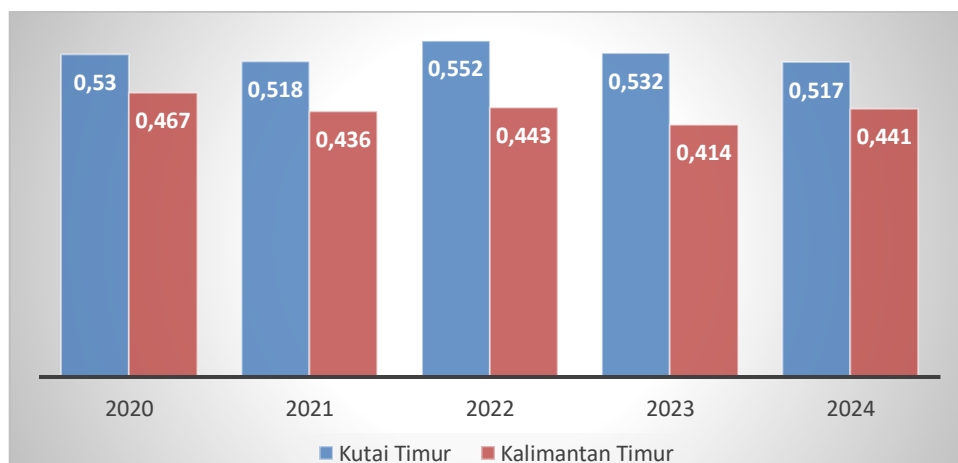
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IKG yang semakin kecil mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan gender semakin membaik. Penurunan IKG dilakukan dengan memperkuat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang.

Gambar 2.26 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

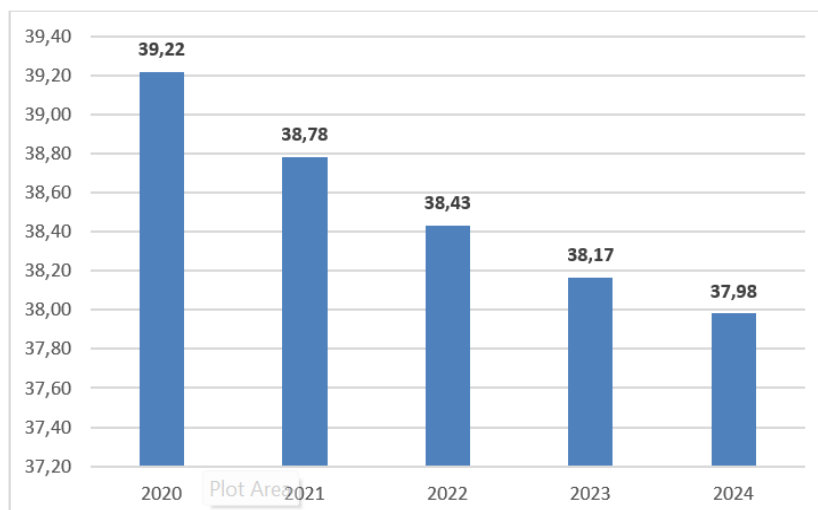
Daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah besarnya angka ketergantungan atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dan tingkat pendidikan penduduk. Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara penduduk bukan usia produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan Kutai Timur tahun 2024 mencapai 37,99%; angka ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 38 penduduk bukan usia produktif. Rasio ketergantungan perempuan (39,55%) lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki (36,66%).

Tabel 2.30 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur 2024

Usia	Jumlah			Dependency Ratio		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0-14	56.740	53.670	110.410	36,66	39,55	37,99
15-64	181.490	154.050	335.540			
65+	9.800	7.250	17.050			
Total	248.030	214.970	463.000			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur, diolah

Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: SP2020 BPS Kabupaten Kutai Timur

Selama periode 2020-2024 rasio ketergantungan Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren yang menurun setiap tahun. Tahun 2020 rasio ketergantungan

sebesar 39,22% dan di tahun 2020 turun menjadi 37,98%. Penurunan tersebut disebabkan karena pertumbuhan penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk bukan usia produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Pertumbuhan penduduk usia produktif ini perlu diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja agar mampu menekan angka pengangguran.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Perekonomian Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Kutai Timur terus berupaya dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi sehingga terjadi transformasi ekonomi sehingga tidak tergantung pada sektor pertambangan. Salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi antara lain terlihat dari peran rasio PDRB sektor industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum, serta pertanian. Proporsi sektor industri pengolahan selama 2020-2024 meski berfluktuasi namun terlihat menunjukkan tren peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertanian yang menunjukkan proporsi peningkatan meskipun berfluktuasi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa peran industri pengolahan yang berbasis sektor pertanian mengalami peningkatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi mendorong semakin besarnya kontribusi sektor industri pengolahan. Dari sisi sektor akomodasi dan makan minum selama 2020-2024 juga menunjukkan proporsi yang meningkat sehingga inovasi dan dinamika di bidang perekonomian mendorong peningkatan peran sektor akomodasi dan makan minum.

Tabel 2.31 Produktivitas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Adhb (Juta Rp)	115.555.662	136.617.573	211.101.484	168.271.524	159.497.231
Tenaga Kerja (Orang)	182.916	206.502	190.015	216.253	223.226
Produktivitas (Juta Rp)	631,742	661,580	1.110,973	778,123	714,510
Pertumbuhan Produktivitas Daerah (%)	-16,13	4,72	67,93	-29,96	-8,18

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, diolah

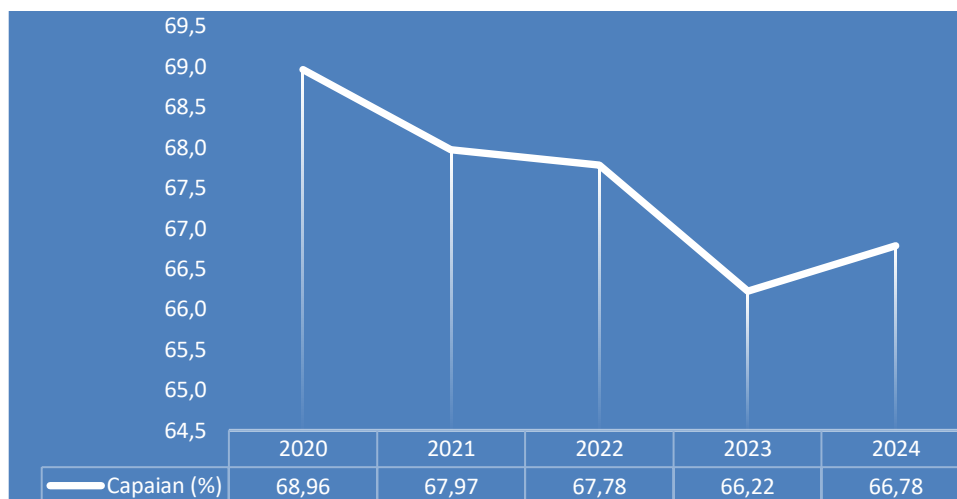
Tabel 2.32 Rasio Sektor Industri Pengolahan, Sektor Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024 (%)

Rasio PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Proporsi 2018-2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	2,98	2,93	3,55	3,38	2,55	3,22	4,34	3,28
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,24	0,28	0,27	0,19	0,27	0,31	0,25
Rasio Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,69	7,69	9,12	8,32	5,90	7,60	8,80	7,87

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, diolah

Peran tenaga kerja dalam mendukung ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi merupakan faktor penting. Inovasi dan teknologi memerlukan dukungan tenaga kerja yang berkualitas, oleh karena itu suplai tenaga kerja adalah faktor yang berpengaruh terhadap berkembangnya tenaga kerja yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut indikator yang perlu diperhatikan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu rasio antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

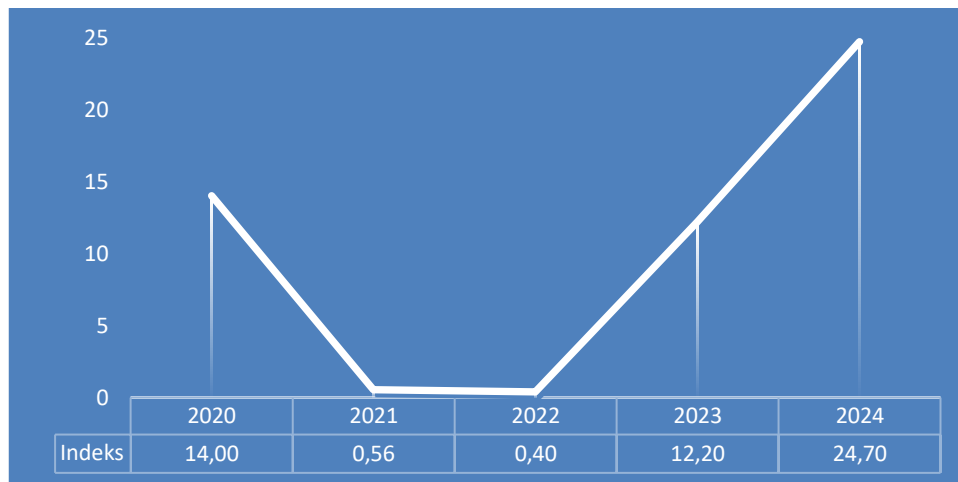
Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Inovasi yang terjadi di daerah dapat diukur dengan Indeks Inovasi Daerah (IID). Indeks ini mengukur berbagai inovasi yang dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal inovasi, Kabupaten Kutai Timur masih memiliki skor yang rendah yaitu 24,7 atau masuk dalam kategori “Kurang Inovatif”. Nilai ini adalah peringkat ke 3 terendah di

Kalimantan Timur. Salah satu tantangan inovasi adalah ketersediaan infrastruktur pendukung yang didukung dengan teknologi informasi.

Gambar 2.29 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Bentuk inovasi daerah dalam indeks ini adalah: 1). Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, *e-monitoring*, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya; 2). Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan 3). Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat, dan lain sebagainya.

2.1.3.3 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Dengan kata lain aktivitas Masyarakat dalam berbagai bidang telah menggunakan perangkat atau platform digital. Penggunaan media digital seperti HP, komputer, serta internet dalam keseharian Masyarakat di berbagai bidang menjadi salah satu faktor untuk mendukung percepatan transformasi digital.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pengembangan transformasi digital dalam menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik, peyehatan investasi dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan. Hingga tahun 2024, beberapa platfrom digital telah diaplikasikan, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.33 Aplikasi Digital Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

No.	Aplikasi Digital	Pemanfaatan
1.	Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)	Penyajian Data Spasial Daerah
2.	E-Kinerja (E-Kin)	Pelaporan Kinerja & Kedisiplinan Pegawai
3.	SP4N Lapor	Kanal Aduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
4.	Portal Satu Data Kutai Timur	Pengelolaan Data Sektoral Kinerja Perangkat Daerah
5.	Sistem Informasi & Manajemen Kemiskinan	Pelaporan, Monitoring & Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
6.	Elektronik Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (e-SPTPD)	Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah
7.	Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kependudukan Warga Ku Layani (SIAP KAWAL)	Pelayanan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil.

No.	Aplikasi Digital	Pemanfaatan
8.	Sistem Layanan Cepat Tanggap (SIGAP)	Pelayanan Pelaporan Kejadian Kebakaran di Permukiman Masyarakat
9.	Sistem Cerdas Pengadaan Terpadu (SICEPAT)	Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
10.	E-Harga Kutim	Pengajuan Standarisasi Harga Barang & Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Sumber: DISKOMINFOSTAPER Kabupaten Kutai Timur, 2024

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global menunjukkan keterkaitan ekonomi dalam mendukung rantai pasok global melalui investasi serta kegiatan ekspor impor. Berdasarkan struktur PDRB menurut pengeluaran faktor pembentuk PDRB Kutai Timur yang paling utama adalah ekspor neto yaitu selisih nilai ekspor dengan nilai impor, khususnya ekspor sektor pertambangan. Proporsi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Kutai Timur selama 2020-2024 menunjukkan tren yang meningkat cukup tajam dari 18,65% di tahun 2019 menjadi 23,43% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan semakin besarnya aktivitas investasi di Kutai Timur dan semakin besarnya peran investasi dalam struktur PDRB. Dari sisi ekspor neto selama 2020-2024 berfluktuasi namun menunjukkan tren penurunan dari 71,73% di tahun 2020 menjadi 66,44% di tahun 2024. Diversifikasi ekspor perlu dipertimbangkan berdasarkan produk unggulan daerah sehingga ketergantungan terhadap ekspor pertambangan semakin berkurang.

Tabel 2.34 Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur Menurut Pengeluaran (%)

Komponen PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	7,17	6,26	4,45	6,06	6,78
Pengeluaran konsumsi LNPRRT	0,28	0,25	0,16	0,23	0,28
Pengeluaran konsumsi Pemerintah	2,03	1,71	1,38	2,51	2,98

Komponen PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
PMTB	18,65	19,10	13,92	20,13	23,43
Perubahan inventori	0,15	0,04	0,04	0,06	0,10
Ekspor Neto	71,73	72,64	80,05	71,00	66,44
PDRB MENURUT PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur

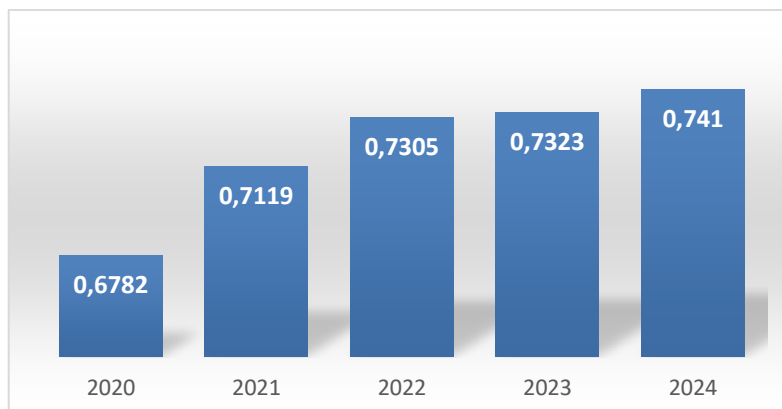
2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Desa merupakan satuan wilayah terkecil yang diharapkan menjadi titik awal pergerakan ekonomi masyarakat. Di Kutai Timur saat ini terdapat 139 desa dan 2 kelurahan, dan diharapkan jumlah desa akan semakin berkembang seiring dengan dinamika yang ada. Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga pembangunan desa diharapkan akan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 41 serta 378 dusun dan 1.656 RT, pembangunan desa memiliki tantangan tersendiri. Pengembangan desa perlu dilakukan melalui pembangunan BUMDes, infrastruktur, serta stimulan lainnya agar ekonomi desa berjalan lebih dinamis. Pembangunan perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan potensi yang ada, untuk mendukung hal tersebut konektivitas desa ke pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi penting untuk dilakukan.

Dari semua kecamatan yang ada, tahun 2024 terdapat dua kecamatan yang memiliki rata-rata IDM dengan status Mandiri, yaitu Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Sebagian besar kecamatan memiliki nilai IDM dengan status Maju dan terdapat 4 kecamatan yang memiliki nilai IDM Berkembang. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk melaksanakan program pembangunan desa.

Secara keseluruhan selama 2020-2024 nilai IDM Kutai Timur menunjukkan peningkatan. Bila tahun 2020 masih berstatus “berkembang”, mulai 2021-2024 status IDM di Kutai Timur menjadi “maju”. Hal ini memperkuat peran perdesaan sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kutai Timur.

Gambar 2.30 Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Upaya menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara lebih cepat dan merata. Salah satu upaya terkait hal tersebut adalah ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat desa. Aspek kelayakan rumah masih menjadi tantangan ke depan bagi Kutai Timur. Setiap tahun pemerintah daerah berupaya menyusun program pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, di tahun 2022 terdapat 6.995 RTLH. Sebagian besar RTLH pada tahun 2022 berada di Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon, Sandaran, serta Long Mesangat yang masing-masing memiliki RTLH lebih dari 500 unit.

Tabel 2.35 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah RTLH
1	Batu Ampar	338
2	Bengalon	645
3	Busang	170
4	Kaliorang	389
5	Karangan	173
6	Kaubun	376
7	Kongbeng	229
8	Long Mesangat	516
9	Muara Ancalong	499
10	Muara Bengkal	407
11	Muara Wahau	409
12	Rantau Pulung	914
13	Sandaran	522
14	Sangatta Selatan	234
15	Sangatta Utara	124
16	Sangkulirang	281
17	Telen	365

No	Kecamatan	Jumlah RTLH
18	Teluk Pandan	404
Total		6.995

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Timur
(<https://data.kaltimprov.go.id/>)

Untuk menjadikan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan dibutuhkan ketersediaan aksesibilitas jalan antar desa dan kecamatan yang mantap. Hal ini penting untuk mendorong percepatan konektivitas antar wilayah di Kutai Timur. Berdasarkan data kondisi jalan yang masuk di dalam kategori jalan kabupaten sesuai SK Bupati Kutai Timur Nomor: 600/K.154/2024, panjang jalan kabupaten mencapai 1.127,09 km. Adapun kondisi jalan mantap baru mencapai 373,6km (33,15%). Kemudian kondisi desa yang memiliki akses telekomunikasi di wilayah Kutai Timur sudah mencapai 136 desa dan hanya tertinggal 3 desa dengan kategori *blank spot*.

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro daerah merupakan prasyarat terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Stabilitas tersebut dapat terwujud dengan menjaga indikator ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi melalui PDRB, serta fiskal seperti pajak atau penerimaan daerah. Perbandingan antara pajak dengan PDRB menghasilkan ukuran rasio pajak terhadap PDRB atau *tax ratio*. Rasio ini menjadi penting karena menggambarkan kontribusi pajak dalam PDRB, semakin tinggi nilainya berarti peran pajak dalam PDRB semakin tinggi. Nilai *tax ratio* yang rendah menggambarkan bahwa pengelolaan pajak belum optimal dalam mendukung PDRB.

Tax ratio Kabupaten Kutai Timur selama 2020-2024 terlihat berfluktuatif, namun pada periode 2022-2024 menunjukkan kenaikan dari 0,047% di tahun 2022 menjadi 0,127 di tahun 2024. Selama 2020-2024 nilai *tax ratio* terlihat sangat kecil, hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah tidak sebanding dengan besarnya PDRB yang terbentuk. Hal ini bisa terjadi karena ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan sedangkan proporsi penerimaan pajak dari sektor tersebut dalam bentuk bagi hasil pajak dan sebagian besar menjadi hak pemerintah pusat. Pengembangan ekonomi daerah diharapkan dapat memunculkan

potensi ekonomi lokal non-pertambangan sehingga penerimaan pajak dari pemerintah tidak tergantung dari sektor pertambangan. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor akomodasi dan makan minum diharapkan mampu dikembangkan dalam rangka meningkatkan *tax ratio*.

Tabel 2.36 *Tax Ratio* Kabupaten Kutai Timur 2020-2024 (%)

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah (MILYAR)	114,06	99,79	98,63	112,71	201,95
PDRB ADHB (MILYAR)	115.555,66	136.617,57	211.101,48	168.271,52	159.497,23
Tax Ratio (%)	0,099	0,073	0,047	0,067	0,127

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. SDM pemerintah perlu mendapatkan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam merespons tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Sistem seleksi, pengangkatan, dan promosi pegawai juga perlu didasarkan pada meritokrasi untuk memastikan bahwa posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.

Untuk melihat sejauh mana implementasi pemerintah daerah menuju tata Kelola, dipergunakan beberapa alat ukur seperti SAKIP, SPBE, IPP, dan IRB. Dalam beberapa indeks tata kelola, pada tahun 2023 Kutai Timur memiliki nilai yang masih rendah untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yaitu masih CC sementara untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) memiliki skor 0,89. Untuk SPBE skor yang diperoleh sudah cukup bagus yaitu 3,20 (tertinggi ketiga).

Di tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan pada IRB; dari CC menjadi BB namun terjadi penurunan indeks SPBE dari 3,20 di tahun 2023 menjadi 3,02 di tahun 2024 meski masih sama-sama masuk dalam kategori “Baik”. Nilai IRB tahun 2023 adalah 53,9 dan tahun 2024 naik tajam menjadi 70,35. Untuk IPP terjadi kenaikan yang signifikan dari 0,89 di tahun 2023 menjadi 2,90 di tahun 2024.

Tabel 2.37 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	2023				2024			
	Indeks RB	Indeks SAKIP	Indeks SPBE	Indeks PP	Indeks RB	Indeks SAKIP	Indeks SPBE	Indeks PP
Kutai Kartanegara	B	B	2.54	4.24	BB	B	3,09	4,35
Paser	B	B	2.90	3.91	BB	B	3,27	4,03
Berau	C	B	2.02	1.09	BB	B	2,28	3,71
Kutai Barat	CC	B	2.50	3.53	B	B	2,62	4,11
Kutai Timur	CC	B	3.20	0.89	BB	B	3,02	2,9
Penajam Paser Utara	CC	B	2.85	3.45	BB	B	2,87	3,75
Mahakam Ulu	CC	N/A	1.11	1.82	CC	B	2,25	1,42
Samarinda	BB	B	3.14	4.02	BB	B	3,85	4,26
Balikpapan	B	B	3.75	4.51	A	B	3,96	4,19
Bontang	BB	B	2.83	4.11	A	BB	3,39	4,28

Sumber: Kementerian PAN dan RB

Pada tahun 2026, Pemerintah Indonesia telah melakukan transformasi kebijakan pengukuran kinerja digital pemerintah daerah. Perubahan tersebut ditandai dengan beralihnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

menjadi Indeks Pemerintahan Digital (IPD) yang mulai diberlakukan secara nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional transformasi digital sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan pentingnya pengukuran kinerja digital secara lebih komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada layanan publik digital yang adaptif dan inklusif.

Berbeda dengan SPBE yang berfokus pada aspek tata kelola internal dan infrastruktur teknologi informasi, Indeks Pemerintahan Digital (IPD) mencakup dimensi yang lebih luas, meliputi:

- a. Kebijakan dan tata kelola pemerintahan digital: mengukur sejauh mana pemerintah daerah memiliki regulasi, kelembagaan, dan perencanaan digital yang terpadu;
- b. Layanan digital pemerintah: menilai kualitas, kemudahan akses, keterpaduan, dan dampak layanan digital terhadap masyarakat;
- c. Infrastruktur digital dan keamanan siber: mengevaluasi kesiapan infrastruktur TIK, interoperabilitas sistem, serta perlindungan data dan privasi pengguna;
- d. Sumber daya manusia digital: mengukur kompetensi ASN dalam mendukung transformasi digital;
- e. Kolaborasi dan partisipasi digital: menilai keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam ekosistem pemerintahan digital.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perubahan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan digitalisasi pemerintahan daerah, menyesuaikan struktur kelembagaan dan strategi pengembangan TIK, serta memastikan seluruh perangkat daerah berperan aktif dalam peningkatan IPD. Oleh karena itu, mulai tahun 2026, pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja digital daerah tidak lagi menggunakan nilai SPBE, melainkan mengacu pada nilai Indeks Pemerintahan Digital (IPD) yang disusun berdasarkan pedoman Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Kementerian PANRB.

Dengan penerapan IPD, diharapkan transformasi digital di Kabupaten Kutai Timur tidak hanya menghasilkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang tangguh, inovatif, dan berbasis teknologi digital.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum suatu daerah sangat mempengaruhi terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini juga akan mempengaruhi iklim investasi di daerah tersebut. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur dapat tercermin dari angka kriminalitas yang terjadi.

Keamanan dan ketertiban umum merupakan prasyarat kelancaran program-program pembangunan daerah. Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendukung akan memperlancar implementasi program Pembangunan daerah yang telah disusun. Keamanan dan ketertiban umum antara lain tercermin melalui rendahnya kejadian kriminalitas di Masyarakat. Di tahun 2024 terdapat 642 kejadian kriminalitas di Kutai Timur atau rata-rata 53 kejadian per bulan. Dari 642 kejadian tersebut, dikategorikan ke kriminalitas umum (sebanyak 619 kejadian) dan kriminalitas khusus (sebanyak 23 kejadian). Dari 619 kriminalitas umum, sebanyak 557 atau 89,98% telah diselesaikan dan dari 31 kejadian kriminal khusus sebanyak 17 kejadian (73,91%) telah diselesaikan; dengan demikian total kejadian kriminalitas yang telah diselesaikan mencapai 574 dari 642 atau 89,41%, naik dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 86,04%.

Kasus kriminal umum yang sering terjadi adalah kasus narkoba yaitu 288 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 256 atau 88,89%. Tingginya kasus ini memerlukan penanganan preventif dan sistematis terlebih kasus ini sering menimpa generasi muda Kutai Timur. Program-program yang difokuskan untuk generasi muda perlu diarahkan untuk membangun generasi muda yang sehat, dinamis, dan kreatif. Untuk kriminal khusus masalah yang menonjol adalah *illegal logging*, *illegal mining*, dan migas. Sebagai daerah penghasil pertambangan utama, kasus ini rawan terjadi di Kutai Timur.



Tabel 2.38 Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

No	Tindak Kriminal	Kejadian	Diselesaikan
Kriminal Umum			
1	Terhadap ketertiban umum	-	1
2	Membahayakan keamanan umum	-	-
3	Sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran)	1	-
4	Pemalsuan	2	1
5	Perkosaan	1	-
6	Judi	4	4
7	Perbuatan yang tidak menyenangkan	-	-
8	Pembunuhan	5	2
9	Kelalaian Mengakibatkan orang mati	1	1
10	Kelalaian mengakibatkan orang luka	1	2
11	Pencurian biasa	25	23
12	Pencurian dengan pemberatan (Curat)	50	52
13	Pencurian ringan	-	-
14	Pengancaman	3	7
15	Penggelapan	35	29
16	Penipuan/Perbuatan Curang	7	7
17	Kejahatan Perlindungan Anak	35	33
18	Kekerasan dalam rumah tangga	5	5
19	Penyalahgunaan sajam, senpi dan handak	9	10
20	Pengeroyokan	7	6
21	Penganiayaan	19	20
22	Cabul	1	-
23	Curanmor	3	3
24	Penyerobotan tanah	2	-
25	Kecelakaan Lalu Lintas	54	50
26	Kejahatan tenaga kesehatan	1	-
27	Percobaan Pencurian	-	-
28	Pengerusakan	2	2
29	Narkotika	288	256
30	Menjual atau mengedarkan Obat Keras tanpa ijin	1	4
31	Penjual Minuman Keras	26	16
32	Pelanggaran hukum non pidana lainnya	-	-
33	Sumpah palsu dan keterangan palsu	-	-
34	Pemerasan	-	1
35	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	6	3
36	Penadahan	2	-
37	Kekerasan Seksual	1	-
38	Persetubuhan terhadap anak	17	18
39	Kejahatan perdagangan Manusia	4	3

No	Tindak Kriminal	Kejadian	Diselesaikan
	Jumlah	619	557
Kriminal Khusus			
1	HAKI	–	–
2	Hak Paten	–	–
3	Korupsi	2	1
4	Illegal Logging	1	1
5	Illegal Fishing	–	–
6	Migas	7	8
7	Illegal Mining	9	3
8	Lingkungan Hidup	–	–
9	Perkebunan	4	4
10	Penyelundupan	–	–
11	Kesehatan	–	–
12	Ketenaga Listikan	–	–
13	Cagar Alam	–	–
14	Peternakan dan Cagar Budaya	–	–
15	UU Pertambangan	–	–
16	Cyber Crime	–	–
17	ITE	–	–
	Jumlah	23	17
TOTAL		642	574

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dalam konteks daerah, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar dapat dilihat antara lain dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kab/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD memiliki 4 komponen dan 12 pilar yang menggambarkan kondisi daya saing suatu daerah.

Gambar 2.31 Struktur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, *check and balances*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *fixed-broadband*, dan pengguna internet.

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.

Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/*start-up*, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang

berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Berdasarkan IDSD tahun 2024, Kutai Timur memiliki skor 3,17 masih di bawah rata-rata nasional yang besarnya 3,43 dan Provinsi Kalimantan Timur (3,37). Nilai IDSD Kutai Timur tersebut adalah terendah kedua setelah Mahakam Ulu, meski naik cukup tajam dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 2,78. Skor Pilar 4 (skor 3,10), Pilar 7 (skor 1,16), dan Pilar 12 (1,38) Kutai Timur memiliki nilai yang rendah dibandingkan sebagian besar dengan lain di Kalimantan Timur.

Tabel 2.39 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
KALIMANTAN TIMUR	4,28	2,89	4,14	4,25	4,15	4,00	1,13	3,63	2,76	4,33	2,35	2,58	3,37
KAB. PASER	4,54	3,33	4,17	3,67	4,00	3,93	1,81	3,74	1,53	4,69	3,03	1,23	3,31
KAB. KUTAI BARAT	4,10	3,10	4,00	3,91	4,02	3,77	3,24	3,01	3,05	4,49	3,73	0,84	3,44
KAB. KUTAI KARTANEGARA	4,43	3,87	3,90	4,51	3,98	4,15	1,93	3,29	1,58	5,00	3,81	1,75	3,52
KAB. KUTAI TIMUR	4,17	3,31	3,83	3,10	4,05	3,93	1,16	3,26	2,06	5,00	2,84	1,38	3,17
KAB. BERAU	4,42	3,07	3,73	4,28	3,96	4,02	3,74	2,83	2,66	4,62	3,00	1,35	3,47
KAB. PENAJAM PASER UTARA	4,11	3,44	4,37	3,52	3,92	4,24	2,95	2,67	1,69	4,09	4,29	0,70	3,33
KAB. MAHAKAM ULU	3,62	1,71	3,08	3,93	3,96	3,99	2,12	2,17	2,81	3,35	1,92	1,30	2,83
KOTA BALIKPAPAN	4,36	3,95	4,90	4,44	4,16	4,05	5,00	3,95	3,39	5,00	3,14	2,56	4,07
KOTA SAMARINDA	4,59	3,51	4,92	3,89	4,15	4,03	5,00	4,61	3,70	4,85	3,25	3,30	4,15
KOTA BONTANG	4,13	3,63	5,00	3,77	4,15	4,08	2,20	3,67	2,46	4,75	2,80	2,29	3,58

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.1.4.4.1 Urusan Pemeritahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Urusan pendidikan antara lain berkaitan dengan masalah angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM). Dalam hal APK, APK untuk jenjang SD/ sederajat hingga SMA/ Sederajat tahun 2023/2024 sudah tinggi (di atas 100%) namun yang kuliah di perguruan tinggi tergolong rendah sehingga motivasi untuk kuliah bagi lulusan SMA/SMK belum sesuai dengan yang diharapkan. APK SD/ sederajat sebesar 105,1 mengandung arti bahwa dari jumlah penduduk yang bersekolah di SD/MI sebanyak 5,1% berusia di luar 7-12 tahun sedangkan APM SD/ sederajat sebesar 95,22% berarti terdapat 95,22% usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/ sederajat atau terdapat 4,78% usia 7-12 tahun yang belum bersekolah di jenjang SD/ sederajat.

Tabel 2.40 APK dan APM SD/Sederajat 2023/2024

Nama Kabupaten/ Kota	Penduduk Usia 7-12 tahun	Jumlah Siswa SD/Sederajat	Jumlah Siswa Usia 7-12	APK	APM
Kab. Paser	33.949	35.597	32.325	104,85	95,22
Kab. Kutai Kartanegara	89.979	94.539	86.379	105,07	96
Kab. Berau	34.737	36.308	33.106	104,52	95,3
Kab. Kutai Barat	22.284	23.669	21.637	106,22	97,1
Kab. Kutai Timur	53.523	56.254	51.584	105,1	96,38
Kab. Penajam Paser Utara	20.964	22.005	20.117	104,97	95,96
Kab. Mahakam Ulu	4.080	4.215	3.756	103,31	92,06
Kota Samarinda	87.112	92.172	86.473	105,81	99,27
Kota Balikpapan	72.621	76.871	71.912	105,85	99,02
Kota Bontang	19.551	20.568	19.041	105,2	97,39

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pelayanan pendidikan untuk Kabupaten Kutai Timur meliputi SD/ sederajat hingga SMP/ sederajat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk MI dan MTs di bawah kewenangan Kementerian Agama. Pendidikan pada jenjang SMA/ sederajat menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur. Di tingkat SD/ sederajat jumlah sekolah adalah 249, dengan jumlah sekolah terbanyak berada di Kecamatan Sangatta Utara yaitu 38 sekolah dan kedua adalah Kecamatan Bengalon sebanyak 25 sekolah. Hal yang sama juga terjadi dengan jumlah murid, terbanyak di Kecamatan Sangatta Utara dan Bengalon, masing-masing 13.148 dan 5.511 murid. Total jumlah murid untuk jenjang SD/ sederajat adalah 51.835 dan total jumlah guru SD/ sederajat sebanyak 3.392. Kecamatan dengan jumlah sekolah paling sedikit adalah Kecamatan Long Mesangat dan Kecamatan Batu Ampar, masing-masing terdapat 7 sekolah.

Pada jenjang SMP/ sederajat Kecamatan Sangatta Utara memiliki jumlah sekolah terbanyak yaitu 22 sekolah selanjutnya Kecamatan Muara Wahau dengan 11 sekolah. Untuk jumlah murid, meski Kecamatan Muara Wahyu memiliki jumlah SMP/ sederajat yang lebih banyak dibandingkan Kecamatan Bengalon, namun jumlah murid SMP/ sederajat Kecamatan Bengalon lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Muara Wahau.

Tabel 2.41 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Jenjang SD/Sederajat hingga SMA/Sederajat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023/2024

Kecamatan	SD/Sederajat			SMP/Sederajat		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
Muara Ancalong	13	1828	160	5	776	72
Busang	6	726	68	2	255	23
Long Mesangat	7	858	69	3	335	38
Muara Wahau	23	4738	296	11	1506	114
Telen	9	1713	109	4	468	47
Kongbeng	14	3244	183	7	1355	107
Muara Bengkal	11	1745	118	5	634	65
Batu Ampar	7	838	72	2	221	20
Sangatta Utara	38	13148	874	22	5893	385
Bengalon	25	5511	330	7	1619	121
Teluk Pandan	8	1366	107	6	767	64
Sangatta Selatan	16	3129	195	8	1326	103
Rantau Pulung	10	1551	99	4	572	40
Sangkulirang	22	3181	226	6	1055	87
Kaliorang	10	2167	122	4	670	56
Sandaran	13	1996	141	6	680	58
Kaubun	9	2270	121	6	820	81
Karangan	8	1826	102	4	601	41
Kutai Timur	249	51835	3392	112	19553	1522

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kabupaten Kutai Timur
Dalam Angka, 2024

Dilihat dari aspek rasio rata-rata jumlah guru untuk jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat adalah 13 per sekolah sementara untuk SMA/ sederajat jumlahnya 17 guru per sekolah. Rasio murid terhadap sekolah untuk SD/ sederajat adalah 208 sehingga rata-rata setiap sekolah memiliki 208 murid. Bila dalam sekolah terdapat 6 rombongan belajar artinya setiap rombongan belajar memiliki 34-35 siswa, namun jika terdapat 12 rombongan belajar maka tiap rombongan belajar memiliki 17 murid. Dengan jumlah guru sebanyak 13-14 orang, untuk jenjang SD/ sederajat jumlah ini sudah cukup.

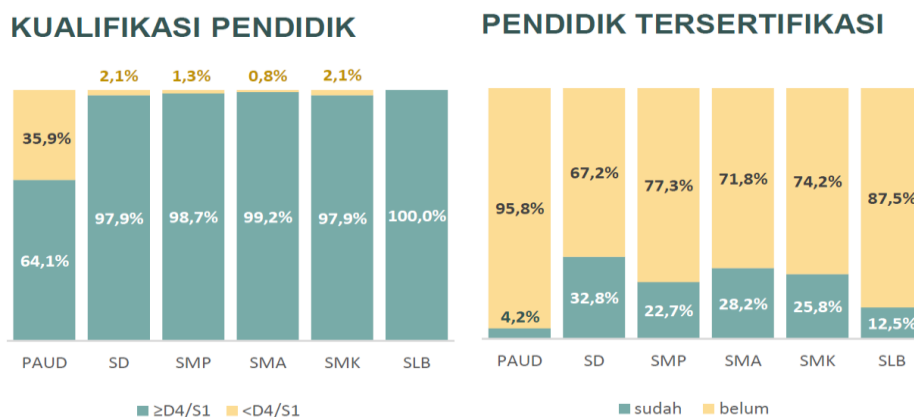
Tabel 2.42 Rasio Jenjang Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023/2024

Jenjang	Murid-Sekolah	Murid-Guru	Guru-Sekolah
SD/Sederajat	208,17	15,28	13,62
SMP/Sederajat	174,58	12,85	13,59

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, 2024

Faktor geografis menjadi faktor yang juga penting untuk dipertimbangkan, meski dalam satu desa minimal satu SD/ sederajat dan satu kecamatan minimal terdapat satu SMP/ sederajat terpenuhi, namun luasnya geografis Kutai Timur juga perlu menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini terdapat dua hal yang diperhatikan yaitu antara efisiensi dan efektivitas. Jumlah sekolah yang banyak mungkin efektif dengan mempertimbangkan geografis, namun tidak efisien. Sebaliknya, jumlah sekolah yang sedikit (sesuai standar) akan efisien, namun tidak efektif. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah di Kutai Timur.

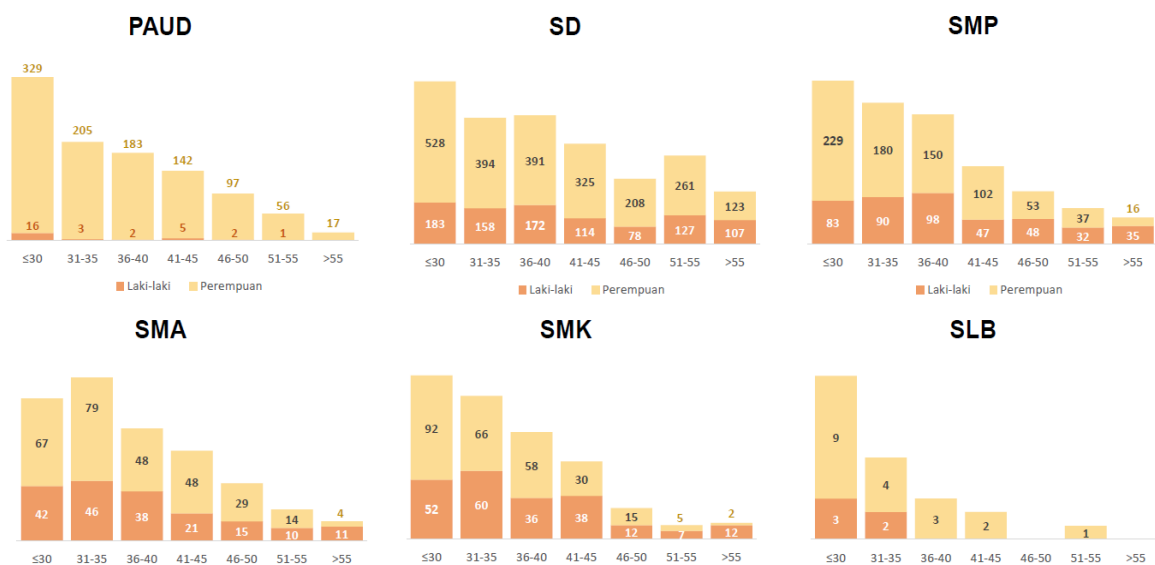
Gambar 2.32 Kualifikasi Pendidik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023



Selain itu kualifikasi pendidik adalah hal lain yang juga penting diperhatikan. Sesuai peraturan yang berlaku pendidik sekurang-kurangnya berijazah sarjana naik S1 maupun D4 (Sarjana Terapan). Di jenjang PAUD masih cukup banyak pendidik yang belum berijazah S1/D4 yaitu 35,9%. Dari sisi sertifikasi sebagai pendidik, masih sangat banyak pendidik yang belum bersertifikat sebagai pendidik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di semua jenjang pendidikan. Di jenjang SD/ sederajat terdapat 67,2% pendidik yang belum bersertifikat dan di jenjang SMP/ sederajat terdapat 77,3% yang belum bersertifikat.

Selain pendidikan dan kualifikasinya, penting untuk diperhatikan adalah usia para pendidik. Hal ini untuk mengantisipasi jumlah pendidik atau guru yang memasuki usia pensiun sehingga dapat diantisipasi lebih dini tentang kebutuhan guru. Guru yang sudah berusia di atas 55 tahun untuk SD/ sederajat hingga 2023 adalah 230 guru sedang untuk jenjang SMP/ sederajat adalah 51 guru. Banyaknya guru yang sudah berusia di atas 55 tahun ini perlu diperhatikan untuk menjaga agar kebutuhan guru di sekolah tetap dapat terpenuhi, bukan hanya jumlahnya saja namun juga kompetensi pelajaran atau keilmuan.

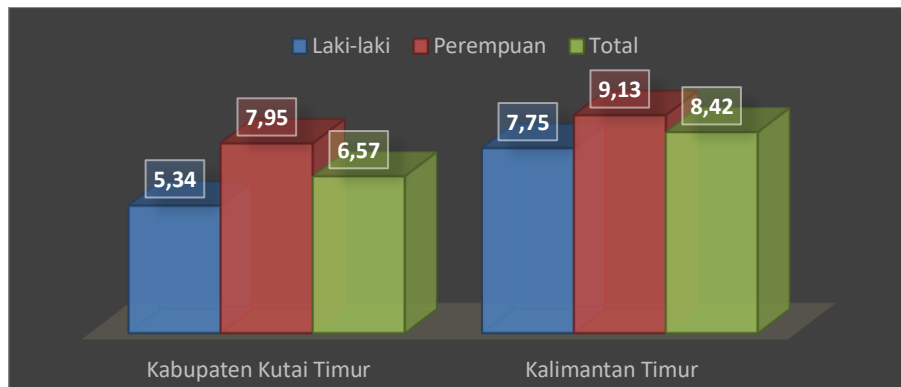
Gambar 2.33 Usia Guru di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023



B. Kesehatan

Salah satu indikator penting kesehatan adalah angka kesakitan yang menggambarkan banyaknya penduduk yang sakit pada periode tertentu. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur di semua kategori: laki-laki, perempuan, dan total penduduk. Angka kesakitan di Kutai Timur tercatat 5,34% untuk laki-laki, 7,95% untuk perempuan, dan 6,57% secara total. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur mencatat angka 7,75% untuk laki-laki, 9,13% untuk perempuan, dan 8,42% secara total.

Gambar 2.34 Angka Kesakitan Tahun 2024 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Selisih yang cukup signifikan menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Kutai Timur mengalami lebih sedikit gangguan kesehatan dibandingkan rata-rata provinsi. Perbedaan ini dapat mencerminkan kondisi lingkungan, akses layanan kesehatan, atau kebiasaan hidup sehat masyarakat lokal yang lebih baik. Namun, hal ini juga bisa dipengaruhi oleh perbedaan sistem pelaporan, cakupan survei, atau kesadaran masyarakat dalam melaporkan gangguan kesehatan.

Di kedua wilayah, angka kesakitan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, yang bisa jadi disebabkan oleh faktor biologis, beban ganda perempuan, atau tingkat kesadaran lebih tinggi dalam mencari pelayanan kesehatan. Di Kutai Timur, selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 2,61 poin persentase, sementara di tingkat provinsi selisihnya 1,38 poin. Artinya, ketimpangan angka kesakitan berdasarkan gender di Kutai Timur lebih besar dibandingkan provinsi.

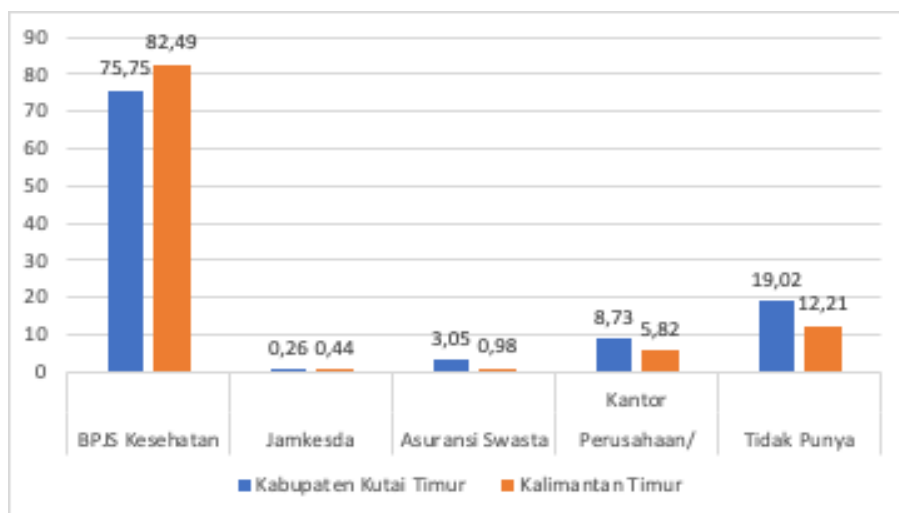
Untuk mengantisipasi kesakitan yang terjadi pada penduduk, penting bagi penduduk untuk memiliki asuransi sehingga penduduk menjadi lebih sejahtera. Berdasarkan data persentase kepemilikan jaminan kesehatan penduduk tahun 2024, mayoritas penduduk tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan Kabupaten Kutai Timur sebesar 75,75% dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 82,49%. Meskipun angka di Kutai Timur cukup tinggi, namun masih di bawah rata-rata provinsi sekitar 6,7 persen. Ini menunjukkan bahwa cakupan jaminan kesehatan nasional di Kutai Timur masih bisa ditingkatkan, khususnya untuk menjangkau penduduk di wilayah pedalaman atau rentan secara ekonomi.

Kepemilikan jaminan dari sumber lain seperti Jamkesda, asuransi swasta, dan jaminan kantor/perusahaan masih sangat rendah di Kutai Timur, yaitu Jamkesda hanya 0,26% (lebih rendah dari provinsi: 0,44%), asuransi swasta: 3,05% (lebih

tinggi dari provinsi: 0,98%), kantor/perusahaan: 8,73% (lebih tinggi dari provinsi: 5,82%) Artinya, meskipun kontribusi swasta dan dunia usaha di Kutai Timur sedikit lebih baik dibandingkan provinsi, namun jumlahnya masih kecil dibandingkan total penduduk, dan sebagian besar tetap bergantung pada program pemerintah.

Yang cukup menjadi perhatian adalah tingginya persentase penduduk Kutai Timur yang belum memiliki jaminan kesehatan, yaitu 19,02%, dibandingkan hanya 12,21% di tingkat provinsi. Ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan akses dan partisipasi dalam sistem jaminan kesehatan, terutama di kalangan masyarakat informal, rentan, atau tinggal di daerah sulit dijangkau.

Gambar 2.35 Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2024 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

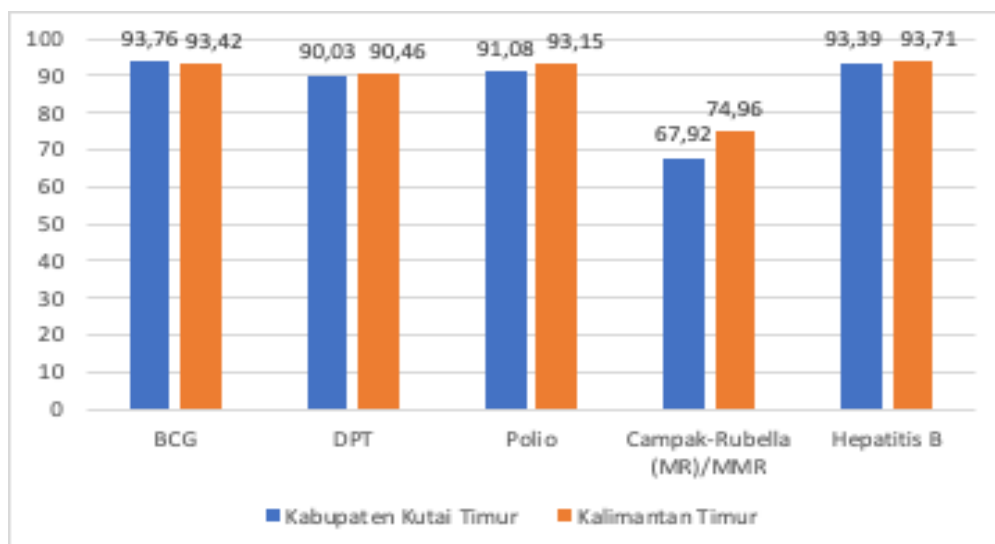
Kebijakan di bidang kesehatan penting untuk dilakukan sejak dini (balita) misal melalui vaksinasi sebagai antisipasi penyakit yang didera di masa mendatang. Vaksinasi yang sering dilakukan untuk balita adalah vaksinasi BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Secara umum, capaian vaksinasi di Kabupaten Kutai Timur hampir setara dengan capaian provinsi, khususnya pada vaksin BCG (93,76%), DPT (90,93%), Polio (91,08%), dan Hepatitis B (93,39%). Seluruh capaian ini berada di atas 90%, yang menunjukkan bahwa program imunisasi dasar di Kutai Timur berjalan dengan baik dan mendekati standar cakupan ideal dari WHO yang merekomendasikan >95%.

Namun, vaksin Campak-Rubella (MR/MMR) menunjukkan capaian relatif rendah, yaitu 67,92% di Kutai Timur, dibandingkan capaian provinsi sebesar 74,96%. Rendahnya cakupan vaksin MR/MMR ini menjadi tantangan khusus, karena

vaksin ini penting untuk mencegah wabah penyakit menular yang bisa berakibat fatal pada anak-anak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan logistik, keraguan masyarakat terhadap vaksin, atau hambatan geografis.

Secara keseluruhan, capaian vaksinasi balita di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen dan kinerja yang cukup baik, namun masih terdapat celah penting pada jenis vaksin tertentu yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah bersama dengan puskesmas dan kader posyandu perlu memperkuat edukasi masyarakat, peningkatan akses layanan imunisasi, serta mendorong pelaksanaan *sweeping* atau imunisasi kejar untuk mengejar cakupan vaksin yang masih di bawah target.

Gambar 2.36 Tingkat Capaian Vaksinasi Balita Tahun 2024 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Selain fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan sebagainya jumlah tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung berbagai program kesehatan serta upaya mewujudkan SDM yang sehat dan berkualitas. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah rasio kecukupan serta penyebarannya. Jumlah kesehatan yang cukup namun tidak merata penyebarannya juga menjadi permasalahan, terlebih bagi daerah yang secara geografis luas seperti Kutai Timur.

Di tahun 2023 jumlah tenaga medis di Kutai Timur sebanyak 281, terbanyak ke 4 di Kalimantan Timur. Meski demikian, jika dibagi dengan jumlah penduduk maka rasio jumlah penduduk terhadap tenaga medis mencapai 1.621 yang berarti 1 tenaga medis melayani 1.621 penduduk. Rasio ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar 1:1.000 dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan menempati urutan tertinggi ke-3 di Kalimantan Timur. Untuk tenaga keperawatan dan kebidanan rasio di Kutai Timur masing-masing 1:380 dan 1:592. Jumlah tenaga medis ini juga perlu diimbangi dengan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Kondisi geografis Kutai Timur menjadi tantangan tersendiri untuk kebijakan dan strategi bidang kesehatan ini.

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat melalui layanan kesehatan. Untuk SDM tenaga medis, menurut standar WHO dan Kementerian Kesehatan, satu dokter melayani paling banyak 1.000 orang. Dengan jumlah tenaga medis sebanyak 314 di tahun 2024 dan jumlah penduduk 462.990, maka rasio jumlah penduduk per tenaga medis sebesar 1.472 yang berarti pada tahun 2024 satu tenaga medis melayani 1.472 orang; jauh lebih besar dibandingkan standar yang ada yaitu 1:1.000. Demikian pula dengan rasio untuk tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, dan lainnya. Pertambahan jumlah penduduk perlu diantisipasi dengan pertambahan sarana dan prasarana kesehatan agar layanan kesehatan penduduk tetap berjalan optimal. Aspek penyebaran dan pemerataan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan sehingga layanan kesehatan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Tabel 2.43 Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Kutai Timur 2024

Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik
1.474	462.990	377	577	2.194	4.495	12.184	10.065	20.130

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025, diolah

Dari aspek fasilitas kesehatan yang ada, di setiap kecamatan telah memiliki Puskesmas dan jumlah rumah sakit cukup banyak. Posyandu aktif sebanyak 268 yang tersebar di berbagai desa. Dengan jumlah desa sebanyak 139 berarti rata-rata setiap desa memiliki 2 Posyandu. Melihat sarana dan prasarana kesehatan yang ada, meski mungkin belum dapat dikatakan ideal, namun dipandang cukup dengan

melihat rasio yang ada dan relatif cukup baik dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Saat ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah tenaga medis serta penyebarannya untuk lebih memudahkan masyarakat dalam akses kesehatan.

Tabel 2.44 Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota	Puskesmas Rawat Inap 2024	Puskesmas Non Rawat Inap 2024	Rumah Sakit Umum 2024	Posyandu Aktif 2023	Apotek 2023
Paser	9	10	2	348	58
Kutai Barat	14	5	3	214	46
Kutai Kartanegara	13	19	3	751	140
Kutai Timur	18	3	8	268	88
Berau	10	11	2	270	72
Penajam Paser Utara	9	2	3	268	57
Mahakam Ulu	6	—	2	50	13
Balikpapan	7	20	11	1309	212
Samarinda	2	24	10	618	355
Bontang	—	6	5	120	25

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2024 jumlah Puskesmas di Kutai Timur sebanyak 21 yang tersebar secara merata di masing-masing kecamatan. Terdapat tiga kecamatan yang memiliki Puskesmas lebih dari satu yaitu Kecamatan Muara Wahau, Sangatta Utara, serta Kecamatan Bengalon. Sangatta utara meski memiliki jumlah penduduk terbanyak hanya memiliki 2 Puskesmas namun kecamatan ini memiliki klinik pratama terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dari sisi Posyandu, jumlah Posyandu tahun 2024 adalah sebanyak 301 dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Sangatta Utara yaitu 53 Posyandu. Meski dari sisi jumlah semua kecamatan memiliki Puskesmas dan Posyandu, namun perbedaan luas geografis serta jumlah penduduk menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sarana kesehatan karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan tersebut. Selain itu, jumlah apotek juga terlihat belum merata antarwilayah sehingga menyebabkan akses terhadap keterjangkauan obat menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan.

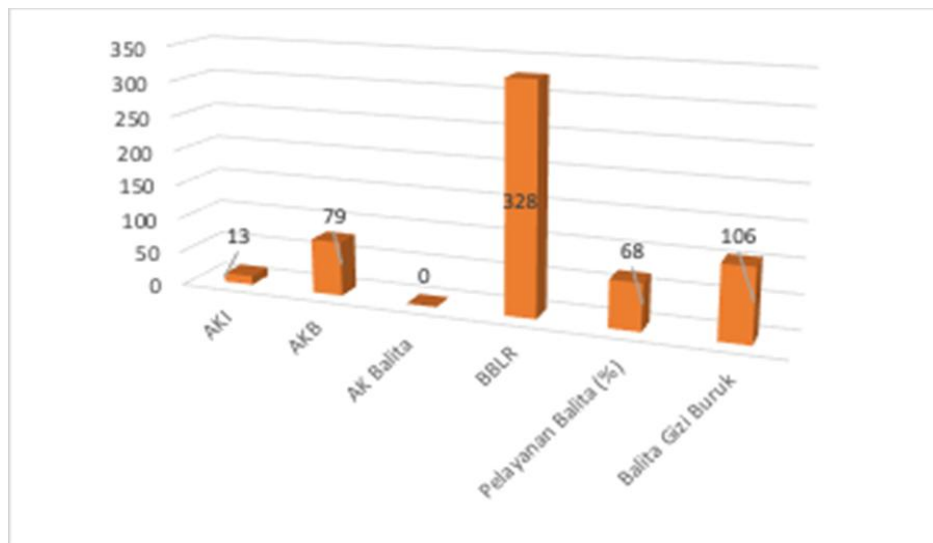
Tabel 2.45 Sarana Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Kecamatan	Puskesmas	Klinik Pratama	Posyandu	Apotek
Muara Ancalong	1	3	19	1
Busang	1	2	8	–
Long Mesangat	1	–	10	–
Muara Wahau	2	2	18	1
Telen	1	2	8	–
Kongbeng	1	2	12	1
Muara Bengkal	1	1	16	4
Batu Ampar	1	1	10	–
Sangatta Utara	2	16	53	4
Bengalon	2	7	34	3
Teluk Pandan	1	2	18	2
Sangatta Selatan	1	1	26	3
Rantau Pulung	1	–	9	2
Sangkulirang	1	4	19	1
Kaliorang	1	3	10	2
Sandaran	1	2	13	–
Kaubun	1	–	8	2
Karangan	1	4	10	–
Kutai Timur	21	52	301	26

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025

Kesehatan masyarakat perlu diperhatikan sejak lahir hingga dewasa. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2023 di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 79 dengan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 13. Meskipun dibandingkan dengan daerah lain hal ini bukanlah yang terburuk namun perlu upaya preventif agar semakin kecil melalui berbagai program yang melibatkan bukan saja balita namun juga ibu. Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) berjumlah 328 dan balita dengan kasus gizi buruk mencapai 106. Untuk angka balita gizi buruk ini cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan balita dan ibu perlu diperhatikan dengan dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Gambar 2.37 Kondisi Kesehatan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2024

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur jalan merupakan salah satu bidang Pekerjaan Umum yang sangat penting. Jalan merupakan salah satu sarana yang menjadi media penting dalam konektivitas antarwilayah di Kutai Timur. Konektivitas akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat antarwilayah semakin lancar termasuk aspek produksi, konsumsi, maupun distribusi. Panjang jalan di Kutai Timur pada tahun 2021 mencapai 1.649,76 km dan dari panjang jalan tersebut 1.105,77 km atau 67,03% merupakan jalan kabupaten. Di tahun 2022 panjang jalan naik menjadi 1.681,58 km yang disebabkan karena pertambahan jalan kabupaten; namun di tahun 2023 panjang kabupaten turun menjadi 1.127,09. Penurunan panjang jalan kabupaten diikuti dengan kenaikan jalan negara dari 387,54 km menjadi 390,76 km serta jalan provinsi dari 156,45 km menjadi 159,38 km. Penambahan panjang jalan negara dan jalan provinsi ini tergolong kecil, masing-masing hanya bertambah sekitar 3 km.

Tabel 2.46 Status Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022	2023	2024
Negara	387,54	387,54	387,54	390,76	409,15
Provinsi	156,45	156,45	156,45	159,38	159,38
Kabupaten	1.105,77	1.105,77	1.137,59	1.127,09	1.128
Jumlah	1.649,76	1.649,76	1.681,58	1.677,23	1.696,53

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025 dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Tabel 2.47 Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024

Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024
Baik	152	234,84	243,403	377,63
Sedang	429,28	70,28	69,418	24,03
Rusak	366,64	27,66	74,049	6,60
Rusak Berat	157,85	804,76	740,22	719,58
Jumlah	1.105,77	1.137,54	1.127,09	1.128

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025

Tabel 2.48 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	207,41	237,12	248,61	230,79	204,39
Kerikil	568,74	527,7	521,15	0,59	1,47
Tanah	241,56	247,66	217,32	730,96	668,01
Lainnya	88,06	93,29	150,5	164,75	253,99
Jumlah/Total	1.105,77	1.105,77	1.137,58	1127,09	1.128

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025

Dari sisi kondisi jalan, pada tahun 2023 dari 1.127,09 km jalan kabupaten jalan dengan kondisi baik hanya 243,402 km atau hanya 21,59% sementara yang rusak berat mencapai 740,22 km atau 65,68%. Dari sisi permukaan jalan, tahun 2023 hanya 230,79 km jalan yang memiliki permukaan aspal sedang 730,96 km memiliki permukaan tanah.

Tahun 2024 total panjang jalan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan terjadi pada kondisi jalan dalam keadaan Baik, yang meningkat tajam menjadi 377,63 km. Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan Baik tersebut menjadikan kondisi jalan yang Sedang, Rusak, dan Rusak Berat menjadi berkurang. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang cukup besar di tahun 2024, meskipun masih banyak jalan dalam kondisi yang Rusak Berat.

Dengan demikian banyaknya jalan yang rusak atau rusak berat lebih banyak disebabkan karena permukaan jalan yang masih berupa tanah. Kondisi geografis Kutai Timur menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah kecamatan maupun titik penting yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Konektivitas ini penting dalam rangka mendorong percepatan pemerataan pembangunan melalui aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Akses masyarakat akan semakin cepat dan mudah sehingga kegiatan ekonomi antarwilayah akan semakin berkembang.

Dari sisi kondisi jalan, pada tahun 2023 dari 1.127,09 km jalan kabupaten jalan dengan kondisi baik hanya 243,402 km atau hanya 21,59% sementara yang rusak berat mencapai 740,22 km atau 65,68%. Dari sisi permukaan jalan, tahun 2023 hanya 230,79 km jalan yang memiliki permukaan aspal sedang 730,96 km memiliki permukaan tanah.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan masyarakat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan derajat kesejahteraan Masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan kondisi perumahan Masyarakat seperti misal kondisi lantai rumah baik dari sisi jenis lantai maupun luasnya. Dari sisi luasnya Sebagian besar penduduk memiliki lantai bangunan yang cukup luas. Sebanyak 47,45% penduduk memiliki tempat tinggal dengan luas lantai 50-99m². Bila rumah tangga memiliki 3-4 anggota keluarga, berarti rata-rata luas per kapita sekitar 15-25m² dan dari sisi luas lantai hal ini dapat dikatakan layak. Rumah dengan luas lantai di bawah 50m² di Kutai Timur sebanyak 26,82%; sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.49 Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (M²) Tahun 2024 (%)

Kabupaten/Kota	< 50	50-99	100-149	150+	Jumlah
Kabupaten Paser	33,88	48,89	12,44	4,79	100
Kabupaten Kutai Barat	15,8	49,97	20,22	14,01	100
Kabupaten Kutai Kartanegara	21,11	50,47	17,6	10,82	100
Kabupaten Kutai Timur	26,82	47,45	16,0	9,73	100
Kabupaten Berau	30,34	49,49	14,53	5,64	100
Kabupaten Penajam Paser Utara	23,15	56,57	15,88	4,41	100
Kabupaten Mahakam Ulu	30,31	51,55	14,37	3,77	100
Kota Balikpapan	36,73	39,77	11,53	11,98	100
Kota Samarinda	23,56	41,74	18,01	16,68	100
Kota Bontang	17,92	42,55	20,98	18,55	100
Kalimantan Timur	26,3	46,02	16,07	11,61	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Dalam aspek perumahan penduduk, hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah fasilitas kesehatan misalnya fasilitas buang air besar serta akses air minum. Untuk fasilitas buang air besar masih terdapat 3,62% rumah penduduk yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Sebanyak 94,96% memiliki fasilitas buang besar yang dipergunakan sendiri, sementara 1,32% menggunakan fasilitas buang air besar bersama dengan rumah tangga tertentu. Masih terdapatnya rumah yang tidak memiliki fasilitas MCK tersebut perlu diperhatikan mengingat dalam perumahan hal tersebut menjadi salah satu fasilitas pokok.

Tabel 2.50 Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2024 (%)

Kabupaten/Kota	Sendiri	Bersama Rumah Tangga Tertentu	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada Fasilitas	Jumlah
Kab. Paser	95,93	1,5	0,97	–	1,6	100
Kab. Kutai Barat	92,44	2,89	4,66	–	–	100
Kab. Kutai Kartanegara	96,99	1,23	1,77	–	–	100
Kab. Kutai Timur	94,96	1,32	NA	–	3,62	100
Kab. Berau	97,13	1,48	–	–	1,39	100
Kab. Penajam Paser Utara	93,75	3,36	2,24	NA	NA	100
Kab. Mahakam Ulu	92,22	4,55	1,46	NA	NA	100
Kota Balikpapan	96,78	2,68	NA	–	NA	100
Kota Samarinda	96,41	3,39	NA	–	–	100
Kota Bontang	98,52	1,1	–	–	NA	100
Kalimantan Timur	96,24	2,19	0,86	NA	0,71	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Masalah pemukiman kumuh merupakan masalah yang banyak terjadi di berbagai daerah termasuk Kutai Timur. Di Kutai Timur pemukiman kumuh masih terdapat 7 kecamatan dan 14 desa. Desa dengan pemukiman kumuh terbanyak adalah desa yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan yaitu 5 desa. Selain itu, masalah lain kaitannya dengan pemukiman adalah masih banyaknya pemukiman di bantaran sungai. Terdapat 16 desa yang memiliki pemukiman di bantaran sungai, meski hal itu tidak dalam arti pemukiman kumuh. Kecamatan Telen, Muara Bengkal, Bengalon, dan Kecamatan Sandaran merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak pemukiman di bantaran sungai.

Tabel 2.51 Sebaran Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Pemukiman Kumuh	Pemukiman di Bantaran Sungai
Muara Ancalong	-	4
Busang	-	-
Long Mesangat	-	-
Muara Wahau	-	5
Telen	1	8
Kongbeng	-	2
Muara Bengkal	1	7
Batu Ampar	-	1
Sangatta Utara	1	2
Bengalon	1	9
Teluk Pandan	3	3
Sangatta Selatan	5	5
Rantau Pulung	-	2
Sangkulirang	-	5
Kaliorang	-	2
Sandaran	-	7
Kaubun	-	-
Karangan	2	2
Kutai Timur	14	64

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kutai Timur 2024

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Iklim investasi merupakan kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Dengan Bahasa lain, iklim investasi menggambarkan kondisi daerah yang mampu mendukung pelaksanaan investasi berjalan dengan aman dan stabil. Untuk mendukung iklim yang kondusif untuk investasi, diperlukan dua aspek utama, yaitu pertama lingkungan yang aman dan stabil, tidak bergejolak, tidak ada permasalahan sosial dan kriminalitas dengan intensitas tinggi. Kedua, kebijakan berupa peraturan perundangan yang memberikan kemudahan semua pihak dalam melakukan investasi.

Dari sisi situasi dan kondisi lingkungan, di Kutai Timur kondisinya cukup stabil. Jumlah kriminalitas tergolong rendah, namun yang perlu diperhatikan dan

diwaspadai adalah penyelesaian tindak kriminal. Tahun 2023 sebanyak 77% Tindakan kriminal telah diselesaikan dan angka ini cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya penyelesaian Tindakan kejahatan menunjukkan respons dan komitmen pemerintah daerah Bersama pihak berwenang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tahun 2024 persentase tindak kejahatan yang mampu diselesaikan naik tajam menjadi 90%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menjaga suasana kondusif sehingga mampu mendorong pembangunan Kutai Timur dan mampu memberikan kepercayaan tinggi masyarakat luar terutama calon investor terhadap Kutai Timur yang tertib dan aman.

Di sisi lain, di tahun 2024 jumlah demonstrasi di Kutai Timur juga tergolong rendah yaitu hanya 5 demonstrasi. Lima demonstrasi tersebut adalah 1 demonstrasi politik, 2 demonstrasi masalah ekonomi, dan 2 demonstrasi masalah sosial. Jumlah demonstrasi yang relatif sedikit ini semakin mendukung iklim Kutai Timur yang kondusif serta komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan iklim yang mendorong iklim investasi.

Tabel 2.52 Penyelesaian Tindak Kejahatan (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1. Paser	86	79	78	74	59
2. Kutai Barat	90	95	55	77	77
3. Kutai Kartanegara	99	97	90	89	89
4. Kutai Timur	78	62	82	77	90
5. Berau	74	95	86	68	60
6. Penajam Paser Utara	84	89	87	86	77
7. Mahakam Ulu	–	...		34	51
8. Balikpapan	91	78	74	51	62
9. Samarinda	97	91	80	66	65
10. Bontang	78	102	79	47	34
Kalimantan Timur	87	85	80	67	66

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2025

Tabel 2.53 Kegiatan Demonstrasi Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Demo Politik	Demo Ekonomi	Demo Sosial	Jumlah
1. Paser	–	3	1	4
2. Kutai Barat	–	–	–	–
3. Kutai Kartanegara	3	6	4	13
4. Kutai Timur	1	2	2	5
5. Berau	–	1	3	4
6. Penajam Paser Utara	–	–	–	–
7. Mahakam Ulu				
8. Balikpapan	–	5	6	11
9. Samarinda	2	3	4	9
10. Bontang	–	–	1	1
Kalimantan Timur	6	20	21	47

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2025

F. Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu ada di setiap daerah dalam berbagai bentuk seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban bencana. Penanganan masalah sosial menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah yang menjadi bagian dari pelayanan dasar. Masalah sosial yang tidak segera ditangani dapat memicu terjadinya masalah lainnya. Pemerintah daerah berupaya untuk melakukan penanganan masalah sosial melalui berbagai program antara lain bantuan sosial (Bansos) pangan.

Di Kutai Timur jumlah rumah tangga penerima Bansos pangan pada tahun 2023 mencapai 70.560 dari 77.240 yang direncanakan, atau terealisasi sebesar 91,35%. Di tahun 2024 jumlah rumah tangga penerima Bansos ini menurun cukup drastis menjadi 46.425 dari 50.018 yang direncanakan atau realisasinya turun sebesar -7,18%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan karena keterbatasan alokasi anggaran, bukan karena jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kutai Timur tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan 2023 dari 37.040 menjadi 37.110, meski tingkat kemiskinan 2024 mengalami penurunan dibandingkan 2023 dari 9,06% menjadi 8,81%.

Tabel 2.54 Jumlah Rumah Tangga Penerima Bansos Pangan Tahun 2021-2024

Kabupaten/ Kota	Persentase Realisasi			
	2021	2022	2023	2024
Paser	94,52	82,09	92,68	93,53
Kutai Barat	106,59	85,15	90,79	91,39
Kutai Kartanegara	99,29	79,89	90,04	92,77
Kutai Timur	101,36	88,08	91,35	92,82
Berau	105,72	92,87	95,56	95,94
Penajam Paser Utara	116,37	92,07	93,82	94,41
Mahakam Ulu	100,00	77,58	79,12	77,98
Kota Balikpapan	94,24	81,10	90,95	92,70
Kota Samarinda	93,24	82,74	92,46	93,69
Kota Bontang	92,20	88,71	84,40	88,37
Kalimantan Timur	98,96	84,01	91,36	92,91

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, di mana capaian indikator kinerja untuk urusan Sosial pada tahun 2023 adalah: a) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial Kelompok Maupun Perorangan sebesar 64,28%; b) Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar 20%; c) Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial sebesar 100%; d) Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 90,87%; e) Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 100%.

2.1.4.4.2. Urusan Pemeritahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan masalah penting yang menjadi salah satu tujuan pembangunan daerah. Pemerintah daerah akan berupaya Pembangunan yang

dilaksanakan mampu mendorong terwujudnya inklusivitas antara lain dengan semakin terbukanya kesempatan kerja. Hal ini akan menjadikan semakin kecilnya Tingkat pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan Tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan Angkatan kerja.

Tingkat pengangguran di Kutai Timur tahun 2023 tercatat 5,93% dan tahun 2024 ini turun menjadi 5,76%. Angka pengangguran baik 2023 maupun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, tingkat pengangguran di Kutai Timur tahun 2024 ini adalah tertinggi ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Selama 2018-2024 tingkat pengangguran di Kutai Timur cenderung stagnan di kisaran 5%. Meskipun Kutai Timur memiliki PDRB serta PDRB per kapita yang tinggi, bahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun hal tersebut belum secara signifikan berdampak pada pengurangan Tingkat pengangguran seperti yang diharapkan. Perluasan kesempatan kerja menjadi prioritas penting untuk dilaksanakan dengan memperkuat sektor non pertambangan dan penggalian.

Dari sisi pendidikannya, Tingkat pengangguran Kutai Timur tahun 2024 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA/ sederajat (7,64%) dan yang terkecil adalah lulusan perguruan tinggi (2,23%). Dari sisi jenis kelaminnya Tingkat pengangguran Kutai Timur tahun 2024 didominasi oleh Perempuan (7,39%) sedangkan laki-laki hanya 5,06%. Dengan demikian karakteristik pengangguran di Kutai Timur adalah para lulusan SMA/ sederajat yang berjenis kelamin Perempuan. Banyaknya Perempuan yang berstatus pengangguran bisa dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya tentang status Perempuan, namun bisa pula dimaknai jenis atau karakteristik pekerjaan di Kutai Timur yang memang lebih banyak membutuhkan laki-laki dibandingkan Perempuan. Pengangguran juga dapat disebabkan karena ketidaksinkronan antara jenis/ karakteristik pekerjaan yang diperlukan dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Hal ini memerlukan kebijakan dan strategi yang integral, bukan parsial yang mampu memperkecil gap atau kesenjangan di pasar tenaga kerja dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pengembangan ekonomi wilayah juga diharapkan dapat dilakukan untuk memperkecil Tingkat pengangguran.

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dari 5,45 pada tahun 2020 menjadi 5,76 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan perpindahan penduduk dari berbagai daerah ke Kabupaten Kutai Timur semakin tinggi setiap tahunnya. Ini mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja tidak mengalami pertumbuhan secara alami. Namun di satu sisi perkembangan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan angkatan kerja yang tersedia. Selain itu, bonus demografi yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur belum mampu dimanfaatkan untuk menciptakan angkatan kerja yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam lapangan kerja formal.

Tabel 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka dan TPAK Tahun 2020-2024 (%)

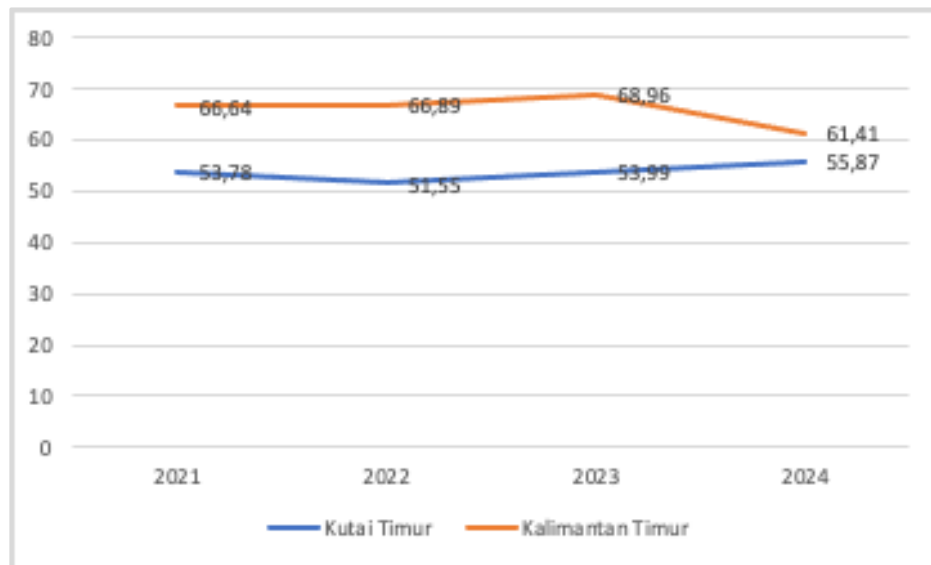
Tahun	TPT		TPAK	
	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	5,45	6,87	68,96	65,50
2021	5,35	6,83	67,97	65,49
2022	6,48	5,71	67,78	64,73
2023	5,93	5,31	66,22	65,57
2024	5,76	5,14	66,78	66,31

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan indikator yang menunjukkan keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan daerah melalui berbagai peran. Pemberdayaan perempuan menggambarkan adanya kesetaraan gender. Salah satu ukuran yang menggambarkan derajat pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IPG mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam bidang-bidang seperti parlemen, pejabat senior, manajer, profesional, teknis, dan pendapatan. IPG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Gambar 2.38 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

IPG Kutai Timur selama 3 tahun terakhir yaitu dari 2022-2024 menunjukkan kenaikan dari 51,55; 53,99; dan di tahun 2024 menjadi 55,86 sementara pada periode sebelumnya yaitu 2021-2022 sempat menunjukkan penurunan. IPG Kutai Timur tahun 2024 merupakan terendah ketiga se-Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan di Kutai Timur masih kurang dibandingkan daerah lain baik keterlibatan dalam ekonomi, politik, maupun jabatan-jabatan publik serta karir. IPG Kutai Timur juga masih jauh di bawah IPG Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 61,41 di tahun 2024.

C. Pangan

Aspek penting dalam urusan pangan adalah berkaitan dengan posisi penduduk yang mengalami ketidakcukupan pangan. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah Jumlah penduduk yang

mengalami ketidakcukupan konsumsi energi minimum untuk hidup sehat dan aktif di suatu wilayah (nasional atau provinsi atau kab/kota) pada tahun tertentu

Dengan demikian prevalensi ketidakcukupan pangan menggambarkan persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum dari konsumsi pangannya, biasanya dengan ambang batas 2.100 kilokalori per kapita per hari. Semakin tinggi angka prevalensi ketidakcukupan pangan berarti semakin buruk, karena menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami kekurangan pangan dari sisi jumlah energi yang dikonsumsi, demikian pula sebaliknya.

Prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,6%, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 7,51%. Angka ini juga menempatkan Kutai Timur lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, seperti Penajam Paser Utara (8,2%), Mahakam Ulu (8,18%), dan Kutai Kartanegara (8,06%), kecuali Kota Balikpapan yang memiliki nilai lebih rendah, yaitu 5,9%.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kutai Timur memiliki kinerja yang relatif lebih baik dalam pengendalian kerawanan pangan dibandingkan provinsi dan mayoritas daerah lainnya. Rendahnya IKP berarti proporsi penduduk yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pangan yang cukup secara energi lebih kecil. Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan—melalui intervensi seperti peningkatan produksi lokal, penguatan distribusi, dan program perlindungan sosial. Dengan kata lain, Kutai Timur lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakatnya dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Kaltim.

Gambar 2.39 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

D. Pertanahan

Pertanahan merupakan hal yang berpotensi tinggi menimbulkan konflik atau sengketa baik antar individu maupun kelompok. Geografis Kutai Timur yang sangat luas berpotensi terhadap berkembangnya penguasaan atas tanah secara sepihak oleh individu maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu masalah pertanahan yang memerlukan prioritas adalah masalah pengelolaan administrasi pertanahan. Persoalan sengketa tanah merupakan peristiwa yang cukup menonjol di Kutai Timur. Persoalan tersebut semakin berkembang dengan adanya program transmigrasi, sehingga pengelolaan tanah transmigrasi memerlukan antisipasi agar tidak berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik. Penyelesaian masalah yang muncul mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Kawasan transmigrasi di Kutai Timur memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, tantangan seperti konflik lahan, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi menjadi merupakan tantangan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Untuk itu keterlibatan unsur kecamatan dan desa menjadi sangat penting dalam administrasi pertanahan.

E. Lingkungan Hidup

Di Kabupaten Kutai Timur terdapat dua pusat kegiatan yaitu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota, dengan Sangatta sebagai wilayah

PKW di Kutai Timur serta kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu a) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan Industri Hijau dan pusat pertanian, perikanan, dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; b) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau c) kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi ekonomi kelautan lokal. Wilayah yang berfungsi menjadi kawasan PKL adalah wilayah Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang.

Pengembangan kawasan di Kutai Timur harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Saat ini terdapat 11 isu lingkungan di Kutai Timur yang menjadi perhatian utama meliputi kebencanaan (banjir, tanah longsor, dan kekeringan), kebakaran hutan, konflik tata ruang, dan optimalisasi ruang terbuka hijau. Selain itu, penting pula diperhatikan eksploitasi tambang, degradasi pesisir (kerusakan hutan mangrove), pencemaran air permukaan, pencemaran udara, pengelolaan sampah dan limbah, ketahanan pangan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Aspek lingkungan hidup merupakan hal yang kompleks sehingga perlu kebijakan dan strategi yang bersifat holistik dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup. Hilirisasi sumber daya alam di Kutai Timur penting untuk dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Dari sebaran pencemaran lingkungan terdapat 30 desa yang memiliki kasus pencemaran air, 5 desa pencemaran tanah, dan 24 desa pencemaran udara. Pencemaran tersebut muncul karena aktivitas rumah tangga dan kegiatan masyarakat. Untuk itu diperlukan kesadaran tinggi masyarakat dalam tanggung jawab memelihara lingkungan hidup.

Tabel 2.56 Sebaran Pencemaran di Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada
Muara Ancalong	-	-	-	10
Busang	1	1	1	5
Long Mesangat	-	-	6	1
Muara Wahau	7	-	1	4
Telen	1	-	1	6
Kongbeng	2	-	-	6
Muara Bengkal	3	2	2	5
Batu Ampar	1	-	-	6

Sanggatta Utara	-	-	1	3
Bengalon	6	2	8	6
Teluk Pandan	-	-	-	7
Sanggatta Selatan	1	-	-	4
Rantau Pulung	-	-	-	9
Sangkulirang	2	-	-	14
Kaliorang	2	-	1	4
Sandaran	-	-	1	8
Kaubun	4	-	2	3
Karangan	-	-	-	7
Kutai Timur	30	5	24	108

Sumber : Dokumen IKLH 2024

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan salah layanan yang berkaitan dengan semua aspek data kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dalam rangka untuk mengidentifikasi jumlah dan kondisi kependudukan di Kutai Timur. Hal ini disebabkan karena aspek kependudukan merupakan sesuatu yang sangat dinamis, baik menyangkut kelahiran, kematian, atau migrasi.

Secara umum pelayanan administrasi kependudukan di antaranya meliputi layanan sebagai berikut:

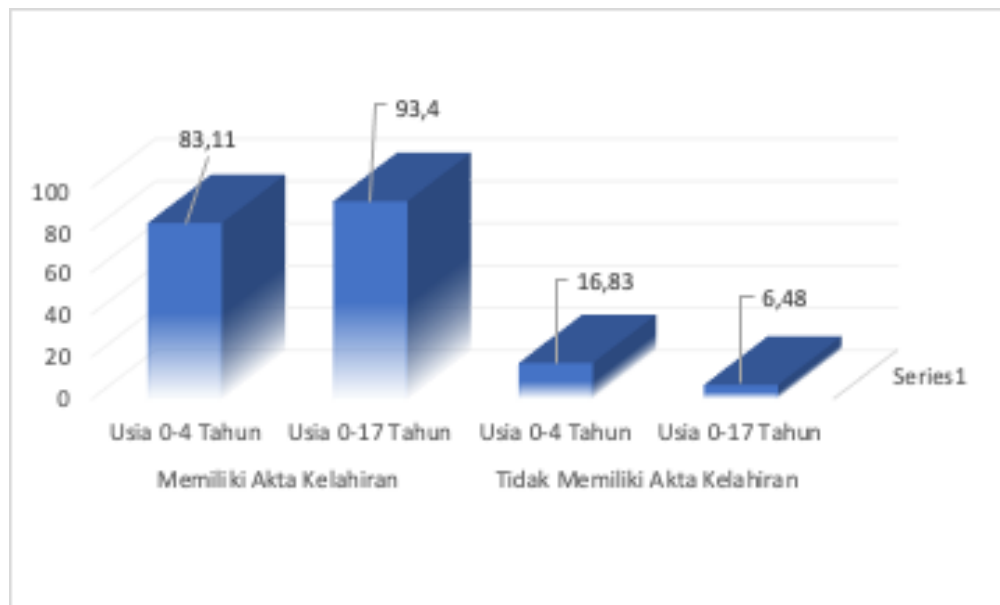
1. Pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan;
3. Pelayanan KTP elektronik;
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI;
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA;
6. Pelayanan pencatatan kelahiran;
7. Pelayanan pencatatan kematian;
8. Pelayanan pencatatan perkawinan;
9. Pelayanan pencatatan perceraian;
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan di Kutai Timur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Akurasi pencatatan data kependudukan sangat penting karena menjadi salah satu dasar dalam

penyusunan kebijakan dan program Pembangunan. Akurasi selain dipengaruhi oleh inisiatif pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh kesadaran Masyarakat atas pentingnya data kependudukan.

Pada tahun 2024 penduduk Kutai Timur usia 0-4 tahun yang memiliki Akta Kelahiran baru mencapai 83,11% dan usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran 96,08%. Hal ini berarti ada Akta Kelahiran yang baru diurus penduduk setelah berumur di atas 4 tahun. Penduduk usia 0-4 tahun dan 0-17 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran di Kutai Timur tersebut adalah yang tertinggi kedua di Kalimantan Timur.

Gambar 2.40 Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa melalui pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan daerah yang dilaksanakan harus diikuti dengan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat desa. Potensi yang ada di masing-masing desa perlu dioptimalkan untuk dikelola masyarakat setempat.

Tabel 2.57 Potensi Ekonomi Desa di Kutai Timur Tahun 2024

Kecamatan	BUMDes	Keberadaan Produk Unggulan		Produk Unggulan yang Diekspor	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Muara Ancalong	-	1	9	-	1
Busang	-	-	6	-	-
Long Mesangat	3	3	4	-	3
Muara Wahau	1	6	5	2	4
Telen	1	-	8	-	-
Kongbeng	1	1	7	-	1
Muara Bengkal	-	5	3	-	5
Batu Ampar	5	2	5	1	1
Sangatta Utara	1	2	2	1	1
Bengalon	4	9	6	-	9
Teluk Pandan	1	4	3	-	4
Sangatta Selatan	-	5	-	-	5
Rantau Pulung	1	4	5	-	4
Sangkulirang	2	9	7	-	9
Kaliorang	4	2	5	2	-
Sandaran	-	4	5	-	4
Kaubun	-	2	6	1	1
Karangan	-	1	6	-	1
Kutai Timur	24	60	92	7	53

Sumber: Statistik Potensi Desa Kabupaten Kutai Timur 2024

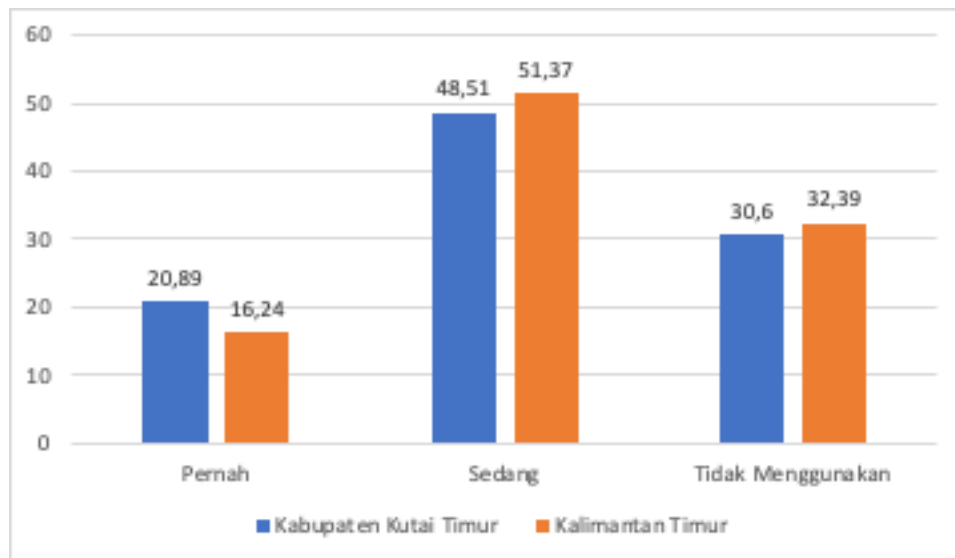
Di Kutai Timur pada tahun 2024 terdapat 24 BUMDes, angka ini masih perlu ditingkatkan dengan memberdayakan potensi masyarakat dan desa. Produk unggulan yang dimiliki oleh masing-masing desa masih perlu untuk ditingkatkan, pada tahun 2024 terdapat 60 desa yang memiliki produk unggulan dan dari jumlah tersebut baru 7 produk yang diekspor. Dengan demikian potensi produk unggulan untuk dikembangkan masih besar melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa akan mempercepat pemerataan pembangunan daerah, mengurangi tingkat pengangguran, serta menurunkan tingkat kemiskinan.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk penting untuk dikendalikan, bukan dibatasi. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kemampuan masing-masing keluarga untuk memberikan penghidupan layak bagi keluarga. Secara geografis Kutai Timur sangat luas dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, namun hal tersebut tidak berarti

aspek pengendalian penduduk menjadi hal yang tidak penting. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak pada kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang meningkat pula. Salah satu Upaya pengendalian penduduk adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi KB.

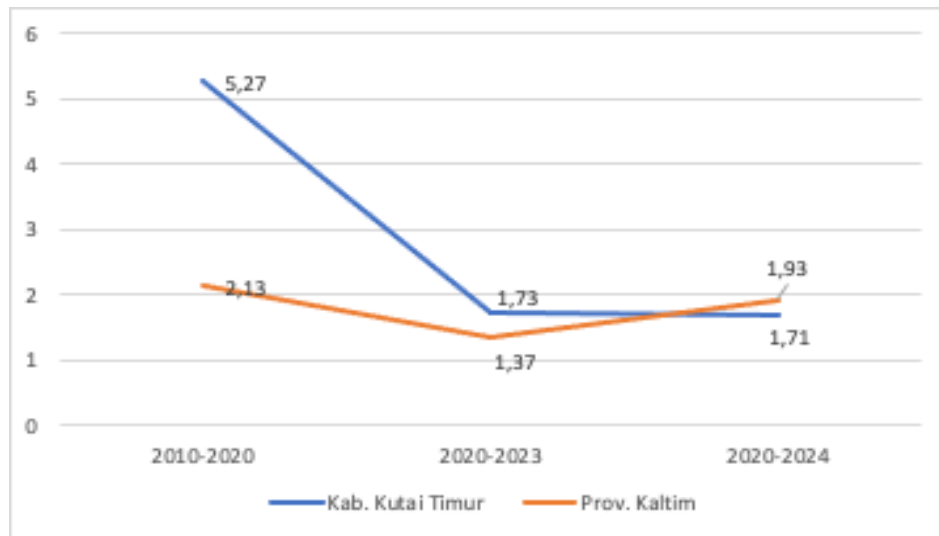
Gambar 2.41 Penggunaan Alat KB Perempuan Usia 15-49 Tahun 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2024 sebanyak 20,89% Perempuan usia 15-49 tahun pernah menggunakan alat KB dan yang sedang menggunakan alat KB mencapai 48,51%. Perempuan yang sedang menggunakan alat KB tahun 2024 tersebut tergolong kecil yaitu terendah ketiga di Kalimantan Timur. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan jumlah penduduk di Kutai Timur akan menjadi lebih tinggi. Pertumbuhan penduduk Kutai Timur 2010-2020 per tahun adalah 5,27%; tertinggi di Kalimantan Timur dan di tahun 2020-2023 pertumbuhan penduduk per tahun 1,73%; masih yang tertinggi di Kalimantan Timur. Di tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,71% dan angka ini tertinggi ketiga di Kalimantan Timur.

Gambar 2.42 Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2024

I. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan urusan penting daerah dalam rangka mendukung konektivitas antarwilayah. Urusan perhubungan berkaitan dengan kelancaran lalu lintas angkutan darat, laut, dan udara. Dalam hal angkutan darat aspek perhubungan berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Pada tahun 2024 panjang jalan Kutai Timur adalah 1.128 km dengan jumlah kendaraan roda dua 217.098 dan roda empat 58.004. Rasio jalan terhadap kendaraan roda dua adalah 192 per km, artinya terdapat 192 kendaraan roda dua dalam 1 km jalan. Untuk roda empat terdapat 51 kendaraan per km. Pertumbuhan jumlah kendaraan perlu diimbangi dengan penambahan Panjang jalan untuk memperlancar arus lalu lintas. Permasalahan yang penting diperhatikan adalah dari Panjang jalan di tahun 2024 tersebut hanya 377,63 km yang memiliki kondisi Baik dan 719,58 km dalam kondisi Rusak Berat. Selain itu jalan yang permukaannya aspal baru sekitar 200 km dan permukaan beton sekitar 250 km. Dengan demikian secara bertahap perlu dilakukan perbaikan jalan terutama jalan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi Masyarakat antarwilayah termasuk jalur lalu lintas pelabuhan.

Tabel 2.58 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022-2024

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Jumlah Kendaraan (Unit)		Rasio Kendaraan Terhadap jalan		
		Roda 2	Bukan Roda 2	Roda 2	Bukan Roda 2	Total
2022	1.105,77	222.081	33.215	201	30	231
2023	1127	217.093	57.996	193	51	244
2024	1128	217.098	58.004	192	51	244

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025, diolah

Untuk perhubungan laut, aktivitas tersebut dapat dilihat pada Pelabuhan Kutai Timur. Aktivitas muat menggambarkan banyaknya barang yang akan diangkut keluar dari Kutai Timur sedangkan aktivitas bongkar merupakan aktivitas barang yang masuk ke Kutai Timur. Aktivitas bongkar muat barang di Kutai Timur semuanya berupa barang hasil pertambangan, bahan bakar, dan bahan bangunan/konstruksi. Tidak terlihat aktivitas bongkar muat untuk barang-barang industri, perdagangan, maupun pertanian.

Tabel 2.59 Muat-Bongkar Pelabuhan Kutai Timur Tahun 2022-2024

Jenis Barang	Dimuat			Dibongkar		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Bahan Bakar Minyak	4.610	6.900	22.720	143.910	203.554	741.071
Batu Bara	46.420.248	56.069.846	59.817.984	–	45.069	824.695
Semen	750	108.250	2.720.325	25.160	23.314	2.156
Pasir Batu	–	–	11.002	82.536	218.228	622.546
Campuran	–	–	199.121	–	–	211.747
Alat Berat	41.820	18.977	63.828	36.490	41.085	17.592

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025, diolah

J. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kutai Timur memegang peran yang sangat penting. Kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan berbukit memerlukan dukungan komunikasi yang handal melalui jaringan internet. Dengan jaringan komunikasi yang handal komunikasi antarwilayah akan tetap dapat berjalan lancar karena tidak terbatas pada tempat dan waktu. Infrastruktur komunikasi yang handal akan mendorong kehidupan bermasyarakat berjalan lebih dinamis. Komunikasi yang handal dan merata akan mendukung urusan kependidikan, layanan publik, maupun perekonomian Masyarakat. Untuk mendukung jaringan komunikasi internet diperlukan menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagai media

menangkap sinyal internet untuk selanjutnya disebarluaskan. Jumlah BTS Kutai Timur tahun 2024 adalah 1.752; melonjak tajam dibandingkan tahun 2023 yang banyaknya 1.053. BTS terbanyak berada di Kecamatan Sangatta Utara, disuse kemudian Kecamatan Bengalon, Muara Wahau, Teluk Pandan, dan Kongbeng. Peningkatan jumlah BTS di beberapa kecamatan disesuaikan dengan kondisi geografis.

Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap kualitas penerimaan sinyal internet. Berdasarkan data Potensi Desa di Kabupaten Kutai Timur yang disusun oleh BPS Kabupaten Kutai Timur, dari seluruh desa atau kelurahan yang ada, 77 desa/kelurahan memiliki sinyal internet kuat dan 55 memiliki sinyal lemah. Masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau sinyal yaitu wilayah di Kecamatan Sandaran. Beberapa wilayah belum diketahui tentang status kekuatan sinyal seperti Sangatta Utara.

Tabel 2.60 Jumlah Base Transceiver Station (BTS) di Kutai Timur Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Muara Ancalong	5	5	9	32	55
Busang	1	1	7	6	15
Long Mesangat	1	1	5	12	19
Muara Wahau	14	14	15	88	171
Telen	9	9	11	28	49
Kongbeng	13	13	14	62	105
Muara Bengkal	11	11	13	32	53
Batu Ampar	3	4	7	19	21
Sangatta Utara	50	50	50	262	397
Bengalon	18	18	22	132	244
Teluk Pandan	17	17	18	88	121
Sangatta Selatan	15	14	14	66	97
Rantau Pulung	6	8	10	37	63
Sangkulirang	13	13	19	56	87
Kaliorang	8	8	9	32	65
Sandaran	4	4	11	14	36
Kaubun	9	9	15	46	80
Karangan	4	4	10	41	74
Kutai Timur	201	203	259	1.053	1.752

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025

Tabel 2.61 Status Sinyal Internet di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Kecamatan	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal
Muara Ancalong	3	7	-
Busang	-	6	-
Long Mesangat	-	7	-
Muara Wahau	4	2	-
Telen	7	1	-
Kongbeng	5	-	-
Muara Bengkal	5	3	-
Batu Ampar	4	3	-
Sangatta Utara	-	-	-
Bengalon	6	9	-
Teluk Pandan	1	-	-
Sangatta Selatan	-	5	-
Rantau Pulung	9	-	-
Sangkulirang	6	9	-
Kaliorang	7	-	-
Sandaran	3	3	3
Kaubun	7	-	-
Karangan	7	-	-
KUTAI TIMUR	74	55	3

Sumber: Statistik Potensi Desa Kabupaten Kutai Timur 2024, BPS Kabupaten Kutai Timur

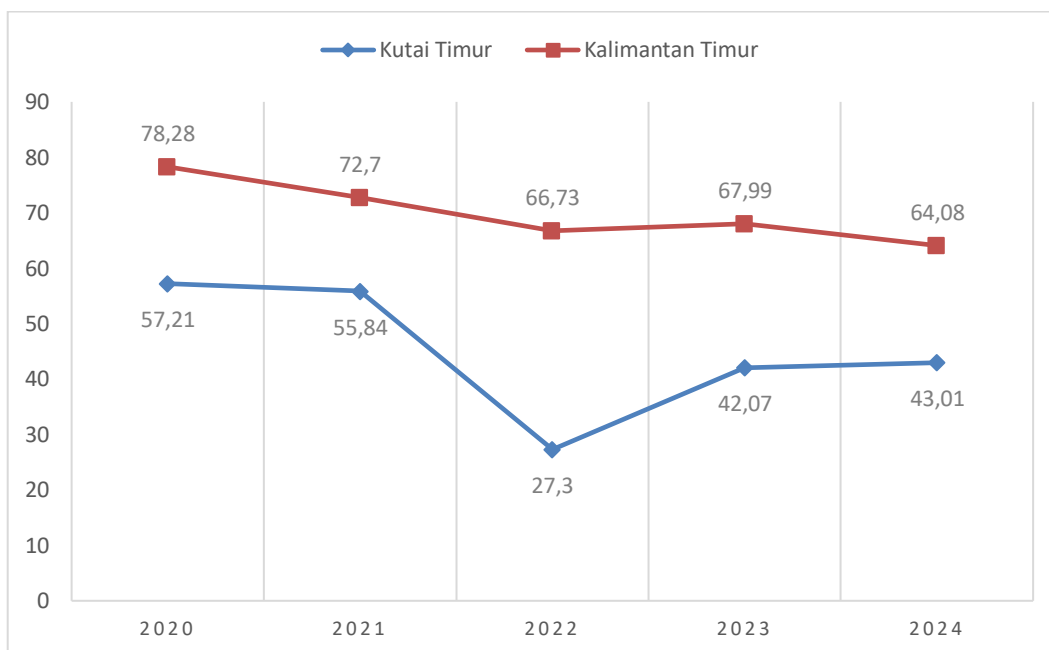
K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UMKM merupakan bentuk usaha yang menggambarkan pemberdayaan masyarakat luas. Di Indonesia kontribusi UMKM terhadap PDB cukup besar yaitu sekitar 60,5% namun 99% dari pelaku usaha adalah para UMKM. Pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta memperkecil tingkat ketimpangan yang ada.

Di Kutai Timur jumlah koperasi aktif berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur mencapai 465 unit. Koperasi aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Salah satu aspek yang juga penting selain keaktifan adalah koperasi yang sehat. Menurut Pemerintah Daerah Kutai Timur, koperasi sehat berdasarkan aset untuk tahun 2023, kali ini ada peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 44 unit meningkat menjadi 80 unit Koperasi. Untuk Koperasi yang diperiksa dan diawasi

oleh Satuan Tugas (satgas) Diskop Kutim, ada sekitar 10 unit Koperasi. Sementara itu jumlah UMKM di Kutai Timur berdasarkan identifikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Timur adalah sekitar 6.000an. Beberapa program pemberdayaan koperasi dan UMKM telah dilakukan seperti bimbingan teknis, pemasaran, produksi, maupun keuangan. Hal penting yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses permodalan serta peningkatan kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan Perusahaan besar.

Gambar 2.43 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2023

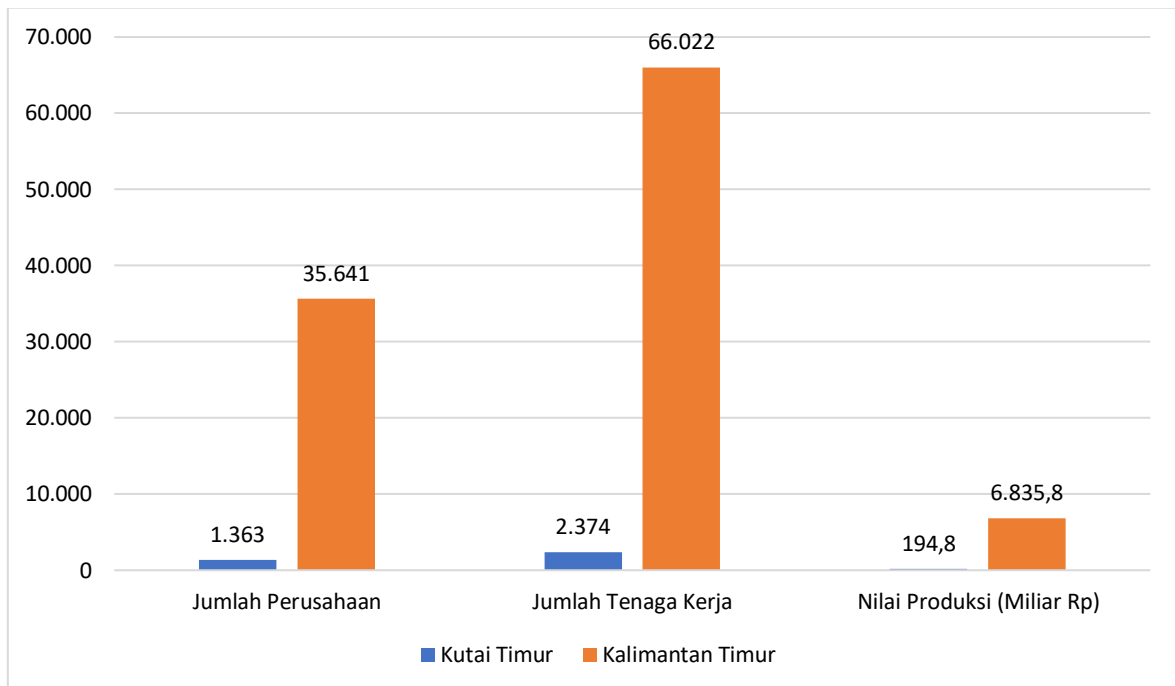


Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Jumlah Perusahaan industri mikro dan kecil di Kutai Timur tahun 2023 sebanyak 1.363 dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.374. Dengan demikian rata-rata setiap perusahaan hanya menyerap 1-2 tenaga kerja. Nilai produksi dari 1.363 perusahaan tersebut adalah 194 Miliar atau rata-rata setiap perusahaan menghasilkan pendapatan 143 juta per tahun. Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, jumlah Perusahaan mikro dan kecil tahun 2023 adalah 35.641 dengan tenaga kerja 66.022 atau rata-rata per UMKM adalah 2 orang, namun pendapatan per perusahaan mencapai sekitar 192 juta; lebih tinggi dibandingkan Kutai Timur. Sementara itu jumlah perusahaan besar dan sedang di Kutai Timur pada tahun 2023 adalah 38 perusahaan, namun mampu menyerap sekitar 9.677

tenaga kerja. Permasalahan perusahaan mikro dan kecil di Kutai Timur menyangkut 2 aspek utama yaitu pemasaran dan akses permodalan.

Gambar 2.44 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Tahun 2023



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

L. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan komponen penting dalam mendorong pembangunan daerah. Tingginya penanaman modal atau investasi akan mendorong bukan hanya pertumbuhan ekonomi, namun juga pengurangan tingkat pengangguran melalui penciptaan tenaga kerja serta pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu investasi yang berkembang akan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Penanaman modal atau investasi terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai PMDN Kutai Timur tahun 2024 berdasarkan data *National Single Window for Investment* Kementerian Investasi dan Hilirasi serta BPS Provinsi Kalimantan Timur mencapai 3.429.334,20 juta atau sekitar 3,4 triliun. Nilai ini turun jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5.241.826,7 juta atau sekitar 5,2 triliun. Dari sisi jumlah proyeknya, nilai investasi 2024 tersebut untuk 1.350 proyek; naik bila dibandingkan jumlah proyek

tahun 2023 yang banyaknya 665 proyek. Untuk PMA pada tahun 2024 US\$240.873,20 juta; turun bila dibandingkan tahun 2023 yang besarnya US\$458.235,8 juta. Dari sisi jumlah proyek PMA di tahun 2024, terjadi kenaikan yang tajam dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari 82 proyek menjadi 207 proyek. Investasi di tahun 2024 tersebut mampu menyerap sekitar 25 tenaga kerja dan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024.

Investasi yang terjadi di Kutai Timur diharapkan mampu mendorong munculnya efek *multiplier* berupa pengembangan sektor industri dan perdagangan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan promosi intensif terhadap keunggulan sumber daya alam Kutai Timur, khususnya sumber daya berbasis pertanian dalam rangka mewujudkan tercapainya hilirisasi SDA.

Tabel 2.62 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2024

Tahun	Kutai Timur		Kalimantan Timur	
	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)
2021	536	5.279.054,0	4.317	30.297.382,2
2022	447	3.428.929,9	4.219	39.595.633,0
2023	665	5.241.826,7	7.571	52.171.695,7
2024	1.350	3.429.334,20	18.524	38.669.046,70

Sumber: NSWI Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.63 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2024

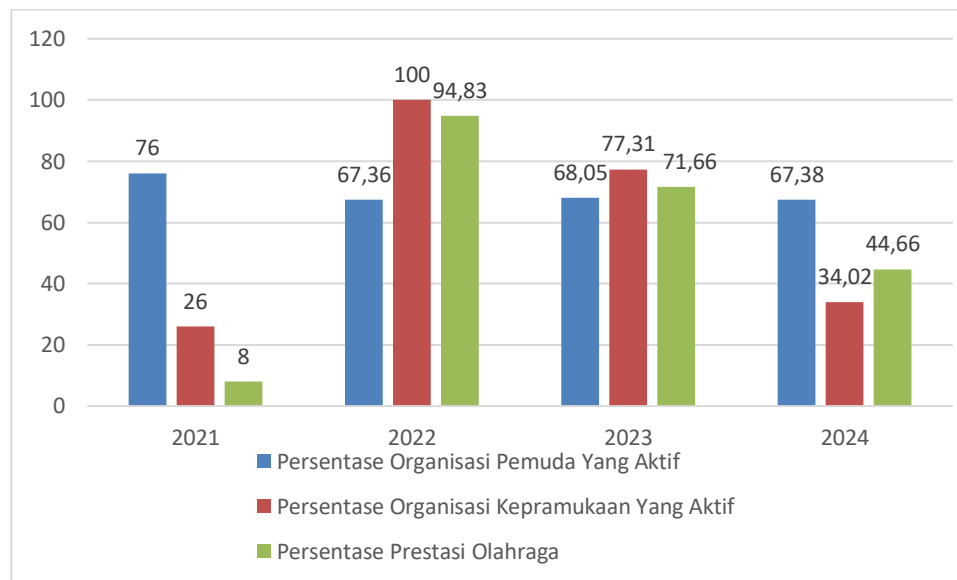
Tahun	Kutai Timur		Kalimantan Timur	
	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)
2021	54	248.360,8	428	745.190,2
2022	65	630.926,0	486	1.266.221,9
2023	82	458.235,8	822	1.332.710,6
2024	207	240.873,20	2.274	1.144.415,80

Sumber: NSWI Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

M. Kepemudaan dan Olahraga

Peran pemerintah dalam pembinaan pemuda dan olahraga memegang posisi strategis dalam mencetak generasi muda yang sehat, aktif, dan berpotensi, baik dalam bidang olahraga maupun dalam konteks pembangunan nasional secara lebih luas. Melalui pembinaan yang efektif, pemerintah dapat berkontribusi signifikan dalam mengembangkan pemuda yang tidak hanya unggul dalam prestasi olahraga, tetapi juga menjadi aset berharga bagi pembangunan bangsa.

Gambar 2.45 Capaian Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2021-2024



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur, 2025

Pada indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif, capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 76 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 67,36 persen. Pada tahun 2023 capaian relatif stabil di angka 68,05 persen dan kembali sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 67,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan organisasi pemuda belum sepenuhnya pulih seperti pada awal periode, sehingga diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif, peningkatan fasilitasi kegiatan, serta penguatan kapasitas kelembagaan organisasi pemuda agar partisipasi dan keberlanjutan organisasi dapat meningkat.

Indikator Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2021 capaian berada pada angka 26 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 100 persen pada tahun 2022. Namun demikian, capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 77,31 persen dan kembali turun secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 34,02 persen.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keaktifan organisasi kepramukaan masih sangat dipengaruhi oleh program atau kegiatan tertentu dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Ke depan, diperlukan strategi pembinaan yang lebih sistematis serta penguatan peran gugus depan dan kwartir agar aktivitas kepramukaan dapat berjalan secara konsisten.

Sementara itu, indikator Persentase Prestasi Olahraga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 94,83 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 8 persen. Namun, pada tahun 2023 capaian menurun menjadi 71,66 persen dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 44,66 persen. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas kompetisi, keterbatasan pembinaan atlet, serta faktor regenerasi atlet dan dukungan sarana prasarana olahraga. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan adanya potensi prestasi olahraga daerah yang perlu terus dikembangkan.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa program kepemudaan dan olahraga telah berjalan dan memberikan dampak, namun masih memerlukan penguatan dari sisi kesinambungan program, konsistensi pembinaan, serta dukungan sumber daya. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan program pada periode selanjutnya agar pembangunan kepemudaan dan olahraga dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

N. Statistik dan Persandian

Sistem data dan statistik yang terintegrasi memiliki peran penting dalam menyediakan akses yang mudah dan cepat ke data yang relevan, memfasilitasi analisis yang mendalam, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Namun, pengembangan dan pengoperasian sistem seperti ini juga menghadapi beberapa tantangan signifikan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengelola program-program urusan statistik telah menunjukkan kesesuaian yang signifikan antara kegiatan yang dijalankan dan target kinerja yang ditetapkan. Salah satu capaian penting dari program-program tersebut adalah tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kabupaten Kutai Timur. Ketersediaan sistem ini merupakan

indikator kinerja utama yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan daerah. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi menandakan adanya kemajuan dalam infrastruktur pengelolaan data di Kabupaten Kutai Timur. Sistem ini memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara efisien, menyediakan informasi yang akurat dan terkini untuk berbagai kepentingan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan.

O. Kebudayaan

Kutai Timur adalah wilayah yang heterogen, yang dihuni dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Dalam konteks masyarakat adat, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki suku asli yang telah berdiam sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Masyarakat adat di Kutai Timur memiliki kearifan lokal yang kaya dan bersejarah, yang tercermin dalam budaya dan tradisi mereka. Salah satu contoh penting adalah "Pelas Tanah", sebuah pesta adat yang diselenggarakan setiap tahun. Pelas Tanah memiliki akar sejarah yang mendalam, berawal dari tradisi kerajaan Kutai Martadipura, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri sejak sekitar abad ke-4. Kerajaan ini, dikenal juga sebagai Kutai Kartanegara ing Martadipura, memiliki sejarah yang merupakan salah satu yang tertua di Nusantara.

Selain itu, terdapat upaya khusus untuk mengembangkan dan memantapkan potensi budaya masyarakat adat Wehea Kelay di Kutai Timur sebagai destinasi wisata. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu Kawasan destinasi wisata utama di Kutai Timur dengan fokus pada pengembangan wisata sosial budaya. Strategi pengembangannya meliputi studi kajian untuk mengembangkan potensi wisata budaya dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempromosikan destinasi wisata masyarakat adat Wehea Kelay. Kedua aspek ini, Pelas Tanah dan pengembangan Wehea Kelay, menunjukkan bagaimana masyarakat adat Kutai Timur tidak hanya mempertahankan budaya mereka yang kaya, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dan mengintegrasikan warisan budaya tersebut ke dalam konteks modern, khususnya pariwisata, untuk mempromosikan dan melestarikan tradisi mereka.

Kutai Timur memiliki beberapa pilar kebudayaan, yakni kebudayaan pedalaman dan kebudayaan pesisir dari etnis Kutai Timur, kebudayaan berlatar

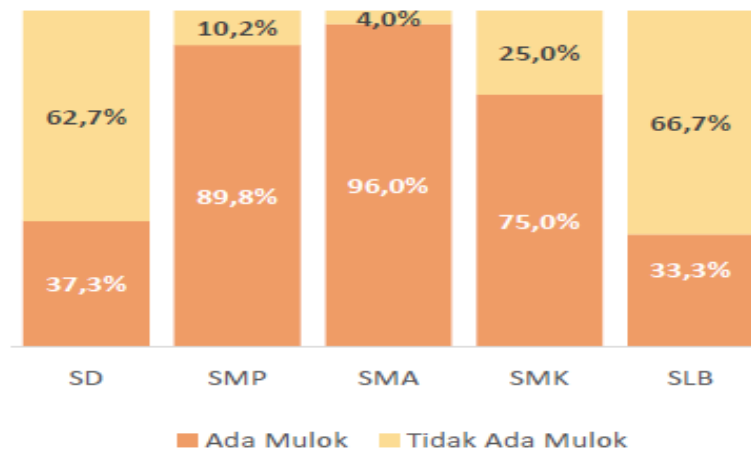
agama serta kebudayaan berdasar etnis pendatang. Kebudayaan pedalaman adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat etnis Dayak. Beberapa di antaranya dalam bentuk seni tari, seperti tari perang, tari enggang, tari berburu, dan tari gentar. Selain itu juga dalam bentuk ritual dan upacara-upacara adat, di antaranya berupa pesta adat lomplai, hudoq, dan belian. Seni tradisi tersebut tetap bertahan dan bahkan tumbuh berkembang, termasuk cerita-cerita rakyat. Senu rupa dan kriya yang berbasis kebudayaan lokal sangat berkembang, seperti ukiran dan kehidupan komunitas rumah adat (rumah panjang/lamin), mandau, tombak dan talabang. Seni musiknya juga khas, seperti sampe, seni bermain gong dan tari gong, kelentangan, kulintang, gendang, dan apa yang mereka sebut suling dewa.

Salah satu upacara khas suku Dayak di daerah ini yang menarik adalah Lomplai, semacam pesta adat yang digelar masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran Sungai Wahea dan Sungai Telen, Kecamatan Wahau. Lomplai mengandung arti mengantisipasi agar tidak sakit atau selalu sehat dan panjang umur. Namun, lomplai bisa juga diartikan sebagai pesta masa panen padi.

Lomplai adalah salah satu bentuk kearifan lokal terkait bagaimana masyarakat di sana menghargai alam dan lingkungan sekitar sebagai tak terpisah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena itu, upacara ini mengandung banyak makna pujian dan rasa terima kasih kepada alam dan sang pencipta. Tumbuhan padi dalam pesta ini dijadikan ikon, sehingga semua manusia menghargai tumbuhan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Prosesnya ditandai dengan pemukulan gong yang dijuluki ngesea agung dan diikuti tetabuhan yang disebut tewung. Pesta adat warisan leluhur yang hingga kini terus dipertahankan ini membuat masyarakat masa kini dapat melihat peninggalan budaya masa lalu yang masih tetap lestari.

Dalam Pendidikan, upaya pelestarian budaya antara dilakukan melalui penyelenggaraan muatan lokal pada berbagai jenjang Pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut muatan lokal untuk jenjang SD/ sederajat hanya 37,3%. Pengenalan budaya penting dilakukan sejak sekolah dasar sehingga para murid mengenal dan memahami dengan baik budaya dan seni yang berkembang di Kutai Timur. Di jenjang SMP/ sederajat dan SMA muatan lokal sudah cukup tinggi yaitu masing-masing 89,8% dan 96,0% sementara untuk SMK sebesar 75,0%.

Gambar 2.46 Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

P. Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk mendukung keberadaan perpustakaan di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan manajemen perpustakaan yang memadai. Hal ini termasuk menyediakan koleksi buku yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan mencatat aktivitas perpustakaan untuk menilai kinerja serta minat baca masyarakat. Di Kutai Timur, terdapat upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan, khususnya dalam rangka mengangkat minat baca masyarakat.

Salah satu area yang perlu ditingkatkan adalah mempermudah akses masyarakat ke sumber bacaan dan informasi. Perpustakaan juga diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui upaya literasi. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kesadaran literasi di kalangan masyarakat Kutai Timur. Dengan demikian, perpustakaan diharapkan dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kesadaran literasi di Kabupaten Kutai Timur. Di samping itu, perbaikan sistem kearsipan di Kabupaten Kutai Timur juga penting, dengan mengadopsi sistem berbasis elektronik atau teknologi informasi yang memadai. Ini sesuai dengan kebijakan kearsipan nasional yang menjadi dasar pengelolaan arsip penting milik pemerintah.

Keseluruhan upaya ini diharapkan dapat memajukan pengelolaan perpustakaan dan literasi di Kabupaten Kutai Timur, mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan arsip yang terpadu dan berkelanjutan, mencakup arsip dinamis dan arsip statis di seluruh perangkat daerah. Arah kebijakan urusan kearsipan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola arsip, melalui penguatan kelembagaan kearsipan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan arsip secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan kearsipan diarahkan pada transformasi digital kearsipan, termasuk pengembangan arsip elektronik, alih media arsip, serta peningkatan keamanan dan perlindungan arsip. Digitalisasi arsip diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat akses informasi, serta meminimalkan risiko kehilangan dan kerusakan arsip.

2.1.4.4.2 Urusan Pemeritahan Pilihan

A. Perikanan

Kutai Tmur memiliki potensi besar di bidang perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangan dan pengolahan potensi perikanan di Kutai Timur diharapkan dapat mendorong hilirisasi sektor perikanan serta dikembangkan dalam rangka mendukung *blue economy*. Produksi perikanan tangkap darat di Kutai Timur tahun 2023 mencapai sekitar 2.171 ton dan produksi perikanan tangkap laut mencapai 6.843 ton. Meskipun masih lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, namun potensi ini dapat dikembangkan melalui kebijakan dan strategi yang mendorong pengembangan produksi sektor perikanan terutama upaya mewujudkan *blue economy* dalam perekonomian Kutai Timur.

Tabel 2.64 Potensi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Tangkap di Darat	
	Volume (ton)	Nilai (Ribuan Rp)	Volume (ton)	Nilai (Ribuan Rp)
1. Paser	10.628	230.934.716	84	5.195.065
2. Kutai Barat	–	–	1.570	44.064.097
3. Kutai Kartanegara	47.371	1.533.547.276	34.318	1.098.187.392
4. Kutai Timur	5.718	189.563.504	1.179	32.641.340
5. Berau	23.299	795.895.497	1.671	79.397.405
6. Penajam Paser Utara	6.521	189.684.430	157	6.513.515
7. Mahakam Ulu	–	–	60	8.226.010
8. Balikpapan	5.704	113.075.347	–	–
9. Samarinda	12.038	447.747.000	4.540	171.816.500
10. Bontang	21.922	1.044.570.063	–	–
Kalimantan Timur	133.201	4.545.017.833	43.579	1.446.041.324

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Potensi perikanan laut terutama berada di Kecamatan Sangkulirang, Sangatta Selatan, Kaliurang, Sangatta Utara, dan Kecamatan Bengalon. Untuk perikanan darat atau perikanan umum potensi yang besar terdapat di Muara Bengkal, Muara Ancalong, Batu Ampar, serta Busang. Perikanan budidaya menyebar cukup merata di berbagai kecamatan terutama di Kecamatan Sangatta Selatan, Sangatta Utara, serta Bengalon. Pengembangan hilirisasi sektor perikanan dapat dilakukan dengan mengembangkan industri berbasis perikanan.

Tabel 2.65 Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2024 (Ton)

Kecamatan	Perikanan Laut		Perairan Umum		Perikanan Budidaya	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Muara Ancalong	–	–	250,55	282,87	31,83	31,83
Busang	–	–	216,44	179,18	–	–
Long Mesangat	–	–	41,98	40,96	22,74	22,74
Muara Wahau	–	–	106,25	102,4	22,74	22,74
Telen	–	–	167,91	143,36	4,55	4,55
Kongbeng	–	–	66,9	71,68	13,13	13,13
Muara Bengkal	–	–	1007,44	1155,81	36,38	36,38
Batu Ampar	–	–	219,07	97,28	9,09	9,09
Sangatta Utara	632,05	569,7	0,57	–	165,32	165,32
Bengalon	506,19	469,98	–	–	110,44	110,44
Teluk Pandan	484,3	509,97	–	–	90,94	109,73
Sangatta Selatan	949,45	1214,99	–	–	300,36	537,12

Kecamatan	Perikanan Laut		Perairan Umum		Perikanan Budidaya	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rantau Pulung	-	-	-	-	50,02	50,02
Sangkulirang	2.175,25	2264,87	45,91	44,8	23,17	35,97
Kaliorang	804,43	819,99	-	-	27,28	33,68
Sandaran	763,39	713,99	-	-	4,55	4,55
Kaubun	-	-	48,54	44,8	18,19	18,19
Karangan	-	-	-	-	50,02	50,02
Kutai Timur	6.315,06	6563,49	2170,99	2163,14	980,75	1255,5

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2025

B. Pariwisata

Kutai Timur memiliki alam yang sangat indah sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Kabupaten Kutai Timur memiliki berbagai obyek wisata yang menarik bagi pengunjung. Salah satu tempat yang terkenal misalnya Taman Nasional Kutai, yang memiliki luas sekitar 192.709,55 hektar. Selain itu, Kutai Timur juga memiliki lokasi wisata utama yang harus dikunjungi, di antaranya adalah Pantai Teluk Lombok, Teluk Perancis, Pantai Kenyamukan, dan Aquatiq yang berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan, serta Taman Nasional Kutai Mentoko, Pantai Birah-birahan di Kecamatan Sandaran, dan wisata tambang serta wisata religi di Bukit Pelangi. Banyaknya jumlah tempat pariwisata di Kabupaten Kutai Timur harus ditingkatkan pelayanannya sehingga dapat menghadirkan juga jumlah wisatawan yang datang.

Jumlah wisatawan di tahun 2023 mencapai 75.233; naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022. Di tahun 2024, jumlah wisatawan melonjak tajam menjadi 189.851. Kenaikan yang terjadi di tahun 2024 tersebut lebih dari dua kali lipat tahun 2023. Sebagian besar wisatawan tahun 2023 berkunjung ke Miau Baru, Bukit Hijau, Pantai Teluk Lombok, serta Pantai Jepu Jepu. Di tahun 2024 destinasi wisata berkembang seperti Teluk Singkama, Embung Wisata, pantai Sekerat, Pantai Marang, serta Mata Air Tangga Bidadari. Promosi yang intensif melalui visualisasi destinasi wisata perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan wisatawan. Peningkatan wisatawan akan memberikan dampak bagi pengembangan industri kreatif, perdagangan, kuliner, perhotelan, serta UMKM. Pariwisata akan mendorong pula berkembangnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Untuk itu perlu

dipertimbangkan semacam “*tagline*” agar lebih mudah mempopulerkan destinasi wisata di Kutai Timur.

Tabel 2.66 Jumlah Wisatawan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Destinasi Wisata	2020	2021	2022	2023	2024
Pantai Teluk Lombok	3.607	-	4.249	7.185	5.400
Taman Nasional Kutai Sangkimah	1.331	-	3.354	2.919	-
Taman Nasional Kutai Frevab Mentoko	35	-	17	373	-
Wehea	7	-	-	-	-
Miau Baru	1.656	-	2.024	42.818	-
Bukit Hijau	1.413	-	3.949	10.970	7.016
Mangkuris	209	-	393	374	-
Pesat	351	-	-	-	-
Pantai Jepu-jepu	-	-	3.476	6.823	37.200
Pantai Sekerat	-	-	4.735	3.771	16.900
Wisata Luah Putih	-	-	-	-	1400
Teluk Prancis	-	-	-	-	2.223
Teluk Singkama	-	-	-	-	33.032
Pulau Miang	-	-	-	-	6.167
Mata Air Tangga Bidadari	-	-	-	-	10.925
Embung Wisata Suka Maju Kombeng	-	-	-	-	27.950
Dana Lelhut	-	-	-	-	6.410
Pantai Marang	-	-	-	-	15.100
Desa Batu Lepoq	-	-	-	-	3.350
Danau Senal	-	-	-	-	5.289
Nayla Waterboom	-	-	-	-	3.224
Air Terjun Air Putih dan Agrowisata	-	-	-	-	3.925
Kebun Kelulut	-	-	-	-	2.153
Kolam Renang Victoria	-	-	-	-	1.902
Mangrove Sei Papan	-	-	-	-	285
Kutai Timur	8.609	-	22.197	75.233	189.851

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2024 dan 2025

C. Pertanian

Salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan adalah padi atau beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Pada tahun 2023 luas panen padi di Kutai Timur adalah 3.440,35 Ha, dengan jumlah panen sebanyak 10.777,38 ton. Tahun 2024 luas panen maupun produksi padi meningkat, luas panen padi menjadi 3.790,01 Ha dengan produksi padi turun menjadi 13.938,46 ton. Peningkatan produksi tersebut karena meningkatnya produktivitas padi dari 31,33 kuintal/hektar di tahun 2023 menjadi 36,78 kuintal per hektar di tahun 2024 (Tabel 2.67). Tanaman padi merupakan salah satu aspek ketahanan pangan yang penting,

oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan kelestarian lingkungan dengan kebijakan pembangunan yang tidak mengganggu produksi padi dan beras. Area atau wilayah yang dipandang potensial untuk tanaman padi perlu dijaga agar ketahanan pangan di Kutai Timur dalam jangka panjang dapat terjaga. Dengan mempertimbangkan aspek geografis pengembangan wilayah yang menjadi lumbung pangan perlu mendapatkan perhatian termasuk mitigasi bencana alam yang dapat mengganggu ketahanan pangan. Urusan pangan selain diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan juga penting diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor lain. Potensi pangan dan buah-buahan yang ada dapat diarahkan pada pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.

Pertanian dalam arti besar mencakup aspek pertanian tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, biofarma, peternakan, perikanan, serta kehutanan. Dari sisi produksi, buah-buahan Kutai Timur memiliki potensi yang tinggi terutama buah mangga, durian, jeruk siam, pisang, salak, dan nanas (Tabel 2.68). Khusus untuk durian, jeruk siam, dan pisang Kutai Timur memiliki tingkat produksi yang termasuk tiga besar di Kalimantan Timur, bahkan untuk pisang adalah yang terbesar di Kalimantan Timur.

Di dalam Kutai Timur sendiri, buah yang memiliki produksi terbesar adalah pisang dan nanas. Untuk tahun 2024 produksi pisang mengalami penurunan cukup besar sementara untuk produksi nanas mengalami kenaikan yang signifikan. Buah-buahan termasuk tanaman yang rentan dengan perubahan iklim. Hilirasi berbagai hasil pertanian seperti perkebunan akan mendorong berkembangnya perekonomian daerah. Untuk itu perlu pengembangan industri yang berbasis buah-buahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah buah sekaligus mendorong *backward* dan *forward linkage* industri pengolahan berbasis pertanian.



Tabel 2.67 Produksi Padi di Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur				Kalimantan Timur			
	Luas Panen	Produktivitas	Produksi Padi	Produksi Beras	Luas Panen	Produktivitas	Produksi Padi	Produksi Beras
2020	4.978,75	34,30	17.078,56	9.882,90	73.568,44	35,67	262.434,52	151.863,46
2021	3.660,48	35,84	13.119,61	7.631,26	66.269,46	36,92	244.677,96	142.321,36
2022	3.415,90	35,35	12.076,25	7.024,36	64.970,01	36,85	239.425,34	139.266,10
2023	3.440,35	31,33	10.777,38	6.268,86	57.143,29	37,68	215.290,58	125.227,66
2024	3.790,01	36,78	13.938,46	8.107,56	63.041,65	39,60	249.642,90	145.209,36

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Tabel 2.68 Produksi Buah-buahan Tahun 2024 (Kuintal)

Sumber	Kutai Timur					Kalimantan Timur				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mangga	9,774	8,135	9,393	7,216	6.492,11	42.604,18	51.315,94	30.102,88	47.579,56	74.985,53
Durian	8,952	10,878	20,414	60,511	22.078,90	104.974,38	134.395,51	87.727,88	208.205,05	98.695,10
Jeruk Siam	37,948	51,296	2,7201	42,752	17.063,62	125167,56	113.006,30	77.552,06	83.955,31	57.790,80
Pisang	340,266	938,261	752,162	1.046.128	877.354,54	955275,52	1.306.561,44	1.275.624,65	1.561,317,45	1.591.196,86
Pepaya	5,785	6,57	4,687	6,739	8.479,16	151.206,08	240.679,54	136.740,98	294.421,27	128.823,05
Salak	2,004	831	1,293	6,011	1.263,56	198.780,56	75.080,92	68.413,83	67.559,27	155.461,98
Nanas	3,413	16,082	73,457	95,607	170.366,18	219.756,45	551.708,51	366.411,41	248.670,57	709.882,37
Buah naga	0	16	189	386	246,1	0	120.348,14	127.191,37	33.375,41	105.283,38

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Di bidang perkebunan Kutai Timur memiliki potensi besar untuk komoditas kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, serta kakao. Total produksi kelapa sawit tahun 2024 mencapai sekita 7,7 juta ton dan karet sebesar 1,8 ribu ton. Produksi kelapa sawit ini di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6,2 juta ton akibat penurunan produksi di semua kecamatan, terutama di Kecamatan Muara Wahau, Sangkulirang, dan Kongbeng. Kelapa sawit menyebar cukup merata di semua kecamatan, namun Kecamatan yang menjadi penghasil utama adalah Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Bengalon, Sangkulirang, Muara Bengkal, serta Kecamatan Karangan. Komoditas karet yang juga memiliki produksi besar terutama terdapat di Kecamatan Teluk Pandan, Kaliorang, serta Kecamatan Batu Ampar. Hilirisasi sektor perkebunan penting dilakukan dalam rangka memberikan efek multiplier yang besar bagi pembangunan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendorong investor datang ke Kutai Timur serta pembangunan saran dan prasarana pendukung terutama infrastruktur jalan, listrik, air, dan telekomunikasi.

Tabel 2.69 Produksi Beberapa Perkebunan Tahun 2024 (Ton)

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Muara Ancalong	293.799,48	2,23	87,51	0,24	28,49
Busang	291.358,80	0	72,48	–	23,1
Long Mesangat	30.350,51	9	198	–	–
Muara Wahau	1.576.886,28	2,06	31,61	1,18	–
Telen	347.807,95	1,14	76,22	–	–
Kongbeng	843.137,03	53	32	–	4,7
Muara Bengkal	520.663,54	1,05	26,52	–	–
Batu Ampar	4.875,00	8,2	208,25	5,50	–
Sangatta Utara	325,00	9	184	0,45	0,5
Bengalon	1.081.477,36	1,03	5,42	–	0,73
Teluk Pandan	159,00	41,93	439,9	13,50	4,68
Sangatta Selatan	6.458,94	1,55	4,38	1,49	0,81
Rantau Pulung	261.784,22	11,22	90,45	–	1,02
Sangkulirang	878.918,66	43,44	63	3,92	12,88
Kaliorang	70.011,27	219	231,84	–	21,6
Sandaran	566.891,09	352,43	–	3,92	38,93
Kaubun	402.015,00	8,2	15	0,8	7
Karangan	583.010,89	1,32	42	–	67,2
Kutai Timur	7.752.987,08	765,8	1.808,58	27,08	211,64

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2025

D. Perdagangan

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang paling luas dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas perdagangan masyarakat bersifat sangat dinamis baik dari sisi pelaku perdagangan maupun jenis komoditas atau barang yang diperdagangkan. Kegiatan perdagangan memerlukan dukungan sarana dan prasarana seperti pasar, pertokoan, kawasan/pusat perdagangan, konektivitas, serta jalan. Sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan dinamika perdagangan masyarakat. Pengembangan pariwisata dan industri juga akan mendorong berkembangnya aktivitas perdagangan masyarakat.

Dari sisi pelaku perdagangan, sebagian besar aktivitas perdagangan dilakukan atau didominasi oleh perusahaan perseorangan yaitu 3.025 di tahun 2023; meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun 2022. Tahun 2024 bentuk usaha perseroan kembali naik cukup tajam menjadi 3.618. Kegiatan perdagangan selain memerlukan sarana dan prasarana fisik, juga melibatkan pihak lain seperti distributor atau pemasok. Dukungan sarana dan prasarana diharapkan akan mendorong lalu lintas perdagangan di Kutai Timur semakin meningkat baik lalu lintas perdagangan di dalam daerah maupun antardaerah.

Tabel 2.70 Bentuk Badan Usaha di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024

Bentuk Badan Usaha	2021	2022	2023	2024
Perseroan Terbatas	51	176	245	195
Koperasi	8	65	37	55
Persekutuan Firma	–	–	–	–
Perusahaan Perseorangan	217	1.532	3.025	3.618
Persekutuan Komanditer	140	331	451	686
Yayasan	2	6	14	16
Lainnya	9	30	82	44
Jumlah/Total	427	2.140	3.854	4.614

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2025

E. Perindustrian

Sektor Perindustrian dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2029 diarahkan untuk mendukung transformasi struktur ekonomi daerah dari ketergantungan pada sektor primer menuju penguatan sektor industri berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif. Pengembangan sektor perindustrian menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

Kutai Timur memiliki potensi besar pada industri berbasis sumber daya alam, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang perlu dikelola secara optimal melalui pengembangan industri kecil, industri menengah, dan industri pengolahan. Oleh karena itu, kebijakan perindustrian difokuskan pada penguatan industri hilir, peningkatan kapasitas pelaku industri lokal, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk mendorong pengembangan industri baik skala kecil maupun menengah melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, teknologi, pelatihan kewirausahaan, standardisasi produk, serta fasilitasi pemasaran. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia industri menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal. Selain itu, urusan perindustrian diarahkan pada penyediaan dan pengembangan kawasan industri, sentra industri, dan sentra IKM yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung. Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Kutai Timur.

Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, kebijakan perindustrian juga memperhatikan prinsip industri hijau dan ramah lingkungan, termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah industri, serta penerapan teknologi bersih. Hal ini sejalan dengan komitmen daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sinergi antar perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat terus diperkuat untuk mewujudkan ekosistem industri yang inovatif.

F. Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi tidak hanya dipandang sebagai pemindahan penduduk, tetapi sebagai upaya pengembangan kawasan baru yang produktif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem pembangunan daerah. Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi pengembangan kawasan transmigrasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lokal lainnya. Oleh karena itu, kebijakan transmigrasi difokuskan pada peningkatan kualitas permukiman transmigrasi, penguatan sarana dan prasarana dasar, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigran dan penduduk sekitar.

Pemerintah Kutai Timur mendorong integrasi kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitar melalui peningkatan konektivitas infrastruktur, akses pelayanan dasar, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi sosial antara transmigran dan masyarakat lokal serta mempercepat pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat transmigrasi, urusan transmigrasi diarahkan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan menjadi bagian penting untuk mendorong keberlanjutan ekonomi kawasan transmigrasi.

Selain aspek ekonomi, pelaksanaan transmigrasi di Kutai Timur memperhatikan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan tata ruang wilayah. Pemanfaatan lahan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung ketahanan kawasan dalam jangka panjang. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat dalam perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi. Dengan arah kebijakan tersebut, urusan transmigrasi diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan wilayah, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur selama periode 2025–2029.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Pasal 279, ayat (2) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bidang Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut: (i) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (ii) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (DAPER); (iii) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (iv) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Khusus terkait dengan pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar

penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan/stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 280, ayat (2); telah dinyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: (i) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (ii) Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (iii) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

2.2.1 Realisasi APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, ayat (26) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:



Tabel 2.71 Realisasi APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp)

URAIAN			2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH			3.491.592.184.252	3.116.655.808.498	5.124.474.001.354	8.597.328.360.021	10.440.426.780.704
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		214.021.234.386	253.159.605.189	272.430.833.078	352.462.374.617	532.251.880.804
	Pajak Daerah		114.059.971.336	99.793.473.728	98.631.755.308	119.665.567.598	201.517.383.483
	Retribusi Daerah		6.876.867.424	6.314.204.198	6.356.405.010	4.638.173.595	5.331.687.700
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.154.852.867	4.258.759.577	5.085.760.438	5.332.834.233	7.316.134.771
	Lain-lain PAD yang Sah		88.929.542.759	142.793.167.686	162.356.912.322	222.825.799.191	318.086.674.850
	Pendapatan Transfer		2.503.977.023.693	2.776.170.339.368	4.774.489.363.927	7.676.010.272.909	9.816.188.964.469
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		773.593.926.173	87.325.863.941	77.553.804.349	568.855.712.495	91.985.935.431
BELANJA DAERAH			3.378.216.857.846	2.843.825.472.652	4.047.272.765.263	8.357.502.854.791	11.970.560.837.722
	Belanja Operasi		2.019.955.041.110	1.924.693.918.291	2.613.363.634.676	4.250.665.063.813	5.638.635.027.761
	Belanja Pegawai		1.047.254.979.351	840.929.684.855	1.125.340.741.513	1.315.963.086.155	1.625.347.086.172
	Belanja Barang dan Jasa		841.061.758.134	1.018.586.718.030	1.356.704.493.060	2.615.488.257.482	3.781.902.505.870
	Belanja Bunga						
	Belanja Subsidi			10.999.921.800			
	Belanja Hibah		131.638.303.625	53.942.593.606	122.343.527.603	319.213.720.176	231.385.435.719
	Belanja Bantuan Sosial			235.000.000	8.974.872.500		
	Belanja Modal		846.728.032.422	706.899.903.373	1.005.918.036.438	3.295.383.241.069	5.082.907.431.862
	Belanja Tidak Terduga		98.571.027.223	23.562.786.490	4.003.489.510		
	Belanja Transfer		412.962.757.091	188.668.864.498	423.987.604.639	811.454.549.909	1.249.018.378.098
SURPLUS/DEFISIT			113.375.326.405	272.830.335.846	1.077.201.236.090	239.825.505.230	-1.530.134.057.018
PEMBIAYAAN DAERAH			159.230.318.401	266.834.893.005	501.865.228.850	1.532.566.464.941	1.737.332.505.394
	Penerimaan Pembiayaan		164.230.318.401	271.834.893.005	540.865.228.850	1.579.066.464.941	1.772.332.505.394
	Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000.000	5.000.000.000	39.000.000.000	46.500.000.000	35.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			272.605.644.807	539.665.228.851	1.579.066.464.941	1.772.391.970.171	207.198.448.377

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, ayat (26) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:



Tabel 2.72 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp)

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH		3.491.592.184.252	3.116.655.808.498	5.124.474.001.354	8.597.328.360.021	10.440.426.780.704
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	214.021.234.386	253.159.605.189	272.430.833.078	352.462.374.617	532.251.880.804
	Pajak Daerah	114.059.971.336	99.793.473.728	98.631.755.308	119.665.567.598	201.517.383.483
	Retribusi Daerah	6.876.867.424	6.314.204.198	6.356.405.010	4.638.173.595	5.331.687.700
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.154.852.867	4.258.759.577	5.085.760.438	5.332.834.233	7.316.134.771
	Lain-lain PAD yang Sah	88.929.542.759	142.793.167.686	162.356.912.322	222.825.799.191	318.086.674.850
	Pendapatan Transfer	2.503.977.023.693	2.776.170.339.368	4.774.489.363.927	7.676.010.272.909	9.816.188.964.469
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	773.593.926.173	87.325.863.941	77.553.804.349	568.855.712.495	91.985.935.431

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3,49 triliun, kemudian sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp3,11 triliun, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp10,44 triliun pada tahun 2024. Dengan demikian, secara rata-rata terjadi pertumbuhan lebih dari 30% per tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan perkembangan positif, dari Rp214 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp532 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan Pajak Daerah, sementara komponen Retribusi Daerah masih relatif stagnan dan kontribusinya sangat kecil terhadap total PAD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah juga memberikan tambahan kontribusi, meskipun dengan pola yang berfluktuasi.

Sumber utama pendapatan daerah masih berasal dari Pendapatan Transfer, yang perannya sangat dominan terhadap struktur pendapatan daerah. Dari Rp2,5 triliun pada tahun 2020, transfer meningkat hampir empat kali lipat menjadi Rp9,8 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Kutai Timur terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan fluktuasi cukup tajam, yang menggambarkan sifat penerimaan yang tidak stabil.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan yang cukup pesat dalam total pendapatan daerah, proporsi PAD terhadap total pendapatan masih tergolong rendah, yaitu sekitar 5% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Timur masih terbatas, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya penguatan basis penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, guna meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat kemandirian pembangunan daerah.

2.2.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan pada Pasal 298 dari UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya yang membahas tentang Belanja Daerah, telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: (i) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (iii) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.86.



Tabel 2.73 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp)

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH		3.378.216.857.846	2.843.825.472.652	4.047.272.765.263	8.357.502.854.791	11.970.560.837.722
	Belanja Operasi	2.019.955.041.110	1.924.693.918.291	2.613.363.634.676	4.250.665.063.813	5.638.635.027.761
	Belanja Pegawai	1.047.254.979.351	840.929.684.855	1.125.340.741.513	1.315.963.086.155	1.625.347.086.172
	Belanja Barang dan Jasa	841.061.758.134	1.018.586.718.030	1.356.704.493.060	2.615.488.257.482	3.781.902.505.870
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi		10.999.921.800			
	Belanja Hibah	131.638.303.625	53.942.593.606	122.343.527.603	319.213.720.176	231.385.435.719
	Belanja Bantuan Sosial		235.000.000	8.974.872.500		
	Belanja Modal	846.728.032.422	706.899.903.373	1.005.918.036.438	3.295.383.241.069	5.082.907.431.862
	Belanja Tidak Terduga	98.571.027.223	23.562.786.490	4.003.489.510		
	Belanja Transfer	412.962.757.091	188.668.864.498	423.987.604.639	811.454.549.909	1.249.018.378.098
SURPLUS/DEFISIT		113.375.326.405	272.830.335.846	1.077.201.236.090	239.825.505.230	-1.530.134.057.018

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang meningkat signifikan. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp3,37 triliun, kemudian sempat menurun menjadi Rp2,84 triliun pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022 belanja mengalami lonjakan tajam hingga mencapai Rp11,97 triliun pada tahun 2024.

Komponen Belanja Operasi mendominasi struktur belanja daerah, dengan porsi terbesar pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada 2024, belanja operasi mencapai lebih dari Rp5,6 triliun atau hampir separuh dari total belanja daerah. Selain itu, belanja modal juga tumbuh signifikan dari Rp846 miliar (2020) menjadi Rp5,08 triliun (2024), menunjukkan adanya peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Adapun belanja transfer dan belanja hibah mengalami fluktuasi, sedangkan belanja bantuan sosial relatif kecil kontribusinya.

Jika dibandingkan dengan perkembangan pendapatan daerah pada tabel sebelumnya, terlihat bahwa meskipun pendapatan meningkat pesat (dari Rp3,49 triliun pada 2020 menjadi Rp10,44 triliun pada 2024), pertumbuhan belanja daerah lebih cepat, terutama sejak 2022. Kondisi ini berimplikasi pada posisi surplus/defisit APBD. Pada 2020–2023, APBD masih mencatatkan surplus, dengan puncaknya di tahun 2022 sebesar Rp1,07 triliun. Namun, pada 2024 terjadi pembalikan drastis menjadi defisit Rp1,53 triliun, seiring peningkatan belanja yang melampaui kenaikan pendapatan. Hal ini menyimpulkan bahwa:

- Surplus pada 2020–2022 menunjukkan adanya ruang fiskal yang cukup baik bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan.
- Defisit pada 2024 menjadi peringatan bahwa pengelolaan belanja harus lebih hati-hati, agar lonjakan belanja modal dan belanja operasi tidak menimbulkan risiko keberlanjutan fiskal.
- Struktur pendapatan yang masih bergantung pada transfer pusat, ditambah tingginya pertumbuhan belanja, menegaskan perlunya strategi peningkatan PAD untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

2.2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penjabaran lebih lanjut juga dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: (i) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (ii) Pencairan dana cadangan; (iii) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (iv) Pinjaman Daerah; dan (v) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel 2.74 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (Dalam Rp)

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN DAERAH		159.230.318.401	266.834.893.005	501.865.228.850	1.532.566.464.941	1.737.332.505.394
	Penerimaan Pembiayaan	164.230.318.401	271.834.893.005	540.865.228.850	1.579.066.464.941	1.772.332.505.394
	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	39.000.000.000	46.500.000.000	35.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		272.605.644.807	539.665.228.851	1.579.066.464.941	1.772.391.970.171	207.198.448.377

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, total pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp159,23 miliar, kemudian naik hampir sebelas kali lipat menjadi Rp1,73 triliun pada tahun 2024. Komponen terbesar berasal dari penerimaan pembiayaan, yang meningkat dari Rp164,23 miliar (2020) menjadi Rp1,77 triliun (2024). Peningkatan ini menunjukkan adanya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sebagai salah satu instrumen untuk menutup defisit dan mendukung belanja pembangunan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan relatif kecil dibanding penerimaan, meskipun cenderung meningkat, dari Rp5 miliar (2020–2021) menjadi Rp39 miliar (2022), Rp46,5 miliar (2023), dan Rp35 miliar (2024). Peningkatan ini terkait kewajiban pemerintah daerah seperti penyertaan modal atau kewajiban pembiayaan lainnya. Posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga memperlihatkan dinamika yang cukup mencolok. Pada 2020–2023, SiLPA tercatat sangat besar, bahkan mencapai Rp1,77 triliun pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya sisa ruang fiskal cukup tinggi. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi hanya Rp207,19 miliar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ruang fiskal telah digunakan untuk menutup defisit akibat tingginya lonjakan belanja pada tahun tersebut.

Jika dikaitkan dengan perkembangan pendapatan dan belanja:

- Surplus 2020–2022 ditopang tidak hanya dari pendapatan yang tumbuh, tetapi juga dari SiLPA yang besar sehingga pembiayaan relatif aman.
- Defisit 2024 sebesar Rp1,53 triliun yang muncul pada APBD, pada akhirnya ditutupi oleh penerimaan pembiayaan yang juga melonjak hingga Rp1,77 triliun.
- Fluktuasi SiLPA menunjukkan bahwa meskipun kapasitas fiskal meningkat, kemampuan perencanaan dan penyerapan anggaran masih menghadapi tantangan, yang perlu diperbaiki agar pembiayaan tidak sekadar menjadi penyeimbang defisit, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat program prioritas pembangunan.

2.2.2 Neraca Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terjadi perubahan mendasar dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini mencakup pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sehingga menjadi lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang menjadi milik Daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Neraca daerah merupakan alat yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, neraca ini memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan daerah, yang sangat krusial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif. Berikut merupakan Tabel Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 - 2024.



Tabel 2.75 Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2024 (dalam Rp)

AKUN	2019	2020	2021	2023	2024
TOTAL ASET	9.780.644.494.000,34	9.889.919.115.440	9.980.115.527.849	35.572.579.735.151	15.986.161.131.119,50
ASET LANCAR	289.046.081.157,75	485.557.583.611	605.853.864.312	4.264.092.128.545	633.959.272.930
Kas dan Setara Kas	166.137.294.982,31	272.612.678.007,55	539.688.244.555	3.544.958.314.139	92.698.770.223,83
Investasi Jangka Pendek					
Piutang Pendapatan	46.744.556.864,04	103.469.694.118,00	42.864.329	61.418.624.457	
Piutang Lainnya			29.800.000	3.615.760.041	
Penyisihan Piutang				-14.433.844.300	-11.523.916.141,83
Beban dibayar Dimuka	1.310.565.708,33	1.169.977.941,66	1.147.701.500	32.175.988.540	33.375.186.426,60
Persediaan	74.853.663.603,07	108.305.233.543,56	64.945.253.927	636.357.285.667	519.409.232.421,40
Aset untuk Dikonsolidasikan					
Aset Lancar Lainnya					
INVESTASI JANGKA PANJANG	154.393.236.883,21	162.516.334.330	165.573.863.199	491.532.673.431	286.142.553.670,64
Investasi Nonpermanen	1.168.468.513,00	1.168.468.513,00	1.168.468.513		
Investasi Permanen	153.224.768.370,21	161.347.865.817,37	164.405.394.686	491.532.673.431	286.142.553.670,64
ASET TETAP	9.163.876.081.365,98	8.657.353.156.630	8.503.499.550.906	23.365.039.734.889	14.390.190.080.151
Tanah	1.619.834.634.972,00	1.653.719.241.907,00	1.662.212.287.133	3.602.453.128.984	1.751.490.400.637
Peralatan dan Mesin	1.701.559.983.888,40	1.832.936.707.003,30	1.922.527.326.007	5.452.580.317.088	3.687.627.527.477.224,63
Gedung dan Bangunan	3.564.528.662.858,50	3.751.592.753.585,50	3.759.333.371.584	9.329.744.473.244	5.345.321.600.521,57
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.128.704.475.748,60	6.239.710.506.175,60	6.751.942.867.202	18.092.563.774.208	12.510.527.459.785,22
Aset Tetap Lainnya	179.459.773.802,18	88.570.780.327,03	92.155.807.120	226.156.537.316	197.396.252.768,03
Konstruksi dalam Pengerjaan	312.078.103.838,00	336.178.792.219,00	212.039.331.601	1.120.726.160.036	720.591.423.113,79
Akumulasi Penyusutan	4.342.289.553.741,70	5.245.355.624.587,90	-5.896.711.439.741	-14.459.184.655.987	-8.071.274.133.262,32
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan					
ASET LAINNYA	173.329.094.593,40	584.492.040.869	705.188.249.433	7.451.915.199.286	873.265.477.136



AKUN	2019	2020	2021	2023	2024
Tagihan Jangka Panjang					17.691.244.385,16
Kemitraan dengan Pihak Ketiga					
Aset Tak Berwujud	17.448.856.994,37	21.233.148.962,52	57.982.498.804		134.534.371.830,39
Aset Lain-Lain	155.880.237.599,03	563.258.891.906,47	647.205.750.628		721.039.860.920,49
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA					
KEWAJIBAN	397.254.605.794,08	344.257.590.702	98.837.262.202	379.328.967.779	1.440.428.250.924,88
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	397.254.605.794,08	344.257.590.702	98.837.262.202	379.328.967.779	1.440.428.250.924,88
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.400,00	63.200,00			
Utang Bunga					
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					
Pendapatan Diterima di Muka	287.836.311,59	546.097.750,00	692.501.608	1.142.917.500	577.803.739,33
Utang Belanja	97.680.857.001,00	114.289.882.366,54	98.144.760.594	57.289.382.502	1.439.850.447.185,55
Utang Jangka Pendek Lainnya	299.285.910.081,49	229.421.547.385,89		320.896.667.777	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri					
Utang Jangka Panjang Lainnya					
EKUITAS	9.383.389.888.206,30	9.545.661.524.737	9.930.426.337.963	41.117.947.754.002	17.682.718.767.363,43
EKUITAS	9.383.389.888.206,30	9.545.661.524.737	9.930.426.337.963	41.117.947.754.002	17.682.718.767.363,43
Ekuitas	9.383.389.888.206,30	9.545.661.524.737,20	9.930.426.337.963	41.117.947.754.002	17.682.718.767.363,43

Catatan: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Tabel 2.76, Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 menyajikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, dengan total aset mencapai Rp 35.572.579.735.151, dengan rincian sebagai berikut: Aset Lancar tercatat sebesar Rp 4.264.092.128.545, mencakup kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar ini menunjukkan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Aset Tetap mencakup investasi dalam infrastruktur dan properti, dengan total mencapai Rp 23.365.039.734.889. Aset tetap ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi Kewajiban, total Kewajiban tercatat sebesar Rp 379.328.967.779. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek, yang mencakup utang dan kewajiban lainnya, menunjukkan tanggung jawab keuangan yang harus dipenuhi dalam waktu dekat.

Sedangkan dari sisi ekuitas, tercatat total ekuitas Rp 41.117.947.754.002. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah setelah dikurangi kewajiban. Ini menunjukkan kemampuan daerah untuk mendanai program dan kegiatan tanpa bergantung pada utang.

Tabel 2.76 Rata-rata Pertumbuhan Aset Kabupaten Kutai Timur

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	TOTAL ASET	38,10%
1.1	ASET LANCAR	95,98%
1.1.1	Kas dan Setara Kas	114,92%
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	
1.1.3	Piutang Pendapatan	7,06%
1.1.4	Piutang Lainnya	
1.1.5	Penyisihan Piutang	
1.1.6	Beban dibayar Dimuka	122,60%
1.1.7	Persediaan	70,75%
1.1.8	Aset untuk Dikonsolidasikan	
1.1.9	Aset Lancar Lainnya	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	33,58%
1.2.1	Investasi Nonpermanen	-100,00%
1.2.2	Investasi Permanen	33,83%

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3	ASET TETAP	26,36%
1.3.1	Tanah	22,12%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	33,79%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	27,19%
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31,08%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5,95%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	37,66%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	35,08%
1.4	DANA CADANGAN	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.5	ASET LAINNYA	156,06%
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3	Aset Tak Berwujud	77,25%
1.5.4	Aset Lain-Lain	161,41%
2	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	
2.1	KEWAJIBAN	-1,15%
2.1.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-1,15%
2.1.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-100,00%
2.1.1.2	Utang Bunga	
2.1.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
2.1.1.4	Pendapatan Diterima di Muka	41,16%
2.1.1.5	Utang Belanja	-12,49%
2.1.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	1,76%
2.1.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2.1.2.1	Utang Dalam Negeri	
2.1.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	
2.2	EKUITAS	44,68%
	EKUITAS	44,68%
2.2.1	Ekuitas	44,68%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Secara lengkap,

perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2023, dapat di lihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.77 Analisis Neraca Kabupaten Kutai Timur

No	Jenis Analisis	Hasil analisis				Rata-rata
		2019	2020	2021	2023	
1	Rasio Likuiditas					
	a. Rasio Lancar	0,73	1,22	6,13	11,24	1,22
	b. Rasio Quick	0,54	1,03	5,47	9,56	1,03
2	Rasio Solvabilitas					
	a. Rasio Total Hutang Terhadap Aset	0,0406	0,0348	0,0099	0,0107	0.0348
	b. Rasio hutang terhadap modal	0,0423	0,0361	0,0100	0,0092	0,0361

Berdasarkan Tabel 2.90, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan Tabel 2.90 di atas, rasio lancar dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan. Kondisi terparah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,73. Hal ini mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang jangka pendeknya melalui aset lancar hanya sebesar 0,73 kali. Kemudian pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 1,22 dan di tahun 2021 sebesar 6,13, serta di tahun 2023 sebesar 11,24. Rasio lancar perlu dijaga jangan sampai menurun tiap tahunnya. Penurunan nilai rasio lancar dari tahun ke tahun memberi pertanda yang kurang baik dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

2. Rasio *Quick*

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan Tabel 2.90 di atas, juga terjadi fluktuasi dengan rata-rata 1,03. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam membayar

kewajiban jangka pendek cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan setiap tahunnya sehingga mencapai level di atas angka 10.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset rata-rata sebesar 0,348. Hal ini menunjukkan total aset pemerintah Kabupaten Kutai Timur cukup baik karena masih di bawah angka 1.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rata-rata rasio hutang terhadap modal sebesar 0,0361.

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

Pada proyeksi keuangan daerah ini bertujuan untuk menentukan seluruh kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendukung program pembangunan jangka menengah daerah dan prioritas utama untuk lima tahun ke depan, yang berakhir pada tahun 2030, serta alokasi untuk pengeluaran daerah lainnya dan pengeluaran berkala yang bersifat wajib dan mengikat.

Untuk sampai pada perkiraan jumlah penerimaan kas daerah secara keseluruhan, prediksi pendapatan daerah harus dihitung. Hal ini akan memungkinkan untuk menentukan kemampuan sebenarnya dari kapasitas keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Untuk menghasilkan prediksi kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya untuk lima tahun ke depan. Proyeksi kerangka pendanaan tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 2.78 Proyeksi Keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp)

URAIAN			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH			8.425.454.264.416	6.383.224.200.000	6.648.381.424.950	6.926.796.511.148	7.219.132.351.655	7.526.084.984.188
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		358.388.327.000	358.388.327.000	376.307.743.350	395.123.130.518	414.879.287.043	4,35623E+11
	1	Pajak Daerah	208.019.299.000	208.019.299.000	218.420.263.950	229.341.277.148	240.808.341.005	252.848.758.055
	2	Retribusi Daerah	118.447.153.000	118.447.153.000	124.369.510.650	130.587.986.183	137.117.385.492	143.973.254.766
	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.441.875.000	7.441.875.000	7.813.968.750	8.204.667.188	8.614.900.547	9.045.645.574
	4	Lain-lain PAD yang Sah	24.480.000.000	24.480.000.000	25.704.000.000	26.989.200.000	28.338.660.000	29.755.593.000
2	Pendapatan Transfer		7.975.080.937.416	5.932.850.873.000	6.180.088.681.600	6.439.688.380.630	6.712.268.064.612	6.998.476.732.792
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		91.985.000.000	91.985.000.000	91.985.000.000	91.985.000.000	91.985.000.000	91.985.000.000
BELANJA DAERAH			8.390.454.264.416	6.348.224.200.000	6.613.381.424.950	6.891.796.511.148	7.184.132.351.655	7.491.084.984.188
1	Belanja Operasi		4.299.132.250.947	3.252.726.793.376	3.388.589.041.286	3.531.244.401.593	3.681.032.529.914	3.838.310.064.651
	1	Belanja Pegawai	2.517.136.279.325	1.904.467.260.000	1.984.014.427.485	2.067.538.953.344	2.155.239.705.497	2.247.325.495.256
	2	Belanja Barang dan Jasa	1.594.186.310.239	1.206.162.598.000	1.256.542.470.741	1.309.441.337.118	1.364.985.146.814	1.423.306.146.996
	3	Belanja Hibah	187.809.661.383	142.096.935.376	148.032.143.061	154.264.111.130	160.807.677.603	167.678.422.399
2	Belanja Modal		3.356.181.705.766	2.539.289.680.000	2.645.352.569.980	2.756.718.604.459	2.873.652.940.662	2.996.433.993.675
3	Belanja Tidak Terduga		21.951.695.227	16.608.669.624	17.302.392.563	18.030.801.649	18.795.631.188	19.598.702.205
4	Belanja Transfer		713.188.612.475	539.599.057.000	562.137.421.121	585.802.703.448	610.651.249.891	636.742.223.656
SURPLUS/DEFISIT			35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
PEMBIAYAAN DAERAH								
1	Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-	-	-
	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu						
	2	Pencairan Dana Cadangan						
	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						



URAIAN			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4	Penerimaan Pinjaman Daerah						
	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
2	Pengeluaran Pembiayaan		35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
	1	Pembentukan Dana Cadangan						
	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
	3	Pembayaran Pokok Utang						
	4	Pemberian Pinjaman Daerah						
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			-	0	-	-	0	-

Total pendapatan daerah Kutai Timur pada 2025 diproyeksikan sebesar Rp8,43 triliun dan mengalami fluktuasi selama periode proyeksi lima tahun, sempat turun signifikan pada 2026 menjadi Rp6,38 triliun, sebelum kembali naik dan mencapai Rp7,53 triliun pada 2030. Penurunan pada 2026 terutama berasal dari berkurangnya pendapatan transfer, yang menjadi komponen dominan dengan kontribusi sekitar 94–95% dari total pendapatan daerah. Hal ini menegaskan ketergantungan keuangan daerah pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, terutama DBH dari sektor pertambangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dengan rata-rata kontribusi hanya sekitar 4–5% per tahun. Meskipun terjadi tren kenaikan terutama pada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan tersebut belum signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Dari sisi belanja daerah, total belanja selalu diupayakan seimbang dengan pendapatan (*balanced budget*), yang ditunjukkan dengan adanya surplus/defisit sebesar Rp35 miliar per tahun yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan, terutama penyertaan modal pemerintah daerah. Komposisi belanja terbesar masih didominasi oleh Belanja Operasi (lebih dari 65% dari total belanja), khususnya belanja pegawai yang pada 2025 mencapai Rp2,52 triliun dan cenderung meningkat hingga Rp2,42 triliun pada 2030. Hal ini menunjukkan tingginya rigiditas belanja daerah yang membuat ruang fiskal (*fiscal space*) untuk belanja pembangunan menjadi terbatas.

Belanja Modal menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun mengalami penurunan pada 2026 dan 2027, namun meningkat kembali hingga Rp2,99 triliun pada 2030. Peningkatan belanja modal ini penting sebagai indikasi komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur dan investasi pembangunan jangka panjang. Dari sisi pembiayaan daerah, terlihat bahwa pemerintah daerah secara konsisten mengalokasikan Rp35 miliar per tahun untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD atau pihak terkait. Tidak terdapat komponen pembiayaan dari pinjaman daerah, sehingga ketergantungan terhadap utang tetap nol, menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan pola fiskal yang hati-hati (*prudent fiscal policy*) dengan memastikan belanja tidak melebihi pendapatan. Namun, fluktuasi tajam pada pendapatan terutama di 2026 menjadi perhatian penting karena



berpotensi memengaruhi kemampuan belanja publik. Pemerintah daerah perlu memperkuat diversifikasi PAD, melakukan efisiensi belanja operasional, serta menjaga porsi belanja modal agar tetap optimal sehingga pembangunan daerah dapat terus berlanjut meskipun terjadi penurunan pendapatan transfer dari pusat..



Tabel 2.79 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp)

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	8.425.454.264.416	6.383.224.200.000	6.648.381.424.950	6.926.796.511.148	7.219.132.351.655	7.526.084.984.188
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	8.425.454.264.416	6.383.224.200.000	6.648.381.424.950	6.926.796.511.148	7.219.132.351.655	7.526.084.984.188
	Dikurangi:						
4	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
5	Belanja Tidak Terduga	21.951.695.227	16.608.669.624	17.302.392.563	18.030.801.649	18.795.631.188	19.598.702.205
6	Belanja Transfer	713.188.612.475	539.599.057.000	562.137.421.121	585.802.703.448	610.651.249.891	636.742.223.656
	Kapasitas Kemampuan Keuangan	7.655.313.956.714	5.792.016.473.376	6.033.941.611.266	6.287.963.006.051	6.554.685.470.576	6.834.744.058.327

Sumber: Data diolah

Tabel 2.80 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp)

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Kemampuan Keuangan	7.655.313.956.714	5.792.016.473.376	6.033.941.611.266	6.287.963.006.051	6.554.685.470.576	6.834.744.058.327
Prioritas I	3.827.656.978.357	2.896.008.236.688	3.016.970.805.633	3.143.981.503.020	3.327.342.735.288	3.417.372.029.165
Prioritas II	2.679.369.884.850	2.077.205.765.682	2.111.879.563.943	2.200.787.052.118	2.294.139.914.702	2.392.160.420.414
Prioritas III	1.148.287.093.507	818.802.471.006	905.091.241.690	943.194.450.913	933.202.820.586	1.025.211.608.748
Total Belanja Prioritas	7.655.313.956.714	5.792.016.473.376	6.033.941.611.266	6.287.963.006.051	6.554.685.470.576	6.834.744.058.327

Sumber: Data diolah

Berdasarkan proyeksi, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai Rp7,65 triliun. Namun, pada 2026 terjadi penurunan signifikan hingga Rp5,79 triliun, sebelum kembali meningkat bertahap hingga mencapai Rp6,83 triliun pada 2030. Fluktuasi ini menggambarkan ketergantungan penerimaan daerah terhadap dinamika harga komoditas, kebijakan transfer pusat, serta kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Dari sisi alokasi belanja prioritas, struktur pembiayaan daerah diarahkan secara proporsional untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dasar, pelaksanaan visi-misi kepala daerah, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

- Prioritas Pertama dialokasikan untuk belanja langsung wajib dan mengikat, termasuk layanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar), serta kewajiban lain yang tidak dapat ditunda. Alokasi besar pada kelompok ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat.
- Prioritas Kedua digunakan untuk membiayai program-program strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Porsi ini diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan daya saing daerah.
- Prioritas Ketiga diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, seperti koordinasi, administrasi, dan penguatan kapasitas birokrasi. Porsi ini tetap penting untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pola distribusi ini menunjukkan adanya keseimbangan yang terukur antara kebutuhan mendasar, agenda pembangunan strategis, dan urusan administratif. Namun, penurunan kapasitas keuangan pada 2026 menjadi sinyal penting perlunya langkah antisipatif. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada fluktuasi komoditas pertambangan. Dengan demikian, pembangunan tetap dapat berjalan sesuai target RPJMD sekaligus menjaga stabilitas fiskal jangka menengah.

2.2.4 Potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Potensi pendanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di daerah sangat besar, terutama melalui program-program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Dana CSR, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, dapat dialokasikan untuk berbagai bidang seperti pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, UMKM, pelestarian lingkungan, dan infrastruktur sosial.

Untuk memaksimalkan potensi pendanaan CSR, perusahaan perlu menyusun program yang terencana, terukur, dan berkelanjutan serta melibatkan Masyarakat dalam proses perencanaannya. Perusahaan juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, untuk memastikan program CSR berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Kutai Timur No. 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sudah diatur tata cara pelaksanaan penggunaan dana CSR dengan pelaksana Forum TJSL dan/atau Tim Pelaksana TJSL. Pada Perbup tersebut, dana TJSL perusahaan adalah dana yang dialokasikan atau yang dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program TJSL perusahaan yang bersangkutan. Realisasi dana untuk pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Besarnya jumlah dana TJSL ditentukan oleh masing-masing Perusahaan dengan tetap berpegang pada asas yang tertera pada perbup tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pelaksana TJSL wajib didukung dengan pendanaan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Forum TJSL. Besarnya dana dukungan terhadap Tim Pelaksana TJSL diatur berdasarkan kesepakatan bersama, Tim Pelaksana TJSL melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada Forum TJSL sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2.2.5 Kebijakan Percepatan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah Melalui Mekanisme Tahun Jamak (*Multi Years*)

Tujuan dari rencana anggaran kegiatan *multi years* ini adalah untuk mendukung proyek jangka panjang yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun untuk diselesaikan, atau proyek yang manfaatnya lebih optimal jika dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan proyek infrastruktur strategis daerah khususnya untuk menjamin konektivitas antara wilayah serta ketersediaan prasarana infrastruktur pelayanan publik strategis merupakan bagian penting dari pemenuhan prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan tersebut yang memerlukan jangka waktu lebih dari satu tahun untuk penyelesaian secara konstruksi. Oleh karena itu untuk menjamin tuntasnya pelaksanaan proyek strategis daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menggunakan mekanisme *Multi Years Contrac (MYC)* sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan yang didanai melalui pola *Multi Years Contrac (MYC)* ini harus memenuhi kriteria paling sedikit : (a). pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau (b). pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Penganggaran kegiatan Tahun Jamak ini akan dilakukan persetujuan bersama antara Kepala daerah dan DPRD dan persetujuannya ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Pelaksanaan Proyek proyek infrastruktur strategis daerah melalui pola *Multi Years Contrac (MYC)* akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun anggaran yang dimulai pada tahun 2026 sampai dengan 2028 yang kegiatannya mengacu pada Program yang tercantum dalam dokumen RPJMD.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal apalagi untuk Kabupaten Kutai Timur yang masih tergolong daerah yang baru berdiri berdasarkan Undang-undang No. 47 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Berdasarkan hasil analisis terhadap data capaian pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan dengan melihat hasil evaluasi RKPD tahun 2024, berikut permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kutai Timur dalam pembangunan daerah.

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab 2.1 dan menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, diperoleh rumusan 5 (lima) permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kutai Timur, yaitu:

Tabel 2.81 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia dan cenderung terjadi ketidakmerataan antar wilayah	Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat	Akses layanan kesehatan sulit di daerah tertentu
			Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan calon pengantin yang mengakibatkan masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi
			Pelayanan kesehatan lansia belum optimal dikarenakan lemahnya koordinasi lintas sektor
			Terbatasnya akses layanan TBC yang berkesinambungan
			Masih banyak puskesmas yang belum membentuk tim jejaring kinerja dalam penanganan dan pengendalian penyakit DM di masyarakat
			Kerjasama antar fasilitas kesehatan, terutama fasyankes swasta, belum optimal
			Kurangnya dukungan lintas sektor dalam penanganan ODGJ



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan produktif Rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan hipertensi Rendahnya ODHIV yang mengakses layanan pengobatan Distribusi nakes tidak merata Belum meratanya peningkatan kompetensi yang diterima setiap nakes dikarenakan belum adanya kebijakan pemda tentang program standar kompetensi nakes Masih ada fasilitas kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit yang belum memenuhi standar Belum semua puskesmas terakreditasi paripurna Edukasi dan promosi kesehatan belum optimal
		Kasus gizi buruk dan stunting masih tinggi	Keterbatasan akses pangan bergizi Kurangnya tenaga kesehatan gizi lemahnya intervensi gizi di tingkat komunitas
		Terbatasnya fasilitas serta sarana dan prasarana pelayanan RSUD	Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di RSUD Terbatasnya akses dan kualitas layanan rujukan Belum optimalnya digitalisasi/pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan
		Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Belum optimalnya standar pelayanan minimal pendidikan untuk penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar Belum merata dan terpenuhinya sarana, prasarana untuk wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi atau tersebar pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi dan berkualifikasi serta masih rendahnya kesejahteraan guru honorer Belum optimalnya kurikulum mulok yang relevan dengan kearifan lokal yang telah ditetapkan pada Jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
		Masih rendahnya kemampuan Literasi Masyarakat	Kurangnya jenis bahan bacaan dan pendistribusian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan (di kabupaten, kecamatan, dan desa) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan di wilayah Kutai Timur



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan (bimtek, sertifikasi pustakawan, diklat pustakawan)
			Banyaknya perpustakaan dan yang belum ber-SNP
		Belum Optimalnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan sebagai kewenangan pada tingkat kabupaten.
			Terbatasnya pelaksanaan kejuaraan olahraga <i>multi event</i> dan <i>single event</i> tingkat Kabupaten Kutai Timur
			Sinergitas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi belum optimal.
		Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Daerah Kutai Timur	belum adanya sebuah wadah komunikasi yang memfasilitasi <i>stakeholder</i> terkait, pemangku kepentingan, pegiat budaya serta elemen masyarakat yang berkontribusi terhadap pengembangan kebudayaan melalui pelaksanaan <i>event</i> kebudayaan
			Kurangnya pembinaan seni budaya dan pelestarian seni tradisional
			Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembinaan sejarah
			Masih kurangnya pusat dokumentasi sejarah dan pemeliharaan situs sejarah yang ada serta belum adanya program digitalisasi dan modernisasi dalam pengelolaan sejarah daerah
			Belum adanya tim ahli cagar budaya Kabupaten Kutai Timur.
			Belum adanya museum Kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur untuk mengumpulkan, merawat, melestarikan dan memamerkan benda-benda atau koleksi yang memiliki nilai historis, budaya, ilmiah atau artistik
		Kondusifitas daerah yang belum stabil	Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
			Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat
			Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan
			Belum optimalnya sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan ke berbagai lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur
			Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku
		Belum Optimalnya Pengembangan	Kurangnya perhatian pemuda dalam pengembangan diri sebagai wirausaha. Mereka masih berharap mendapatkan pekerjaan di



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	pemerintahan/perusahaan tambang dan/atau perusahaan sawit.
			Kurangnya pengembangan pemuda menjadi pemuda pelopor di Kabupaten Kutai Timur
			Masih rendahnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
		Belum terciptanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah
			Kurang optimalnya pelatihan pemberdayaan ekonomi khusus perempuan dan Kepala Keluarga (PEKKA)
			Belum maksimalnya penerapan ARG (Anggaran Responsif Gender) yang dilakukan oleh SKPD
			Peran tim driver dan pokja belum berjalan optimal
		Belum Optimalnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perkara kekerasan yang di alami
			Minimnya tenaga konselor / tenaga Layanan di UPTD PPA
			Belum optimalnya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat Kecamatan dan Desa.
		Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial terhadap PMKS sangat tergantung dari Program bantuan sosial sehingga PMKS belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup mandiri
			Kurangnya kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diusulkan mulai dari level desa/kelurahan
			Terbatasnya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Sarana dan prasarana di rumah perlindungan sosial belum sesuai standar
			Belum terbentuk PSM setiap desa
			Rendahny jiwa sosial PSKS
		Belum Optimalnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri
			Belum optimalnya peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta dan mengoptimalkan peran Bursa Kerja Khusus (BKK)
			Belum optimalnya peningkatan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri
			belum optimalnya peningkatan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
		Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk	Advokasi program kependudukan yang belum dijalankan secara optimal



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terutama dari Penduduk Pendetang dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk	Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, terutama permintaan data mengenai kependudukan dan data keluarga Jumlah Penyuluh yang belum ideal (1 Desa 1 penyuluh KB) serta operasional bagi kader pendata masih kurang (insentif kader) Rendahnya kualitas SDM kader dan penyuluh Peran bidan dan petugas lapangan KB dalam konseling belum optimal masih adanya keluarga berisiko stunting di kelompok peringkat kesejahteraan rumah tangga
2	Transformasi ekonomi yang berjalan lambat dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan	Lambatnya transformasi ekonomi sektor perkebunan dalam peningkatan nilai produk dan lapangan usaha Rendahnya daya saing/daya tarik pariwisata di Kabupaten kutai timur Belum optimalnya upaya peningkatan ekonomi masyarakat sektor ekonomi kreatif Belum optimalnya upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM	Terbatasnya akses pekebunan terhadap lahan pengembangan ekonomi melalui usaha perkebunan Rendahnya sumber daya manusia dan kelembagaan pekebun/petani sub sektor perkebunan Rendahnya produktivitas komoditas perkebunan petani swadaya Terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung usaha perkebunan Terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun Lambatnya perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi perkebunan Tingginya kerugian akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan perkebunan masih tinggi Infrastruktur pariwisata belum memadai Belum adanya kerjasama dengan mitra pariwisata terkait promosi pariwisata Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata belum tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas kreatif dalam melaksanakan suatu event kreatif Kurangnya ekosistem digital yang mendukung ekonomi kreatif dalam promosi produk kreatif Kurangnya minat kewirausahaan masyarakat Belum optimalnya pembinaan anggota koperasi Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UKM (inovasi) dalam menumbuhkan wirausaha baru



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM
			Kurangnya pembinaan UKM
		Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan pekebun melalui usaha perkebunan	Tingginya biaya produksi dan rantai pasok komoditas perkebunan tidak merata dan efisien
			Harga komoditas perkebunan yang fluktuatif
			Akses pemasaran yang masih konvensional
			Belum terbentuknya korporasi petani
			Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif
			Rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan
		Rendahnya kualitas dan daya saing SDM petani dan peternak	Banyak petani dan peternak bekerja berdasarkan pengalaman tanpa akses ke pendidikan formal atau pelatihan
			Regenerasi petani dan peternak menurun karena generasi muda lebih tertarik ke sektor lain
			Rasio jumlah kelompok tani dengan jumlah penyuluh yang sangat tinggi
		Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan (padi dan palawija) dan hortikultura	Infrastruktur air bersih dan listrik serta jalan on farm ke market masih minim
			Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga cenderung merugikan petani
			Kurangnya permodalan untuk meningkatkan produk olahan
			Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida secara berlebihan
		Belum optimalnya peningkatan produksi daging	Pelaksanaan mini ranch (model pengelolaan budidaya sapi ternak) belum efektif
			Kurangnya SDM (petugas paramedik/petugas IB (Inseminasi Buatan)) yang terampil
			Pelayanan IB (Inseminasi Buatan) terkendala jarak dan lokasi
		Belum optimalnya upaya penguatan produksi, pengolahan dan pengawasan hasil perikanan.	Kualitas sumber daya manusia dan keinginan berusaha masih rendah
			Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata dan masih tradisional
			Terbatasnya olahan hasil perikanan (kurang variatif)
			Masih tingginya tingkat penangkapan ikan secara ilegal (<i>illegal fishing</i>) atau yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
		Belum optimalnya pengembangan industri hilir	Keterbatasan fasilitas pendukung industri pengolahan seperti jalan kawasan, pasokan listrik, dan air
			Kelembagaan yang belum kuat
			Kurangnya keterampilan tenaga kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan industri lokal



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya regulasi serta kebijakan daerah dan kepastian hukum dan peraturan yang tumpang tindih membuat investor ragu untuk berinvestasi di sektor industri hilir
			Belum adanya jaminan ketersediaan lahan dan bahan baku yang cukup mendukung industri pengolahan
		Belum optimalnya upaya kemandirian pangan lokal guna menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan	Kurang optimalnya penyediaan pangan utama
			Masih rendahnya diversifikasi sumber bahan pangan
			Belum optimalnya program ketahanan pangan dalam mendukung ketersediaan dan kecukupan pangan utama.
			Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dari hutan dan lahan pertanian ke perumahan dan industri
		Pemanfaatan hasil riset dan inovasi belum optimal	Belum adanya regulasi yang mengatur tata kelola riset dan inovasi Kutai Timur
			Belum terpetakannya kebutuhan dan karakteristik teknologi dan inovasi
			Pelaksanaan riset dan inovasi belum satu pintu
			Masih minimnya keterampilan SDM pengelola riset dan inovasi naik secara kuantitas maupun kualitas
			Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang riset
		Belum optimalnya upaya pemenuhan capaian target investasi	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan penggunaan sistem/aplikasi perizinan berusaha melalui OSS RBA
			Kurang optimalnya strategi promosi melalui media digital, media sosial dan <i>Business Matching</i>
			Pelaporan LKPM belum dilakukan secara periodik oleh pelaku usaha
			Minat investor yang tidak dapat diprediksi atau <i>unpredictable</i> .
			Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM terkait pelayanan perizinan berusaha
		Kinerja kawasan Investasi KEK MBTK masih rendah	Infrastruktur pendukung Belum optimal, dukungan perusahaan sawit sekitar masih rendah, kelembagaan BUPP yang masih berbenah
		Fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok	Kebutuhan bahan makanan pokok selama ini tergantung dari Jawa dan Sulawesi. Demikian juga kebutuhan barang-barang hasil industri.
			kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar
			Belum optimalnya penyediaan pangan mandiri masyarakat akibat perubahan iklim



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang termasuk pedagang kaki lima
		Masih rendahnya daya saing produk ekspor	Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar
			Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa
			Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan
			Belum optimalnya perlindungan konsumen
3	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Masih rendahnya kualitas perencanaan daerah	Kurang optimalnya dukungan data dalam menyusun dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi.
			Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
			Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat yang sering berubah
		Belum optimalnya upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	Lemahnya sumber daya manusia pengelola data reformasi birokrasi
			Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah
			Keterlambatan penyampaian data IKK (Indikator Kinerja Kunci)
			Rencana aksi yang belum disertai bukti dukungan
		Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Kutai Timur	Kurangnya komitmen perangkat daerah untuk mengelola arsipnya sesuai NSPK
			Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kearsipan di perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah
			Kurangnya pemahaman kompetensi arsiparis dan pengelola arsip di perangkat daerah
		Belum optimalnya dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi	Jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh desa dan kualitas jaringan telekomunikasi di sebagian desa masih kurang baik
			Aplikasi layanan di OPD belum sepenuhnya terintegrasi
			Belum maksimal pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Belum optimalnya penyelenggaraan statistik daerah	Belum sinerginya pembangunan wilayah yang berdasarkan data-data sektoral Pemerintahan
		Belum maksimalnya pelaksanaan pengamanan informasi perangkat daerah	Belum terlaksananya standar keamanan informasi
			Kurangnya SDM yang mengikuti Diklat tentang Pengelolaan Ruang SIBER



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurang meratanya kompetensi dan profesionalisme pegawai	Kurangnya penilaian kualifikasi karena dipengaruhi tingkat pendidikan PNS yang harus ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi
			Kurangnya pemahaman dari ASN terkait pentingnya kompetensi untuk mengikuti Bimtek dan Diklat Kepemimpinan.
			Kurangnya kesadaran dan kewajiban PNS untuk mengoptimalkan kinerja, berpengaruh pada penilaian SKP
			Kurangnya pemahaman dan kesadaran pada aturan dan disiplin ASN, sehingga masih ada tindakan hukuman disiplin (hukdis) yang terjadi pada ASN
			Banyaknya data yang belum sesuai dengan standar dan prosedur sehingga mengurangi nilai pada Indeks NSPK
		Penyelenggaraan Manajemen ASN belum optimal	Belum optimalnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah terhadap prinsip sistem merit
			Belum adanya peta jalan pengembangan SDM ASN jangka menengah/panjang
			Perencanaan kebutuhan ASN kurang berbasis analisis jabatan dan beban kerja
		Belum Optimalnya Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendukung Pendapatan Daerah	Kurang kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah tepat waktu
			Data potensi pajak daerah belum dioptimalkan
			Masih ada beberapa desa belum terjangkau jaringan internet (<i>blank spot</i>) sehingga penerapan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) belum cukup optimal menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur
			Belum diterapkannya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
			Masih kurangnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
			Kurang optimalisasi SDM Petugas Pajak
			Belum dilakukan update NJOP PBB-P2
		Belum Optimalnya upaya pengawasan Internal Pemerintah Daerah	SPIP Belum sepenuhnya diimplementasikan
			Belum optimalnya tindak lanjut penerapan predikat zona integritas
		Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa tidak maksimal	Masih Rendahnya tingkat kapabilitas APIP
			Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan desa yang belum memadai
			Keterjangkauan dan akses pelayanan masih sangat susah dijangkau
			Sarana dan prasarana layanan dasar bagi masyarakat masih sangat minim.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Perlu dilaksanakan penyesuaian kembali peraturan Bupati tentang penataan desa dan kewenangan desa
		Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Administrasi Kependudukan
			Kondisi geografis Kutai Timur yang sangat luas sehingga Sulit Mengakses Layanan Disdukcapil yang ada di Ibukota Kabupaten Kutai Timur (Sangatta)
			Kurangnya sumber daya manusia (aparatur pelayanan Disdukcapil) untuk memberikan pelayanan baik kantor Disdukcapil maupun di kecamatan
			Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan (peralatan, jaringan internet dan gedung pelayanan yang ada di kecamatan)
		Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kurangnya cakupan sosialisasi ,pengawasan dan penanganan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
			Kurangnya kerja sama dengan lembaga vertikal dan lintas SKPD terkait perda dan perkada
4	Belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar dan digital yang berkualitas	Belum optimalnya pemenuhan akses terhadap air minum layak	Keterbatasan jangkauan pelayanan air minum untuk daerah-daerah yang mempunyai topografi lereng dan terpencil
		Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh	Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan
			Banyak kawasan permukiman yang berkembang secara tidak terencana, mengakibatkan permukiman kumuh dengan infrastruktur yang buruk dan kualitas hidup yang rendah.
			Belum memadainya sanitasi di wilayah permukiman
			Kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu SK Bupati tentang bencana
		Belum meratanya akses listrik di seluruh Kabupaten Kutai Timur	Luasnya wilayah Kutai Timur menjadi tantangan dalam pemenuhan jaringan elektrifikasi
			Infrastruktur listrik yang ada belum mampu menampung dan mendistribusikan energi dari sumber terbarukan
			Diperlukan investasi besar dalam pengembangan jaringan listrik dan teknologi penyimpanan energi untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil sepanjang waktu.
			Kebijakan dan regulasi yang sering berubah-ubah mengganggu iklim investasi di sektor EBT



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemenuhan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman	Untuk Perumahan umum karena belum adanya pelepasan aset dari developer sehingga untuk penyediaan PSU nya belum bisa di- <i>take over</i>
			Perumahan swadaya terkait rentang kendali, karena luasnya wilayah dengan kondisi perumahan yang tersebar sehingga diperlukan biaya yang besar dan waktu yang lama
			Penyerahan aset PSU dari developer tidak memenuhi syarat
		Akses Konektivitas ke Daerah yang Belum Optimal	Kondisi jalan mantap yang masih rendah dikarenakan kondisi tanah dasar yang ada di Kabupaten Kutai Timur memerlukan penanganan yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan daya dukung yang besar untuk mencapai kondisi jalan yang mantap
			Kondisi jembatan non permanen yang rusak atau tidak memadai
			Kendala Kawasan hutan, karena ada Sebagian ruas jalan berada dalam kawasan hutan. Perubahan status jalan di Kawasan hutan (sudah dilakukan ada yang disetujui dan ada yang tidak)
			Kesenjangan infrastruktur jalan antar wilayah kota dan pedesaan
		Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas yang berkualitas dalam mendukung mobilitas barang dan jasa	Kurangnya sarana prasarana pelabuhan
			Belum adanya izin pengoperasian pelabuhan
			Trayek angkutan dalam kota belum tertata
			Konektivitas antara kecamatan yang belum baik
		Belum meratanya cakupan layanan telekomunikasi/internet	Masih ada beberapa desa yang berada di kawasan pedalaman dan pesisir belum menikmati layanan internet
			kapasitas jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah belum maksimal.
			Luasnya wilayah Kutai Timur menjadi tantangan dalam pemenuhan jaringan telekomunikasi
		Masih Rendahnya Kualitas Pembangunan Di Desa	Belum maksimalnya dalam pengelolaan usaha desa/BUMDESA dan aset desa
			Belum optimalnya peran LKD dan LAD dalam memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa
			Belum diaturnya regulasi tentang LKD dan LAD oleh desa
			Belum tergalinya dan teridentifikasinya potensi desa
			Masih minimnya desa yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga
5	Belum optimalnya		Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah termasuk bank sampah /

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada tingginya risiko bencana	Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan	komunitas / komunitas swadaya masyarakat / <i>offtaker</i> , TPST, TPS 3R, rumah kompos, rumah maggot BSF
			Kurangnya Kesadaran dan keterampilan masyarakat tentang pengelolaan sampah serta belum terbentuknya pengelola sampah di kecamatan di luar kota Sangatta
			Belum adanya penetapan lokasi TPST, TPS 3R, rumah kompos, rumah maggot BSF, dan pengelolaan sampah lainnya
			Belum adanya teknologi pengelolaan sampah modern
			Belum tersedianya lokasi dan fasilitas TPA <i>sanitary landfill</i> dan kontrol <i>landfill</i>
			Belum adanya kerjasama dengan pihak swasta terkait penanganan dan pengelolaan sampah
			Kurangnya ketaatan pelaku usaha kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
			Belum adanya pembaharuan terkait regulasi mengenai pengelolaan sampah
		Belum optimalnya upaya pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan dan Pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik
			Kurangnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku
			Belum tersedianya alat monitoring kualitas lingkungan dan sarana dan prasarana uji kualitas sampel
			Kurangnya SDM laboratorium lingkungan
			Belum optimalnya pengendalian pencemaran dari sumber pencemar bergerak dan tidak bergerak
		Belum optimalnya upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup	Masih kurang ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup seperti Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-KEHATI) kabupaten, kajian pengelolaan lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH), inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
			Masih kurangnya hasil inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
			Kurangnya penetapan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta data identifikasi dan inventarisasi tutupan lahan
			Belum adanya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha, pengelolaan pengaduan lingkungan hidup, pembinaan, dan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi /masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
		Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Bencana	Belum terlaksananya sosialisasi peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan kajiannya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur
			Belum optimalnya pelaksanaan regulasi pelaksanaan prabencana, saat dan pasca bencana
			Belum lengkapnya dokumen kebencanaan
			Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana,
			Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana
			Belum optimalnya kajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan renkon atau kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi) untuk bencana prioritas,
			Belum optimalnya fungsi pusdalops penanggulangan bencana
			Belum optimalnya sinergi mitra kerja penanggulangan bencana antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana
			Belum terlaksananya sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah ditingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB),
			Belum terintegrasinya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) di semua wilayah rawan bencana
			Belum terlaksananya simulasi rencana kontinjensi per jenis ancaman bencana
		Belum optimalnya pelayanan Kebakaran area Kutai Timur	Kurangnya ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk pembangunan Pos Pemadam
			Akses jalan penghubung antar wilayah banyak yang rusak
			Sumber daya manusia (SDM) di bidang pemadam kebakaran masih kurang

Sumber : Analisis Tim penyusun RPJMD Kabupaten Kutai Timur

2.3.2 Isu - Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan dan menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dalam uraian ini dikelompokkan berdasarkan isu strategis di tingkat global, isu strategis tingkat nasional, dan isu strategis tingkat regional/daerah. Secara singkat, hubungan antara potensi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi Kab. Kutai Timur seperti pada tabel berikut:



Tabel 2.82 Isu Strategis Kabupaten Kutai Timur

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Sektor Pertambangan Sektor Pertanian dan Perkebunan Sektor Perikanan Sektor Industri Pengolahan	Masih rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia dan cenderung terjadi ketidakmerataan antar wilayah	Pengembangan Kualitas SDM Pelestarian Budaya	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (<i>Millenium Development Goals</i>)	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Extrem Percepatan Penangan Stunting <i>Middle Income Trapp</i> (MIT)	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat Ketahanan Pangan Dampak Pembangunan IKN				Tingginya angka kemiskinan
	Transformasi ekonomi yang berjalan lamban dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan	Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi industri	Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Implementasi dari kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru Kebijakan pengembangan industri pengolahan Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Percepatan Transformasi Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Ketergantungan Barang Pokok Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur	Optimalisasi Sumber Daya Daerah Non-Tambang
	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola	Peningkatan pelayanan Publik dan Kompetensi ASN		Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i> dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan		upaya efisiensi anggaran	yang profesional dan akuntabel	
	Belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar dan digital yang berkualitas	Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	Perkembangan dan disrupsi teknologi		Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur	Infrastruktur dasar yang berkelanjutan
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada tingginya risiko bencana	Kelestarian kawasan lindung dan keanekaragaman hayati kerawanan bencana dan dampak perubahan iklim kerusakan dan pencemaran lingkungan pengelolaan sampah dan limbah pengembangan pemanfaatan energi terbarukan	Komitmen penurunan emisi GRK dan tantangan perubahan iklim serta transisi energy ke <i>clean energy</i>		Peningkatan kualitas lingkungan hidup pelestarian lingkungan sumber energi nasional	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sumber: Analisis Tim Penyusunan RPJMD Kab. Kutai Timur

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Dengan terbitnya Permendagri 100 Tahun 2018 penerapan SPM di daerah lebih terarah untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Peningkatan sarana dan prasarana serta pembaharuan sistem pendidikan merupakan langkah awal yang penting. Semua masyarakat Kutai Timur, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk pendidikan yang berkualitas. Dengan tindakan yang tepat dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, masyarakat, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi, maka akan dapat menciptakan transformasi positif dalam sistem pendidikan. Dalam mengembangkan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pendidikan yang berkualitas dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan model pendidikan yang inovatif, memperkuat jaringan kerja sama antar institusi pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pemberdayaan masyarakat lokal dapat menjadi kunci keberhasilan untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah, sehingga dapat membuka pintu akses pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.

Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi yang baik agar bisa memainkan peran penting dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia. Kutai Timur harus mampu mewujudkan sinergi dalam bidang pendidikan melalui perkembangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia untuk menghadapi era *society* 5.0. Di tengah dinamika dan transformasi ketenagakerjaan dan pendidikan, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi harus dapat menghadapi perubahan-perubahan dan menciptakan sinergi. Untuk itu, perlu dilakukan usaha-usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong

kewirausahaan, pengembangan kemampuan digital, program pelatihan dan adaptasi, dan peningkatan mobilitas ketenagakerjaan.

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur membutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Penggunaan teknologi digital dan jaringan telekomunikasi dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di perkotaan dan perdesaan, walau tidak dapat mengatasi semua tantangan yang ada. Peningkatan infrastruktur dan tenaga medis perlu dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dapat tersedia. Pelatihan dan edukasi ditingkat masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan teknologi digital dalam akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, dan secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur.

B. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang belum terpecahkan di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi kemiskinan yang dicerminkan oleh persentase penduduk miskin pada tahun 2024 masih sebesar 8,81 persen (peringkat 3 dengan persentase kemiskinan tertinggi di Prov. Kaltim) dengan jumlah absolut sebesar 3.711.000 penduduk. Walaupun tren data menunjukkan penurunan persentase kemiskinan, akan tetapi jumlah penduduk miskin secara absolut menunjukkan peningkatan (tahun 2023 sebanyak 3.704.000). Garis kemiskinan di Kutai Timur juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.091 menjadi sebesar Rp.753.332,-. Sehingga, kenaikan persentase penduduk miskin bisa jadi diakibatkan oleh rendahnya pendapatan penduduk sehingga tidak mampu memenuhi batas pengeluaran minimumnya. Upaya pemerintah daerah Kutai Timur dalam penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang melibatkan masyarakat lokal.

C. Optimalisasi Sumber Daya Daerah Non-Tambang

Perekonomian Kutai Timur yang masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian perlu melakukan transformasi struktural seiring dengan kesepakatan Paris *Agreement* terkait transisi energi menuju nol emisi karbon (*net*

zero emission). Pengurangan atau bahkan penghentian pemanfaatan bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara secara global dipastikan akan memengaruhi PDRB Kutai Timur secara signifikan. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari sektor pertambangan, yang saat ini masih memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDBR) Kutai Timur. Meskipun Kutai Timur saat ini masih mengandalkan PDRB yang berasal dari sektor pertambangan gas dan minyak bumi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersiap menghadapi batasan penggunaan batu bara yang akan berakhir pada tahun 2050. Kutai Timur perlu mengubah arah PDRB secara perlahan, di mana tumpuan terhadap agribisnis dan agroindustri dipandang perlu untuk dilakukan agar ketergantungan terhadap industri tambang dapat berfokus pada transformasi pertanian dalam arti luas, perikanan, manufaktur, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi digital.

Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi, maka Presiden Republik Indonesia memberikan arahan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi tersebut berisi arahan dan langkah-langkah komprehensif dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan cakupan bidang usaha penyediaan Kebutuhan Bahan Pokok, Simpan Pinjam, Klinik Desa, Aptotek, *cold storage* atau Pergudangan dan Logistik serta bidang usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan upaya untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia melalui penyediaan akses terhadap berbagai sumberdaya dan pasar lebih luas. Dengan kemandirian ini, melalui produksi dan pemasaran produk-produk lokal diharapkan dapat mendorong pengurangan terhadap ketergantungan pada impor. Selain itu, pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendukung pada penguatan ketahanan pangan serta meningkatkan kegiatan ekonomi inklusif. Hal ini dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan gotong royong.

Terdapat 3 (tiga) model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu : (1) pembentukan koperasi baru dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, (2)

pengembangan koperasi yang telah ada (eksisting) melalui peningkatan kapasitas dan perluasan cakupan usaha, dan (3) revitalisasi koperasi yang tidak aktif/lemah melalui restrukturisasi manajemen dan atau melakukan penggabungan (merger) bila diperlukan.

Koperasi juga merupakan alat yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan hutan/area berhutan khususnya pada masyarakat yang menempati wilayah di sekitar kawasan hutan/area berhutan dalam konteks Perhutanan Sosial (PS). Koperasi masyarakat setempat dapat mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi untuk menjamin keseimbangan antara mata pencaharian masyarakat setempat (*livelihood*) dan pelestarian kawasan hutan itu sendiri.

D. Infrastruktur dasar yang Berkelanjutan

Pertumbuhan pembangunan infrastruktur mendasar yang belum merata, menyebabkan masih banyaknya desa tertinggal. Hal ini masih terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Kutai Timur, ditandai dengan minimnya infrastruktur, baik prasarana jalan, fasilitas pelayanan umum, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi yang mengakibatkan aktivitas sosial ekonomi rendah, sehingga desa ditinggalkan penduduknya bermigrasi ke kota. Peningkatan pemerataan infrastruktur, terutama yang bersifat dasar seperti: prasarana transportasi, jaringan listrik dan komunikasi serta instalasi dan jaringan air minum sangat penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kutai Timur. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta akan mempengaruhi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

E. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi yang holistik di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Peningkatan mutu layanan dan kinerja, serta penerapan *good corporate governance*, harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kutai Timur.

F. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di era modern ini. Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang efektif dan bertanggung jawab penting dilakukan. Konservasi sumber daya alam dan

lingkungan (KSDAL) merupakan tanggung jawab semua tanpa terkecuali karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian *integral* dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur akan terkait dengan kepentingan daerah lain maupun kepentingan nasional bahkan internasional. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberlanjutan. Dengan sumber daya alam yang terbatas, pengelolaan yang efektif diperlukan agar sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pengelolaan yang baik juga akan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi masa depan.

Kutai Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Di tengah isu global dalam masalah lingkungan dan perubahan iklim terutama berkaitan dengan pengurangan dan penghapusan secara bertahap (*pashing out*) pemanfaatan batu bara sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (*Coal Fired Power Plant*) hingga 2030 sesuai dengan komitmen pada pertemuan G20 di Bali tahun 2022, maka hal ini mendorong setiap negara (termasuk Indonesia) untuk melaksanakan pemanfaatan energi yang berorientasi pada transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Just Energy Transition*). Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan akses energi yang bersih dan terjangkau bagi semua orang. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Timur harus dapat menjawab tantangan ini dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki menuju kemandirian energi. Sektor Pertambangan dan

Penggalian merupakan sektor basis dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur yang dimungkinkan bergeser pada sektor non basis yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian. Diawali dengan penerapan praktik-praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices*), maka potensi sektor ini dapat diarahkan pada pengembangan ekonomi hijau yang berfokus pada pembangunan

Pembangunan berkelanjutan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Kabupaten Kutai Timur harus mendorong peningkatan investasi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar dapat membantu meningkatkan pengembangan kegiatan ekonomi hijau di Kutai Timur.

Sektor Pertanian khususnya pada sub sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur telah memiliki landasan keberlanjutan yang memadai. Sejak tahun 2018 telah dirintis kerja sama dengan sejumlah Mitra Pembangunan (NGO/CSO/LSM) untuk keberlanjutan pada sub Sektor Perkebunan mulai dari aspek tata kelola, penerapan praktik-praktik pertanian yang baik, penguatan kapasitas pekebun mandiri dan koperasi, membangun kemitraan rantai pasok antara koperasi dan perusahaan kelapa sawit, dan mendorong identifikasi dan penetapan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT). Penguatan implementasi keberlanjutan (*sustainability*) pada sektor pertanian secara luas, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu mendorong penguatan pada aspek Tata Kelola meliputi tatanan regulasi, analisis dan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) bagi para pengambil keputusan agar menjamin terlaksananya kegiatan oleh semua pihak dalam mendukung pembangunan keberlanjutan.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, di antaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, desa tangguh bencana, sekolah/madrasah aman bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029. Visi dan Misi dalam konteks ini merupakan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2029 yaitu Bapak Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan H. Mahyunadi, S.E., M.Si. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur periode 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing"

Visi tersebut merupakan suatu cita-cita besar dalam rangka membangun daerah dan masyarakat Kutai Timur agar dapat berkembang secara berkelanjutan, menghadapi tantangan zaman, dengan memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Unsur yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan adalah Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Secara lebih spesifik, penjelasan setiap unsur dalam visi ini disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Kutai Timur

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1	Kutai Timur	Bahwa sasaran capaian keberhasilan penerapan visi tersebut adalah untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2	Tangguh	Merujuk pada kemampuan Kutai Timur untuk bertahan, berkembang, dan menghadapi tantangan yang ada, baik yang berasal dari alam, sosial, politik maupun ekonomi. Daerah yang tangguh tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga dapat pulih dan bangkit lebih kuat setelah menghadapi bencana atau krisis. Makna “tangguh” ini menekankan pada aspek-aspek berikut: ○ Ketahanan Ekonomi: Kabupaten Kutai Timur harus memfokuskan pembangunan ekonominya pada sektor-sektor yang dapat bertahan (<i>resilience</i>) terhadap fluktuasi pasar, bencana alam, atau perubahan kebijakan di tingkat regional, nasional dan global. ○ Ketahanan Sosial: Kutai Timur harus memiliki masyarakat yang memiliki daya tahan sosial yang tinggi, mampu mengatasi konflik, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. ○ Ketahanan Politik: mencerminkan kondisi pemerintahan dan masyarakat yang memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika politik, dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang demokratis, stabil, dan akuntabel ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta terciptanya harmoni antara berbagai

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		kepentingan politik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan ○ Manajemen Bencana dan Infrastruktur: Dengan risiko bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, atau gempa bumi, wilayah ini harus memiliki sistem manajemen bencana yang tangguh dan infrastruktur yang mampu bertahan terhadap bencana alam. Perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana sangat penting. ○ Kesiapsiagaan dan Adaptasi: Masyarakat dan pemerintah daerah perlu memiliki sistem dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan, baik perubahan iklim, ekonomi, maupun politik. Ini termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kutai Timur agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik dalam dunia yang terus berubah.
3	Mandiri	Kutai Timur diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya yang ada secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi dari luar. Hal ini mencakup kemandirian dalam ekonomi, pengelolaan pemerintahan, serta dalam pemberdayaan masyarakat. Makna “mandiri” ini menekankan pada aspek-aspek berikut: ○ Ekonomi Lokal yang Kuat: Kabupaten Kutai Timur harus mampu mengelola secara optimal sektor-sektor unggulan yang ada di daerahnya, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, agar dapat menciptakan ekonomi yang mandiri. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber daya alam

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		saja misalnya ketergantungan pada sektor Pertambangan dan Penggalian. ○ Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM: Salah satu cara untuk mencapai kemandirian adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap kewirausahaan lokal dan penguatan sumber daya manusia akan menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian daerah. ○ Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Kemandirian juga berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama tenaga kerja. Meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar lokal akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berinovasi, serta mengurangi ketergantungan pada pekerja dari luar daerah.
4	Berdaya Saing	Kutai Timur harus mampu bersaing secara positif, baik di tingkat regional, nasional, maupun global, dalam hal ekonomi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta daya tarik bagi investor. Makna “berdaya saing” ini menekankan pada aspek-aspek berikut: ○ Infrastruktur Berkualitas: Agar Kutai Timur dapat bersaing, pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti transportasi, konektivitas digital, dan infrastruktur dasar lainnya, harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing dalam perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat.



No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		○ Inovasi dan Teknologi: Kutai Timur perlu mendorong inovasi di berbagai sektor, terutama di bidang teknologi dan industri berbasis digital. Penggunaan teknologi dalam sektor-sektor tradisional, seperti pertanian dan perikanan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. ○ Pariwisata dan <i>Branding</i> Daerah: Dengan potensi alam dan budaya yang kaya, sektor pariwisata harus dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal dan internasional. <i>Branding</i> daerah yang kuat, dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan khas Kutai Timur, akan meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata. ○ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk dapat bersaing, SDM harus memiliki keahlian yang relevan dengan tuntutan pasar global. Peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan kepemimpinan akan membantu masyarakat di Kutai Timur untuk berdaya saing. ○ Kebijakan Pemerintah yang Mendukung: Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha, seperti insentif bagi investor, regulasi yang mempermudah bisnis, serta penciptaan peluang-peluang baru bagi pelaku usaha



Visi "**Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing**" bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi merupakan suatu langkah strategis yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Kesatuan dari ketiga aspek ini akan membawa Kutai Timur menuju kemajuan yang berkelanjutan, di mana masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera, daerahnya dapat berkembang, dan Kutai Timur dapat memainkan peran penting dalam perekonomian nasional maupun global dengan target sasaran seperti pada Tabel 3.2 berikut:



Tabel 3.2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kutai Timur Periode Lima Tahun Pertama

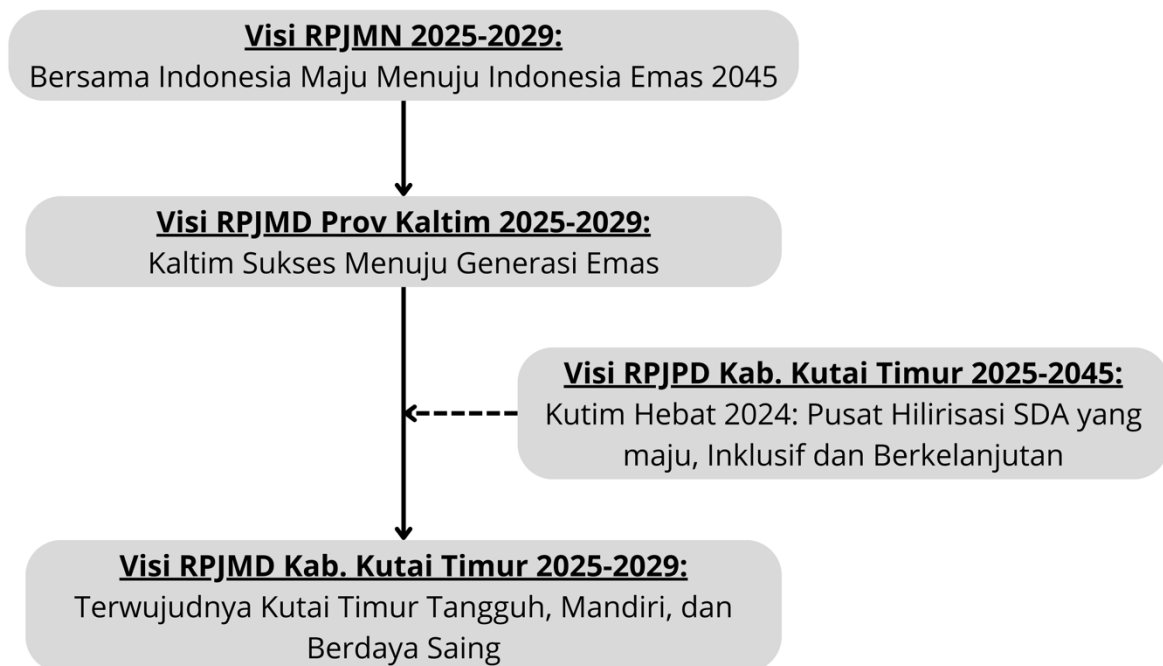
NO	Sasaran Visi RPJP	Indikator Pembangunan	REALIASI	Target Tahun ke-					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	344,49	366,53	389,99	414,94	441,49	469,74	499,80
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,34	4,56	4,80	5,05	5,31	5,58	5,87
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,81	7,64–8,5	6,92-7,82	6,21-7,14	5,49-6,37	4,78-5,80	4,06–5,12
		Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota		19,24	18,92	18,6	18,28	17,96	17,64
		Rasio gini (Indeks)	0,283	0,277–0,282	0,270-0,280	0,263-0,278	0,256-0,276	0,249-0,274	0,242–0,272
3	Peran kabupaten/kota secara provinsi meningkat/ Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	9,82	9,85-10	10,17-10,38	10,49-10,76	10-80,14	11,12-11,52	11,44-11,9
		Indeks Daya Saing Daerah	3,17	3,25-3,45	3,33-3,53	3,41-3,61	3,49-3,69	3,58-3,78	3,67-3,87
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	75,9	76,18	76,60	77,02	77,45	77,87	78,29
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	NA	61,66	63,50	65,33	67,16	69,00	70,83

Visi Kutai Timur 2025-2029 diciptakan untuk dapat meningkatkan pendapatan per kapita yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, di mana sasaran ini selaras dengan cita-cita Kutai Timur menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi. Selain itu, pencapaian visi tangguh dan mandiri tidak dapat dilepaskan dari upaya sistematis untuk mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial. Program-program pro-rakyat akan difokuskan pada penyediaan jaminan sosial, peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara merata di wilayah pedalaman maupun pesisir. Kutai Timur juga diarahkan untuk berperan aktif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur melalui kontribusi sektor unggulan. Dengan potensi sumber daya alam dan posisi strategis dalam pengembangan wilayah, Kutai Timur dipersiapkan sebagai simpul pertumbuhan baru yang menopang daya saing provinsi dan nasional.

Sementara itu, daya saing daerah menjadi kunci bagi keberlanjutan pembangunan. Sasaran ini mendorong inovasi daerah dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, serta reformasi tata kelola birokrasi. Semua ini adalah wujud dari visi berdaya saing yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Tidak hanya itu, pembangunan manusia adalah fondasi utama dalam membangun Kutai Timur yang tangguh dan mandiri. Sasaran ini mendorong investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi, dan pengembangan pemuda. SDM yang unggul akan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi dan sosial daerah. Kutai Timur juga berkomitmen terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Visi tangguh juga mengandung makna ketahanan ekologi. Oleh karena itu, arah pembangunan akan ditujukan untuk mengurangi emisi GRK melalui penguatan tata kelola lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta transisi energi bersih dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Visi Kabupaten Kutai Timur periode 2025-2029 sudah selaras dengan visi RPJMN 2025-2029 dan visi Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 seperti pada Gambar berikut:

Gambar 3.1 Keselarasan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur



Visi Kabupaten Kutai Timur periode 2025-2029 menitikberatkan pada pemerataan pembangunan baik infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia serta diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor tambang, sehingga dapat terwujud kondisi Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan keinginan dari RPJMN 2025-2029. Narasi ***"Indonesia Maju"*** dalam RPJMN 2025-2029 dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang ***"Tangguh" dan "Mandiri"***, serta Narasi ***"Indonesia Emas 2045"*** dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang memiliki ***"Daya Saing"***.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

- 1. Misi 1: "Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi."**

Peningkatan daya saing berarti meningkatkan kemampuan suatu daerah atau masyarakat untuk bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti

ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi. Sedangkan pemerataan daya saing memiliki makna bahwa hasil pembangunan harus merata ke semua wilayah dalam suatu daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, dan memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan bersaing.

Misi peningkatan dan pemerataan daya saing ini akan difokuskan pada:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- SDM yang unggul akan menjadi kunci utama dalam pembangunan berbagai aspek di Kutai Timur.
- Dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan moral masyarakat, Kutai Timur dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
- Masyarakat yang cerdas dan terampil akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan industri dan teknologi.

b. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

- Pemerataan pembangunan akan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kutai Timur.
- Dengan adanya akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
- Ketimpangan dalam pembangunan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, sehingga pemerataan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

c. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah.
- Akses layanan kesehatan yang lebih baik akan mengurangi angka kematian, meningkatkan harapan hidup, dan menciptakan generasi yang lebih kuat secara fisik dan mental.
- Gizi yang baik dan pola hidup sehat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar anak-anak serta produktivitas tenaga kerja.

- d. Menjaga Identitas Budaya dan Moralitas Masyarakat
 - Nilai-nilai budaya lokal perlu dijaga agar tidak tergerus oleh modernisasi yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Kutai Timur.
 - Masyarakat yang berbudaya akan lebih memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
 - Pendidikan berbasis moral akan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak baik, menjunjung tinggi etika, dan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.
- e. Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing Daerah
 - Mendorong prestasi di berbagai bidang (pendidikan, olahraga, seni, dan ekonomi) akan membantu meningkatkan citra Kutai Timur sebagai daerah yang maju dan inovatif.
 - Prestasi yang tinggi akan menarik lebih banyak investasi, meningkatkan pariwisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Dengan daya saing yang meningkat, Kutai Timur bisa menjadi salah satu daerah terdepan di Kalimantan Timur, baik dalam pembangunan SDM maupun sektor ekonomi lainnya.

2. Misi 2: "Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan."

Misi ini menekankan pentingnya transformasi/perubahan dan penguatan struktur ekonomi di Kutai Timur dengan mengandalkan sektor-sektor utama yang menjadi potensi daerah.

Secara lebih spesifik misi ini difokuskan pada:

a. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi berarti mengubah dan meningkatkan struktur ekonomi agar lebih kuat, berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Ini mencakup:

- **Diversifikasi ekonomi**, Kutai Timur tidak boleh hanya bergantung pada sektor pertambangan, tetapi juga mengembangkan sektor lain yang lebih berkelanjutan.

- **Meningkatkan nilai tambah**, pembangunan ekonomi di Kutai Timur harus mampu mendorong hilirisasi industri, misalnya pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar bernilai lebih tinggi sebelum dijual.
- **Pemanfaatan teknologi dan inovasi**, dilakukan melalui adopsi teknologi baru dalam pertanian, perikanan, dan industri agar lebih efisien dan produktif.

b. **Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal**

Kutai Timur memiliki potensi besar dalam beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi secara berkelanjutan, antara lain:

- **Pertanian dan Perkebunan**, melalui pengembangan tanaman unggulan seperti sawit, nenas, kakao, karet, dan hortikultura, serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan akses modal dan pasar yang lebih baik.
- **Kehutanan**: Mendorong pengelolaan hutan secara lestari untuk menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.
- **Pariwisata**: Mengembangkan ekowisata dan wisata budaya untuk menarik wisatawan serta meningkatkan pendapatan daerah.
- **Peternakan dan Perikanan**: Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan dengan pendekatan modern agar lebih produktif dan berkelanjutan.
- **Kelautan**: Mengoptimalkan potensi laut dan pesisir dengan meningkatkan infrastruktur perikanan serta mendukung nelayan dengan teknologi dan akses pasar.

3. Misi 3: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas."

Misi ini berfokus pada perbaikan sistem pemerintahan agar lebih kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah:

a. **Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh**

Tata kelola pemerintahan yang tangguh berarti pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup:

- **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan :** Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) agar lebih produktif dan inovatif dalam melayani masyarakat.
- **Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi :** Digitalisasi layanan publik untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- **Meningkatkan ketahanan birokrasi :** Pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan bencana, dengan kebijakan yang cepat dan tepat.
- **Peningkatan pelayanan publik :** Memastikan semua layanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial, berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan.

b. Pemerintahan yang Berintegritas

Integritas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup:

- **Transparansi dalam pengelolaan anggaran:** Menggunakan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, bertanggungjawab agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.
- **Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN):** Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat.
- **Partisipasi masyarakat dalam pengawasan:** Seoptimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
- **Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara:** Dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan ASN lebih fokus dalam bekerja dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

4. Misi 4 "Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas."

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Misi ini menekankan pada:

a. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar adalah fasilitas fisik yang menjadi fondasi utama dalam mendukung kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Fokus utama peningkatan infrastruktur dasar meliputi:

- **Jalan dan transportasi** : Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah terpencil.
- **Listrik dan air bersih** : Memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pedesaan, memiliki akses listrik yang stabil dan air bersih yang cukup.
- **Fasilitas pendidikan dan kesehatan** : Meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah, puskesmas, serta rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
- **Perumahan dan sanitasi** : Menyediakan hunian yang layak dan sistem pembuangan limbah yang baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Peningkatan Infrastruktur Digital

Di era digital, teknologi menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Peningkatan infrastruktur digital akan difokuskan pada:

- **Internet dan jaringan telekomunikasi** : Memperluas akses internet ke seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok, agar masyarakat bisa menikmati layanan digital seperti *e-commerce*, pendidikan daring, dan *telemedicine*.
- **Sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)** : Menerapkan layanan digital dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- **Transformasi digital di sektor ekonomi** : Mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun global.
- **Edukasi dan literasi digital** : Memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan menghindari dampak negatif dunia digital.

c. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah

Konektivitas antarwilayah sangat penting untuk pemerataan pembangunan. Fokus peningkatan konektivitas antar wilayah ini adalah:

- **Membangun akses transportasi yang lebih baik** antara kota dan desa agar distribusi barang dan jasa lebih lancar.
- **Mempermudah mobilitas masyarakat** dengan menyediakan sarana transportasi umum yang terjangkau dan nyaman.
- **Meningkatkan akses ke pasar dan pusat ekonomi** bagi pelaku usaha di daerah terpencil agar mereka dapat menjual produknya lebih luas.
- **Menghubungkan desa dengan kota melalui jaringan internet** agar masyarakat desa dapat mengakses layanan digital dan informasi secara lebih mudah.

d. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berintegritas

Peningkatan infrastruktur yang memadai dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- **Penerapan sistem e-Government** dalam upaya untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.
- **Digitalisasi layanan administrasi publik** agar masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan lainnya dengan cepat, transparan dan tanpa pungli.
- **Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran** untuk memastikan dana pembangunan digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif (3E).

5. Misi 5 "Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan."

Misi ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang baik akan memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. Elemen penting yang menjadi fokus misi ini adalah:

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu

Pengelolaan lingkungan yang terpadu berarti mengelola sumber daya alam secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*), seperti pemerintah, masyarakat, dan industri. Hal ini mencakup:

- **Pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan** guna mencegah deforestasi dan degradasi lahan akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan perumahan.
- **Pengendalian pencemaran lingkungan** guna menekan pencemaran air, udara, dan tanah dari industri dan aktivitas domestik agar lingkungan tetap sehat.
- **Peningkatan tata kelola sampah dan limbah** melalui penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Pemanfaatan energi ramah lingkungan** guna mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biogas, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

b. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan**

Merupakan pendekatan strategis jangka panjang yang bertujuan menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang. Ini mencakup:

- **Rehabilitasi dan konservasi ekosistem**

Merupakan adalah upaya untuk memulihkan, melindungi, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem agar tetap berfungsi secara optimal, termasuk melalui kegiatan seperti reboisasi, perlindungan lahan gambut, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

- **Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**

Adalah strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim dengan mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan lingkungan serta masyarakat, seperti pembangunan tanggul, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan penghijauan kota.

- **Pendidikan dan kesadaran lingkungan**

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye, edukasi, dan partisipasi aktif dalam gerakan lingkungan.

- **Penerapan kebijakan ramah lingkungan**

Mendorong peraturan yang lebih ketat terhadap industri agar mereka menjalankan bisnis dengan memperhatikan dampak lingkungan.

c. Keseimbangan Antara Pembangunan dan Kelestarian Alam

Fokus ini juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi fokus adalah:

- **Menerapkan konsep pembangunan hijau (*green development*)** : Mengembangkan proyek infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti bangunan hemat energi dan transportasi hijau.
- **Mendukung ekonomi berbasis lingkungan** : Mendorong usaha yang berbasis ekowisata, pertanian organik, dan industri hijau yang tidak merusak alam.
- **Menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir** : Melindungi kawasan mangrove, terumbu karang, dan ekosistem pesisir yang berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Hubungan antara kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Hubungan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur



Visi pembangunan jangka menengah Kutai Timur difokuskan pada transformasi Sosial (pada misi 1) dan transformasi Ekonomi (pada misi II). Fokus transformasi ini akan didukung oleh fondasi transformasi Tata Kelola (pada misi III) dan peningkatan

Infrastruktur (pada misi IV) yang kesemuanya itu akan bermuara pada keberlanjutan Lingkungan Hidup (pada misi V).

Misi tersebut memuat 50 program unggulan Kepala Daerah yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Tabel 3.3 Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah 2025-2029	
KUTAI TIMUR HEBAT	1.000 Beasiswa Hafidz/Hafidzah Jenjang Pelajar SD-SMP
	1.000 Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah & Relokasi Warga Terdampak Bencana
	Program RT 250 Juta Per RT Per Tahun
	1 Desa 1 Kendaraan Mobil Operasional
	1 RT 1 Kendaraan Motor Operasional
	1 Kecamatan 1 Stadion Mini
	1 KK 1 Sertifikat Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
	Angkutan Bus Listrik Anak Sekolah
	ASN Hebat & Berintegritas
	Asuransi Pertanian Gagal Panen.
	Pembukaan/cetak Lahan Pertanian 100.000 Ha dan Cetak Tambak 5.000 Ha
	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian
	Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas
	Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan
	Gratis Bantuan Buku, Seragam dan Sepatu Sekolah
	Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting
	Hibah 1 Miliar untuk Yayasan Pendidikan Agama
	Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Minggu
	Event dan Pembinaan untuk Peningkatan Prestasi Olahraga
	Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
	Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Rentan
	Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non Formal, Stop Stunting, dan Warga di Bawah Garis Kemiskinan
	Menggelar Festival Seni, Budaya & Wisata, Baik Tingkat Nasional & Internasional
	Pelatihan Keterampilan & Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat
	Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh
	Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Pariwisata Strategis Daerah
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)



Program Unggulan Kepala Daerah 2025-2029	
DESA HEBAT	Jalan Poros Desa Mulus
	Listrik Desa Menyala 24 Jam
	1 Desa 1 Jaringan Air Bersih yang Lancar
	Akses Internet Desa Lancar dan Internet Sekolah Gratis
	Anjungan Dukcapil Mandiri (Pencetakan KK, KTP, Akta Kelahiran, Kartu BPJS Kesehatan Setiap Desa)
	Bantuan 25 Juta Permodalan UMKM Desa
	Bantuan Bibit Tanaman Buah per Rumah Tangga untuk Penghijauan Lingkungan
	Bantuan untuk Kelompok Tani & Nelayan
	Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, Karet dan Padi
	Membangun Pabrik-Pabrik Hilirisasi Sawit
	Menjaga Ketersediaan Stok Pupuk Harga Terjangkau Bagi Petani Desa
	Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil
	Program Desa Presisi (Satu data Kutim)
	Insentif Kader Posyandu 500 Ribu Rupiah Per Bulan
	Enklave dan Perubahan Tata Ruang Bagi Wilayah yang Masih Masuk Dalam Daerah Kawasan
	Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perempuan & Keluarga di Setiap Kecamatan
	Penangkaran Buaya Sebagai Potensi Ekonomi & Wisata
KOTA HEBAT	Semenisasi, Aspal Jalan & Gang Mulus
	Pembangunan & Revitalisasi Drainase Kota
	Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Taman Tempat Bermain Anak, Ramah Disabilitas, Tempat Olahraga dan Tempat Berkumpul
	Pasar Digital
	Mall UMKM & Mall Pelayanan Publik
	Percepatan Operasional Pelabuhan Kenyamukan, Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan Pembangunan Bandara Sangatta

Penyusunan program unggulan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung keberhasilan pembangunan secara menyeluruh dan berjenjang dari pusat hingga daerah. Program unggulan daerah telah disusun untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan Presiden RI (RPJPN/RPJMN 2025–2045, serta arahan Presiden Prabowo) dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (RPJMD Provinsi dan Kaltim Berdaulat), dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi lokal Kutai Timur. Sinkronisasi tersebut dapat digambarkan dalam beberapa klaster utama berikut:

1. **Ketahanan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Alam**, Program seperti Bantuan Bibit Tanaman Buah, Asuransi Pertanian, Cetak Lahan Pertanian dan Tambak, serta Jaminan Pupuk Terjangkau mendukung langsung misi nasional untuk mencapai swasembada pangan dan Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern, yang juga merupakan bagian dari prioritas Kalimantan Timur dalam program unggulan Jospol;
2. **Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah**, Inisiatif seperti Pembangunan Mall UMKM dan Mall Pelayanan Publik serta peningkatan pelayanan birokrasi digital mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, sekaligus memperkuat posisi Kutai Timur dalam meningkatkan peran ekonomi kabupaten/kota terhadap pertumbuhan Provinsi Kalimantan Timur;
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, Program beasiswa seperti Kutim Stimulan, Kutim Tuntas, Beasiswa Hafidz/Hafidzah, bantuan pendidikan dan tenaga pengajar, serta event peningkatan prestasi olahraga secara langsung mendukung prioritas nasional dalam penguatan SDM unggul dan berkarakter, serta menjadi bagian dari pengembangan manusia sebagai prioritas Kaltim Berdaulat;
4. **Kesehatan dan Perlindungan Sosial**, Program Dokter Keliling, BPJS gratis bagi masyarakat miskin, Posyandu, dan pemberian susu & buah gratis untuk cegah stunting, merupakan respons konkret terhadap program nasional peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta dukungan terhadap upaya pencapaian zero stunting dan perlindungan kelompok rentan, sebagaimana juga menjadi fokus RPJMD Provinsi Kalimantan Timur;
5. **Percepatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**, Inovasi seperti ASN Hebat & Berintegritas serta Anjungan Dukcapil Mandiri menunjukkan dukungan langsung terhadap prioritas nasional dalam reformasi birokrasi, integritas ASN, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, murah, dan akuntabel;

6. Pembangunan Rendah Karbon dan Pengendalian Emisi, Komitmen Kutai Timur dalam penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim tercermin melalui program-program hijau, rehabilitasi lingkungan, serta penguatan sektor energi terbarukan, sejalan dengan target nasional menuju net zero emission tahun 2060 dan kontribusi Kalimantan Timur dalam program pembangunan rendah karbon.

Dengan demikian, Program Unggulan Bupati Kutai Timur 2025–2029 bukan hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian penting dalam rantai kontribusi pembangunan nasional dan provinsi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sinkronisasi ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan Kalimantan Timur yang berdaulat. Secara lengkap, bentuk dukungan terhadap Program Unggulan Nasional 2025-2029 dan program unggulan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 seperti pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.4 Sinkronisasi Dukungan Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Nasional

No.	Program Prioritas Nasional	Program Unggulan Bupati Kutai Timur
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	Bantuan Bibit Tanaman Buah Per Rumah Tangga untuk Penghijauan Lingkungan
		Asuransi Pertanian Gagal Panen
		Pembukaan/cetak Lahan Pertanian 100.000 Ha & Cetak Tambak 5.000 Ha
		Menjaga Ketersediaan Stok Pupuk Harga Terjangkau Bagi Petani Desa
		Bantuan Penyuluh Pertanian
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara	Mall UMKM & Mall Pelayanan Publik
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	ASN Hebat & Berintegritas
		Anjungan Dukcapil Mandiri (Pencetakan KK, KTP)
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	ASN Hebat & Berintegritas
5	Pemberantasan kemiskinan	Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas
		Gratis Bantuan Buku, Seragam dan Sepatu Sekolah



No.	Program Prioritas Nasional	Program Unggulan Bupati Kutai Timur
		Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perempuan & Keluarga
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia	Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil
		Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
		Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting
		Bantuan Tenaga Kesehatan
		Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan
		Insentif Kader Posyandu 500 Ribu Rupiah Per Bulan
		Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
8	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi	1.000 Beasiswa Hafidz/Hafidzah Jenjang Pelajar SDSMP
		Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan
		Event dan Pembinaan untuk Peningkatan Prestasi Olahraga
		Angkutan Bus Listrik Anak Sekolah
		Bantuan Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perempuan & Keluarga
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	Bantuan untuk Kelompok Tani & Nelayan
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau	Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Relokasi Warga Terdampak Longsor
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM	Bantuan 25 Juta Permodalan UMKM Desa
		Pelatihan Keterampilan & Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat



No.	Program Prioritas Nasional	Program Unggulan Bupati Kutai Timur
		Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Pariwisata Strategis Daerah
		Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh
		Pelatihan Keterampilan & Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat
		Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non Formal, Stop Stunting, dan Warga di Bawah Garis Kemiskinan
		Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Rentan
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA	Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, & Karet
		Membangun Pabrik Hilirisasi Sawit
16	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Minggu
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Event dan Pembinaan untuk Peningkatan Prestasi Olahraga
		Menggelar Festival Seni, Budaya & Wisata, Baik Tingkat Nasional & Internasional
		1 Kecamatan 1 Stadion Mini

Tabel 3.5 Sinkronisasi Dukungan Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur

Program Unggulan Provinsi	Program Unggulan Bupati
Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga 53	1.000 Beasiswa Hafidz/Hafidzah Jenjang Pelajar SD-SMP
Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah;	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian
Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga 53	Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas
Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit;	Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan
Gratis Seragam Sekolah;	Gratis Bantuan Buku, Seragam dan Sepatu Sekolah
Gratis Makanan Bergizi;	Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting
Gratis Hajidan Umrah untuk Marbot	Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Minggu



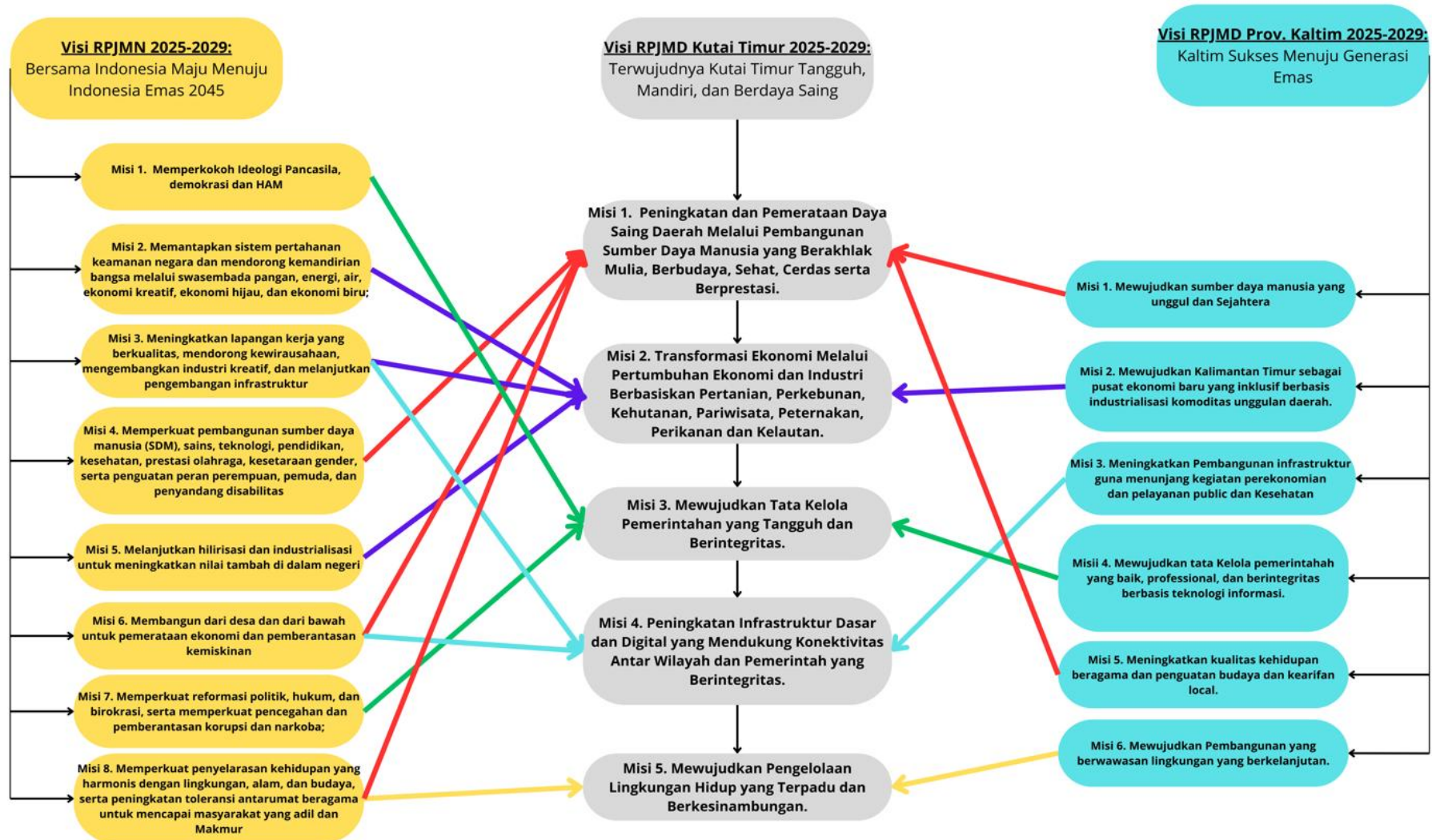
Program Unggulan Provinsi	Program Unggulan Bupati
Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan;	Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa	Menggelar Festival Seni, Budaya & Wisata, Baik Tingkat Nasional & Internasional
Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa	Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Pariwisata Strategis Daerah
Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;	Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, & Karet
Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kefasilitas antara pemerintah daerah, pusat dan swasta	Membangun Pabrik-Pabrik Hilirisasi Sawit
Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa	Penangkaran buaya sebagai potensi ekonomi dan wisata
Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM	Mall UMKM & Mall Pelayanan Publik
Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;	1 KK 1 Sertifikat Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik	Anjungan Dukcapil Mandiri (Pencetakan KK, KTP, Akta Kelahiran, Kartu BPJS Kesehatan Setiap Desa)
Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi dan pelabuhan internasional;	Jalan Poros Desa Mulus
Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa;	Akses Internet Desa Lancar dan Internet Sekolah Gratis
Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi dan pelabuhan internasional;	Semenisasi, Aspal Jalan & Gang Mulus
	Pembangunan & Revitalisasi Drainase Kota
Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM	Pasar Digital
Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi dan pelabuhan internasional;	Percepatan Operasional Pelabuhan Kenyamukan, Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan Pembangunan Bandara Sangatta

Selain untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2029, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur di atas juga disusun dalam rangka untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN Tahun



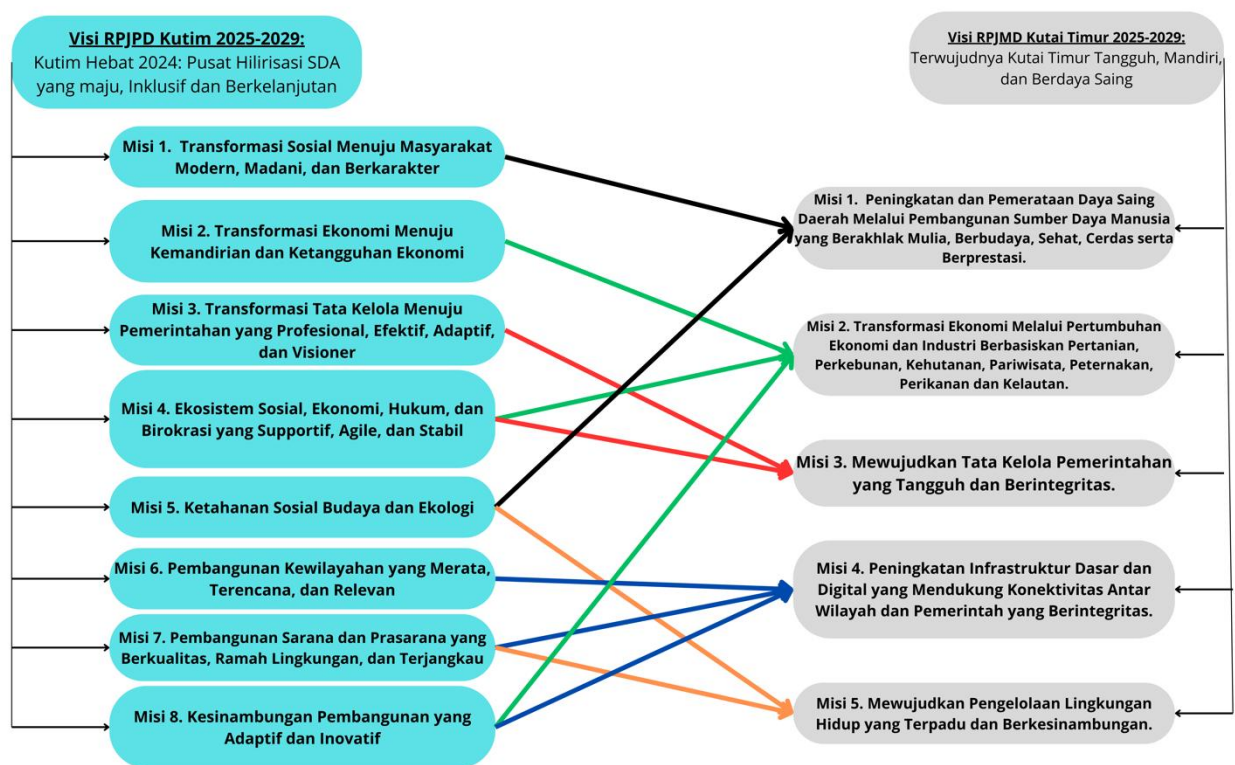
2025-2029 dengan skema keterkaitan antara visi dan misi Kutai Timur dengan visi misi provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3 Skema Keterkaitan Antara Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Misi Provinsi dan Nasional



RPJMD juga merupakan penerapan RPJPD dalam setiap lima tahun. Sejalan dengan hal tersebut, maka sinkronisasi antara misi pembangunan Jangka Panjang Daerah dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan visi jangka panjang daerah. Sinkronisasi antara RPJPD dan RPJMD bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan strategi penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan arah yang jelas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang terintegrasi, daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan mencapai visi jangka panjangnya dengan efektif.

Gambar 3.4 Sinkronisasi Misi RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

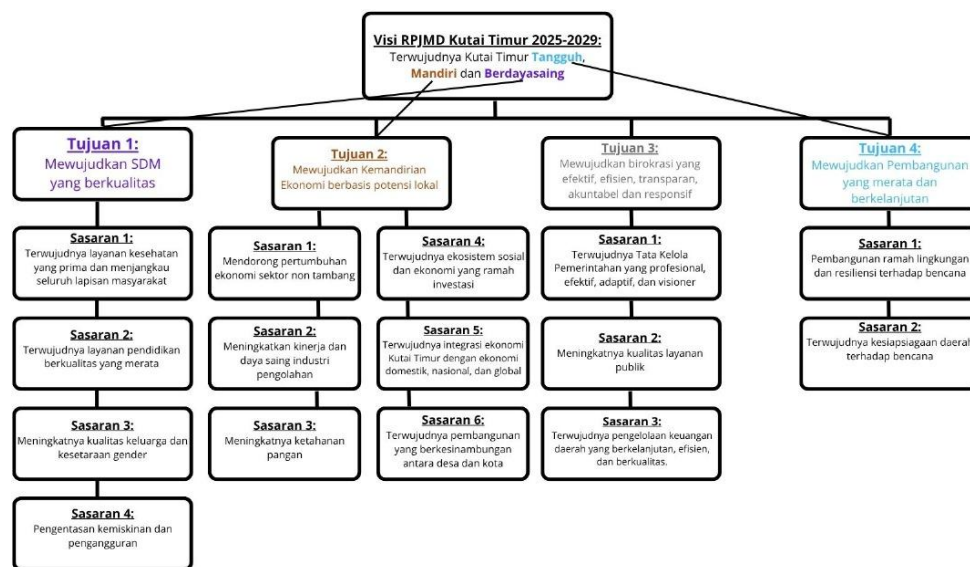


3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa

hasil pembangunan Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan berdasarkan pada analisis isu-isu strategis. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini selanjutnya menjadi sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.

Gambar 3.5 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029



Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk target kinerja juga telah memperhatikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 tahap pertama. Terdapat 4 (empat) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi : "Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing"										
1	Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi.	T1. Mewujudkan SDM yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	76,18	76,6	77,02	77,45	77,87	78,29
			T1.S1. Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,33	74,79	75,25	75,71	76,16	76,61
				Angka Stunting	25,35	23,7	22,16	20,72	19,38	18,12
			T1.S2. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	9,49	9,51	9,53	9,55	9,57	9,59
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08
			T1.S3. Meningkatkan kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42
				Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	66,7	67,9	68,9	69,9	70,9	71,8
			T1.S4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan (%)	7,93–8,14	7,16-7,55	6,38-6,97	5,61-6,38	4,83-5,80	4,06–5,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,44–5,51			5,21-5,31	4,98-5,10	4,76-4,90	4,53-4,70	4,30–4,50		



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.	T2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi	10	10,38	10,76	11,14	11,52	11,9
				PDRB per kapita (Rp Juta)	366,53	389,99	414,94	441,49	469,74	499,8
				Rasio gini (Indeks)	0,278-0,283	0,271-0,281	0,264-0,279	0,257-0,277	0,250-0,275	0,243-0,273
			T2.S1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%)	25,06	25,66	26,91	27,56	28,22	28,88
			T2.S2 Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,56	5,06	6,9	8,74	10,58	12,42
			T2.S3. Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	64,22	66,9	69,7	72,62	75,66	78,82
			T2.S4. Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi	Nilai investasi PMDN (Juta Rupiah)	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
				Nilai investasi PMA (Ribu \$)	268.750	271.875	275.000	275.000	275.000	275.000
			T2.S5. Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global	Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB	70,99	71,69	72,39	73,09	73,79	74,49



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintah yang Berintegritas.		T2.S6. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,89–8,01	8,01–8,13	8,13–8,26	8,26–8,38	8,38–8,50	8,50–9,00
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas.	T3. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif		Indeks Reformasi Birokrasi	72 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	80 (BB)
			T3.S1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Indeks Pemerintahan Digital	NA	3	3,4	3,8	4	4,2
				Indeks Sistem Merit	296,25	317	337,75	358,5	379,25	400
				Nilai SAKIP	63,4	66,72	70,04	73,36	76,68	80
				Indeks Integritas Pemerintah (Survei Penilaian Integritas)	62,13	65,11	68,08	71,05	74,03	77
				Indeks Inovasi Daerah	28	32	36	40	44	46
			T3.S2. Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11
			T3.S3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,73	76,23	77,73	79,23	80,73	82,23



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan.	T4. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	61,66	63,5	65,33	67,16	69	70,83
			T4.S1. Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,37	78,91	80,49	82,1	83,74	85,41
			T4.S2. Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	166,36	159,36	152,36	145,36	138,36	131,36

Keempat tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SDGs dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.6 Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan RPJMD KUTIM 2025-2029	Tujuan SDG'S							
T1. Mewujudkan SDM Yang berkualitas	1 MENGEKSPLOKASI KEMISKINAN	3 KESEHATAN TANGSAH DAN KESELAMATAN	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	5 KESAMPAKAN GENDER	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI			
T2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal	2 MENGEKSPLOKASI KELAPARAN	9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKUALITAS					
T3. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif	16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KETANGGULANGAN YANG KUAT	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN						
T4. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan	6 AIR BERSIH DAN SANITASI	7 ENERGI BERSIH DAN TERKAWAL	9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI	10 KEMERATAAN	11 KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKUALITAS	13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	14 KEKAYAAN LAUT	15 KEKAYAAN DARAT

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2025-2029. Strategi Pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *Grand Design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan

bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Perumusan strategi dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Pentahapan pembangunan merupakan salah satu bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Adapun pentahapan pembangunan RPJMD secara indikatif direpresentasikan melalui tema pembangunan tahunan yang disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.7 Agenda/Tahapan Pembangunan Tahunan Kutai Timur 2025-2029



Agenda pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025–2029 disusun secara bertahap dengan arah yang jelas dan terukur untuk mewujudkan visi daerah. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus yang berbeda, namun saling terkait dan berkesinambungan. Pola ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Kutai

Timur tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan fondasi kokoh bagi kemandirian dan daya saing daerah di masa depan. Mulai dari pemantapan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan diarahkan secara bertahap menuju penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi yang berkelanjutan, hingga penguatan sektor non-tambang sebagai upaya melepaskan ketergantungan dari sumber daya alam ekstraktif. Pada akhirnya, tahapan pembangunan ini bermuara pada terwujudnya Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing di tahun 2029.

- **Tahun 2025 – Pemantapan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung daya saing daerah**, Pada awal periode RPJMD, pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agenda ini diarahkan untuk mendukung daya saing daerah melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar. Tahun ini menjadi momentum konsolidasi pembangunan, selaras dengan RKP Nasional 2025 yang menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta RKPD Prov Kal-Tim 2025 yang meningkatkan diversifikasi ekonomi yang didukung infrastruktur wilayah dan SDM berdaya saing.
- **Tahun 2026 – Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung dengan kemantapan infrastruktur yang mendukung investasi**, Setelah fondasi ekonomi mulai kokoh, perhatian pembangunan beralih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai motor utama transformasi ekonomi. Fokus diarahkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan Gender serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu pembangunan konektivitas antar wilayah difokuskan untuk menunjang peningkatan sumber daya ekonomi dan investasi daerah yang didukung transformasi Tata Kelola Pemerintahan.
- **Tahun 2027 – Transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berdayasaing menuju Kutai Timur sejahtera**. Tahap ketiga menjadi momentum transformasi ekonomi Kutai Timur menuju pola pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk daerah pedalaman dan perbatasan, menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara inklusif. Selain itu, penguatan kapasitas SDM diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang kompetitif, sehingga mendukung ekosistem ekonomi yang produktif menuju Kutai Timur sejahtera.

- **Tahun 2028 – Menuju Kutai Timur mandiri melalui penguatan ekonomi non tambang dan ketahanan pangan yang didukung pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang partisipatif.** Pada tahun keempat, fokus pembangunan diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan sektor non-tambang sebagai sumber pertumbuhan baru, serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan dan partisipatif, sehingga masyarakat memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tahapan ini sekaligus mempersiapkan Kutai Timur memasuki era pasca-tambang dengan fondasi ekonomi yang kokoh.
- **Tahun 2029 – Perwujudan visi Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.** Tahun terakhir periode RPJMD menjadi puncak konsolidasi seluruh agenda pembangunan. Fokus diarahkan pada penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan global, kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, serta daya saing yang ditopang oleh SDM unggul dan tata kelola pemerintahan yang responsif. Tahun 2029 menjadi momentum untuk memastikan seluruh upaya pembangunan tidak hanya menghasilkan capaian fisik, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara menyeluruh

Tahapan pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2025–2029 yang telah dirumuskan sebelumnya bukan hanya sekadar penanda arah capaian setiap tahun, tetapi sekaligus menuntut adanya strategi yang tepat untuk mewujudkannya. Setiap tema pembangunan tahunan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan strategis yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah pada tahap tersebut. Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kutai Timur 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan indikasi strategi yang disusun. Strategi-strategi inilah yang akan menjadi



jembatan antara arah pembangunan makro dengan implementasi program nyata di lapangan, sehingga visi Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing dapat diwujudkan secara konsisten dan terukur. Berikut ini merupakan indikasi strategi dalam RPJMD Kutai Timur 2025-2029:

Tabel 3.7 Strategi Pemenuhan Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD Kutai Timur

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI
T1. Mewujudkan SDM Yang berkualitas	
T1.S1. Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Pemerataan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan,
	Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan
	Penguatan pembiayaan dan jaminan kesehatan
	Pencegahan dan pengendalian penyakit secara komprehensif,
	Transformasi digital dan sistem informasi kesehatan,
	Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesehatan masyarakat
	Penurunan kejadian stunting pada bayi dan balita,
T1.S2. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata	Pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan,
	Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan,
	Penguatan mutu pembelajaran dan kurikulum
	Dukungan sosial dan bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu,
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan modern
	Kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga non-formal
T1.S3. Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga
	Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah
	Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, politik, dan kepemimpinan
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
	Perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal
T1.S4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan pendapatan dan akses terhadap lapangan kerja
	Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
	Perlindungan sosial terpadu dan inklusif
	Penguatan layanan dasar di wilayah tertinggal dan pedalaman
	Kemitraan dan kolaborasi multipihak



TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI
T2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal	
T2.S1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta UMKM
	Pengembangan sektor pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekowisata
	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Ekonomi Hijau
	Kolaborasi dan inovasi lintas sektor
T2.S2. Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan	Hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan
	Penguatan infrastruktur dan kawasan industri
	Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM Industri
	Penguatan akses pasar dan branding produk lokal
	Fasilitasi pembiayaan dan insentif industri pengolahan
T2.S3. Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal
	Penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah,
	Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
	Penguatan ketahanan pangan keluarga dan komunitas
	Pengembangan sistem informasi dan tata kelola panga
T2.S4. Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi	Penyederhanaan regulasi dan perizinan investasi
	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung investasi
	Jaminan stabilitas sosial, politik, dan keamanan,
	Promosi dan fasilitasi investasi berbasis potensi unggulan daerah
T2.S5. Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global	Mendorong hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor lokal
	Penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung ekspor
	Promosi dagang dan akses ke pasar internasional,
T2.S6. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar antar kecamatan dan desa
	Pengendalian risiko banjir dan infrastruktur resilien terhadap iklim
	Pengembangan bandara dan pelabuhan sebagai pusat konektivitas daerah



TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI
	Peningkatan infrastruktur irigasi, bendungan, dan ketersediaan air baku
	Penyediaan akses air minum aman di daerah sulit terlayani,
	Peningkatan kualitas tata kelola dan pembiayaan infrastruktur
	Peningkatan status desa untuk pemenuhan dimensi IDM
	Penguatan konektivitas dan integrasi wilayah desa-kota
	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan perencanaan partisipatif
	Integrasi program kabupaten dan dana desa,
	Pengembangan wilayah perdesaan sebagai basis ketahanan sosial dan ekonomi
T3. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif	
T3.S1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam adaptasi perubahan iklim,
	Pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multi-pihak
	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja daerah
	Membangun budaya pemerintahan yang inovatif dan berintegritas
	Penguatan ekosistem inovasi daerah
	Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi digital
	Dukungan regulasi dan insentif inovasi
T3.S2. Meningkatnya kualitas layanan publik	Standardisasi dan penyederhanaan prosedur layanan,
	Pengembangan mal pelayanan publik (MPP) dan layanan terpadu
	Digitalisasi layanan publik
	Peningkatan kompetensi dan etika pelaksana layanan
	Penguatan mekanisme pengaduan dan umpan balik masyarakat
T3.S3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas



TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI
T4. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan	
T4.S1. Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Penguatan tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan
	Peningkatan kualitas IKLH
T4.S2. Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Penguatan sistem manajemen risiko dan ketahanan bencana daerah

1) T1.S1. Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

- a. **Pemerataan Akses dan Ketersediaan Pelayanan Kesehatan.** Strategi pemerataan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan diarahkan untuk menjawab tantangan geografis dan demografis Kutai Timur yang memiliki wilayah luas, sebaran penduduk tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur dasar. Program Dokter Keliling dan layanan kesehatan bergerak menjadi solusi praktis untuk menjangkau masyarakat di daerah pedalaman, terpencil, maupun perbatasan, sehingga hak dasar kesehatan dapat dirasakan lebih merata. Di sisi lain, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kesehatan diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas layanan tidak hanya hadir sesaat, tetapi berkelanjutan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sesuai standar. Upaya ini diperkuat dengan optimalisasi sistem rujukan berjenjang, agar setiap kasus kesehatan ditangani sesuai tingkatannya, sekaligus mengurangi beban rumah sakit rujukan utama. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas serta Pustu menjadi kunci memperluas cakupan layanan primer di tingkat lokal. Dengan tenaga kesehatan yang memadai, layanan dasar yang optimal, serta jejaring rujukan yang kuat, strategi ini diharapkan dapat menghadirkan layanan kesehatan yang prima, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kutai Timur
- b. **Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan.** Strategi peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan ditujukan untuk menjawab permasalahan mendasar terkait keterbatasan jumlah, distribusi yang belum merata, serta kompetensi tenaga medis di Kutai Timur. Rekrutmen dan distribusi tenaga medis secara proporsional menjadi langkah penting agar kebutuhan layanan kesehatan di setiap wilayah, termasuk daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan, dapat terpenuhi secara adil. Upaya ini perlu diimbangi dengan pemberian insentif daerah dan tunjangan khusus sebagai daya tarik untuk mempertahankan tenaga kesehatan, sekaligus meningkatkan motivasi

dan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan prima. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi elemen krusial dalam menghadapi dinamika penyakit, perkembangan teknologi medis, dan standar pelayanan kesehatan modern. Dengan tenaga medis yang terdistribusi secara merata, termotivasi, serta kompeten, strategi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi layanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan di Kutai Timur

- c. **Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,** Strategi penguatan pembiayaan dan jaminan kesehatan diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat Kutai Timur memperoleh perlindungan kesehatan yang berkeadilan. Pemenuhan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi prioritas agar tidak ada warga yang tertinggal dari skema jaminan nasional, sekaligus mengurangi beban biaya pribadi saat mengakses layanan kesehatan. Di sisi lain, optimalisasi layanan bagi ibu hamil, balita, lansia, serta kelompok rentan lainnya dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan kualitas tumbuh kembang generasi muda, serta menjamin kehidupan sehat bagi kelompok usia lanjut. Dengan pembiayaan yang lebih inklusif dan jaminan kesehatan yang efektif, strategi ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan sistem kesehatan daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kutai Timur.
- d. **Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara Komprehensif.** Strategi pencegahan dan pengendalian penyakit secara komprehensif dirancang untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat Kutai Timur melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunisasi lengkap, serta skrining dini penyakit tidak menular menjadi upaya penting untuk menekan angka kesakitan sejak hulu, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kesehatan. Di sisi lain, penguatan program penanganan penyakit menular dilakukan guna

menekan risiko penularan yang cepat, terutama di wilayah padat penduduk maupun daerah rawan wabah. Tak kalah penting, penyediaan pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi bagi masyarakat dengan gangguan mental ringan hingga sedang menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif. Dengan adanya pendekatan ini, kesehatan mental tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan daerah. Secara keseluruhan, strategi ini diharapkan mampu menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular, memperluas akses layanan kesehatan jiwa, serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan tangguh menghadapi tantangan kesehatan di masa depan

- e. **Transformasi Digital dan Sistem Informasi Kesehatan,** Strategi transformasi digital dan sistem informasi kesehatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelayanan kesehatan di Kutai Timur. Digitalisasi rekam medis dan pelayanan berbasis aplikasi memungkinkan tenaga kesehatan memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Sementara itu, integrasi sistem data kesehatan antar fasilitas dan Dinas Kesehatan membuka peluang pemantauan kondisi kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga deteksi dini masalah kesehatan dapat dilakukan dengan lebih responsif. Dengan dukungan teknologi digital, pelayanan kesehatan akan semakin transparan, terukur, dan terkoordinasi, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola sektor kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Strategi ini menjadi fondasi menuju sistem kesehatan daerah yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
- f. **Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kesehatan Masyarakat,** Strategi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesehatan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif warga sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di Kutai Timur. Penguatan peran kader Posyandu melalui peningkatan kapasitas dan pemberian insentif

bulanan menjadi langkah krusial agar kader tetap termotivasi dalam memberikan layanan dasar, khususnya bagi ibu, balita, dan kelompok rentan. Selain itu, edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan pola hidup sehat yang dilaksanakan melalui sekolah maupun komunitas lokal merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Tidak kalah penting, kemitraan dengan organisasi masyarakat, PKK, dan tokoh adat akan memperkuat basis sosial dalam advokasi kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif, memperluas jangkauan informasi kesehatan, sekaligus memastikan program kesehatan lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang kuat, strategi ini diharapkan mampu melahirkan kemandirian komunitas dalam menjaga kesehatan, mengurangi ketergantungan pada layanan kuratif, serta memperkuat fondasi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Kutai Timur

- g. **Penurunan kejadian Stunting pada bayi dan balita.** Strategi penurunan kejadian stunting diarahkan untuk memastikan tumbuh kembang optimal bagi bayi dan balita di Kutai Timur melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pemberian makanan tambahan, susu gratis, serta penguatan fungsi Posyandu menjadi langkah utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Upaya ini diperkuat dengan optimalisasi gerakan aksi konvergensi lintas sektor, sehingga pencegahan stunting dilakukan secara terpadu mulai dari tingkat keluarga, desa, hingga kabupaten. Inovasi layanan jemput bola melalui Cap Jempol Stop Stunting memastikan intervensi gizi dan kesehatan menjangkau langsung keluarga berisiko, khususnya di wilayah pedalaman dan terpencil. Sementara itu, pembentukan kampung keluarga berkualitas, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan rumah data kependudukan berfungsi sebagai pusat edukasi, layanan, dan pengelolaan informasi yang mendukung ketepatan sasaran program. Selain dari APBD dan dukungan pemerintah, strategi ini juga mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari CSR perusahaan

sebagai bentuk kolaborasi dunia usaha dalam percepatan penurunan stunting. Dengan pendekatan komprehensif dan partisipatif ini, diharapkan prevalensi stunting di Kutai Timur dapat ditekan secara signifikan, melahirkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing.

2) T1.S2. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata.

a. Pemerataan Akses Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Strategi pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah Kutai Timur yang memiliki tantangan geografis, sebaran penduduk yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah menjadi prioritas agar setiap anak mendapatkan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Penyediaan transportasi sekolah, seperti bus listrik, hadir sebagai solusi inovatif untuk mengurangi hambatan jarak dan meningkatkan aksesibilitas bagi anak-anak di daerah terpencil. Selain itu, pengembangan sekolah terbuka dan pembelajaran berbasis komunitas memungkinkan fleksibilitas layanan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang terkendala jarak, kondisi sosial-ekonomi, maupun kebutuhan khusus. Upaya ini diperkuat dengan penguatan inklusivitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, agar mereka memperoleh kesempatan belajar yang setara dalam lingkungan yang ramah dan adaptif. Melalui strategi ini, diharapkan setiap anak di Kutai Timur memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas, tanpa terhambat oleh faktor geografis, sosial, maupun fisik, sehingga tercipta generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.

b. Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan. Strategi peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan difokuskan untuk memperkuat peran pendidik sebagai aktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan di Kutai Timur. Peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran agar mampu menjawab tantangan pendidikan abad 21. Langkah ini diimbangi dengan pemberian insentif

dan afirmasi bagi guru, terutama yang bertugas di wilayah pedalaman dan perbatasan, guna menjaga motivasi dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, rekrutmen tenaga pengajar secara proporsional dan berbasis zonasi menjadi upaya untuk mengatasi kekurangan guru, sehingga distribusi pendidik lebih merata di seluruh wilayah. Program magang, pertukaran guru, serta pengiriman guru berprestasi turut mendukung peningkatan mutu melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan inovasi pembelajaran. Dengan strategi ini, diharapkan kualitas pembelajaran di Kutai Timur semakin meningkat, kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat ditekan, dan terbentuk ekosistem pendidikan yang adaptif, berdaya saing, serta berorientasi pada pengembangan SDM unggul.

- c. **Penguatan Mutu Pembelajaran dan Kurikulum.**, Strategi penguatan mutu pembelajaran dan kurikulum diarahkan untuk memastikan peserta didik di Kutai Timur mampu menguasai kompetensi dasar sekaligus memiliki karakter dan daya saing yang kuat. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui platform digital, e-learning, dan konten pendidikan daring menjadi jawaban atas kebutuhan inovasi metode belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Selain itu, pengembangan pendidikan karakter, literasi digital, dan numerasi dijadikan fondasi utama dalam membentuk SDM unggul. Dengan demikian, siswa tidak hanya cakap dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, keterampilan, serta kesiapan menghadapi transformasi digital dan dinamika global. Melalui strategi ini, kualitas pendidikan di Kutai Timur diharapkan semakin adaptif, relevan dengan perkembangan zaman, dan mampu melahirkan generasi yang sehat secara moral, kritis secara intelektual, serta tangguh dalam bersaing di masa depan.
- d. **Dukungan Sosial dan Bantuan Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu.** Strategi dukungan sosial dan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan

yang berkeadilan di Kutai Timur. Melalui program Beasiswa Kutim Stimulan dan Kutim Tuntas, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin maupun siswa berprestasi tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi. Selain itu, pemberian perlengkapan sekolah gratis berupa seragam, buku, dan sepatu setiap tahun ajaran baru membantu meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat belajar siswa. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya strategi ini, diharapkan akses pendidikan di Kutai Timur semakin merata, inklusif, serta mampu membangun generasi yang lebih cerdas, tangguh, dan berdaya saing.

- e. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Layak dan Modern.** Strategi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sesuai standar di seluruh wilayah Kutai Timur. Pembangunan laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, serta toilet yang layak menjadi prioritas agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermutu di setiap jenjang pendidikan. Pemenuhan fasilitas sekolah berbasis teknologi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menyiapkan generasi yang melek digital dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, standarisasi fasilitas sekolah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan penting untuk menjamin kesetaraan mutu layanan di seluruh sekolah, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman. Dengan demikian, pemerataan sarana prasarana tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah. Melalui strategi ini, Kutai Timur diharapkan mampu menghadirkan sistem pendidikan yang modern, inklusif, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

- f. **Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Lembaga Non-Formal**, Strategi kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga non-formal bertujuan memperkuat ekosistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja. Pengembangan kemitraan dengan industri dan dunia kerja (DUDI) membuka peluang bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman praktis, memperluas akses magang, serta meningkatkan kesiapan kerja setelah lulus. Di sisi lain, pemberdayaan pendidikan nonformal berperan sebagai jalur alternatif yang fleksibel bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam peningkatan kapasitas SDM. Pelibatan masyarakat, LSM, serta tokoh adat dan agama menjadi kunci dalam membangun lingkungan pendidikan yang kondusif, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Kutai Timur. Melalui sinergi multi-pihak ini, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama untuk melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

3) T1.S3. Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender.

- 2.1.1.1.5 Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga.** Strategi penguatan ketahanan dan kualitas keluarga difokuskan pada peningkatan peran keluarga sebagai unit terkecil namun paling strategis dalam pembangunan SDM Kutai Timur. Edukasi keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) menjadi wadah penting untuk membekali keluarga dengan pengetahuan, keterampilan, serta dukungan dalam menghadapi setiap tahapan siklus kehidupan. Penyediaan layanan konseling keluarga dan parenting berbasis komunitas turut memperkuat fungsi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Kampanye keluarga sehat dan bahagia mendorong terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya pola hidup sehat dan relasi keluarga yang berkualitas. Upaya ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media digital dan platform edukasi daring, sehingga pesan-pesan edukatif dapat

menjangkau masyarakat lebih luas dan efektif. Dengan strategi ini, diharapkan terbangun keluarga Kutai Timur yang tangguh, sejahtera, dan mampu menjadi fondasi utama dalam melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan.

2.1.1.1.6 Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. Strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di Kutai Timur mampu memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program di setiap perangkat daerah menjadi kunci agar pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, penguatan kelembagaan PUG dilakukan untuk memperkuat koordinasi, kapasitas, serta komitmen lintas sektor dalam mendorong terciptanya ruang partisipasi yang setara. Dengan demikian, PUG tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Melalui strategi ini, diharapkan pembangunan Kutai Timur mampu mengurangi kesenjangan gender, memperluas peran perempuan dalam pembangunan, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

2.1.1.1.7 Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi, Politik, dan Kepemimpinan. Strategi pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, politik, dan kepemimpinan diarahkan untuk memperluas peran serta perempuan dalam pembangunan daerah secara nyata dan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga dan perempuan kepala keluarga, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal. Fasilitasi bagi perempuan pelaku UMKM dalam mengakses pasar, pembiayaan, serta legalitas usaha semakin membuka ruang agar perempuan dapat berdaya saing dalam dunia usaha. Di ranah sosial-politik, peningkatan partisipasi perempuan dalam forum desa, BPD, organisasi masyarakat, maupun jabatan

struktural pemerintahan berfungsi untuk memastikan representasi dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pemberian penghargaan bagi tokoh perempuan inspiratif dan organisasi perempuan yang aktif menjadi apresiasi sekaligus motivasi untuk terus mendorong kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan. Dengan strategi ini, perempuan di Kutai Timur tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat demokrasi lokal, serta melahirkan kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan gender.

2.1.1.1.8 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

(KtPA). Strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) difokuskan pada perlindungan hak asasi serta pemenuhan kebutuhan korban secara menyeluruh. Penguatan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta unit layanan ramah korban menjadi langkah strategis untuk memberikan akses cepat, aman, dan manusiawi bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Upaya ini dipertegas melalui pendidikan anti-kekerasan dan kesetaraan gender di sekolah, komunitas, maupun tempat ibadah, guna menumbuhkan kesadaran kolektif sejak dini. Di samping itu, peningkatan koordinasi lintas sektor antara aparat kepolisian, rumah sakit, DP3A, dan lembaga sosial menjadi kunci agar penanganan korban lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kampanye publik seperti “Stop KDRT”, “Stop Perkawinan Anak”, dan “Lindungi Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan” memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Dengan strategi ini, Kutai Timur diharapkan mampu membangun sistem perlindungan yang tangguh, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan, ramah anak, dan responsif gender.

2.1.1.1.9 Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dan Marginal.

Strategi perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar serta

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, khususnya perempuan miskin, penyandang disabilitas, korban kekerasan, serta kelompok rentan lainnya. Fasilitasi layanan hukum dan pendampingan menjadi langkah utama agar kelompok ini memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan yang layak. Selain itu, program dukungan sosial bagi ibu tunggal, lansia perempuan, dan perempuan dengan HIV/AIDS dirancang untuk memperkuat daya tahan hidup serta meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka. Upaya ini diperkuat dengan penguatan lembaga rujukan dan pusat aduan masyarakat berbasis desa/kelurahan, sehingga pelayanan perlindungan dapat diakses lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan strategi ini, diharapkan kelompok rentan di Kutai Timur tidak lagi termarginalkan, tetapi terlindungi, berdaya, dan mampu menjalani kehidupan yang lebih sejahtera dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

4) T1.S4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

a. Peningkatan Pendapatan dan Akses terhadap Lapangan Kerja.

Strategi peningkatan pendapatan dan akses terhadap lapangan kerja diarahkan untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat Kutai Timur sekaligus menekan tingkat pengangguran. Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis desa menjadi fokus utama karena sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar serta mampu meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Program padat karya produktif dilaksanakan untuk menyediakan lapangan kerja langsung, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM membuka ruang inovasi baru yang sesuai dengan tren pasar modern, memperluas akses pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Upaya ini diperkuat melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi agar dunia usaha semakin tertarik menanamkan modal di Kutai Timur, sehingga tercipta lebih banyak kesempatan kerja berkualitas. Dengan strategi ini, diharapkan

pendapatan masyarakat meningkat, tingkat kesejahteraan membaik, serta struktur ekonomi daerah semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

- b. **Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).** Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi utama dalam mendorong daya saing daerah. Melalui program beasiswa Kutim Tuntas dan Stimulan, pemerintah memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda, khususnya dari keluarga kurang mampu maupun berprestasi. Selain itu, pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu terserap di pasar kerja secara optimal. Tidak kalah penting, peningkatan keterampilan digital dan kewirausahaan menjadi langkah strategis menghadapi tantangan era transformasi digital dan ekonomi kreatif. Dengan kombinasi kebijakan ini, SDM Kutai Timur diharapkan tumbuh menjadi tenaga kerja terampil, adaptif, dan inovatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
- c. **Perlindungan Sosial Terpadu dan Inklusif.** Perlindungan sosial yang terpadu dan inklusif merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, memperoleh jaminan kesejahteraan yang layak. Melalui peningkatan cakupan bantuan sosial tepat sasaran, baik berupa bantuan pangan, pendidikan, maupun subsidi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup masyarakat. Efektivitas program akan semakin kuat dengan optimalisasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga intervensi berbasis data dapat menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan. Lebih jauh, strategi ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, melainkan juga mendorong kemandirian keluarga miskin produktif melalui pendampingan kewirausahaan dan program graduasi kemiskinan. Dengan demikian, perlindungan sosial tidak hanya bersifat kuratif, tetapi

juga transformatif dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

d. **Penguatan Layanan Dasar di Wilayah Tertinggal dan Pedalaman.**

Penguatan layanan dasar di wilayah tertinggal dan pedalaman menjadi kunci dalam menurunkan kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kutai Timur. Aksesibilitas yang terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan internet seringkali menghambat mobilitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Melalui pembangunan serta perbaikan infrastruktur dasar, hambatan konektivitas dapat diatasi sehingga membuka peluang baru bagi aktivitas ekonomi pedesaan. Selain itu, layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah rentan kemiskinan akan diperkuat melalui pemberian insentif bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil, guna memastikan kehadiran tenaga profesional yang memadai. Strategi ini juga diperkuat dengan mobilisasi program desa tematik berbasis potensi lokal, yang diintegrasikan dengan program prioritas kabupaten. Dengan pendekatan ini, pembangunan di wilayah tertinggal tidak hanya menghadirkan layanan dasar, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri sesuai karakteristik lokalnya.

e. **Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak.** Kemitraan dan kolaborasi multipihak merupakan pendekatan strategis untuk memperkuat efektivitas pembangunan di Kutai Timur. Sinergi dengan program provinsi dan pusat memastikan konsistensi kebijakan serta memaksimalkan sumber daya lintas level pemerintahan. Di sisi lain, kolaborasi dengan dunia usaha melalui pemanfaatan program CSR, dukungan LSM, serta lembaga keagamaan memberikan ruang partisipasi aktif bagi berbagai aktor non-pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, pemanfaatan Dana Desa dan APBDesa diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja lokal, sehingga pembangunan berbasis desa dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan terbangunnya kolaborasi multipihak ini, program pembangunan tidak

hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan menjadi gerakan bersama yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

5) T2.S1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang

- a. **Penguatan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan.** Penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan merupakan salah satu motor utama pembangunan ekonomi Kutai Timur yang berorientasi pada ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini dilakukan melalui perluasan lahan pertanian produktif, baik untuk tanaman pangan maupun hortikultura, yang dikelola secara kawasan agar memberikan skala ekonomi yang optimal. Pada sektor perikanan, program cetak tambak dan kemitraan dengan pelaku usaha diarahkan untuk memperkuat produktivitas sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Peningkatan infrastruktur pendukung serta penguatan kapasitas petani, pembudidaya ikan, dan peternak menjadi langkah penting untuk mendorong efisiensi dan daya saing. Lebih jauh, pengembangan komoditas unggulan lokal berbasis klaster produksi dan agribisnis akan menjadi strategi hilirisasi yang memberi nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja. Dengan pendekatan ini, sektor pertanian dan perikanan tidak hanya sekadar penyedia pangan, tetapi juga pilar ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- b. **Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta UMKM.** Pengembangan IKM dan UMKM menjadi pilar penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui fasilitasi pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan pemasaran digital, pelaku UMKM akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola usaha serta memperluas jaringan pemasaran. Peningkatan akses pembiayaan juga menjadi prioritas agar UMKM tidak terhambat modal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, pendirian kawasan sentra industri berbasis komoditas lokal akan mendorong penguatan rantai nilai dan hilirisasi produk daerah. Promosi

produk lokal melalui pameran, platform digital, dan program “Bangga Buatan Kutim” diharapkan mampu memperluas pasar serta meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap produk daerah. Dengan strategi ini, UMKM dan IKM Kutai Timur tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

- c. **Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Alam, Budaya, dan Ekowisata.** Pengembangan sektor pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekowisata menjadi salah satu motor diversifikasi ekonomi Kutai Timur. Dengan memperkuat daya tarik destinasi wisata, baik melalui konservasi alam maupun revitalisasi budaya lokal, pariwisata dapat menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan amenities pariwisata yang memadai turut menjadi prasyarat agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkualitas. Lebih jauh, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama desa wisata dan ekowisata memastikan manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung di tingkat akar rumput. Upaya ini diperkaya dengan strategi promosi digital dan penyelenggaraan event daerah yang mampu memperluas jangkauan pasar wisata. Dengan pendekatan ini, sektor pariwisata Kutai Timur tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. **Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Ekonomi Hijau.** Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan ekonomi hijau menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur. Melalui pengembangan produk HHBK seperti madu hutan, rotan, dan tanaman obat, masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh sumber pendapatan alternatif yang ramah lingkungan. Dukungan kelembagaan koperasi dan BUMDes menjadi kunci agar rantai nilai HHBK dapat berjalan efisien sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang merata. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis konservasi melalui kemitraan kehutanan, ekowisata,

dan jasa lingkungan diarahkan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan pengolahan hasil hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan juga menjadi bagian integral agar masyarakat memiliki keterampilan dan daya saing yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, Kutai Timur dapat membangun model ekonomi hijau yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem hutan.

- e. **Kolaborasi dan Inovasi Lintas Sektor.** Kolaborasi dan inovasi lintas sektor menjadi pendorong penting dalam membangun struktur ekonomi Kutai Timur yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Melalui penguatan riset dan pengembangan (R&D) di sektor pertanian serta ekonomi kreatif bersama perguruan tinggi dan lembaga litbang, diharapkan muncul inovasi produk dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pelaku sektor non-tambang, termasuk generasi muda, perempuan, dan penyandang disabilitas, menjadi langkah strategis untuk memastikan transformasi ekonomi berlangsung inklusif. Integrasi program sektoral dengan pemanfaatan Dana Desa turut memperkuat basis pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Dengan sinergi multipihak ini, Kutai Timur dapat mempercepat lahirnya ekosistem ekonomi baru yang lebih berdaya saing dan ramah keberlanjutan.

6) **T2.S2. Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan**

- a. **Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.** Hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan strategi kunci dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi Kutai Timur. Dengan mengembangkan sentra industri pengolahan berbasis komoditas unggulan lokal, potensi hasil bumi tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi. Fasilitasi unit pengolahan hasil (UPH) dan industri rumah tangga juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menghasilkan produk makanan olahan, kerajinan, maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara lebih mandiri. Peningkatan kapasitas teknologi pascapanen dan pengolahan diarahkan

agar kualitas produk lokal mampu bersaing di pasar regional hingga nasional. Selain itu, kemitraan dengan investor melalui pembangunan pabrik pengolahan skala menengah, baik dengan skema investasi langsung maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), akan memperkuat rantai industri daerah. Dengan pendekatan ini, hilirisasi tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta memperluas basis ekonomi lokal.

- b. **Penguatan Infrastruktur dan Kawasan Industri.** Penguatan infrastruktur dan kawasan industri menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang lebih terarah dan berdaya saing. Pembangunan kawasan industri kecil dan menengah (IKM) di kecamatan potensial akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Upaya ini diperkuat dengan penyediaan infrastruktur dasar kawasan industri, sehingga aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan lebih efisien. Revitalisasi pasar induk dan gudang logistik daerah juga menjadi bagian penting untuk memperkuat rantai distribusi hasil industri pengolahan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pusat distribusi luar daerah. Lebih jauh, penerapan digitalisasi rantai pasok dan pencatatan produksi berbasis teknologi akan meningkatkan transparansi, akurasi data, dan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional. Dengan strategi ini, Kutai Timur dapat membangun ekosistem industri yang modern, efisien, dan inklusif.
- c. **Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM Industri.** Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM industri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat basis industri lokal di Kutai Timur. Melalui pelatihan teknis yang mencakup aspek produksi, sanitasi, standar mutu seperti HACCP, pengemasan, hingga pemasaran, pelaku IKM dan UMKM dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus memenuhi standar pasar yang lebih luas. Selain itu, sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing SDM daerah. Pemberian insentif dan pembinaan

berkelanjutan bagi pelaku industri kecil yang berorientasi ekspor atau substitusi impor juga diarahkan untuk mendorong transformasi industri ke arah yang lebih kompetitif dan mandiri. Dengan strategi ini, Kutai Timur dapat mencetak SDM industri yang handal, adaptif, dan siap menghadapi dinamika pasar global.

- d. **Penguatan Akses Pasar dan Branding Produk Lokal.** Penguatan akses pasar dan branding produk lokal menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah di Kutai Timur. Fasilitasi sertifikasi halal, izin edar BPOM, dan PIRT memastikan produk industri rumah tangga memenuhi standar keamanan dan kualitas, sehingga lebih mudah diterima pasar. Upaya ini diperkuat dengan promosi produk unggulan melalui pameran daerah maupun nasional, serta pemanfaatan platform digital e-commerce yang mampu memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, pendampingan branding dan pengemasan produk sesuai standar pasar regional hingga global akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan citra produk lokal. Penyusunan katalog digital produk unggulan industri Kutai Timur juga akan memperkuat visibilitas sekaligus mempermudah akses pasar bagi konsumen dan mitra usaha. Dengan strategi ini, produk lokal Kutai Timur dapat naik kelas, berdaya saing tinggi, dan menjadi kebanggaan daerah.
- e. **Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Industri Pengolahan.** Fasilitasi pembiayaan dan insentif industri pengolahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi tumbuhnya industri kecil dan menengah (IKM) di Kutai Timur. Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, baik melalui KUR, dana bergulir, maupun dukungan CSR, pelaku industri dapat mengembangkan kapasitas usaha tanpa terbebani keterbatasan modal. Selain itu, pemberian insentif berupa keringanan pajak atau retribusi daerah diarahkan bagi industri yang ramah lingkungan serta mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Skema subsidi alat produksi dan bahan baku awal juga didorong untuk memfasilitasi tumbuhnya industri baru yang potensial. Dengan strategi

ini, Kutai Timur dapat mempercepat pertumbuhan industri pengolahan yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

7) T2.S3. Meningkatkan ketahanan pangan

- a. **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Lokal.** Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal merupakan strategi penting untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kutai Timur. Perluasan lahan pangan strategis melalui program cetak sawah, intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan menjadi langkah awal untuk memperkuat ketersediaan pangan daerah. Upaya ini dipadukan dengan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan mekanisasi agar hasil pertanian lebih efisien, berkualitas, dan berdaya saing. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dengan pendekatan korporatisasi petani serta kluster komoditas unggulan diarahkan untuk memperkuat posisi petani dalam rantai nilai agribisnis. Selain itu, diversifikasi pangan lokal seperti sorgum, umbi, jagung, pisang, dan talas menjadi strategi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap beras sekaligus memperkaya pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kemandirian pangan daerah dapat dicapai secara lebih berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
- b. **Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan Daerah.** Penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan Kutai Timur, terutama saat menghadapi paceklik, bencana, atau fluktuasi pasar. Melalui pembangunan dan optimalisasi lumbung pangan masyarakat serta gudang pangan desa, stok pangan dapat lebih terjamin dan stabil sepanjang tahun. Selain itu, penguatan sistem distribusi dan rantai pasok pangan didorong untuk memastikan hasil pertanian dapat tersalurkan secara merata, cepat, dan efisien. Fasilitasi logistik serta pemasaran hasil pertanian langsung ke konsumen atau koperasi juga akan mengurangi rantai tengkulak dan meningkatkan nilai jual petani. Pemantauan harga dan stok pangan secara berkala melengkapi strategi ini agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi cepat saat terjadi gejolak. Dengan

langkah-langkah tersebut, Kutai Timur mampu membangun sistem pangan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

- c. **Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.** Perlindungan dan pemberdayaan petani serta nelayan menjadi pilar penting dalam membangun kemandirian pangan dan ekonomi berbasis sumber daya lokal di Kutai Timur. Melalui skema asuransi pertanian dan perikanan, risiko gagal panen maupun bencana dapat diminimalisir sehingga keberlanjutan usaha tetap terjaga. Dukungan pemerintah juga diperkuat dengan subsidi pupuk dan sarana produksi yang lebih tepat sasaran, sekaligus peningkatan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang kini ditopang dengan layanan berbasis digital. Langkah ini akan mendekatkan inovasi, teknologi, dan informasi kepada petani dan nelayan secara lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, regenerasi petani milenial menjadi agenda strategis melalui pelatihan agribisnis, teknologi modern, serta akses permodalan. Dengan begitu, sektor pertanian dan perikanan tidak hanya terlindungi, tetapi juga lebih berdaya, inovatif, dan adaptif menghadapi tantangan masa depan.
- d. **Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Komunitas.** Ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada skala besar melalui pertanian dan distribusi regional, tetapi juga harus diperkuat dari lingkup terkecil: keluarga dan komunitas. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya sayur, buah, ternak, dan ikan menjadi strategi sederhana namun berdampak nyata dalam memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga. Selain itu, kampanye konsumsi pangan bergizi, beragam, dan berimbang perlu digencarkan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama pada keluarga rentan. Upaya ini diperkuat dengan pendampingan khusus bagi ibu hamil dan anak, sehingga penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif. Peran perempuan juga dioptimalkan, baik sebagai pengelola pangan rumah tangga maupun pelaku usaha tani berbasis keluarga. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya menjadi urusan produksi, melainkan juga gerakan sosial yang memperkuat kemandirian keluarga sekaligus daya tahan komunitas lokal.

e. Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Pangan.

Pengelolaan ketahanan pangan di tingkat daerah membutuhkan sistem informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan digitalisasi data produksi serta kebutuhan pangan, pemerintah daerah dapat memetakan kesenjangan pasokan dan permintaan secara lebih tepat waktu. Penyusunan Food Security and Vulnerability Mapping (FSVA) menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi ketahanan dan kerentanan pangan, sehingga arah intervensi kebijakan dapat berbasis bukti dan lebih terarah. Lebih jauh, pemantauan ketahanan pangan melalui indikator ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan memberikan gambaran komprehensif bagi perencanaan. Dengan tata kelola informasi yang baik, kebijakan pangan daerah tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga preventif dalam memastikan kecukupan dan keberlanjutan pangan masyarakat.

8) T2.S4. Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi

- a. Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Investasi.** Kemudahan berusaha menjadi kunci untuk mendorong minat investasi di Kutai Timur. Dengan mengoptimalkan pelayanan perizinan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik dan OSS Daerah, proses perizinan dapat dipangkas dari segi waktu, biaya, dan prosedur, sehingga lebih ramah bagi pelaku usaha. Di sisi lain, penyusunan regulasi daerah yang pro-investasi, transparan, dan efisien memastikan adanya kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi hambatan birokrasi. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM pelayanan investasi, agar petugas mampu memberikan layanan yang cepat, profesional, dan responsif. Transformasi digital melalui perizinan berbasis aplikasi dan real-time menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah pungli, dan memberi kenyamanan bagi investor, baik lokal maupun nasional. Dengan demikian, Kutai Timur dapat memperkuat citra sebagai daerah yang terbuka dan kondusif bagi investasi.

- b. **Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pendukung Investasi.** Investasi hanya dapat tumbuh jika ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, Kutai Timur perlu mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta jaringan telekomunikasi dan internet. Infrastruktur yang baik akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia, sekaligus menekan biaya logistik. Selain itu, pengembangan kawasan industri terpadu dan zona ekonomi khusus menjadi instrumen strategis dalam menarik investor. Kawasan ini dapat menyediakan berbagai fasilitas terintegrasi, mulai dari utilitas, logistik, hingga layanan pendukung usaha, sehingga menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari potensi konflik, pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan lahan investasi yang legal, bersih dari sengketa, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat realisasi investasi di sektor-sektor produktif.
- c. **Jaminan Stabilitas Sosial, Politik, dan Keamanan.** Investasi tidak hanya membutuhkan regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai, tetapi juga jaminan stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Tanpa kondisi sosial yang kondusif, investor akan ragu menanamkan modalnya. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan menciptakan rasa aman. Selain itu, Kutai Timur perlu memiliki mekanisme yang cepat dan efektif dalam penanganan potensi konflik, baik yang terkait lahan, tenaga kerja, maupun isu lingkungan. Respons yang sigap akan mencegah eskalasi masalah sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik maupun investor. Di sisi lain, sosialisasi manfaat investasi dan partisipasi lokal juga penting untuk memastikan masyarakat tidak merasa ditinggalkan, melainkan menjadi bagian dari proses pembangunan. Dengan begitu,

tercipta rasa memiliki (sense of belonging) yang dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap agenda investasi daerah.

d. **Promosi dan Fasilitasi Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah.**

Promosi investasi tidak cukup dilakukan secara umum, melainkan harus berbasis potensi unggulan daerah agar lebih tepat sasaran dan menarik minat investor. Kutai Timur memiliki kekayaan sumber daya di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, energi terbarukan, hingga pengolahan hasil tambang, yang semuanya perlu dituangkan dalam profil investasi (investment prospectus) yang komprehensif dan menarik. Keaktifan pemerintah daerah dalam berbagai forum investasi, baik regional maupun nasional, serta pendekatan langsung ke calon investor strategis akan semakin memperluas peluang masuknya modal. Untuk memperkuat daya tarik ini, dibutuhkan juga fasilitasi pertemuan bisnis (business matching) yang mempertemukan investor dengan pelaku usaha lokal, sehingga tercipta sinergi antara modal besar dan kekuatan ekonomi rakyat. Selain itu, keberhasilan investasi juga ditentukan oleh ketersediaan rantai pasok lokal. Dengan melakukan pemetaan potensi UMKM dan menghubungkannya ke ekosistem investasi, Kutai Timur bukan hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi inklusif yang melibatkan masyarakat setempat secara nyata.

9) **T2.S5. Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global**

a. **Mendorong Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Ekspor Lokal.**

Hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Kutai Timur pada penjualan bahan mentah dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan ekspor, seperti hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan hutan non-kayu, daerah tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memperluas lapangan kerja lokal. Untuk mempercepat akses pasar global, pemerintah daerah perlu memfasilitasi pelaku UMKM dan IKM masuk ke rantai ekspor melalui pendampingan perizinan, standarisasi

mutu, sertifikasi, hingga akses pembiayaan. Diversifikasi produk olahan bernilai tambah—misalnya olahan pangan, produk kreatif, hingga bio-based product—akan memperkuat posisi Kutai Timur di pasar internasional yang menuntut inovasi dan keberlanjutan. Selain itu, diperlukan skema kemitraan ekspor yang melibatkan koperasi, BUMDes, dan eksportir nasional. Model ini tidak hanya menjamin keberlangsungan pasokan produk dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan pelaku usaha lokal ikut terhubung langsung dengan pasar global. Dengan demikian, hilirisasi dan diversifikasi ekspor akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung Ekspor.

Penguatan konektivitas dan infrastruktur ekspor menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan Kutai Timur sebagai pusat perdagangan dan ekspor yang kompetitif. Optimalisasi Pelabuhan Maloy (KEK MBTK) dan Pelabuhan Kenyamukan sebagai gerbang ekspor utama akan mendorong percepatan distribusi produk unggulan daerah menuju pasar nasional maupun internasional. Keberadaan pelabuhan modern yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus menjadikan Kutai Timur lebih menarik bagi investor dan pelaku perdagangan global. Selain itu, peningkatan sistem logistik dan cold chain untuk produk pertanian dan perikanan segar sangat penting agar mutu tetap terjaga hingga ke tangan konsumen internasional. Sistem distribusi yang efisien akan menurunkan biaya logistik, memperpendek waktu tempuh, serta meningkatkan daya saing produk ekspor Kutai Timur. Lebih jauh, penguatan infrastruktur jalan penghubung dari sentra produksi ke pelabuhan menjadi prioritas agar arus barang lebih lancar dan terkoneksi dengan baik. Hal ini akan memastikan rantai pasok ekspor berjalan efektif, termasuk untuk komoditas bernilai tinggi. Pemanfaatan KEK dan kawasan industri sebagai pusat kegiatan ekspor dan re-ekspor juga berperan strategis, tidak hanya memperkuat daya tarik investasi, tetapi juga membuka peluang bagi industri pengolahan lokal untuk naik kelas menjadi pemain

ekspor. Dengan demikian, konektivitas dan infrastruktur yang solid akan menjadikan Kutai Timur lebih berdaya saing sebagai simpul ekspor regional maupun global.

- c. **Promosi Dagang dan Akses ke Pasar Internasional.** Promosi dagang yang terarah menjadi instrumen penting untuk memperluas jangkauan produk unggulan Kutai Timur ke pasar internasional. Melalui penyusunan katalog produk ekspor yang terintegrasi dan disebarluaskan melalui platform digital global, pemerintah daerah dapat menampilkan potensi komoditas lokal secara lebih profesional, modern, dan mudah diakses oleh calon mitra dagang internasional. Katalog digital ini bukan hanya sekadar etalase produk, melainkan juga sarana branding daerah sebagai pusat produksi dan ekspor yang berdaya saing. Selain itu, kolaborasi dengan KADIN, APINDO, dan pelaku ekspor nasional akan menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekspor Kutai Timur. Melalui pembinaan terhadap eksportir pemula, pelaku usaha lokal akan mendapat bimbingan teknis terkait prosedur ekspor, regulasi, standarisasi mutu, hingga akses pasar global. Kemitraan ini memastikan UMKM dan IKM Kutai Timur tidak hanya mampu memproduksi barang berkualitas, tetapi juga siap berkompetisi di pasar internasional dengan dukungan jejaring yang lebih luas.

10) T2.S6. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota

- a. **Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar antar Kecamatan dan Desa.** Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar antar kecamatan dan desa merupakan fondasi penting untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kutai Timur, terutama antara daerah pusat pemerintahan dan kawasan tertinggal, terluar, serta terisolir (3T). Melalui pemetaan wilayah prioritas pembangunan, pemerintah daerah dapat memastikan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, sehingga setiap wilayah memperoleh akses yang adil terhadap layanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa yang menghubungkan

pusat produksi, pasar, dan pemukiman masyarakat menjadi kunci dalam membuka aksesibilitas ekonomi. Infrastruktur jalan yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pembangunan jembatan penghubung antar desa dan kecamatan untuk memastikan keterhubungan lintas wilayah tidak lagi terhambat kondisi geografis. Lebih jauh, penerapan skema padat karya berbasis masyarakat dalam pembangunan infrastruktur memberikan manfaat ganda: selain mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar, juga menciptakan lapangan kerja lokal dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun. Dengan demikian, strategi pemerataan pembangunan infrastruktur ini bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara inklusif.

- b. **Pengendalian Risiko Banjir dan Infrastruktur Resilien terhadap Iklim.** Pengendalian risiko banjir menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kutai Timur, terutama pada wilayah dengan intensitas curah hujan tinggi dan kondisi geografis rawan genangan. Untuk itu, strategi diarahkan pada kombinasi pendekatan teknis, ekologis, dan kelembagaan. Normalisasi dan rehabilitasi sungai, kanal, serta saluran drainase utama dilakukan untuk memulihkan kapasitas daya tampung aliran air dan mencegah terjadinya luapan di kawasan pemukiman maupun pusat ekonomi. Selain itu, pembangunan tanggul, kolam retensi, dan sistem pemantauan banjir berbasis data dan peringatan dini akan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi banjir. Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring debit air dan sistem peringatan dini berbasis komunitas akan meningkatkan efektivitas mitigasi bencana. Tidak kalah penting, Kutai Timur perlu mengintegrasikan pendekatan nature-based solution, seperti rehabilitasi hutan riparian, restorasi lahan basah, dan penghijauan kawasan hulu, sebagai solusi jangka panjang yang ramah lingkungan. Pendekatan ini sekaligus mendukung agenda pembangunan hijau dan

berkelanjutan. Agar upaya ini berjalan optimal, diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu, melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, serta lembaga pengelola lingkungan. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga resilien terhadap perubahan iklim, sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap risiko bencana banjir.

- c. **Pengembangan Bandara dan Pelabuhan sebagai Pusat Konektivitas Daerah.** Pengembangan bandara dan pelabuhan merupakan strategi kunci untuk memperkuat konektivitas Kutai Timur, baik di tingkat regional maupun nasional. Percepatan pembangunan Bandara Kenyamukan sebagai bandara perintis bertujuan membuka akses udara yang lebih cepat dan efisien, menghubungkan Kutai Timur dengan wilayah Kaltim dan Kawasan Timur Indonesia lainnya. Di sektor laut, Pelabuhan Maloy difokuskan sebagai pelabuhan ekspor-industri utama, sementara Pelabuhan Kenyamukan difungsikan untuk kebutuhan logistik masyarakat dan UMKM, sehingga mendukung distribusi barang baik skala komersial maupun kebutuhan lokal. Penyediaan akses jalan dan logistik menuju bandara dan pelabuhan, termasuk integrasi dengan kawasan industri dan sentra ekonomi, memastikan konektivitas multimoda yang lancar dan efisien. Selain itu, fasilitasi kolaborasi pemerintah-pelaku usaha (KPBU) dalam pembiayaan infrastruktur konektivitas menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani APBD secara signifikan. Dengan kombinasi pengembangan infrastruktur udara, laut, dan darat, Kutai Timur dapat meningkatkan mobilitas orang, barang, dan jasa, sekaligus membuka peluang ekonomi baru, memperkuat distribusi produk lokal, dan mendukung daya saing investasi di daerah.
- d. **Peningkatan Infrastruktur Irigasi, Bendungan, dan Ketersediaan Air Baku.** Peningkatan infrastruktur air menjadi pilar utama untuk mendukung produktivitas pertanian, ketersediaan air minum, dan pengendalian banjir di Kutai Timur. Rehabilitasi dan pembangunan

jaringan irigasi teknis maupun semi-teknis memungkinkan lahan pertanian produktif mendapatkan pasokan air yang andal, sehingga meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan lokal. Selain itu, pembangunan embung dan bendungan skala kecil hingga menengah berfungsi ganda: sebagai sumber irigasi, pengendali banjir, dan sarana konservasi air. Optimalisasi infrastruktur ini juga mencakup SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan kawasan pertumbuhan, sehingga mendukung kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Pendekatan berbasis digital melalui sistem monitoring irigasi (smart irrigation) memungkinkan pemantauan debit air dan kondisi infrastruktur secara real-time, memudahkan perencanaan, pemeliharaan, dan respon cepat terhadap potensi kekeringan atau banjir. Dengan kombinasi infrastruktur fisik dan digital, Kutai Timur dapat memastikan ketersediaan air yang aman, efisien, dan berkelanjutan untuk pertanian, masyarakat, dan sektor ekonomi lainnya.

e. Penyediaan Akses Air Minum Aman di Daerah Sulit Terlayani.

Strategi ini difokuskan pada peningkatan akses air minum aman untuk wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan. Langkah pertama adalah pembangunan SPAM skala kecil dan sumur bor dalam, dilengkapi dengan sarana filtrasi dan desinfeksi, untuk menjamin kualitas air yang memenuhi standar kesehatan di desa-desa yang belum terlayani jaringan perpipaan. Selanjutnya, dilakukan rehabilitasi dan optimalisasi jaringan PDAM eksisting, dengan peningkatan kapasitas pompa, perbaikan pipa distribusi, dan pengendalian kebocoran, sehingga efisiensi suplai air meningkat dan cakupan layanan diperluas. Untuk daerah dengan cakupan layanan rendah, dilakukan pembangunan jaringan air bersih baru, termasuk instalasi sambungan rumah tangga (SR) yang terintegrasi dengan sistem distribusi, guna meningkatkan akses langsung bagi masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan prinsip engineering dan manajemen sistem berbasis data, sehingga setiap intervensi bersifat terukur, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian,

strategi ini tidak hanya memperluas cakupan layanan, tetapi juga memastikan mutu air minum sesuai standar teknis dan kesehatan publik.

f. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Pembiayaan Infrastruktur.**

Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas perencanaan, pengelolaan, dan pendanaan proyek infrastruktur. Peningkatan kapasitas perencanaan teknis OPD terkait memastikan setiap proyek infrastruktur dirancang sesuai kebutuhan, standar teknis, dan prioritas strategis daerah. Selanjutnya, penguatan sistem pemeliharaan berbasis siklus hidup (life-cycle maintenance) memungkinkan infrastruktur berfungsi optimal dalam jangka panjang, dengan perencanaan pemeliharaan preventif dan prediktif, meminimalkan kerusakan, dan menurunkan biaya perbaikan mendadak. Untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan, strategi ini memanfaatkan skema alternatif, seperti KPBU, CSR, dana desa, maupun kolaborasi APBD, guna mendanai proyek strategis tanpa membebani anggaran tunggal pemerintah daerah. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui kanal aduan publik dan pemantauan pembangunan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sistem ini memungkinkan identifikasi masalah sejak dini, mendorong partisipasi warga, dan memastikan hasil pembangunan infrastruktur sesuai target teknis dan sosial. Dengan pendekatan teknokratis ini, tata kelola dan pembiayaan infrastruktur Kutai Timur dapat lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan, mendukung pencapaian prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang.

g. **Peningkatan Status Desa untuk Pemenuhan Dimensi IDM.**

Strategi ini difokuskan pada percepatan peningkatan indeks desa membangun (IDM) melalui intervensi terpadu di bidang layanan dasar, ekonomi, dan tata kelola desa. Peningkatan akses layanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di desa tertinggal dan sangat tertinggal, menjadi prioritas untuk memastikan kesejahteraan warga secara merata. Selanjutnya, penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pemberdayaan BUMDes, koperasi, dan pengembangan

kewirausahaan lokal, sehingga desa tidak hanya bergantung pada transfer anggaran, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri. Pembangunan infrastruktur desa diarahkan agar fungsional dan konektif, termasuk akses jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi, yang terintegrasi dengan pusat ekonomi kecamatan maupun kabupaten, mendukung mobilitas dan distribusi barang/jasa. Selain itu, pelatihan dan penguatan kelembagaan desa, mulai dari aparatur hingga mekanisme perencanaan dan pelaporan, meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan dana desa secara optimal.

- h. **Penguatan Konektivitas dan Integrasi Wilayah Desa–Kota.** Strategi ini menitikberatkan pada pengembangan konektivitas fisik dan digital antara desa dan kota untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pinggiran dikembangkan dan diintegrasikan dengan pusat kota melalui infrastruktur penghubung desa–kecamatan–kabupaten, sehingga arus barang, jasa, dan tenaga kerja berjalan lebih lancar. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik desa dan pengembangan smart village memperkuat akses warga desa terhadap layanan publik dan transformasi digital. Pemetaan rantai pasok desa–kota juga dilakukan untuk memastikan hasil pertanian, perikanan, dan UMKM desa dapat tersalur ke pasar kota secara efisien, mendorong inklusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan
- i. **Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Perencanaan Partisipatif.** Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola desa melalui pemanfaatan data dan sistem informasi. Pendampingan berbasis IDM, SDGs Desa, dan Sistem Informasi Desa (SID) memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan desa dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan terukur secara indikator kinerja. Selain itu, penguatan forum Musrenbangdes dan musyawarah kampung mendorong partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga pembangunan desa menjadi lebih

inklusif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD juga menjadi fokus utama untuk memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan koordinasi antar lembaga. Kolaborasi lintas sektor, termasuk OPD dan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi pembangunan desa, mendukung implementasi solusi berbasis bukti dan inovatif. Dengan pendekatan ini, pemerintahan desa dapat mengoptimalkan sumber daya lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik serta pembangunan ekonomi di tingkat desa.

- j. **Integrasi Program Kabupaten dan Dana Desa.** Strategi ini menekankan pada sinkronisasi antara program unggulan kabupaten dan pembangunan desa untuk memperkuat efektivitas intervensi pembangunan. RPJMDes dan RKPDes diselaraskan dengan prioritas kabupaten, sehingga setiap kegiatan desa mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah secara menyeluruh dan terukur. Pemanfaatan dana desa diarahkan melalui pendampingan intensif, memastikan alokasi dan penggunaan anggaran mendukung pencapaian IDM, layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan platform pelaporan dan pemantauan berbasis digital memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi real-time terhadap pelaksanaan program di tingkat desa. Untuk mendorong inovasi, diterapkan mekanisme insentif bagi desa yang menunjukkan kinerja unggul, partisipatif, dan mampu keluar dari kategori tertinggal. Pendekatan ini mendorong kompetisi sehat antar desa, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menciptakan desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
- k. **Pengembangan Wilayah Perdesaan sebagai Basis Ketahanan Sosial dan Ekonomi.** Strategi ini bertujuan menjadikan wilayah perdesaan sebagai basis ketahanan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan akses ke pendidikan vokasi, layanan kesehatan, dan jaringan internet di desa mendukung peningkatan kapasitas SDM lokal sekaligus memperluas peluang ekonomi dan konektivitas informasi.

Selain itu, fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan tematik memungkinkan desa mengembangkan potensi lokal secara terintegrasi, baik di sektor pertanian, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. Pendekatan ini mendorong efektivitas program pembangunan dan meningkatkan daya saing desa di tingkat kabupaten maupun regional. Strategi ini juga menekankan penguatan peran pemuda dan perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa. Keterlibatan aktif kelompok ini memperkuat partisipasi masyarakat, inovasi lokal, dan keberlanjutan program, sehingga wilayah perdesaan menjadi mandiri secara ekonomi dan tangguh secara sosial.

11) T3.S1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner

- a. **Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Adaptasi Perubahan Iklim.** Strategi ini fokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Program desa peduli lingkungan dan desa tangguh bencana diterapkan untuk meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan respons komunitas terhadap bencana alam maupun dampak perubahan iklim. Pendidikan dan advokasi juga menjadi komponen penting melalui edukasi perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana di sekolah dan komunitas lokal, sehingga generasi muda dan masyarakat secara aktif memahami risiko, mitigasi, dan adaptasi yang tepat. Selain itu, strategi ini mendorong ekonomi hijau melalui insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan *green economy* dan *eco-labeling*, serta kampanye publik pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, dan konservasi air. Pendekatan ini memastikan partisipasi masyarakat dan sektor swasta secara sinergis dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi daerah.
- b. **Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Multi-Pihak.** Strategi ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Penggunaan sistem informasi lingkungan dan

kebencanaan berbasis geospasial (SIG) memungkinkan pemantauan real-time kondisi lingkungan, identifikasi risiko, dan perencanaan mitigasi berbasis data yang akurat. Kolaborasi multi-pihak dilakukan dengan BMKG, BNPB, BPBD, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana, sekaligus memperkuat transfer pengetahuan dan inovasi berbasis komunitas. Selain itu, pelaporan capaian IKLH dan IKD secara terbuka melalui dashboard lingkungan daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Strategi ini juga mendorong pembangunan berkelanjutan melalui investasi hijau, termasuk energi terbarukan, pertanian organik, dan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi berjalan secara sinergis, efisien, dan berkelanjutan.

- c. **Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah.** Strategi ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang terintegrasi dengan SAKIP dan SIPD memastikan seluruh program dan kegiatan OPD terukur, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja dilakukan berbasis data dan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya, sehingga perencanaan lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi capaian program dilakukan secara berkala, dengan pelaporan berbasis outcome untuk menilai dampak nyata dari kebijakan dan intervensi pembangunan. Selain itu, strategi ini mendukung peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) melalui tindak lanjut audit, pembinaan berkala, dan implementasi best practices. Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menciptakan budaya manajemen kinerja yang berkelanjutan.

d. Membangun Budaya Pemerintahan yang Inovatif dan Berintegritas.

Strategi ini menitikberatkan pada pembentukan budaya birokrasi yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Pemberian insentif inovasi dan kompetisi kinerja antar-OPD dan antar-desa mendorong peningkatan kreativitas, produktivitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, penerapan zona integritas dan WBK/WBBM di unit strategis memperkuat tata kelola yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sementara peran Inspektorat Daerah yang proaktif dan edukatif memastikan pengawasan internal berjalan efektif dan berorientasi pada pembinaan. Strategi ini juga menekankan transparansi anggaran, layanan, dan kinerja melalui kanal digital dan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memantau, memberikan masukan, dan menilai akuntabilitas pemerintah. Pendekatan ini secara sistematis membangun kepercayaan publik dan memperkuat budaya pemerintahan yang inovatif, bersih, dan profesional.

e. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah. Strategi ini bertujuan membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Kutai Timur. Pendirian atau penguatan Pusat Inovasi Daerah (PID) atau Pusat Kreativitas Kutai Timur menjadi basis pengembangan ide, riset, dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi lintas sektor dilakukan melalui model quadruple helix, yakni sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas, untuk memperkuat transfer pengetahuan, pengembangan produk inovatif, dan adopsi teknologi tepat guna. Selain itu, lomba inovasi dan insentif bagi pelaku usaha, ASN, dan pelajar mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan solusi kreatif dan aplikatif untuk masalah lokal. Pendekatan ini juga mencakup pemetaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk skala desa dan komunitas, sehingga inovasi dapat langsung diterapkan, meningkatkan produktivitas, daya saing lokal, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan cara ini, Kutai Timur dapat

menumbuhkan ekosistem inovasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada pembangunan daerah.

- f. **Peningkatan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Digital.** Strategi ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur digital yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di Kutai Timur. Peningkatan akses internet berkualitas di seluruh kecamatan dan desa memastikan semua pelaku ekonomi, termasuk masyarakat pedesaan, dapat terhubung ke pasar digital dan layanan informasi secara merata. Selain itu, pembangunan ruang kerja bersama (co-working space) berbasis desa/kecamatan memberikan fasilitas bagi pelaku ekonomi digital untuk berkolaborasi, mengembangkan produk kreatif, dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Strategi ini juga memperkuat ekosistem inovasi lokal dan mendukung sinergi antarpengusaha, pelajar, dan start-up. Untuk mendukung transaksi dan akses pembiayaan, penyediaan platform pembayaran digital dan fintech bagi pelaku usaha kecil mempermudah arus modal, memperluas akses pasar, dan meningkatkan inklusi keuangan. Pendekatan ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi digital yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kutai Timur.
- g. **Dukungan Regulasi dan Insentif Inovasi.** Strategi ini bertujuan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan adopsi teknologi di Kutai Timur. Penyusunan kebijakan daerah yang mendorong penggunaan teknologi lokal dan inovasi dalam proses bisnis memastikan regulasi mendukung pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi serta solusi kreatif lokal. Untuk mendorong partisipasi sektor swasta, diterapkan skema insentif fiskal bagi pelaku usaha yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau berteknologi tinggi, sehingga mendorong efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, strategi ini memperkuat tata kelola publik melalui digitalisasi sistem perizinan, OSS daerah, dan layanan satu pintu, yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pendekatan ini memperkuat sinergi regulasi, insentif, dan teknologi

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi secara berkelanjutan.

12) T3.S2. Meningkatnya kualitas layanan public

- a. **Standardisasi dan Penyederhanaan Prosedur Layanan.** Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan publik di Kutai Timur melalui penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang jelas dan terukur. Standarisasi ini memastikan setiap warga menerima layanan publik dengan mutu, kecepatan, dan kepastian yang sama di seluruh wilayah. Selain itu, reformasi prosedur layanan diarahkan agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi, disertai penerapan sistem layanan satu pintu untuk perizinan, kependudukan, dan bantuan sosial. Pendekatan ini meminimalkan birokrasi yang berbelit dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik. Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas, dilakukan audit layanan publik secara berkala guna memangkas prosedur yang tidak relevan dan meningkatkan kepatuhan OPD terhadap standar pelayanan. Dengan demikian, strategi ini mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- b. **Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Layanan Terpadu.** Strategi ini bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, terpadu, dan berkualitas. Peningkatan kapasitas Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadikannya pusat layanan multi-instansi yang modern, terintegrasi, dan efisien, sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan di satu lokasi dengan prosedur yang lebih sederhana. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat melalui penguatan sinergi antar-OPD, instansi vertikal, dan BUMD, sehingga layanan publik berjalan konsisten, terstandarisasi, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Strategi ini mendorong terciptanya ekosistem pelayanan terpadu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional. Selain itu, pemanfaatan layanan keliling (mobile service) menjangkau wilayah terpencil dan pedesaan, memastikan masyarakat yang sulit mengakses

MPP tetap memperoleh layanan publik. Pendekatan ini memperluas jangkauan, mengurangi kesenjangan pelayanan, dan meningkatkan inklusi masyarakat dalam akses layanan pemerintah.

- c. **Digitalisasi Layanan Publik.** Strategi ini menitikberatkan pada percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik di Kutai Timur. Pengembangan portal pelayanan publik digital (e-layanan) memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan secara daring, meningkatkan kecepatan, transparansi, dan efisiensi pelayanan. Integrasi lintas perangkat daerah melalui Indeks Pemerintahan Digital (IPD), serta penyediaan layanan melalui aplikasi mobile, chatbot, dan kios layanan mandiri, mendorong interoperabilitas data, kemudahan akses, dan layanan 24/7 bagi warga. Pendekatan ini mempermudah masyarakat memperoleh informasi, mengurus dokumen, dan memanfaatkan layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor. Untuk mendukung keberlanjutan digitalisasi, dilakukan penguatan infrastruktur internet di desa dan kecamatan, sehingga akses digital merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, strategi ini menciptakan ekosistem layanan publik yang modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kutai Timur.
- d. **Peningkatan Kompetensi dan Etika Pelaksana Layanan.** Strategi ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan publik di Kutai Timur. Pelatihan pelayanan prima (service excellence) diberikan kepada petugas frontliner untuk meningkatkan kualitas interaksi, responsivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan. Selain itu, penerapan kode etik pelayanan dan standar etika profesi bagi seluruh penyelenggara layanan memastikan perilaku dan keputusan aparat publik konsisten dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hal ini membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Strategi ini juga mengintegrasikan mekanisme reward and punishment berbasis evaluasi kinerja dan kepuasan pengguna layanan, sehingga mendorong motivasi, disiplin, dan perbaikan berkelanjutan.

Pendekatan ini memastikan layanan publik lebih efisien, transparan, dan berfokus pada kualitas serta pengalaman pengguna.

e. **Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Umpan Balik Masyarakat.**

Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas dan responsivitas layanan publik melalui mekanisme pengaduan yang efektif. Pengoperasian kanal pengaduan publik terpadu seperti call center, kotak saran digital, dan media sosial resmi pemerintah daerah memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan secara mudah dan transparan. Selain itu, strategi ini menekankan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat, sehingga setiap isu atau kendala dalam pelayanan dapat segera ditangani, meminimalkan hambatan, dan meningkatkan kepuasan publik. Pendekatan ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Untuk memastikan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, dilakukan penyusunan laporan tahunan pelayanan publik berbasis aspirasi dan keluhan masyarakat, yang menjadi dasar evaluasi, pengambilan kebijakan, dan penyempurnaan prosedur layanan. Strategi ini memperkuat interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik.

13) T3.S3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas

- a. **Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas.** Strategi ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan memastikan sumber daya keuangan memadai untuk membiayai program prioritas dan mendukung kemandirian fiskal. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, serta penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pendekatan ini memperkuat integritas, kontrol internal, dan

pemantauan kinerja keuangan. Strategi ini juga menekankan pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem akuntansi dan pelaporan digital, untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi proses keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

14) T4.S1. Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana

- a. **Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup Berkelanjutan.** Strategi ini bertujuan membangun pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan selaras dengan pembangunan ekonomi Kutai Timur. Integrasi prinsip kelestarian lingkungan ke dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah memastikan setiap program dan kegiatan mempertimbangkan dampak ekologis secara sistematis. Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan, perkebunan, dan industri yang berpotensi merusak lingkungan, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara berkelanjutan, mendorong pemulihan ekosistem dan mitigasi risiko degradasi lingkungan. Strategi ini juga menekankan penguatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati, serta penggunaan data lingkungan berbasis teknologi. Pendekatan ini menciptakan tata kelola lingkungan yang responsif, akuntabel, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- b. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.** Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kutai Timur secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan dan optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) serta revitalisasi ekosistem pesisir dan rawa melalui penanaman mangrove dan konservasi lahan basah mendorong pemulihan fungsi ekologis dan keseimbangan lingkungan. Selain itu, pengendalian pencemaran melalui pengolahan limbah domestik, industri, dan pertanian sesuai baku mutu memastikan sumber daya alam

tetap lestari dan risiko dampak kesehatan masyarakat diminimalkan. Pendekatan ini memperkuat kapasitas pemerintah dalam memitigasi tekanan lingkungan akibat aktivitas ekonomi. Strategi ini juga menekankan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui transisi energi bersih, efisiensi energi, dan transportasi ramah lingkungan. Upaya ini sejalan dengan target pembangunan rendah karbon dan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kutai Timur.

15) T4.S2. Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana

- a. **Penguatan Sistem Manajemen Risiko dan Ketahanan Bencana Daerah.** Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas Kutai Timur dalam menghadapi risiko bencana melalui pendekatan manajemen risiko yang sistematis. Pemetaan wilayah rawan bencana dan integrasi hasil kajian risiko ke dalam tata ruang dan rencana pembangunan memastikan setiap kegiatan pembangunan mempertimbangkan potensi ancaman bencana. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi, serta pelaksanaan simulasi bencana, pelatihan satgas desa tangguh bencana, dan penyusunan Rencana Kontinjensi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dalam merespons bencana secara cepat dan efektif. Strategi ini juga menekankan pemenuhan standar bangunan tahan bencana untuk fasilitas publik, sekolah, dan puskesmas, sehingga infrastruktur vital tetap berfungsi saat bencana terjadi. Pendekatan ini memperkuat ketahanan daerah, meminimalkan kerugian sosial-ekonomi, dan mendukung pembangunan yang aman dan berkelanjutan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan rencana pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Berikut indikasi arah kebijakan dalam RPJMD Kutai Timur 2025-2029:

Tabel 3.8 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas, serta Berprestasi	Menyediakan beasiswa pendidikan, program keterampilan, serta pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
		Pengembangan pendidikan karakter untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, sehat, dan cerdas, serta memfasilitasi akses pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kutai Timur
		Pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana, prasarana, serta alat kesehatan untuk UKP dan UKM rujukan sesuai standar pelayanan minimal.
		Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, fasilitas belajar, serta sarana pendukung untuk semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah termasuk
		optimalisasi program beasiswa, insentif bagi tenaga kesehatan, serta bantuan buku, seragam, dan makanan bergizi untuk anak-anak sebagai upaya menurunkan angka stunting.
		Memastikan akses air bersih, internet desa, dan jaringan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih merata.
		Fokus pada program pengentasan kemiskinan, melalui pemberian bantuan sosial, subsidi untuk kelompok rentan, dan peningkatan insentif bagi pekerja sektor informal.
2	Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	Menyusun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa, dengan membangun usaha ekonomi kreatif, serta menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses pasar.
		Mendorong hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan dengan pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan produk lokal (misalnya pengolahan coklat, pisang, karet, dan hasil perkebunan lainnya).
		Meningkatkan kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai komoditas unggulan daerah.
		Memfasilitasi akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, khususnya di sektor UMKM dan koperasi, untuk mendukung diversifikasi usaha berbasis komoditas lokal.
		Pengembangan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi, termasuk perbaikan fasilitas pelabuhan dan bandara yang menjadi titik masuk wisatawan, serta penyediaan akses yang memadai ke destinasi wisata.
		Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta mendorong penggunaan produk berbasis energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
		Memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan, dengan menyediakan pelatihan teknis dan akses terhadap teknologi terbaru yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi produksi.
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
		pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemasaran, serta promosi produk lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat.



No	Misi	Arah Kebijakan
		Mengimplementasikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di sektor industri hilir agar lebih siap bersaing di pasar lokal dan internasional. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan, serta memperkenalkan budaya dan sejarah lokal melalui festival seni dan budaya, dengan tujuan menarik wisatawan domestik dan internasional. Menerapkan prinsip ekonomi hijau dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan mendukung inisiatif yang mengurangi emisi GRK dan mempertahankan kelestarian alam dalam sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Perluasan Akses Keuangan Bagi Pelaku Usaha Sektor Riil Berbasis Lokal serta Penguatan Kelembagaan Keuangan Rakyat dan Inklusif (koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, BUMDes dan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas).
3	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan	Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, kehutanan lestari, dan perikanan yang ramah lingkungan serta penguatan tata kelola keberlanjutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi SDA. Mendorong pengelolaan sumber daya alam melalui regulasi yang ketat, seperti pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan industri yang dapat merusak lingkungan. Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga internasional dalam upaya konservasi alam, serta memperkuat peran masyarakat adat dalam melestarikan lingkungan hidup. Mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor industri dan rumah tangga, serta meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Memperkenalkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan solusi berbasis alam yang mendukung pengurangan emisi GRK. Mengimplementasikan program penghijauan, pengelolaan hutan berkelanjutan pada lahan dengan stok karbon tinggi (<i>High Carbon Stock</i>) dan bernilai konservasi tinggi (<i>High Conservation Value</i>) serta restorasi lahan yang telah rusak untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan penyerapan karbon. Membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan, termasuk penerapan 5R (<i>Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Revenue</i>) serta ikut berkontribusi dalam Pemantauan sampah laut. Menerapkan regulasi yang lebih ketat bagi industri dalam pengelolaan limbah, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan lingkungan. Membangun dan memperkuat zona konservasi, seperti Taman Nasional, hutan lindung, dan cagar alam yang dapat menjaga spesies flora dan fauna langka Mendorong kebijakan berbasis ekosistem yang memperhatikan keberlanjutan alam dan memberikan ruang untuk peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Menyusun dan melaksanakan program pelestarian keanekaragaman hayati dengan pendekatan yang terpadu, termasuk kegiatan restorasi habitat alami dan penanaman pohon untuk memperbaiki ekosistem.



No	Misi	Arah Kebijakan
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas	Melaksanakan kampanye pendidikan lingkungan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pelestarian alam.
		Meningkatkan penataan dan pengelolaan sumber daya air dengan membangun infrastruktur pengelolaan air yang efisien dan ramah lingkungan serta mengimplementasikan sistem pengelolaan air berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air di wilayah mereka.
		Mendorong konservasi air dengan program penanaman vegetasi di sekitar daerah aliran sungai untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyerapan air.
		Meningkatkan kapasitas perencanaan daerah dengan memperkuat analisis kebutuhan daerah serta memastikan penganggaran berbasis kinerja yang selaras dengan visi pembangunan.
		Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pencapaian program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
		Melakukan reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah bekerja secara efisien dan transparan.
		Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, termasuk di dalamnya pelatihan kepemimpinan dan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
		Memastikan bahwa seluruh pencapaian kinerja ASN dinilai berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta mengimplementasikan sistem reward and punishment yang adil.
		Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, dengan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta meningkatkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku.
		Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk penerapan sistem e-budgeting dan e-procurement untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan efisiensi anggaran.
		Menyelenggarakan audit keuangan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh anggaran daerah digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta mempublikasikan hasil audit kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas.
		Meningkatkan akses informasi publik dan memperkuat pelayanan informasi untuk masyarakat dengan menyediakan portal informasi pemerintah yang mudah diakses dan transparan.
		Mendorong kolaborasi antar pihak dalam pengambilan keputusan, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.
		Mengoptimalkan pengawasan internal dengan memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
		Memperkuat sistem whistleblower untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran.



No	Misi	Arah Kebijakan
5	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum (KPK, kejaksaan, dan kepolisian) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.
		Mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan yang terhubung secara online, untuk mempermudah akses data antar instansi dan memfasilitasi pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat.
		Mengimplementasikan e-Government secara lebih luas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu.
		Mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan poros desa serta jalan utama antar kecamatan termasuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM 46, untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik antara wilayah pedesaan dan perkotaan
		Membangun dan memperbaiki jembatan, terutama yang berada di wilayah terpencil dan yang mengalami kerusakan, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan mempercepat distribusi barang dan layanan.
		Mengoptimalkan penataan kawasan transportasi, termasuk pembangunan pelabuhan dan pengembangan pelabuhan maloy serta bandara, dan memperbaiki fasilitas transportasi umum untuk mendukung mobilitas warga dan barang.
		Dukungan terhadap Pembangunan Bendungan Sukarahmat
		Pembangunan, normalisasi, dan rehabilitasi sungai, kanal, tanggul, kolam retensi, serta drainase perkotaan dan pedesaan sesuai standar
		Penataan kawasan permukiman padat, revitalisasi permukiman kumuh, Rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta integrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten
		Pembangunan tanggul, pemecah gelombang, dan struktur penahan abrasi untuk melindungi permukiman, kawasan industri, dan ekosistem pesisir terutama sekitar Pantai Manubar
		Meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan, seperti pembangunan Instalasi energi surya, hidro, turbin angin (<i>wind turbine</i>) energi biomassa, dan biofuel untuk mempercepat transisi ke energi hijau dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
		Mempercepat pembangunan infrastruktur listrik dan penyediaan jaringan listrik yang dapat menjangkau wilayah pedesaan, pemukiman dan daerah yang belum terjangkau.
		Meningkatkan infrastruktur penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dengan program seperti 1 Desa 1 Jaringan Air Bersih yang Lancar serta Optimalisasi sistem pengelolaan air, monitoring kualitas air, dan pemeliharaan rutin fasilitas SPAM untuk efisiensi dan keberlanjutan layanan.
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sangatta
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Kenyamukan
		Mengembangkan infrastruktur jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kutai Timur, terutama di desa-desa terpencil dan daerah pesisir yang masih kesulitan dalam mengakses layanan internet yang stabil serta menyediakan akses internet gratis di sekolah-sekolah dan akses internet publik di desa-desa untuk mendukung kegiatan pendidikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

No	Misi	Arah Kebijakan
		Dukungan operasional KEK Maloy dengan memastikan ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan logistik
		Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas dengan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah serta menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
		Membangun fasilitas pendukung pariwisata yang lebih memadai, termasuk akses jalan menuju destinasi wisata, penginapan ramah lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya yang menarik wisatawan.
		Meningkatkan infrastruktur pengaman bencana, termasuk pembangunan tempat evakuasi yang mudah dijangkau, serta pembangunan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.
		Membangun rumah-rumah dan infrastruktur yang resisten terhadap bencana untuk memastikan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur, meliputi:

1. **Peningkatan infrastruktur dan konektivitas**, antara lain infrastruktur dasar, transportasi, logistik, dan digital
2. **Transformasi ekonomi berkelanjutan**, antara lain diversifikasi Ekonomi, UMKM, dan pariwisata berkelanjutan
3. **Peningkatan kualitas SDM**, antara lain Pendidikan berkualitas, Kesehatan masyarakat dan kapasitas kepemudaan
4. **Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah**, antara lain transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik dan penegakan hukum
5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, antara lain restorasi lingkungan, Pengelolaan SDA dan Mitigasi Perubahan Iklim
6. **Penguatan Ketahanan Pangan**, antara lain pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, pasar dan distribusi pangan

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub ini akan menjabarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai instrumen operasional yang diturunkan langsung dari sasaran RPJM. Program-program ini difokuskan pada penguatan kapasitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, serta pengelolaan

lingkungan hidup secara berkelanjutan. Formulasi program prioritas mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan integrasi lintas sektor, sehingga setiap intervensi memiliki dampak terukur.

Sebagai turunan operasional dari sasaran RPJM, program prioritas memastikan pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah secara sistematis. Implementasi program didukung oleh pendekatan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan OPD terkait, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan menjadi lebih akuntabel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

Untuk memudahkan pemahaman dan pengelolaan, tabel berikut menyajikan rincian Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta, indikator kinerja, dan OPD pelaksana. Tabel ini berfungsi sebagai panduan implementatif yang menghubungkan sasaran strategis RPJMD Kutai Timur dengan kegiatan operasional di tingkat perangkat daerah, sehingga pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan dapat direalisasikan secara optimal, terukur, dan berkelanjutan.



Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Kode				Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
T1. Mewujudkan SDM Yang berkualitas						Indeks Pembangunan Manusia	75,9	76,18	76,6	77,02	77,45	77,87	78,29	
T1.S1. Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat						Usia Harapan Hidup (UHH)	73,75	74,33	74,79	75,25	75,71	76,16	76,61	
						Angka Stunting		25,35	23,7	22,16	20,72	19,38	18,12	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8	7	6	5	5	Dinas Kesehatan	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	28,47	32,12	35,77	39,42	Dinas Kesehatan	
					Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. (%)	95	95	95	95	95	95	95	Dinas Kesehatan	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48	62	76	90	100	Dinas Kesehatan	
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)		90	90,45	90,9	91,35	91,8	92,25	Dinas Kesehatan	
					Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	Dinas Kesehatan	
					Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	134	122	109	97	86	77	77	Dinas Kesehatan	



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
					Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44	42	40	38	36	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12	11,5	11	10	10	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44	42	40	38	36	Dinas Kesehatan
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45	54	63	70	79	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	Dinas Kesehatan
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10	12	15	20	20	Dinas Kesehatan
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25	30	35	40	40	Dinas Kesehatan
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84	88	92	95	95	Dinas Kesehatan
					Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2	98,4	98,6	98,8	99	Dinas Kesehatan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68	71	75	80	80	Dinas Kesehatan
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84	86	88	90	92	Dinas Kesehatan
					Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88	96	100	100	100	Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86	89	92	95	95	Dinas Kesehatan
					Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
					Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77	79	81	83	85	Dinas Kesehatan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1	8	7,9	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT Sesuai standar (%)	10	15	20	25	30	35	40	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	42,86	66,67	76,19	85,71	90,48	95,24	100	Dinas Kesehatan
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	6.62:0.82	6.72:0.83	6.81:0.85	6.90:0.86	6.99:0.87	7.07:0.89	7.15:0.90	Dinas Kesehatan
					Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	33	33	67	67	75	75	100	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	48	64	69	80	Dinas Kesehatan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat RSUD Kudungga	Peringkat Kelulusan Akreditasi (Nilai Akreditasi)	80	80	80	80	80	80	80	RSUD Kudungga Sangatta
T1.S2. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata					Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	9,47	9,49	9,51	9,53	9,55	9,57	9,59	
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,02	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	65,31%	68,51%	71,72%	74,76%	77,80%	80,84%	80,84%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	99,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan 7-18 Tahun	32,40%	37,38	42,36%	47,34%	52,31%	57,29%	57,29%	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Penerima Beasiswa	91.97%	75.57%	76%	77.57%	78%	79,57%	79,57%	Sekretariat Daerah
			Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	15	25	30	35	40	45	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	1	45	58,33	61,66	65	70	75	Dinas kepemudaan dan Olahraga
					Persentase Atlet yang Berasal Dari Kab/ Kota yang Masuk Pelatda (%)	0	13,40	13,60	14,00	15,00	15,60	18,60	Dinas kepemudaan dan Olahraga
T1.S3. Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		64,47	65,73	67	68,26	69,53	70,79	
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,517	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG (%)	10	30	35	40	42	45	45	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Keluarga yang Menerima Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60.75	62.31	63.3	64.3	65.29	66.29	67.28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak eksploitasi, penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	90	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengendalian Penduduk	Terkendalnya penambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR) (Rata-Rata Jumlah Anak)	2,09	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08	2,07	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	18,3	17,1	16	15,1	14,2	13,5	12,8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	"Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) " (%)	52.8	53.1	53.4	53.7	54	54.3	54.6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	16.3	16.1	15.9	15.7	15.5	15.3	15.3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / IKK (%)	16.3	19.5	22.8	26	29.3	32.5	35.8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	7.8	7.9	8.0	8.10	8.20	8.30	8.40	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
T1.S4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran					Tingkat Kemiskinan (%)	8,81	7,93– 8,14	7,16– 7,55	6,38– 6,97	5,61– 6,38	4,83– 5,80	4,06– 5,21	
					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,76	5,44– 5,51	5,21-5,31	4,98-5,10	4,76-4,90	4,53-4,70	4,30–4,50	
			Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	100	9,8	10,78	11,76	12,74	13,72	14,7	Dinas Sosial



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat penanganan (%)	100	20	40	60	80	90	100	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (%)	100	9,80	10,78	11,76	12,72	13,72	14,70	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan anak - anak terlantar yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	15,00	16,50	19,97	26,58	38,92	49,67	66,56	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan / kompetensi (%)	88,76	89,65	90,54	91,45	92,36	93,29	94,22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
					Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Orang) (Juta Rupiah)	514,92	542,27	571,85	603,51	637,07	672,67	705,09	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	24,33	24,33	26,77	26,78	32,41	43,13	63,14	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Hubungan Industrial	Meningkatnya perlindungan pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparfis, Struktur Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	66,37%	66,36%	72,56%	75,49%	80,97%	81,18%	81,45%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
T2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal					Laju Pertumbuhan Ekonomi	9,82	9,85-10	10,24-10,38	10,62-10,76	11-11,14	11,36-11,52	11,76-11,9	
					PDRB per kapita (Rp Juta)	344,49	366,53	389,99	414,94	441,49	469,74	499,8	
					Rasio gini (Indeks)	0,283	0,278-0,283	0,271-0,281	0,264-0,279	0,257-0,277	0,250-0,275	0,243-0,244	
T2.S. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang					Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%)	24,47	25,06	25,66	26,91	27,56	28,22	28,88	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	0	1,07	1,06	1,05	1,03	0,68	1,02	Dinas Pariwisata
					Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)	0	1,48	1,21	1,20	1,19	1,17	1,16	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata (%)	25,00	20,00	16,67	14,29	12,50	11,11	9,52	Dinas Pariwisata



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,08	0,11	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih (%)	28,57	33,61	37,82	46,22	50,42	58,82	58,82	Dinas Pariwisata
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	17,95	45,63	46,51	47,67	48,78	50,16	51,47	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	43,01	43,66	44,30	44,93	45,54	46,13	46,71	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	6,79	12,92	13,24	11,81	11,90	13,62	15,27	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,92	0,93	0,95	0,97	1	1,02	1,04	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.726,62	8.797,94	8.799,28	8.802,37	8.804,85	8.806,40	8.809,55	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.255,48	1.117,2	1.138,63	1.153,44	1.171,6	1.186,35	1.203,28	Dinas Perikanan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang Diawasi (%)	0	13,33	48,65	51,35	55,41	62,16	71,62	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	41,29	42,39	43,49	44,59	45,69	46,79	47,89	Dinas Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian Dinas Perkebunan	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)	0	40	45	51	59	69	79	Dinas Perkebunan
				Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	Jumlah Produksi Padi (Ton)	24.278	25.920	26.186	26.453	26.720	26.986	27.245	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
					Jumlah Produksi Jagung (Ton)	1.499	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	1.850	
					Produksi Pisang (Ton)	88.358	91.218	97.417	102.288	112.516	123.768	123.768	
					Produksi Nanas (Ton)	0	17.549	18.426	19.347	20.315	21.331	21.331	
					Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	762	409	437	450	480	495	495	
					Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	2.867	3.250	3.325	3.450	3.580	3.725	3.880	



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian Dinas Perkebunan	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian (%)	0	20	20	26	34	44	54	Dinas Perkebunan
				Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	0	65,33	65,33	63,73	62,21	60,77	60,77	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	0	60	60	66	74	84	94	Dinas Perkebunan
					Persentase peningkatan luas ANKT (%)			0,08	0,09	0,09	0,1	0,1	
					Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan (%)	0	85	100	100	100	100	100	
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0	0,17	0,17	6	14	24	34	Dinas Perkebunan
				Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	21,23	19,34	25,47	31,13	39,15	53,30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi (%)	0	20	20	26	34	44	54	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
T2.S2. Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan					Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,34	4,56	5,06	6,9	8,74	10,58	12,42	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	97,2	97,01	97,11	97,17	97,20	97,21	97,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
T2.S3. Meningkatnya ketahanan pangan					Indeks Ketahanan Pangan	NA	64,22	66,9	69,7	72,62	75,66	78,82	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	105,96	78,00	81,00	84,12	87,36	90,72	94,22	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	86,80	89,00	91,20	93,40	95,60	97,80	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan Kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	13,89	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	Dinas Ketahanan Pangan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya mengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	96,67	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,50	Dinas Ketahanan Pangan
T2.S4. Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi					Nilai investasi PMDN (Juta Rupiah)	5.160.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	
					Nilai investasi PMA (Ribu \$)	NA	268.750	271.875	275.000	275.000	275.000	275.000	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	105,03	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Jumlah Promosi yang Diikuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
T2.S5. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Kutai Timur Dengan Ekonomi Domestik, Nasional, dan Global					Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB	NA	70,99	72	72,39	73,09	73,79	74,49	
			Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Pelaku usaha yang Melakukan Ekspor	0	1	1,5	1,7	2,0	2,5	2,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33	33	33	35	40	45	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	1,08	1,08	1,08	1,06	1,05	1,05	1,03	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pengawasan Alat UTP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	10	12	15	18	20	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
T2.S6. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota					Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	NA	7,89–8,01	8,01–8,13	8,13–8,26	8,26–8,38	8,38–8,50	8,50–9,00	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	39,24	38	47	56	63	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan (%)	58,53	60,28	62,28	64,78	66,88	68,08	68,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (%)	4,06	39	69	76	82	85	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	4,96	0,77	0,77	1,03	1,28	3,08	3,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	56,67	60,64	64,55	67,77	70,07	74,97	74,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan Lingkungan yang tertata	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Rasio)	0	0,36	41,94	42,57	43,22	43,89	43,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Yang Nyaman dan Aman Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	33,15	38,49	42,57	46,03	48,95	51,61	51,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Wilayah Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang (%)	0	61,50	70	78,34	86,67	95	95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	39,56	40,49	49,95	59,80	63,65	69,06	75,37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	37,84	38,22	38,73	39,37	40,14	41,03	42,05	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum(PSU)	Meningktanya Penyediaan Psu Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	26,32	31	32	40	43	48	52	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	81,04	81,04	82,00	84,00	86,00	88,00	92,00	Dinas Perhubungan



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Ransportasi Laut	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	67,74	73,66	79,57	84,95	90,32	95,16	100	Dinas Perhubungan
T3. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif					Indeks Reformasi Birokrasi	70,35 (BB)	72 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	80 (BB)	
T3.S1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner					Indeks Pmerintahan Digital	0	0	3	3,4	3,8	4	4,2	
					Indeks Sistem Merit	275,5	296,25	317	337,75	358,5	379,25	400	
					Nilai SAKIP	60,08	63,4	66,72	70,04	73,36	76,68	80	
					Indeks Integritas Pemerintah (Survei Penilaian Integritas)	59,16	62,13	65,11	68,08	71,05	74,03	77	
					Indeks Inovasi Daerah	24,7	28	32	36	40	44	46	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi (%)	75	80	80	80	85	90	80	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
					Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur (%)	75	80	84	89	93	96	100	
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	97,76	98	98,25	98,5	98,75	99	99	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4,63	15	15	15	15	15	15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	0	100	100	100	100	100	
				Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	NA	98,37	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	86	96	96	96	96	96	96	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik Yang Bersifat Anggaran Atauupun Proses dan Kewenangan	Tindakanjutt Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	86,20	81,68	83	85	87	89	90	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3 (%)	NA	50	55	60	65	70	75	Inspektorat
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3	3	3	3	3	3	4	



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	3	3	3	3	3	3	4	
			Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan, Pengembangan Potensi Unggulan dan Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)	NA	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	Badan Riset dan Inovasi Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembanguna daerah	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	93,47	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	99,32	100	100	100	100	100	100	
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	-	-	71,5	73	74,5	76	77,5	Sekretariat Daerah
					Persentase Ketercapaian Kinerja SPM (%)	91,80	92,00	93,00	94,00	95,00	97,00	97,00	
					Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)		70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	90,00	
					Presentase Penerima Beasiswa (%)	91,97	75,57	76,00	77,57	78,00	79,57	79,57	
					Efektivitas Kerja Sama Daerah (Presentase)	79	79	80	81	82	83	85	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	7.169	7.180	7.190	7.200	7.210	72,30	72,50	Sekretariat Daerah
					Presentase Layanan Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	84,50	84,50	90,42	96,74	100,00	100,00	100,00	
					Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian (%)	75,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5	5	5	5	5	5	5	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	57	60	65	70	75	82	89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Publikasi Data Sektor dalam Portal Satu Data (%)	0	31	45	59	72	86	100	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
T3.S2. Meningkatnya kualitas layanan publik					Indeks Pelayanan Publik	2,9	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
			Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Admuduk (Persentase)	73,46	62	55	70	80	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	0	0	97	97,5	98	98,5	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	100	62	63	63,50	64	64,50	65	



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	0	0	65,5	70	70,5	80	80,5	
					Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	0	0	63	65	70	80	85	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemantauan informasi kependudukan	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	30	30	20	18,5	16,5	14,5	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) (%)	98,83	97,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Persentase Desa/Kelurahan yang tersosialisasi atau edukasi dalam Pencegahan Kebakaran (%)	42,55	42,55	60,28	74,47	92,20	99,00	99,00	
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (%)	38,89	38,89	50,00	66,67	83,33	99,00	99,00	



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	8	10	20	30	40	50	60	Satuan Polisi Pamong Praja
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	
					Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	100	100	100	100	100	100	100	
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2	3	4	5	6	7	7	
					Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	0	0	90	90	90	90	90	
					Persentase jumlah sarana dan prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)	70	80	80	85	85	85	85	



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar (%)	20	28	34	39	49	51	56	
T3.S3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		74,73	76,23	77,73	79,23	80,73	82,23	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase capaian pajak daerah terhadap target yg ditetapkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
					Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata (%)	60,2	63,5	67	70	73	77	79	
					Persentase realisasi penagihan terhadap piutang pajak (%)	64,6	65	62,70	64	66	67,2	68,4	
					Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan (%)	29,2	30,1	30,8	31,4	32,1	32,6	33,2	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Pembendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Realisasi SP2D Terhadap Total SPD yang Diterbitkan (%)		80	83	90	93	97	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	11,98	22,03	30	30	30	30	30	



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	75,59	79,09	84,37	90,20	91,37	94,87	96,59	
					Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40	40	40	40	40	40	40	
					Presentase Penurunan SILPA (%)	-93,57	-94,07	-94,57	-95,07	-95,57	-96,07	-96,57	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	30,47	40,47	50,47	60,47	70,47	80,47	90,47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
T4. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan					Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	NA	61,66	63,5	65,33	67,16	69	70,83	
T4.S1. Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana					Indeks kualitas lingkungan hidup	75,85	77,37	78,91	80,49	82,1	83,74	85,41	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	0	50	50	52	53	54	55	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan IKLH (%)	0	10	11	12	13	14	14	Dinas Lingkungan hidup



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH yang Dikelola (%)	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penurunan Limbah B3 (%)	4,97	4,97	4	3,5	3	2	1	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Persetujuan lingkungan Yang Diterbitkan	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	0	50	50	52	53	54	54	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Pengetahuan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Mha Yang Terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Penetapan Masyarakat Adat Menjadi Masyarakat Hukum Adat (%)	12,5	12,5	25	37,5	50	62,5	80	Dinas Lingkungan hidup



Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Diberikan kepada Lembaga Masyarakat / Lembaga Pendidikan (%)	0	80	80	80,2	80,4	80,5	81	Dinas Lingkungan hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (%)	0	80	80	80	82	82,5	83	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	0	41,92	41,99	42,50	45	50	50	Dinas Lingkungan hidup
T4. S2. Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana					Indeks Risiko Bencana		166,36	159,36	152,36	145,36	138,36	131,36	
			Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pra Bencana (Indeks)	0,267	0,293	0,317	0,346	0,374	0,422	0,453	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	0,118	0,126	0,131	0,133	0,133	0,134	0,134	
					Indeks Pasca Bencana (Indeks)	0,035	0,042	0,042	0,057	0,057	0,057	0,057	

3.2.4 Dukungan Program Unggulan RPJMD Kutai Timur 2025-2029 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kutai Timur 2025–2029 tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian sasaran prioritas pemerintah pusat.

Dalam konteks tersebut, program-program unggulan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kutai Timur diarahkan untuk mendukung Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029, khususnya yang relevan dengan karakteristik wilayah, potensi sumber daya, serta isu strategis yang dihadapi daerah. Untuk memperjelas keterkaitan tersebut, pada bagian berikut disajikan tabel pemetaan (mapping) antara Program Unggulan RPJMD Kutai Timur 2025–2029 dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029. Tabel ini memudahkan identifikasi kontribusi masing-masing program unggulan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi pelaksanaan dan pengalokasian sumber daya di daerah.

Tabel 3.10 Pemetaan (*mapping*) antara Program Unggulan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025–2029 dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029

NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH			
(01)	(02)	(03)			(05)
1	Investasi pelayanan kesehatan primer	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Memberikan bantuan penempatan tenaga kesehatan
		Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu
		Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokter dan tenaga medis akan berkeliling dari satu desa ke desa lain secara rutin, dengan menggunakan kendaraan operasional yang memadai—baik kendaraan darat maupun sungai—untuk memberikan layanan kesehatan primer langsung ke masyarakat.
		Insentif Kader Posyandu 500 Ribu Rupiah Per Bulan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pemerintah memberikan insentif tetap bulanan sebesar Rp500.000 per kader sebagai stimulus kesejahteraan sekaligus penguatan motivasi dalam menjalankan peran vital mereka.
2	Penuntasan TBC	Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokter dan tenaga medis akan berkeliling dari satu desa ke desa lain secara rutin, dengan menggunakan kendaraan operasional yang memadai—baik kendaraan darat maupun sungai—untuk memberikan layanan kesehatan primer langsung ke masyarakat.
3	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu



NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH			
(01)	(02)	(03)			(05)
4	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah kecamatan dan desa, terutama di daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) yang selama ini mengalami ketimpangan akses dan mutu layanan.
5	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Jalan Poros Desa Mulus	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperbaiki dan membangun jalan poros desa — yaitu jalan penghubung antarpermukiman, pusat produksi, layanan publik, dan akses ke kota/kecamatan — agar seluruh wilayah desa memiliki aksesibilitas transportasi yang baik sepanjang tahun.
		1.000 Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah & Relokasi Warga Terdampak Longsor	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program ini mencakup pembangunan rumah baru, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga relokasi terpadu bagi warga terdampak bencana ke lokasi yang lebih aman dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pendekatan pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan mitra swasta/CSR.
		Listrik Desa Menyala 24 Jam	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Memastikan seluruh desa, termasuk daerah terpencil dan terluar, mendapatkan akses listrik yang stabil dan menyala penuh selama 24 jam sehari. Program ini ditujukan untuk mengatasi persoalan ketimpangan energi antarwilayah serta mendorong transformasi ekonomi dan sosial di pedesaan. Dengan menggandeng PLN dan berbagai mitra penyedia energi, program ini mengusung



NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH			
(01)	(02)	(03)			(05)
					berbagai pendekatan—mulai dari ekspansi jaringan listrik, pembangkit energi baru terbarukan (EBT), hingga solusi hybrid dan off-grid untuk wilayah yang belum terjangkau infrastruktur PLN konvensional.
6	Pencegahan dan penurunan stunting	Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Memberikan akses rutin terhadap susu dan buah segar secara gratis sebagai asupan tambahan bergizi untuk memperkuat tumbuh kembang anak.
		Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non-Formal, Stop Stunting, dan Warga di Bawah Garis Kemiskinan			Program “Layanan Jemput Bola” bertujuan menjangkau langsung kelompok masyarakat yang rentan dan sulit mengakses layanan dasar, khususnya dalam bidang pendidikan non-formal, kesehatan gizi (stunting), dan perlindungan sosial bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan.
7	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Membangun Pabrik-Pabrik Hilirisasi Sawit	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah mendorong pembangunan dan pengembangan pabrik-pabrik pengolahan lanjutan seperti refinery (pemurnian CPO), pabrik biodiesel, pabrik sabun, margarin, hingga industri oleokimia, yang berlokasi di kawasan ekonomi strategis dan dekat dengan sentra perkebunan sawit.
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, & Karet	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program ini dirancang untuk membangun sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan bernilai jual tinggi, seperti coklat batang, keripik



NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH			
(01)	(02)	(03)			(05)
					pisang, sari nanas, lateks, dan barang jadi berbahan karet.
8	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Penguatan Ketahanan Pangan melalui Revitalisasi, Rehabilitasi, Optimasi, dan Pembukaan/cetak Lahan Pertanian & Tambak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Program ini menyasar kawasan desa yang memiliki potensi pengembangan sawah, ladang produktif, serta tambak air tawar dan payau, khususnya untuk mendukung kemandirian pangan, pengendalian inflasi, dan peningkatan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan.
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	
9	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	Revitalisasi lahan pertanian dan tambak yang tidak optimal, rehabilitasi lahan rusak, optimasi lahan eksisting, serta pembukaan atau pencetakan lahan baru untuk mendukung ekspansi produksi pangan lokal.
10	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Bantuan Bibit Tanaman Buah Per Rumah Tangga untuk Penghijaun Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Setiap rumah tangga di seluruh desa akan mendapatkan bantuan bibit tanaman buah produktif seperti mangga, rambutan, durian, jambu, atau alpukat yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan pemukiman yang asri, sehat, dan bernilai ekonomi, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kelestarian alam dari pekarangan rumah sendiri.
11	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	1 Desa 1 Jaringan Air Bersih yang Lancar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memastikan setiap desa memiliki sistem distribusi air bersih yang berfungsi optimal, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.
12	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut				



NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH			
(01)	(02)	(03)			(05)
13	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memberikan bantuan penempatan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan insentif bagi guru swasta dan penyuluh pertanian agar mereka lebih termotivasi dan optimal dalam menjalankan tugas.
		Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Mingguan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memberikan insentif kepada tenaga pendidik yang tersedia bagi satuan pendidikan



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini akan membahas seluruh rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah 2025-2029. Program Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Bab IV Renstra Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					784.039.296.873		816.608.054.870		850.805.250.753		886.712.306.454		924.414.714.924	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					329.404.083.563		343.087.430.716		357.454.945.214		372.540.835.458		388.381.020.200	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	329.404.083.563	72,00	343.087.430.716	73,50	357.454.945.214	75,00	372.540.835.458	76,50	388.381.020.200	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	81,00	82,00		83,00		84,00		85,00		86,00		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					399.844.429.242		416.453.847.296		433.893.736.252		452.205.619.658		471.433.097.232	
MENINGKATNYA PARTISIPASI ANAK USIA SEKOLAH	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (Angka)	65,31	68,51	71,72	399.844.429.242	74,76	416.453.847.296	77,8	433.893.736.252	80,84	452.205.619.658	80,84	471.433.097.232	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun (Angka)	99,97	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaran 7-18 Tahun (Angka)	32,4	37,38	42,36		47,34		52,31		57,29		57,29		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	45.96:10000	46.25:10000	46.55:10000		46.84:10000		47.13:10000		47.42:10000		47.45:10000		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	104,65	104,35	104,10		103,65		103,35		103,10		102,65		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni (APM) 7-12 Tahun Jenjang SD/MI (Angka)	96,33	96,85	97,33		97,85		98,33		98,85		99,33		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	43.13:10000	43.40:10000	43.64:10000		43.88:10000		44.09:10000		44.29:10000		44.49:10000		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 Tahun Jenjang SMP/MTs (Angka)	84,86	85,86	86,86		87,86		88,86		89,86		90,86		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS (Angka)	106,65	106,35	106,00		105,65		105,35		105,00		104,65		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni (APM) 5-6 Tahun Jenjang PAUD (Angka)	92,20	78,65	79,65		80,65		81,65		82,65		83,65		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi (%)	66,67	72,22	77,78		83,33		88,89		94,44		100,00		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					227.831.615		237.295.672		247.232.932		257.667.055		268.622.884	
MENINGKATNYA KUALITAS KURIKULUM PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	227.831.615	100	237.295.672	100	247.232.932	100	257.667.055	100	268.622.884	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					54.562.952.453		56.829.481.186		59.209.336.355		61.708.184.283		64.331.974.608	
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	100	100	100	54.562.952.453	100	56.829.481.186	100	59.209.336.355	100	61.708.184.283	100	64.331.974.608	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					612.351.200.779		637.879.778.647		664.579.785.419		692.714.792.525		722.151.549.984	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					390.943.742.770		405.912.753.896		421.152.373.025		437.253.973.114		454.055.653.202	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	219.075.229.228	72,00	228.217.088.457	73,50	237.816.040.647	75,00	247.894.940.447	76,50	258.477.785.237	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH RSUD KUDUNGGGA	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80	80	80	135.364.786.781	81	139.488.351.408	82	143.445.251.715	83	147.599.997.038	84	151.962.479.626	1.02.0.00.0.00.0 1.0001 - RSUD Kudungga Sangatta
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		1.02.0.00.0.00.0 1.0001 - RSUD Kudungga Sangatta
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH RSUD SANGKULIRANG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	6.303.367.675	72,00	6.565.207.684	73,50	6.840.139.693	75,00	7.128.818.303	76,50	7.431.930.843	1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS SANDARAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	673.649.041	72	793.324.281	73,50	813.983.282	75	935.675.234	76,50	958.451.783	1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS SANGKULIRANG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.728.896.208	72,00	1.804.868.010	73,50	1.884.638.402	75,00	1.968.397.313	76,50	2.056.344.170	1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS KALIORANG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	2.463.404.901	72	2.569.887.974	73,50	2.681.695.201	75	2.799.092.789	76,50	2.922.360.257	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS KAUBUN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,5	1.803.421.136	72	1.882.488.681	73,5	1.965.509.603	75	2.052.681.571	76,5	2.144.212.138	1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS KARANGAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.301.877.109	72,00	1.360.110.665	73,50	1.421.255.899	75,00	1.485.458.395	76,50	1.552.871.015	1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS SEPASO	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	2.442.851.860	72,00	2.550.558.151	73,50	2.663.649.757	75,00	2.782.395.943	76,50	2.907.079.438	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS BUSANG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	67,65	815.048.626	72,00	855.136.457	73,50	897.228.680	75,00	941.425.514	76,50	987.832.190	1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS LONG MESANGAT	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	980.771.700	72,00	1.027.743.618	73,50	1.077.064.133	75,00	1.128.850.673	76,50	1.183.226.539	1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS MUARA ANCALONG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.168.771.931	72,00	1.223.553.323	73,50	1.281.073.785	75,00	1.341.470.269	76,50	1.404.886.578	1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH MUARA BENGKAL	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.240.531.323	72,00	1.298.293.578	73,50	1.358.943.947	75,00	1.422.626.833	76,50	1.489.493.864	1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS BATU AMPAR	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	715.083.191	72,00	744.787.533	73,50	775.977.092	75,00	808.726.129	76,50	843.112.618	1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS KOMBENG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	2.402.257.239	72,00	2.508.277.242	73,50	2.619.598.245	75,00	2.736.485.298	76,50	2.859.216.703	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS TELEN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	850.896.516	72,00	886.242.503	73,50	923.355.789	75,00	962.324.740	76,50	1.003.242.138	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS MUARA WAHAU 1	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.048.094.199	72,00	1.097.862.674	73,50	1.150.119.573	75,00	1.204.989.316	76,50	1.262.602.547	1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS MUARA WAHAU 2	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	2.030.611.345	72,00	2.121.193.289	73,50	2.216.304.329	75,00	2.316.170.922	76,50	2.421.030.844	1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80				80				80		
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS RANTAU PULUNG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.239.341.326	72,00	1.297.054.149	73,50	1.357.652.614	75,00	1.421.281.002	76,50	1.488.090.809	1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80				80				80		
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS TEPIAN BARU	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.415.260.128	72,00	1.480.280.566	73,50	1.548.552.025	75,00	1.620.237.058	76,50	1.695.506.342	1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80				80				80		
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS TELUK LINGGA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	2.388.452.564	72,00	2.493.899.125	73,50	2.604.618.013	75,00	2.720.872.846	76,50	2.842.940.421	1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.189.187.273	72,00	1.244.816.712	73,50	1.303.227.623	75,00	1.364.559.080	76,50	1.428.957.109	1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80				80				80		



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS SANGATTA SELATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.274.951.675	72,00	1.334.143.741	73,50	1.396.295.411	75,00	1.461.554.665	76,50	1.530.076.881	1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS TELUK PANDAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	848.013.627	72,00	887.393.830	73,50	928.743.042	75,00	972.159.716	76,50	1.017.747.223	1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	178.986.168	72,00	180.190.245	73,50	181.454.525	75,00	182.782.020	76,50	184.175.889	1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					206.045.691.401		216.127.062.803		227.085.345.329		238.591.541.982		250.673.048.468	
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8	141.294.411.656	7	147.163.739.275	6	153.326.533.275	5	159.797.466.975	5	166.591.947.360	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82		28,47		32,12		35,77		39,42		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT RSUD KUDUNGGGA	Peringkat Kelulusan Akreditasi (Nilai Akreditasi)	80	80	80	28.045.752.739	80	30.710.213.071	80	33.880.738.970	80	37.209.791.165	80	40.705.295.969	1.02.0.00.0.00.0 1.0001 - RSUD Kudungga Sangatta
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS SANDARAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.975.274.857	28,47	2.061.481.154	32,12	2.151.997.766	35,77	2.247.040.209	39,42	2.346.834.773	1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	0	90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT RSUD SANGKULIRANG	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	5.186.435.885	28,47	5.401.878.881	32,12	5.628.094.027	35,77	5.865.619.930	39,42	6.115.022.129	1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	0	98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100
proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68	71	75	80	80	1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang						



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - RSUD Sangkulirang
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS SANGKULIRANG	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.358.350.110	28,47	1.414.775.567	32,12	1.474.022.298	35,77	1.536.231.364	39,42	1.601.550.885	1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRAN G
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS KALIORANG	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.262.163.838	28,47	1.314.593.746	32,12	1.369.645.150	35,77	1.427.449.124	39,42	1.488.143.297	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	berkelanjutan. ((%))																	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48				62				76			90		100	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45				90,9				91,35			91,8		92,25	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14				0,14				0,14			0,14		0,14	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109				97				86			77		77	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100		100	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44				42				40			38		36	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12				11,5				11			10		10	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44				42				40			38		36	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Persentase Cakupan pemeriksaan		36	45				54				63			70		79	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 -



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	kesehatan gratis (Persentase)													PUSKESMAS KALIORANG		
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4				23,4				23,4			23,4	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10				12				15			20	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25				30				35			40	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84				88				92			95	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2				98,4				98,6			98,8	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68				71				75			80	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84				86				88			90	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100				100				100			100	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88				996				100			100	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS KAUBUN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.283.825.182	28,47	1.337.154.897	32,12	1.393.151.097	35,77	1.451.947.107	39,42	1.513.682.917	1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment)		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	success rate) ((%))														
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14				0,14				0,14			0,14
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109				97				86			77
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44				42				40			38
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12				11,5				11			10
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44				42				40			38
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45				54				63			70
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4				23,4				23,4			23,4
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10				12				15			20
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masvarakat (%)	20	22	25				30				35			40



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)		65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN						



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS KARANGAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.785.369.209	28,47	1.859.532.912	32,12	1.937.404.800	35,77	2.019.170.283	39,42	2.105.024.040	1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68	71	75	80	80	1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN						



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN		
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
	MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS SEPASO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17		24,82		1.235.103.906		28,47		1.286.409.753		32,12
Jumlah Kematian Ibu (Orang)		10	9	8	7	6	5		5	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO				
Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara		95	95	95	95	95	95		95	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO				



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	berkelanjutan. ((%))																	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48				62				76			90		100	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45				90,9				91,35			91,8		92,25	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14				0,14				0,14			0,14		0,14	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109				97				86			77		77	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100		100	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44				42				40			38		36	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12				11,5				11			10		10	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44				42				40			38		36	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4						
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		100



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS BUSANG	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.586.262.300	28,47	1.652.155.162	32,12	1.721.342.667	35,77	1.793.989.547	39,42	1.870.268.771	1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,2	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG						



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS LONG MESANGAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.415.069.581	28,47	1.473.851.148	32,12	1.535.571.794	35,77	1.600.378.472	39,42	1.668.425.484	1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS MUARA ANCALONG	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.227.069.349	28,47	1.278.041.443	32,12	1.331.562.142	35,77	1.387.758.876	39,42	1.446.765.446	1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS MUARA BENGKAL	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.155.309.958	28,47	1.203.301.188	32,12	1.253.691.980	35,77	1.306.602.311	39,42	1.362.158.159	1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	46		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)		65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS BATU AMPAR	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.680.758.090	28,47	1.756.807.233	32,12	1.836.658.834	35,77	1.920.503.015	39,42	2.008.539.405	1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		80		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4						
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		100



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOMBENG	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.270.228.882	28,47	1.322.993.810	32,12	1.378.396.984	35,77	1.436.570.317	39,42	1.497.652.317	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	kesehatan esensial (%)																	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45				90,9				91,35			91,8		92,25	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14				0,14				0,14			0,14		0,14	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109				97				86			77		77	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100		100	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44				42				40			38		36	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12				11,5				11			10		10	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44				42				40			38		36	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45				54				63			70		79	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4				23,4				23,4			23,4		23,4	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Persentase tempat pengelolaan	5	6	10				12				15			20		20	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 -



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pangan memenuhi syarat (%)													PUSKESMAS KOMBENG
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 -



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PUSKESMAS KOMBENG
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS TELEN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.544.944.765	28,47	1.615.352.264	32,12	1.689.280.137	35,77	1.766.904.405	39,42	1.848.409.886	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		36	36	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		10	10	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		36	36	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		79	79	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4	23,4	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		20	20	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		40	40	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		95	95	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		99	99	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS MUARA WAHAU 1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.347.747.082	28,47	1.403.732.093	32,12	1.462.516.354	35,77	1.524.239.828	39,42	1.589.049.477	1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS MUARA WAHAU 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.003.552.356	28,47	1.045.239.620	32,12	1.089.011.249	35,77	1.134.971.458	39,42	1.183.229.678	1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS RANTAU PULUNG	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.156.499.955	28,47	1.204.540.617	32,12	1.254.983.313	35,77	1.307.948.143	39,42	1.363.561.215	1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG	
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG	
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG	



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS TEPIAN BARU	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	986.351.642	28,47	1.027.324.394	32,12	1.070.345.784	35,77	1.115.518.244	39,42	1.162.949.326	1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4						
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		100



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	80		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS TELUK LINGGA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.928.126.466	28,47	2.008.220.263	32,12	2.092.318.749	35,77	2.180.622.161	39,42	2.273.340.742	1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA		
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS SANGATTA UTARA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.212.456.945	28,47	1.262.822.044	32,12	1.315.705.398	35,77	1.371.232.920	39,42	1.429.536.818	1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														SANGATTA UTARA
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS SANGATTA SELATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.126.692.544	28,47	1.173.495.015	32,12	1.222.637.610	35,77	1.274.237.335	39,42	1.328.417.046	1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. (%)	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100				
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100				
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS TELUK PANDAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	965.308.172	28,47	1.005.406.785	32,12	1.047.510.328	35,77	1.091.719.049	39,42	1.138.138.205	1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
				2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	nasional (JKN) (%)													TELUK PANDAN					
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN		
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68				71				75			80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84				86				88			90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100				100				100			100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88				96				100			100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86				89				92			95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90				90				90			90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77				79				81			83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9				8,8				8,7			8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT INSTALASI FARMASI KABUPATEN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.595.806.050	28,47	1.662.095.356	32,12	1.731.699.128	35,77	1.804.783.088	39,42	1.881.521.246	1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		96		96		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - Instalasi Farmasi Kabupaten



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,79	21,17	24,82	1.416.819.882	28,47	1.481.905.112	32,12	1.550.244.603	35,77	1.622.001.068	39,42	1.697.345.357	1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	10	9	8		7		6		5		5		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	29	38	48		62		76		90		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		90	90,45		90,9		91,35		91,8		92,25		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	134	122	109		97		86		77		77		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	12		11,5		11		10		10		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	71	47	44		42		40		38		36		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	45		54		63		70		79		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	5	6	10		12		15		20		20		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	22	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	84		88		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		98	98,2		98,4		98,6		98,8		99		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	65	68		71		75		80		80		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	88		96		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	83	86		89		92		95		95		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Penemuan Kasus TBC (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84,75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9,1	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,5	8,4	8,3		8,2		8,1		8		7,9		1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - Laboratorium Kesehatan Daerah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.834.663.980		1.910.875.373		1.990.897.336		2.074.920.397		2.163.144.611	
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	42,86	66,67	76,19	1.834.663.980	85,71	1.910.875.373	90,48	1.990.897.336	95,24	2.074.920.397	100	2.163.144.611	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga keehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	6.62:0.82	6.72:0.83	6.81:0.85		6.90:0.86		6.99:0.87		7.07:0.89		7.15:0.90		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	33	33	67		67		75		75		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.532.691.310		1.554.819.148		1.578.053.377		1.602.449.318		1.628.065.057	
MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT Sesuai standar (%)	10	15	20	1.532.691.310	25	1.554.819.148	30	1.578.053.377	35	1.602.449.318	40	1.628.065.057	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	30	35	40		45		50		55		60		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	10	15	20		25		30		35		40		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					11.994.411.318		12.374.267.427		12.773.116.352		13.191.907.714		13.631.638.646	
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	9.043.297.106	48	9.418.952.964	64	9.813.391.615	69	10.227.552.199	80	10.662.420.812	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS SANDARAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	104.365.782	48	104.547.135	64	104.737.556	69	104.937.498	80	105.147.437	1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS SANDARAN
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS SANGKULIRANG	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	104.365.782	48	104.547.135	64	104.737.556	69	104.937.498	80	105.147.437	1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS SANGKULIRANG
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS KALIORANG	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	104.365.782	48	104.547.135	64	104.737.556	69	104.937.498	80	105.147.437	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS KALIORANG
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS KAUBUN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	104.365.782	48	104.547.135	64	104.737.556	69	104.937.498	80	105.147.437	1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KAUBUN



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS KARANGAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	104.365.782	48	104.547.135	64	104.737.556	69	104.937.498	80	105.147.437	1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS KARANGAN
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS SEPASO	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	151.978.754	48	152.060.951	64	152.147.258	69	152.237.880	80	152.333.033	1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS SEPASO
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS BUSANG	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	151.978.754	48	152.060.951	64	152.147.258	69	152.237.880	80	152.333.033	1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS BUSANG
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS LONG MESANGAT	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS LONG MESANGAT
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS MUARA ANCALONG	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS MUARA ANCALONG
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS MUARA BENGKAL	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS MUARA BENGKAL
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS BATU AMPAR	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BATU AMPAR
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS KOMBENG	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS KOMBENG



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS TELEN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TELEN
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS MUARA WAHAU 1	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 1
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS MUARA WAHAU 2	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS MUARA WAHAU 2
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS RANTAU PULUNG	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	157.448.399	48	157.757.803	64	158.082.678	69	158.423.796	80	158.781.970	1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS RANTAU PULUNG
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS TEPIAN BARU	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	151.677.910	48	151.747.610	64	151.820.795	69	151.897.639	80	151.978.326	1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS TEPIAN BARU
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS TELUK LINGGA	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	151.677.910	48	151.747.610	64	151.820.795	69	151.897.639	80	151.978.326	1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS TELUK LINGGA
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS SANGATTA UTARA	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	151.645.461	48	151.713.813	64	151.785.583	69	151.860.941	80	151.940.067	1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS SANGATTA UTARA



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS SANGATTA SELATAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	151.645.461	48	151.713.813	64	151.785.583	69	151.860.941	80	151.940.067	1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS SANGATTA SELATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS TELUK PANDAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	3	10	32	101.645.461	48	101.713.813	64	101.785.583	69	101.860.941	80	101.940.067	1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS TELUK PANDAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.441.181.482.475		1.424.775.246.432		1.538.797.251.554		1.401.202.961.411		1.362.005.399.721	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.296.410.988		50.258.555.698		52.476.307.646		54.804.947.190		57.250.018.712	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	44.479.589.880	72,00	46.327.258.746	73,50	48.267.311.055	75,00	50.304.365.980	76,50	52.443.273.651	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77	78	79		80		80		82		83		1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN / ALAT BERAT	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	2.553.289.680	72,00	2.659.352.570	73,50	2.770.718.604	75,00	2.887.652.941	76,50	3.010.433.994	1.03.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77	78	79		80		80		82		83		1.03.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	370.909.662	72,00	407.086.989	73,50	445.073.183	75,00	484.958.686	76,50	526.838.464	1.03.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77	78	79		80		80		82		83		1.03.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN / ALAT BERAT KEC. SANGKULIRANG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	334.389.535	72,00	369.049.826	73,50	405.443.133	75,00	443.656.104	76,50	483.779.725	1.03.0.00.0.00.0 1.0003 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77	78	79		80		80		82		83		1.03.0.00.0.00.0 1.0003 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN / ALAT BERAT KEC. MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	308.058.248	72,00	254.086.656	73,50	302.416.485	75,00	353.162.805	76,50	406.446.441	1.03.0.00.0.00.0 1.0004 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77	78	79		80		80		82		83		1.03.0.00.0.00.0 1.0004 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA BENGKAL	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	250.173.983	72,00	241.720.911	73,50	285.345.186	75,00	331.150.674	76,50	379.246.437	1.03.0.00.0.00.0 1.0005 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77	78	79		80		80		82		83		1.03.0.00.0.00.0 1.0005 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					78.812.376.580		82.127.758.843		85.608.910.219		89.264.119.163		78.102.088.555	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	39,24	38	47	78.812.376.580	56	82.127.758.843	63	85.608.910.219	70	89.264.119.163	70	78.102.088.555	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					95.906.440.319		84.890.365.178		104.073.486.280		108.465.763.437		103.077.654.451	
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan (%)	58,53	60,28	62,28	95.906.440.319	64,78	84.890.365.178	66,88	104.073.486.280	68,08	108.465.763.437	68,08	103.077.654.451	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					4.615.609.822		4.807.340.874		5.008.658.479		5.220.041.964		5.441.994.623	
MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrstruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan (%)	90,59	91,09	91,59	4.615.609.822	92,09	4.807.340.874	92,59	5.008.658.479	93,09	5.220.041.964	93,59	5.441.994.623	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.897.947.003		1.935.247.453		1.974.412.925		2.015.536.671		2.058.716.605	
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	4,96	0,77	0,77	1.897.947.003	1,03	1.935.247.453	1,28	1.974.412.925	3,08	2.015.536.671	3,08	2.058.716.605	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					66.239.389.964		70.257.915.302		79.477.366.907		83.907.791.093		73.559.736.487	
MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (%)	4,06	39	69	66.239.389.964	76	70.257.915.302	82	79.477.366.907	85	83.907.791.093	85	73.559.736.487	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					361.289.741.547		345.466.815.379		368.265.529.955		363.089.530.804		337.394.701.899	
MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	56,67	60,64	64,55	361.289.741.547	67,77	345.466.815.379	70,07	368.265.529.955	74,97	363.089.530.804	74,97	337.394.701.899	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					131.888.979.070		133.699.317.667		156.654.580.614		151.221.298.247		159.486.198.507	
MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Rasio)	0	0,36	41,94	131.888.979.070	42,57	133.699.317.667	43,22	156.654.580.614	43,89	151.221.298.247	43,89	159.486.198.507	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					644.191.832.360		642.975.851.436		676.572.929.958		534.183.424.803		536.241.070.401	
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	33,15	38,49	42,57	640.348.784.428	46,03	638.929.090.678	48,95	672.469.770.736	51,61	530.021.047.191	51,61	532.016.513.480	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. SANGATTA UTARA	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	33,15	38,49	42,57	905.735.178	46,03	922.589.296	48,95	940.286.119	51,61	958.867.785	51,61	978.378.533	1.03.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. SANGKULIRANG	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	33,15	38,49	42,57	942.255.305	46,03	960.626.459	48,95	979.916.169	51,61	1.000.170.366	51,61	1.021.437.272	1.03.0.00.0.00.0 1.0003 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA WAHAU	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	33,15	38,49	42,57	968.586.592	46,03	1.075.589.629	48,95	1.082.942.818	51,61	1.090.663.665	51,61	1.098.770.556	1.03.0.00.0.00.0 1.0004 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA BENGKAL	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	33,15	38,49	42,57	1.026.470.857	46,03	1.087.955.374	48,95	1.100.014.116	51,61	1.112.675.796	51,61	1.125.970.560	1.03.0.00.0.00.0 1.0005 - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					4.220.350.912		4.395.663.027		4.579.740.748		4.773.022.355		4.975.968.043	
MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KONSTRUKSI	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	9,76	10,64	11,37	4.220.350.912	11,98	4.395.663.027	12,46	4.579.740.748	12,84	4.773.022.355	13,13	4.975.968.043	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3.822.403.910		3.960.415.575		4.105.327.823		4.257.485.684		4.417.251.438	
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Wilayah Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang (%)	0	61,50	70	3.822.403.910	78,34	3.960.415.575	86,67	4.105.327.823	95	4.257.485.684	95	4.417.251.438	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					292.032.507.150		304.163.450.192		316.900.940.385		330.275.305.089		344.318.388.026	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.275.429.764		36.742.974.161		40.383.895.777		44.206.863.475		48.220.979.557	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	29.880.695.373	72,00	33.207.223.518	73,50	36.700.078.070	75,00	40.367.575.350	76,50	44.218.447.494	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	75	76		76		77		78		79		1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	2.234.128.470	72,00	2.326.933.499	73,50	2.424.378.779	75,00	2.526.696.323	76,50	2.634.129.744	1.04.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	75	76		76		77		78		79		1.04.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	1.160.605.921	72,00	1.208.817.144	73,50	1.259.438.928	75,00	1.312.591.802	76,50	1.368.402.319	1.04.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	75	76		76		77		78		79		1.04.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					32.075.456.610		39.238.655.510		41.510.014.354		43.894.941.140		41.399.114.266	
TERPENUHINYA RUMAHLAYAK HUNI BAGI WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	Persentase penyediaan / rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan korban terdampak relokasi program pemerintah kab/kota (%)	39,56	40,49	49,95	32.075.456.610	59,80	39.238.655.510	63,65	41.510.014.354	69,06	43.894.941.140	75,37	41.399.114.266	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					97.507.110.898		98.435.955.206		101.511.241.730		109.740.292.579		113.130.795.971	
MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	37,84	38,22	38,73	97.507.110.898	39,37	98.435.955.206	40,14	101.511.241.730	41,03	109.740.292.579	42,05	113.130.795.971	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					18.449.071.173		19.838.535.589		21.297.473.227		22.829.357.746		24.437.836.491	
TERPENUHINYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TANPA KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani (%)	0	0	16.25%	18.449.071.173	32.51%	19.838.535.589	55.27%	21.297.473.227	81.27%	22.829.357.746	100%	24.437.836.491	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					110.324.583.871		109.498.131.442		111.780.356.391		109.176.692.589		116.692.845.595	
MENINGKTKANYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	26,32	31	32	110.092.544.952	40	109.257.272.301	43	111.529.436.017	48	108.910.457.920	52	116.416.030.917	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
MENINGKTKANYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	26,32	31	32	116.038.919	40	120.859.141	43	125.920.374	48	131.234.669	52	136.814.678	1.04.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan
MENINGKTKANYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	26.32%	31%	32%	116.000.000	40%	120.000.000	43%	125.000.000	48%	135.000.000	52%	140.000.000	1.04.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					400.854.834		409.198.284		417.958.906		427.157.560		436.816.146	



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI AORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERENCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARAN DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENEH	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana ()	0	0	20	400.854.834	40	409.198.284	60	417.958.906	80	427.157.560	100	436.816.146	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					129.155.441.300		131.182.107.761		148.560.107.545		156.307.007.318		164.441.252.080	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					66.181.490.092		71.173.793.262		81.415.711.589		86.919.725.833		92.698.940.789	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	15.395.056.655	72,00	16.616.118.521	73,50	17.898.233.480	75,00	19.244.454.186	76,50	20.657.985.928	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	73	74	80		85		86		87		88		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	76	77	15.778.062.246	78	16.433.478.235	79	17.121.665.023	80	17.844.261.151	80	18.602.987.085	1.05.0.00.0.00.0 4.0000 - Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
	Nilai SAKIP (Nilai)	48	50	52		54		56		58		60		1.05.0.00.0.00.0 4.0000 - Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	35.008.371.191	72,00	38.124.196.506	73,50	46.395.813.086	75,00	49.831.010.496	76,50	53.437.967.776	1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	75	75		75		75		75		75		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					23.542.610.965		23.939.008.171		24.355.225.238		24.792.253.159		25.251.132.475	
MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	8	10	20	23.542.610.965	30	23.939.008.171	40	24.355.225.238	50	24.792.253.159	60	25.251.132.475	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2	3	4		5		6		7		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	0	0	90		90		90		90		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase jumlah sarana dan prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masvarakat (%)	70	80	80		85		85		85		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja		



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar (%)	20	28	34		39		49		51		56		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					8.478.189.714		8.830.371.180		9.200.161.719		9.588.441.785		9.996.135.855	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Indeks Pra Bencana (Indeks)	0,267	0,293	0,317	8.478.189.714	0,346	8.830.371.180	0,374	9.200.161.719	0,422	9.588.441.785	0,453	9.996.135.855	1.05.0.00.0.00.0 4.0000 - Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	0,118	0,126	0,131		0,133		0,133		0,134		0,134		1.05.0.00.0.00.0 4.0000 - Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
	Indeks Pasca Bencana (Indeks)	0,035	0,042	0,042		0,057		0,057		0,057		0,057		1.05.0.00.0.00.0 4.0000 - Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					30.953.150.529		27.238.935.148		33.589.008.999		35.006.586.541		36.495.042.961	
MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) (%)	98,83	97,83	96,83	30.953.150.529	96,83	27.238.935.148	96,83	33.589.008.999	96,83	35.006.586.541	96,83	36.495.042.961	1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase Desa/Kelurahan yang tersosialisasi atau edukasi dalam Pencegahan Kebakaran (%)	42,55	42,55	60,28		74,47		92,20		99,00		99,00		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (%)	38,89	38,89	50,00		66,67		83,33		99,00		99,00		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					22.341.284.700		23.269.334.988		24.243.787.789		25.266.963.231		26.341.297.446	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.647.039.795		14.068.544.794		14.511.125.044		14.975.834.306		15.463.779.031	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	13.647.039.795	72,00	14.068.544.794	73,50	14.511.125.044	75,00	14.975.834.306	76,50	15.463.779.031	1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Sosial
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.602.211.063		1.689.536.282		1.781.227.762		1.877.503.816		1.978.593.673	
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100	9,80	10,78	1.602.211.063	11,76	1.689.536.282	12,74	1.781.227.762	13,72	1.877.503.816	14,70	1.978.593.673	1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					202.279.485		204.451.159		206.731.417		209.125.688		211.639.672	
MEINGKATNYA LAYANAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ynag Mendapat Penanganan (%)	100	20,00	40,00	202.279.485	60,00	204.451.159	80,00	206.731.417	90,00	209.125.688	100	211.639.672	1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.166.385.362		2.304.147.019		2.448.796.758		2.600.678.984		2.760.155.322	
MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (%)	100	9,80	10,78	2.166.385.362	11,76	2.304.147.019	12,72	2.448.796.758	13,72	2.600.678.984	14,70	2.760.155.322	1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Sosial



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.600.243.404		2.749.796.439		2.906.827.125		3.071.709.346		3.244.835.678	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Anak- Anak Terlantar yang Ditangani (%)	100	100	100	2.600.243.404	100	2.749.796.439	100	2.906.827.125	100	3.071.709.346	100	3.244.835.678	1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Sosial
	Cakupan Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelatihan untuk Pengembangan Usaha (%)	100	10,00	12,00		14,00		16,00		18,00		20,00		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					2.123.125.591		2.252.859.295		2.389.079.683		2.532.111.091		2.682.294.070	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (%)	100	16,67	33,33	2.123.125.591	50,00	2.252.859.295	66,67	2.389.079.683	83,33	2.532.111.091	100	2.682.294.070	1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					58.556.590.453		60.847.778.729		63.253.526.423		65.779.561.498		68.431.898.327	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.294.033.865		20.137.041.964		21.022.200.469		21.951.616.899		22.927.504.150	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	17.504.442.512	72,00	18.231.571.820	73,50	18.995.057.595	75,00	19.796.717.658	76,50	20.638.460.724	2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,77	79,33		81,73		85,05		89,39		94,84		2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI	Nilai SAKIP (Nilai)	69,80	69,50	75,90	1.789.591.353	76,84	1.905.470.144	83,49	2.027.142.874	84,52	2.154.899.241	91,84	2.289.043.426	2.07.3.32.0.00.0 1.0001 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,77	79,33		81,73		85,05		89,39		94,84		2.07.3.32.0.00.0 1.0001 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					647.028.649		657.290.145		668.064.716		679.378.015		691.256.980	
TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	15,00	16,50	19,97	647.028.649	26,58	657.290.145	38,92	668.064.716	49,67	679.378.015	66,56	691.256.980	2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					6.405.823.203		6.671.919.183		6.951.319.964		7.244.690.783		7.552.730.142	
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (%)	88,76	89,65	90,54	3.088.835.196	91,45	3.258.684.187	92,36	3.437.025.629	93,29	3.624.284.142	94,22	3.820.905.581	2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Orang) (Juta Rupiah)	514,92	542,27	571,85		603,51		637,07		672,67		705,09		2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (%)	88,76	89,65	90,54	3.316.988.007	91,45	3.413.234.996	92,36	3.514.294.335	93,29	3.620.406.641	94,22	3.731.824.561	2.07.3.32.0.00.0 1.0001 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Orang/Bulan)	514,92	542,27	571,85		603,51		637,07		672,67		705,09		2.07.3.32.0.00.0 1.0001 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.246.902.177		1.369.315.613		1.497.849.720		1.632.810.532		1.774.519.385	
MENINGKATNYA PENEMPATA TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	24,33	24,33	26,77	1.246.902.177	26,78	1.369.315.613	32,41	1.497.849.720	43,13	1.632.810.532	63,14	1.774.519.385	2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					30.962.802.559		32.012.211.824		33.114.091.554		34.271.065.269		35.485.887.670	
MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	66,37	68,99	71,73	30.962.802.559	74,57	32.012.211.824	77,52	33.114.091.554	80,59	34.271.065.269	87,10	35.485.887.670	2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					19.787.995.019		20.609.982.418		21.473.069.185		22.379.310.290		23.330.863.451	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.152.900.894		11.616.189.062		12.102.641.640		12.613.416.846		13.149.730.812	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	11.152.900.894	72,00	11.616.189.062	73,50	12.102.641.640	75,00	12.613.416.846	76,50	13.149.730.812	2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82	89	96		103		110		117		124		2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					2.120.257.964		2.146.023.295		2.173.076.892		2.201.483.168		2.231.309.759	
MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase ARG (%)	10	30	35	2.120.257.964	40	2.146.023.295	42	2.173.076.892	45	2.201.483.168	45	2.231.309.759	2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1.227.632.974		1.278.628.481		1.332.173.763		1.388.396.309		1.447.429.983	
MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	1.227.632.974	100	1.278.628.481	100	1.332.173.763	100	1.388.396.309	100	1.447.429.983	2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					886.689.776		902.752.754		919.618.880		937.328.313		955.923.218	
MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Keluarga yang Menerima Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100	100	100	886.689.776	100	902.752.754	100	919.618.880	100	937.328.313	100	955.923.218	2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					352.051.475		356.290.663		360.741.810		365.415.515		370.322.904	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Anak yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	352.051.475	100	356.290.663	100	360.741.810	100	365.415.515	100	370.322.904	2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	90	100	100		100		100		100		2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					2.998.317.977		3.205.946.612		3.423.956.678		3.652.867.248		3.893.223.346	
TERJAMINNYA PEMENUHAN HAK SEMUA ANAK SECARA KOMPREHENSIF	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,75	62,31	63,3	2.998.317.977	64,3	3.205.946.612	65,29	3.423.956.678	66,29	3.652.867.248	67,28	3.893.223.346	2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.050.143.959		1.104.151.551		1.160.859.522		1.220.402.891		1.282.923.429	
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	90	100	100	1.050.143.959	100	1.104.151.551	100	1.160.859.522	100	1.220.402.891	100	1.282.923.429	2.08.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					30.639.476.159		31.912.230.840		33.248.623.254		34.651.835.288		36.125.207.923	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.665.736.881		10.859.550.196		11.063.054.177		11.276.733.357		11.501.096.496	
TERLAKSANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	63,65	64,00	66,72	10.665.736.881	70,04	10.859.550.196	73,36	11.063.054.177	76,68	11.276.733.357	80,00	11.501.096.496	2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	80,50		81,00		81,50		82,00		82,50		2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					9.704.458.344		10.356.816.849		11.041.793.279		11.761.018.530		12.516.205.044	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	105,96	78,00	81,00	9.704.458.344	84,12	10.356.816.849	87,36	11.041.793.279	90,72	11.761.018.530	94,22	12.516.205.044	2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Ketahanan Pangan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					8.060.054.293		8.394.866.539		8.746.419.397		9.115.549.898		9.503.136.924	
MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	86,80	89,00	91,20	8.060.054.293	93,40	8.394.866.539	95,60	8.746.419.397	97,80	9.115.549.898	100,00	9.503.136.924	2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					1.070.430.473		1.114.895.835		1.161.584.465		1.210.607.526		1.262.081.740	
MENINGKATNYA PENANGNAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	13,89	13,00	12,00	1.070.430.473	11,00	1.114.895.835	10,00	1.161.584.465	9,00	1.210.607.526	8,00	1.262.081.740	2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					1.138.796.168		1.186.101.421		1.235.771.936		1.287.925.977		1.342.687.719	
MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	96,67	97,00	97,50	1.138.796.168	98,00	1.186.101.421	98,50	1.235.771.936	99,00	1.287.925.977	99,50	1.342.687.719	2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					24.256.251.961		25.263.849.414		26.321.826.743		27.432.702.936		28.599.122.939	
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.618.262.709		12.810.103.960		13.011.537.275		13.223.042.256		13.445.122.486	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	81	82	83	10.703.295.449	84	10.815.589.533	85	10.933.498.322	86	11.057.302.551	87	11.187.296.991	2.10.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pertanahan
	Nilai SAKIP (Nilai)	66,7	76,7	81,3		87		92,2		97,4		97,4		2.10.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pertanahan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT SURVEY DAN PEMETAAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	81	82	83	1.914.967.260	84	1.994.514.427	85	2.078.038.953	86	2.165.739.705	87	2.257.825.495	2.10.1.03.0.00.0 1.0002 - UPT Survey dan Pemetaan
	Nilai SAKIP (Nilai)	66,7	76,7	81,3		87		92,2		97,4		97,4		2.10.1.03.0.00.0 1.0002 - UPT Survey dan Pemetaan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					1.469.166.979		1.023.269.335		2.024.243.788		2.530.606.228		2.026.341.297	
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat Penyelesaian Sengketa Tanah (%)	100	100	100	1.469.166.979	100	1.023.269.335	100	2.024.243.788	100	2.530.606.228	100	2.026.341.297	2.10.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.766.679.148		1.546.241.389		1.114.781.743		1.224.249.114		1.126.689.854	
MENINGKATNYA PENYELESAIAN GANTI RUGI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untk pembangunan (%)	65	50	80	1.766.679.148	90	1.546.241.389	95	1.114.781.743	100	1.224.249.114	100	1.126.689.854	2.10.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					1.357.460.555		1.488.656.035		2.009.119.544		2.025.266.963		2.553.167.246	
MENINGKATNYA TATA KELOLA TANAH ULAYAT	Presentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat (%)	100	100	100	1.357.460.555	100	1.488.656.035	100	2.009.119.544	100	2.025.266.963	100	2.553.167.246	2.10.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					1.022.341.285		1.372.309.360		1.137.900.605		2.404.271.412		2.421.460.759	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tingkat Pemanfaatan Tanah Kosong (%)	100	100	100	1.022.341.285	100	1.372.309.360	100	1.137.900.605	100	2.404.271.412	100	2.421.460.759	2.10.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					6.022.341.285		7.023.269.335		7.024.243.788		6.025.266.963		7.026.341.297	
MENINGKATNYA TERTIB PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	Presentase Administrasi Penggunaan dan Penatagunaan Tanah (%)	100	100	100	6.022.341.285	100	7.023.269.335	100	7.024.243.788	100	6.025.266.963	100	7.026.341.297	2.10.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pertanahan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					70.668.677.950		76.905.533.144		86.404.231.096		88.177.863.944		93.740.178.438	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.000.017.911		20.996.971.480		22.043.772.727		23.142.914.037		24.297.012.413	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	19.000.017.911	72,00	20.996.971.480	73,50	22.043.772.727	75,00	23.142.914.037	76,50	24.297.012.413	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	0	74	75		76		77		78		79		2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.437.237.762		1.496.940.189		1.559.627.738		1.625.449.663		1.694.562.685	
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	0	100	100	1.437.237.762	100	1.496.940.189	100	1.559.627.738	100	1.625.449.663	100	1.694.562.685	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.841.262.494		2.955.133.719		3.074.698.505		3.200.241.530		3.332.061.706	
MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan IKLH (%)	5,17	5,31	0,2	2.145.456.444	0,2	2.193.038.363	0,2	2.242.999.377	0,2	2.295.458.442	0,2	2.350.540.460	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UPT LABORATORIUM LH	Persentase Peningkatan IKLH (%)	5,17	5,31	0,2	695.806.050	0,2	762.095.356	0,2	831.699.128	0,2	904.783.088	0,2	981.521.246	2.11.0.00.0.00.0 1.0004 - UPT Laboratorium LH



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.062.499.266		2.812.810.085		3.600.636.446		4.427.854.124		4.796.432.687	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH yang Dikelola (%)	12,87	12,87	12,87	2.062.499.266	12,87	2.812.810.085	12,87	3.600.636.446	12,87	4.427.854.124	12,87	4.796.432.687	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					1.186.247.958		1.193.984.642		1.202.108.161		1.210.637.855		1.219.594.035	
MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Limbah B3 (%)	4,97	4,97	4	1.186.247.958	3,5	1.193.984.642	3	1.202.108.161	2	1.210.637.855	1	1.219.594.035	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					2.719.903.394		2.749.807.966		2.781.207.766		2.814.177.556		2.848.795.836	
MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUANLINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	0	50	50	2.719.903.394	52	2.749.807.966	53	2.781.207.766	54	2.814.177.556	54	2.848.795.836	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					1.161.767.535		1.168.487.311		1.175.543.074		1.182.951.626		1.190.730.606	
MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Penetapan Masyarakat Adat Menjadi Masyarakat Hukum Adat (%)	12,5	12,5	25	1.161.767.535	37,5	1.168.487.311	50	1.175.543.074	62,5	1.182.951.626	80	1.190.730.606	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.227.190.004		1.278.167.110		1.331.693.071		1.387.895.330		1.446.907.702	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Lembaga Masyarakat / Lembaga Pendidikan (%)	0	80	80	1.227.190.004	80,2	1.278.167.110	80,4	1.331.693.071	80,5	1.387.895.330	81	1.446.907.702	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					771.679.397		782.964.878		794.814.633		807.256.876		820.321.230	
MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	0	80	80	771.679.397	80,4	782.964.878	80,5	794.814.633	80,7	807.256.876	81	820.321.230	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					1.321.730.700		1.335.095.297		1.349.128.124		1.363.862.592		1.379.333.784	
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA / KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (%)	0	80	80	1.321.730.700	80	1.335.095.297	82	1.349.128.124	82,5	1.363.862.592	83	1.379.333.784	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					36.939.141.529		40.135.170.467		47.491.000.851		47.014.622.755		50.714.425.754	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	41,84	41,92	26,2	13.469.730.849	26,3	15.233.910.772	26,4	17.086.299.691	26,5	19.031.308.056	26,7	21.073.566.839	2.11.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN UPT KEBERSIHAN SANGATTA UTARA	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	41,84	41,92	26,2	11.873.027.760	26,3	12.615.467.990	26,4	13.395.030.231	26,5	14.213.570.585	26,7	15.073.037.956	2.11.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Kebersihan Sangatta Utara
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN UPT KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	41,84	41,92	26,2	7.766.448.400	26,3	8.296.762.850	26,4	8.853.593.022	26,5	9.438.264.703	26,7	10.052.169.968	2.11.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Kebersihan Sangatta Selatan
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN UPT TPA, PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	41,84	41,92	26,2	3.829.934.520	26,3	3.989.028.855	26,4	8.156.077.907	26,5	4.331.479.411	26,7	4.515.650.991	2.11.0.00.0.00.0 1.0003 - UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					22.341.284.701		23.269.334.987		24.243.787.789		25.266.963.231		26.341.297.444	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.929.942.108		14.508.587.739		15.116.165.651		15.754.122.459		16.423.977.107	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	13.929.942.108	72,00	14.508.587.739	73,50	15.116.165.651	75,00	15.754.122.459	76,50	16.423.977.107	2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					4.690.219.751		4.801.970.675		4.919.309.145		5.042.514.539		5.171.880.203	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk (Persentase)	73,46	62	55	4.690.219.751	70	4.801.970.675	80	4.919.309.145	99	5.042.514.539	99	5.171.880.203	2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.560.122.546		1.728.778.822		1.905.867.913		2.091.811.458		2.287.052.180	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	0	0	97	1.560.122.546	97,5	1.728.778.822	98	1.905.867.913	98,5	2.091.811.458	99	2.287.052.180	2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	100	62	63		63,50		64		64,50		65		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	0	0	65,5		70		70,5		80		80,5		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	0	0	63		65		70		80		85		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.567.442.533		1.632.553.627		1.700.920.276		1.772.705.258		1.848.079.488	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	30	30	20	1.567.442.533	18,5	1.632.553.627	16,5	1.700.920.276	14,5	1.772.705.258	13	1.848.079.488	2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					593.557.763		597.444.124		601.524.804		605.809.517		610.308.466	
MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1	1	1	593.557.763	1	597.444.124	1	601.524.804	1	605.809.517	1	610.308.466	2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					49.789.148.759		51.857.375.114		54.029.012.787		56.309.232.343		58.703.462.877	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.469.918.108		24.444.851.490		25.468.531.541		26.543.395.594		27.672.002.850	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	23.469.918.108	72,00	24.444.851.490	73,50	25.468.531.541	75,00	26.543.395.594	76,50	27.672.002.850	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	0	80	80		80		80		80		2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					1.032.394.643		1.075.280.008		1.120.309.641		1.167.590.756		1.217.235.926	
MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	40	52	57	1.032.394.643	62	1.075.280.008	80	1.120.309.641	85	1.167.590.756	100	1.217.235.926	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					817.750.511		851.719.623		887.387.190		924.838.136		964.161.629	
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang Telah Ditindaklanjuti (%)	0	28	50	817.750.511	67	851.719.623	83	887.387.190	100	924.838.136	100	964.161.629	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					19.176.011.121		19.972.576.890		20.808.970.948		21.687.184.708		22.609.309.157	
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	57	60	65	19.176.011.121	70	19.972.576.890	75	20.808.970.948	82	21.687.184.708	89	22.609.309.157	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					5.293.074.376		5.512.947.103		5.743.813.467		5.986.223.149		6.240.753.315	
MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	(Persentase LKD dan LAD aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%)	41	41,02	48,03	5.293.074.376	55,62	5.512.947.103	58	5.743.813.467	61,80	5.986.223.149	100	6.240.753.315	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					22.341.284.700		23.269.334.987		24.243.787.790		25.266.963.231		26.341.297.445	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.332.794.252		15.762.015.436		16.212.697.680		16.685.914.035		17.182.791.208	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	15.332.794.252	72,00	15.762.015.436	73,50	16.212.697.680	75,00	16.685.914.035	76,50	17.182.791.208	2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74	75	76		77		78		79		80		2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.173.760.734		1.222.518.404		1.273.713.958		1.327.469.289		1.383.912.387	
TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR) (Rata-Rata Jumlah Anak)	2,09	2,09	2,08	1.173.760.734	2,08	1.222.518.404	2,08	1.273.713.958	2,08	1.327.469.289	2,07	1.383.912.387	2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	18,3	17,1	16		15,1		14,2		13,5		12,8		2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.069.208.352		3.404.400.854		3.756.352.982		4.125.902.716		4.513.929.937	
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	"Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) " (%)	52,8	53,1	53,4	3.069.208.352	53,7	3.404.400.854	54	3.756.352.982	54,3	4.125.902.716	54,6	4.513.929.937	2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	16.3%	16.1%	15.9%		15.7%		15.5%		15.3%		15.3%		2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / IKK (%)	16,3	19,5	22,8		26		29,3		32,5		35,8		2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.765.521.362		2.880.400.293		3.001.023.170		3.127.677.191		3.260.663.913	
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	7,8	7,9	8,0	2.765.521.362	8,10	2.880.400.293	8,20	3.001.023.170	8,30	3.127.677.191	8,40	3.260.663.913	2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					83.833.395.740		145.831.206.946		70.823.908.714		106.121.245.569		110.633.449.267	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.536.956.781		19.763.913.135		21.052.217.307		33.404.936.688		34.825.292.037	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	14.536.956.781	72,00	19.763.913.135	73,50	21.052.217.307	75,00	33.404.936.688	76,50	34.825.292.037	2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perhubungan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)		78	80		82		83		84		85		2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					6.827.707.094		12.942.122.026		29.112.257.705		45.807.360.512		47.117.268.677	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT DINAS PERHUBUNGAN	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	81,04	81,04	82,00	4.912.739.834	84,00	10.947.607.599	86,00	27.034.218.752	88,00	43.641.620.807	92,00	44.859.443.182	2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perhubungan
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Uji Berkala Kendaraan Bermotor (%)	24,20	24,70	25,20	1.914.967.260	25,70	1.994.514.427	26,20	2.078.038.953	26,70	2.165.739.705	27,20	2.257.825.495	2.15.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Pengujian Kendaraan Bermotor



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					62.468.731.865		112.901.579.264		20.659.433.702		26.908.948.369		28.690.888.553	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN RANSPORTASI LAUT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	67,74	73,66	79,57	62.468.731.865	84,95	112.901.579.264	90,32	20.659.433.702	95,16	26.908.948.369	100	28.690.888.553	2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					0		223.592.521		0		0		0	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERLINTASAN KERETA API	Cakupan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Perkeretaapian (%)				0	100	223.592.521		0		0		0	2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					118.837.201.375		126.898.282.296		132.212.417.263		137.792.258.978		143.651.092.779	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.222.661.858		16.896.546.382		17.604.125.132		18.347.082.819		19.127.188.391	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	13.222.661.858	72,00	16.896.546.382	73,50	17.604.125.132	75,00	18.347.082.819	76,50	19.127.188.391	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	81	82		83		84		85		86		2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					18.626.244.771		19.399.973.410		20.212.388.481		21.065.424.306		21.961.111.922	
MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	97,76	98	98,25	18.626.244.771	98,5	19.399.973.410	98,75	20.212.388.481	99	21.065.424.306	99	21.961.111.922	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					86.988.294.746		90.601.762.504		94.395.903.650		98.379.751.853		102.562.792.466	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi (%)	75	80	80	86.988.294.746	80	90.601.762.504	85	94.395.903.650	90	98.379.751.853	80	102.562.792.466	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur (%)	75	80	84		89		93		96		100		2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					25.702.962.280		27.364.577.109		29.538.029.448		31.190.144.455		32.348.870.005	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.862.647.939		11.230.799.685		11.617.359.018		12.023.246.318		12.449.427.983	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	10.862.647.939	72,00	11.230.799.685	73,50	11.617.359.018	75,00	12.023.246.318	76,50	12.449.427.983	2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	75	76		77		78		79		79		2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					2.203.485.679		2.378.097.217		2.561.439.333		2.753.948.554		2.956.083.236	
MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	23,94	17,22	17,88	2.203.485.679	18,91	2.378.097.217	20,09	2.561.439.333	21,27	2.753.948.554	22,62	2.956.083.236	2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					218.094.076		422.999.669		428.150.541		433.558.957		439.237.794	
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	43,01	43,66	44,30	218.094.076	44,93	422.999.669	45,54	428.150.541	46,13	433.558.957	46,71	439.237.794	2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					250.399.079		756.646.612		763.206.521		1.170.094.426		1.277.326.726	
MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	15,44	4,37	10,22	250.399.079	9,97	756.646.612	9,72	763.206.521	9,49	1.170.094.426	9,27	1.277.326.726	2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1.259.528.412		1.380.237.050		1.670.737.888		1.995.753.820		2.081.025.340	
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	17,95	45,63	46,51	1.259.528.412	47,67	1.380.237.050	48,78	1.670.737.888	50,16	1.995.753.820	51,47	2.081.025.340	2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					5.432.631.140		5.658.301.013		5.895.254.381		6.144.055.416		6.405.296.503	
MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	6,79	12,92	13,24	5.432.631.140	11,81	5.658.301.013	11,90	5.895.254.381	13,62	6.144.055.416	15,27	6.405.296.503	2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.476.175.955		5.537.495.863		6.601.881.766		6.669.486.964		6.740.472.423	
MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,92	0,93	0,95	5.476.175.955	0,97	5.537.495.863	1	6.601.881.766	1,02	6.669.486.964	1,04	6.740.472.423	2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					26.838.733.738		26.173.412.235		28.752.689.600		32.715.686.328		34.565.065.274	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.925.352.996		14.483.038.146		15.068.607.553		17.683.455.431		18.329.045.703	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	13.925.352.996	72,00	14.483.038.146	73,50	15.068.607.553	75,00	17.683.455.431	76,50	18.329.045.703	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	80,1	80,2		80,2		80,3		80,4		80,5		2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					3.231.447.319		3.365.680.675		3.506.625.698		3.654.617.973		3.810.009.861	
MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	105,03	100	100	3.231.447.319	100	3.365.680.675	100	3.506.625.698	100	3.654.617.973	100	3.810.009.861	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					5.847.983.921		4.219.020.885		5.691.474.642		6.702.306.580		7.064.450.601	
MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Promosi yang Diikuti (%)	100	100	100	5.847.983.921	100	4.219.020.885	100	5.691.474.642	100	6.702.306.580	100	7.064.450.601	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.318.517.817		1.373.288.653		1.430.798.031		1.491.182.878		1.554.586.967	
MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	1.318.517.817	100	1.373.288.653	100	1.430.798.031	100	1.491.182.878	100	1.554.586.967	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					2.176.050.153		2.287.212.477		2.403.932.916		2.526.489.378		3.142.635.559	
TERKENDALINYA PERLAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	2.176.050.153	100	2.287.212.477	100	2.403.932.916	100	2.526.489.378	100	3.142.635.559	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					339.381.532		445.171.399		651.250.760		657.634.088		664.336.583	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	339.381.532	100	445.171.399	100	651.250.760	100	657.634.088	100	664.336.583	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					62.751.911.209		66.734.401.741		70.916.016.797		80.306.712.606		90.045.745.488	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.741.670.040		18.935.590.421		20.189.206.820		26.505.504.041		27.887.616.122	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	13.188.380.360	72,00	14.276.237.851	73,50	15.418.488.216	75,00	19.617.851.100	76,50	20.877.182.128	2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74	77	80		83		86		89		92		2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPTD SARANA PRASARANA OLAHRAGA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	4.553.289.680	72,00	4.659.352.570	73,50	4.770.718.604	75,00	6.887.652.941	76,50	7.010.433.994	2.19.0.00.0.00.0 1.0001 - UPTD Sarana Prasarana Olahraga
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74	77	80		83		86		89		92		2.19.0.00.0.00.0 1.0001 - UPTD Sarana Prasarana Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					5.754.105.627		5.993.129.455		6.244.104.474		6.507.628.243		6.784.328.202	
MENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	65,97	67,36	68,75	5.754.105.627	69,44	5.993.129.455	70,13	6.244.104.474	70,83	6.507.628.243	72,22	6.784.328.202	2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training/ dan Memperoleh Sertifikat (%)	0	4,87	4,96		5,05		5,14		5,22		5,27		2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					36.447.593.309		38.465.076.616		40.583.434.088		42.807.709.433		50.272.000.827	
MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	0	45	58,33	36.447.593.309	61,66	38.465.076.616	65	40.583.434.088	70	42.807.709.433	75	50.272.000.827	2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kab/ Kota yang Masuk Pelatda (%)	0	13,40	13,60		14,00		15,00		15,60		18,60		2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					2.808.542.233		3.340.605.249		3.899.271.415		4.485.870.889		5.101.800.337	
MENINGKATNYA KULITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%)	32,98	32,98	34,02	2.808.542.233	35,05	3.340.605.249	36,08	3.899.271.415	37,11	4.485.870.889	39,17	5.101.800.337	2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					1.514.247.472		1.577.148.860		1.643.195.316		1.712.544.096		1.785.360.314	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					1.514.247.472		1.577.148.860		1.643.195.316		1.712.544.096		1.785.360.314	
TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI DAN STANDARISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	Persentase Publikasi Data Sektoral dalam Portal Satu Data (%)	0	31	45	1.514.247.472	59	1.577.148.860	72	1.643.195.316	86	1.712.544.096	100	1.785.360.314	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.121.423.053		1.168.006.631		1.216.919.388		1.268.277.783		1.322.204.098	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.121.423.053		1.168.006.631		1.216.919.388		1.268.277.783		1.322.204.098	
MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks KAMI (Indeks)	0	1	2	1.121.423.053	2	1.168.006.631	3	1.216.919.388	3	1.268.277.783	4	1.322.204.098	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.012.246.994		3.137.374.835		3.268.759.067		3.406.712.509		3.551.563.624	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.168.955.811		1.217.513.886		1.268.499.865		1.322.035.142		1.378.247.184	
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	15	25	30	1.168.955.811	35	1.217.513.886	40	1.268.499.865	45	1.322.035.142	50	1.378.247.184	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					380.195.824		395.989.045		412.571.927		429.983.953		448.266.580	
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	15	20	40	380.195.824	60	395.989.045	80	412.571.927	100	429.983.953	100	448.266.580	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					119.875.367		124.854.954		130.083.521		135.573.515		141.338.009	
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	12	14	15	119.875.367	18	124.854.954	19	130.083.521	20	135.573.515	20	141.338.009	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					271.141.173		282.404.297		294.230.576		306.648.169		319.686.642	
MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0,07	0,09	0,11	271.141.173	0,13	282.404.297	0,15	294.230.576	0,17	306.648.169	2	319.686.642	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0,07	0,09	0,11		0,13		0,15		0,17		2		1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					1.072.078.819		1.116.612.653		1.163.373.178		1.212.471.730		1.264.025.209	
MENINGKATNYA TATA KELOLA MUSEUM	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	11	20	25	1.072.078.819	25	1.116.612.653	28	1.163.373.178	29	1.212.471.730	29	1.264.025.209	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					33.214.070.902		34.820.174.699		36.508.739.214		38.335.253.873		39.988.085.874	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.151.153.895		30.227.572.426		31.359.967.413		32.602.504.067		33.744.194.874	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	28.351.153.895	72,00	29.314.932.742	73,50	30.329.056.061	75,00	31.447.407.463	76,50	32.574.230.150	2.23.2.24.0.00.0 2.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	76	77		78		79		80		81		2.23.2.24.0.00.0 2.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA BENGKAL	Nilai SAKIP (Nilai)	72,55	73	74	200.000.000	75	228.159.921	76	257.727.838	77	288.774.151	78	292.491.181	2.23.2.24.0.00.0 2.0001 - UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	76	77		78		79		81		82		2.23.2.24.0.00.0 2.0001 - UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN SANGKULIRANG	Nilai SAKIP (Nilai)	72,55	73	74	200.000.000	75	228.159.921	76	257.727.838	77	288.774.151	78	292.491.181	2.23.2.24.0.00.0 2.0002 - UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	76	77		78		79		81		82		2.23.2.24.0.00.0 2.0002 - UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATA SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	72,55	73	74	200.000.000	75	228.159.921	76	257.727.838	77	288.774.151	78	292.491.181	2.23.2.24.0.00.0 2.0003 - UPT Perpustakaan Kecamata Sangatta Utara



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	76	77		78		79		81		82		2.23.2.24.0.00.0 2.0003 - UPT Perpustakaan Kecamatan Sangatta Utara
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	72,55	73	74	200.000.000	75	228.159.921	76	257.727.838	77	288.774.151	78	292.491.181	2.23.2.24.0.00.0 2.0004 - UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	76	77		78		79		81		82		2.23.2.24.0.00.0 2.0004 - UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					4.062.917.007		4.592.602.273		5.148.771.801		5.732.749.806		6.243.891.000	
MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	67,59	67,91	68,23	3.356.337.647	68,55	3.786.536.817	68,87	4.238.245.945	69,19	4.712.540.530	69,59	5.210.549.844	2.23.2.24.0.00.0 2.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat (%)	0,78	1,11	1,45		1,89		2,23		2,56		2,67		2.23.2.24.0.00.0 2.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA BENGKAL	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	67,59	67,91	68,23	176.644.840	68,55	201.516.364	68,87	227.631.464	69,19	255.052.319	69,59	258.335.289	2.23.2.24.0.00.0 2.0001 - UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal
MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN SANGKULIRANG	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	67,59	67,91	68,23	176.644.840	68,55	201.516.364	68,87	227.631.464	69,19	255.052.319	69,59	258.335.289	2.23.2.24.0.00.0 2.0002 - UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN SANGATTA UTARA	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	67,59	67,91	68,23	176.644.840	68,55	201.516.364	68,87	227.631.464	69,19	255.052.319	69,59	258.335.289	2.23.2.24.0.00.0 2.0003 - UPT Perpustakaan Kecamatan Sangatta Utara
MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA WAHAU	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	67,59	67,91	68,23	176.644.840	68,55	201.516.364	68,87	227.631.464	69,19	255.052.319	69,59	258.335.289	2.23.2.24.0.00.0 2.0004 - UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					2.155.715.992		2.274.341.580		2.398.898.449		2.629.683.160		2.867.007.107	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.773.447.894		1.876.194.180		1.984.077.781		2.097.355.561		2.216.297.230	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	24,07	29,63	1.773.447.894	37,04	1.876.194.180	44,44	1.984.077.781	50	2.097.355.561	55	2.216.297.230	2.23.2.24.0.00.0 2.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Minimal B (Rasio)	0,6	0,11	0,19		0,28		0,33		0,37		0,40		2.23.2.24.0.00.0 2.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					382.268.098		398.147.400		414.820.668		532.327.599		650.709.877	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SESUAI NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	7,41	25,93	37,04	382.268.098	44,44	398.147.400	62,96	414.820.668	81,48	532.327.599	100	650.709.877	2.23.2.24.0.00.0 2.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					68.223.284.018		70.648.156.547		74.999.956.499		80.610.812.623		86.079.401.804	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.415.223.877		26.524.966.289		27.690.195.824		28.863.686.834		30.198.352.395	



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78	79	80	24.120.893.725	81	25.122.868.439	82	26.174.941.889	83	27.279.619.012	84	28.439.529.990	3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perikanan
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perikanan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78	80	80	447.750.555	81	466.349.979	82	485.879.375	83	506.385.240	84	527.916.398	3.25.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Balai Benih Ikan Kaliorang
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	70,00	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		3.25.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Balai Benih Ikan Kaliorang
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78	80	80	269.934.757	81	306.071.586	82	344.015.258	83	433.856.112	84	525.689.010	3.25.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	70	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		3.25.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT BALAI BENIH UDANG TELUK LOMBOK	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78	80	80	576.644.840	81	629.676.285	82	685.359.302	83	643.826.470	84	705.216.997	3.25.0.00.0.00.0 1.0003 - UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	70	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		3.25.0.00.0.00.0 1.0003 - UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					16.068.207.598		16.735.676.138		17.436.518.104		18.172.402.169		18.945.080.439	
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.726,62	8.797,94	8.799,28	13.514.917.918	8.802,37	14.076.323.568	8.804,85	14.665.799.500	8.806,40	15.284.749.229	8.809,55	15.934.646.445	3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perikanan
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.726,62	8.797,94	8.799,28	1.276.644.840	8.802,37	1.329.676.285	8.804,85	1.385.359.302	8.806,40	1.443.826.470	8.809,55	1.505.216.997	3.25.0.00.0.00.0 1.0004 - UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.726,62	8.797,94	8.799,28	1.276.644.840	8.802,37	1.329.676.285	8.804,85	1.385.359.302	8.806,40	1.443.826.470	8.809,55	1.505.216.997	3.25.0.00.0.00.0 1.0005 - UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					19.377.355.770		20.124.129.755		20.908.242.437		22.931.560.755		25.796.044.988	
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.255,48	1.117,2	1.138,63	17.148.461.485	1.153,44	17.860.803.449	1.171,6	18.608.762.510	1.186,35	20.394.119.525	1.203,28	23.218.744.390	3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perikanan
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.255,48	1.117,2	1.138,63	828.894.285	1.153,44	863.326.306	1.171,6	899.479.927	1.186,35	937.441.230	1.203,28	977.300.598	3.25.0.00.0.00.0 1.0001 - UPT Balai Benih Ikan Kaliorang
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.255,48	1.117,2	1.138,63	700.000.000	1.153,44	700.000.000	1.171,6	700.000.000	1.186,35	800.000.000	1.203,28	800.000.000	3.25.0.00.0.00.0 1.0002 - UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA UPT BALAI BENIH UDANG TELUK LOMBOK	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.255,48	1.117,2	1.138,63	700.000.000	1.153,44	700.000.000	1.171,6	700.000.000	1.186,35	800.000.000	1.203,28	800.000.000	3.25.0.00.0.00.0 1.0003 - UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.612.498.855		2.507.596.983		3.022.781.025		3.588.616.874		3.756.112.697	
MENINGKATNYA KELESTARIAN LAUT DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang Diawasi (%)	0	13,33	48,65	2.612.498.855	51,35	2.507.596.983	55,41	3.022.781.025	62,16	3.588.616.874	71,62	3.756.112.697	3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					4.749.997.918		4.755.787.382		5.942.219.109		7.054.545.991		7.383.811.285	
MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	41,29	42,39	43,49	4.749.997.918	44,59	4.755.787.382	45,69	5.942.219.109	46,79	7.054.545.991	47,89	7.383.811.285	3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Perikanan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					38.746.055.521		40.230.935.979		41.790.060.463		45.427.141.168		47.146.075.912	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.416.645.804		18.140.128.064		18.899.784.437		19.697.423.628		20.534.944.779	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	72	73	74	17.416.645.804	75	18.140.128.064	76	18.899.784.437	77	19.697.423.628	78	20.534.944.779	3.26.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pariwisata
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		3.26.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					7.635.662.117		7.952.845.238		8.285.887.516		8.635.581.907		9.002.761.019	
MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	0	1,07	1,06	7.635.662.117	1,05	7.952.845.238	1,03	8.285.887.516	0,68	8.635.581.907	1,02	9.002.761.019	3.26.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pariwisata
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)	0	1,48	1,21		1,20		1,19		1,17		1,16		3.26.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					3.580.006.831		3.728.719.244		3.884.867.278		4.048.822.714		4.220.975.922	
MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata (%)	25,00	20,00	16,67	3.580.006.831	14,29	3.728.719.244	12,50	3.884.867.278	11,11	4.048.822.714	9,52	4.220.975.922	3.26.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					5.465.884.945		5.692.936.171		5.931.339.959		6.181.663.936		6.444.504.112	
MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,08	0,11	0,14	5.465.884.945	0,17	5.692.936.171	0,19	5.931.339.959	0,22	6.181.663.936	0,25	6.444.504.112	3.26.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pariwisata



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					4.647.855.824		4.716.307.262		4.788.181.273		6.863.648.983		6.942.890.080	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih (%)	28,57	33,61	37,82	4.647.855.824	46,22	4.716.307.262	50,42	4.788.181.273	58,82	6.863.648.983	58,82	6.942.890.080	3.26.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					180.268.477.720		188.511.784.045		195.945.466.847		206.750.833.789		214.946.469.078	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					98.783.754.431		103.642.209.713		107.521.798.917		114.595.367.582		118.872.614.679	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN	Nilai SAKIP (Nilai)	65,5	65,5	65,5	12.372.384.357	66,00	13.641.337.159	66,5	13.751.948.760	67,00	16.868.090.941	67,50	16.990.040.231	3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77	80	80		81		82		83		84		3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	86.411.370.074	72,00	90.000.872.554	73,50	93.769.850.157	75,00	97.727.276.641	76,50	101.882.574.448	3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	76	80		82		84		86		86		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					48.484.336.595		50.498.361.442		52.613.087.532		54.833.549.926		57.165.035.440	
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)	0	40	45	13.001.914.630	51	13.542.010.276	59	14.109.110.705	69	14.704.566.156	79	15.329.794.379	3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Jumlah Produksi Padi (Ton)	24.278	25.920	26.186	35.482.421.965	26.453	36.956.351.166	26.720	38.503.976.827	26.986	40.128.983.770	27.245	41.835.241.061	3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	1.499	1.500	1.550		1.600		1.650		1.700		1.850		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Produksi Pisang (Ton)	88.358	91.218	97.417		102.288		112.516		123.768		123.768		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Produksi Nanas (Ton)	0	17.549	18.426		19.347		20.315		21.331		21.331		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	762	409	437		450		480		495		495		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	2.867	3.250	3.325		3.450		3.580		3.725		3.880		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					17.596.931.557		18.327.902.832		19.095.422.672		19.901.318.504		20.747.509.128	
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian (%)	0	20	20	3.127.480.564	26	3.257.395.171	34	3.393.805.509	44	3.537.036.364	54	3.687.428.762	3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	0	65,33	65,33	14.469.450.993	63,73	15.070.507.661	62,21	15.701.617.163	60,77	16.364.282.140	60,77	17.060.080.366	3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.037.739.686		1.080.847.082		1.126.109.848		1.173.635.753		1.223.537.952	
MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYRAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	100	100	1.037.739.686	100	1.080.847.082	100	1.126.109.848	100	1.173.635.753	100	1.223.537.952	3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					3.482.123.959		3.626.770.348		3.778.649.056		3.938.121.699		4.105.567.975	
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	0	60	60	1.396.586.791	66	1.454.600.589	74	1.515.515.077	84	1.579.475.289	94	1.646.633.512	3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan
	Persentase peningkatan luas ANKT (%)			0,08		0,09		0,09		0,1		0,1		3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan (%)	0	85	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	0	55,33	2.085.537.168	57,73	2.172.169.759	60,00	2.263.133.979	66,67	2.358.646.410	66,67	2.458.934.463	3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					454.303.513		473.175.145		492.990.359		513.796.333		535.642.606	
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi (%)	0	20	20	454.303.513	26	473.175.145	34	492.990.359	44	513.796.333	54	535.642.606	3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					10.429.287.979		10.862.517.483		11.317.408.463		11.795.043.992		12.296.561.298	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0	0,17	0,17	6.293.263.365	6	6.554.683.643	14	6.829.174.936	24	7.117.390.793	34	7.420.017.444	3.27.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Perkebunan
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	21,23	19,34	4.136.024.614	25,47	4.307.833.840	31,13	4.488.233.527	39,15	4.677.653.199	53,30	4.876.543.854	3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					21.259.807.039		23.112.331.686		24.131.628.210		25.488.036.205		26.965.249.961	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					817.504.708		834.847.728		953.057.900		972.178.581		1.092.255.295	
MENINGKATNYA KEMUDAHAN PROSES PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BERUSAHA	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	100	100	817.504.708	100	834.847.728	100	953.057.900	100	972.178.581	100	1.092.255.295	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					9.632.417.078		11.143.178.408		11.604.477.807		12.218.842.174		12.688.924.760	
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33	33	33	5.164.160.138	35	6.489.311.411	40	6.755.720.249	45	7.165.449.528	50	7.420.665.271	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR INDUK SANGATTA UTARA	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33	33	33	1.595.806.050	35	1.662.095.356	40	1.731.699.128	45	1.804.783.088	50	1.881.521.246	3.31.3.30.0.00.0 1.0001 - UPT Pasar Induk Sangatta Utara
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR SANGKULIRANG	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33	33	33	1.276.644.840	35	1.329.676.285	40	1.385.359.302	45	1.443.826.470	50	1.505.216.997	3.31.3.30.0.00.0 1.0002 - UPT Pasar Sangkulirang
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR MUARA WAHAU	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33	33	33	1.595.806.050	35	1.662.095.356	40	1.731.699.128	45	1.804.783.088	50	1.881.521.246	3.31.3.30.0.00.0 1.0003 - UPT Pasar Muara Wahau
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					7.371.579.805		7.553.173.923		7.743.847.747		8.144.055.262		8.354.273.153	
MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	1,08	1,08	1,08	7.371.579.805	1,06	7.553.173.923	1,05	7.743.847.747	1,05	8.144.055.262	1,03	8.354.273.153	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.576.711.655		1.642.207.785		1.710.978.723		1.783.188.207		1.859.008.165	
MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR	Persentase Pelaku usaha yang Melakukan Ekspor (%)	0	1	1,5	1.576.711.655	1,7	1.642.207.785	2,0	1.710.978.723	2,5	1.783.188.207	2,5	1.859.008.165	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.004.763.903		1.046.501.495		1.090.325.967		1.136.341.662		1.684.658.142	
MENINGKATNYA TERTIB NIAGA DAN MUTU PRODUK	Persentase alat- ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	100	100	1.004.763.903	100	1.046.501.495	100	1.090.325.967	100	1.136.341.662	100	1.684.658.142	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					856.829.890		892.422.347		1.028.940.066		1.233.430.319		1.286.130.446	
MENINGKATNYA PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	10	12	856.829.890	15	892.422.347	18	1.028.940.066	20	1.233.430.319	20	1.286.130.446	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					21.377.860.583		21.642.795.005		22.020.976.148		22.513.066.348		23.819.761.059	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.336.316.458		18.516.445.747		18.705.581.501		18.904.174.042		20.112.696.211	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	0	82	82	18.336.316.458	84	18.516.445.747	84	18.705.581.501	85	18.904.174.042	85	20.112.696.211	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	60,55	60,55	60,55		61,55		63,55		65,55		69,55		3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.750.128.186		1.822.827.988		1.899.162.779		1.979.314.311		2.063.473.419	
MENINGKATNYA REALISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	97,2	97,01	97,11	1.750.128.186	97,17	1.822.827.988	97,20	1.899.162.779	97,21	1.979.314.311	97,50	2.063.473.419	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					583.308.121		586.768.716		690.402.340		694.217.645		698.223.716	
MENINGKATNYA KUALITAS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	0	0	100	583.308.121	100	586.768.716	100	690.402.340	100	694.217.645	100	698.223.716	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					708.107.818		716.752.554		725.829.528		935.360.350		945.367.713	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI INDUSTRI	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	6,25	6,25	6,50	708.107.818	6,75	716.752.554	7	725.829.528	7,25	935.360.350	7,25	945.367.713	3.31.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					3.360.684.287		3.641.521.092		3.936.399.737		4.246.022.313		4.571.126.018	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					646.857.657		715.267.632		787.098.106		862.520.103		941.713.200	
MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	13,33	13,33	20,00	646.857.657	26,67	715.267.632	33,33	787.098.106	46,67	862.520.103	73,33	941.713.200	2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					2.713.826.630		2.926.253.460		3.149.301.631		3.383.502.210		3.629.412.818	
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	2,01	3,01	4,01	2.713.826.630	5,01	2.926.253.460	6,02	3.149.301.631	7,02	3.383.502.210	8,02	3.629.412.818	2.07.3.32.0.00.0 1.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					356.394.761.599		364.122.308.397		372.486.232.536		387.518.352.880		393.288.352.376	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					215.461.015.338		219.411.201.501		223.808.896.973		224.676.477.218		226.073.709.610	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	215.461.015.338	72,00	219.411.201.501	73,50	223.808.896.973	75,00	224.676.477.218	76,50	226.073.709.610	4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78,15	78,35	78,75		79,10		79,50		79,70		79,70		4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					128.347.281.814		131.601.804.478		135.019.053.276		148.607.164.513		152.374.681.312	
MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	-	-	71,5	128.347.281.814	73	131.601.804.478	74,5	135.019.053.276	76	148.607.164.513	77,5	152.374.681.312	4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Ketercapaian Kinerja SPM (%)	91,80	92,00	93,00		94,00		95,00		97,00		97,00		4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)		70,00	75,00		80,00		85,00		85,00		90,00		4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
	Presentase Penerima Beasiswa (%)	91,97	75,57	76,00		77,57		78,00		79,57		79,57		4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	79	79	80		81		82		83		85		4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					12.586.464.447		13.109.302.418		13.658.282.287		14.234.711.149		14.839.961.454	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	7.169	7.180	7.190	12.586.464.447	7.200	13.109.302.418	7.210	13.658.282.287	72,30	14.234.711.149	72,50	14.839.961.454	4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
	Presentase Layanan Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	84,50	84,50	90,42		96,74		100,00		100,00		100,00		4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian (%)	75,00	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah
	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5	5	5		5		5		5		5		4.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat Daerah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					86.282.413.540		107.566.639.772		124.165.077.314		161.093.436.734		168.368.214.126	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					70.646.019.937		85.242.222.527		100.068.235.246		125.135.548.601		130.456.227.624	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH					70.646.019.937		85.242.222.527		100.068.235.246		125.135.548.601		130.456.227.624	4.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					15.636.393.603		22.324.417.245		24.096.842.068		35.957.888.133		37.911.986.502	
MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	70	75	80	15.636.393.603	85	22.324.417.245	90	24.096.842.068	95	35.957.888.133	100	37.911.986.502	4.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					37.661.022.779		39.225.450.407		40.868.099.415		42.592.880.875		44.403.901.407	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.089.449.935		21.965.499.381		22.885.351.298		23.851.195.812		24.865.332.551	
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74,00	75,00	76,00	21.089.449.935	77,00	21.965.499.381	78,00	22.885.351.298	79,00	23.851.195.812	80,00	24.865.332.551	5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					6.892.176.798		7.178.475.762		7.479.089.674		7.794.734.282		8.126.161.120	
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	93,47	94,00	94,50	6.892.176.798	95,00	7.178.475.762	95,50	7.479.089.674	96,00	7.794.734.282	96,50	8.126.161.120	5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	99,32	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					9.679.396.046		10.081.475.264		10.503.658.443		10.946.950.781		11.412.407.736	
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	9.679.396.046	100	10.081.475.264	100	10.503.658.443	100	10.946.950.781	100	11.412.407.736	5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	100	100	100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.02 - KEUANGAN					1.284.304.709.040		1.337.654.342.699		1.393.671.458.044		1.552.489.429.153		1.714.248.298.818	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					187.183.723.704		192.466.897.563		198.014.230.117		203.838.929.298		209.954.863.436	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75	76	77	145.870.264.255	78	149.437.289.360	79	153.182.665.721	80	157.115.310.900	81	161.244.588.337	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	41.313.459.449	72,00	43.029.608.203	73,50	44.831.564.396	75,00	46.723.618.398	76,50	48.710.275.099	5.02.0.00.0.00.0 3.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76	77	78		79		80		81		82		5.02.0.00.0.00.0 3.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1.058.308.815.110		1.104.763.028.962		1.153.539.953.507		1.304.755.724.278		1.458.532.283.589	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN, PENBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Persentase Realisasi SP2D Terhadap Total SPD yang Diterbitkan (%)		80	83	1.058.308.815.110	90	1.104.763.028.962	93	1.153.539.953.507	97	1.304.755.724.278	100	1.458.532.283.589	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Presentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	11,98	22,03	30		30		30		30		30		5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	75,59	79,09	84,37		90,20		91,37		94,87		96,59		5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40	40	40		40		40		40		40		5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Presentase Penurunan SILPA (%)	-93,57	-94,07	-94,57		-95,07		-95,57		-96,07		-96,57		5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					30.336.480.915		31.596.649.263		32.919.826.029		34.309.161.632		35.767.964.016	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	30,47	40,47	50,47	30.336.480.915	60,47	31.596.649.263	70,47	32.919.826.029	80,47	34.309.161.632	90,47	35.767.964.016	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					8.475.689.311		8.827.766.911		9.197.448.391		9.585.613.945		9.993.187.777	
MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	Persentase capaian pajak daerah terhadap target yg ditetapkan (%)	100	100	100	8.475.689.311	100	8.827.766.911	100	9.197.448.391	100	9.585.613.945	100	9.993.187.777	5.02.0.00.0.00.0 3.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata (%)	60,2	63,5	67		70		73		77		79		5.02.0.00.0.00.0 3.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase realisasi penagihan terhadap piutang pajak (%)	64,6	65	62,70		64		66		67,2		68,4		5.02.0.00.0.00.0 3.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan ketetapan (%)	29,2	30,1	30,8		31,4		32,1		32,6		33,2		5.02.0.00.0.00.0 3.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					29.625.733.204		30.868.839.216		32.174.100.526		33.744.624.903		35.183.675.500	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.416.272.144		23.388.977.089		24.410.317.280		25.482.724.481		26.608.752.043	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	22.416.272.144	72,00	23.388.977.089	73,50	24.410.317.280	75,00	25.482.724.481	76,50	26.608.752.043	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80	81	82		83		84		85		86		5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					7.209.461.060		7.479.862.127		7.763.783.246		8.261.900.422		8.574.923.457	
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4,63	15	15	2.900.000.000	15	2.900.000.000	15	3.050.000.000	15	3.300.000.000	15	3.300.000.000	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	0	100	2.250.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	100	2.550.000.000	100	2.900.000.000	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
MENINGKATNYA KUALITAS PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bermilai Baik (Persentase)		98,37	99,88	1.659.461.060	99,88	1.729.862.127	99,88	1.763.783.246	99,88	1.811.900.422	99,88	1.774.923.457	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGEMBANGAN KARIR ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	86	96	96	400.000.000	96	450.000.000	96	550.000.000	96	600.000.000	96	600.000.000	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.352.065.375		3.408.229.767		3.717.202.378		5.429.123.620		6.094.140.923	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.352.065.375		3.408.229.767		3.717.202.378		5.429.123.620		6.094.140.923	
MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, KADER, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	38,94	56,76	66,02	3.352.065.375	71,84	3.408.229.767	75,73	3.717.202.378	85,44	5.429.123.620	93,20	6.094.140.923	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					13.043.093.239		15.626.439.134		16.238.952.324		16.882.091.173		17.557.386.965	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.533.478.699		9.929.496.554		10.345.315.302		10.781.924.987		11.240.365.157	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	54,7	62,2	62,7	9.533.478.699	63,7	9.929.496.554	64,5	10.345.315.302	65,00	10.781.924.987	65,50	11.240.365.157	5.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	81	82	82,2		83		83,5		84		84,5		5.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.944.194.189		3.962.645.883		3.982.020.162		3.502.363.154		3.523.723.296	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN, SERTA PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	14,47	14,81	29,63	1.944.194.189	44,44	3.962.645.883	59,26	3.982.020.162	74,07	3.502.363.154	88,89	3.523.723.296	5.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.565.420.351		1.734.296.697		1.911.616.860		2.597.803.032		2.793.298.512	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)		14,29	28,57	1.565.420.351	42,86	1.734.296.697	57,14	1.911.616.860	71,43	2.597.803.032	85,71	2.793.298.512	5.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					45.565.793.601		46.887.051.400		49.114.372.089		59.753.058.813		62.208.679.873	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.576.370.023		23.450.352.545		24.893.034.193		34.407.849.924		35.998.406.441	
TERWUJUDNYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)		80	80	22.576.370.023	80	23.450.352.545	80	24.893.034.193	80	34.407.849.924	80	35.998.406.441	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Inspektorat



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					16.529.499.243		16.708.431.194		17.211.309.744		18.039.332.220		18.593.755.821	
MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAUPUN PROSES DAN KEWENANGAN	Tindakanjutt Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	86,20	81,68	83	16.529.499.243	85	16.708.431.194	87	17.211.309.744	89	18.039.332.220	90	18.593.755.821	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					6.459.924.335		6.728.267.661		7.010.028.152		7.305.876.669		7.616.517.611	
MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3 (%)		50	55	6.459.924.335	60	6.728.267.661	65	7.010.028.152	70	7.305.876.669	75	7.616.517.611	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Inspektorat
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3	3	3		3		3		3		4		6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Inspektorat
	Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	3	3	3		3		3		3		4		6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					198.624.934.122		209.677.136.074		218.151.577.316		240.193.755.857		252.081.620.560	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					114.723.699.769		123.411.328.690		127.716.589.057		138.233.362.439		145.545.974.494	
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA SELATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	10.045.420.150	72,00	13.462.703.900	73,50	13.800.851.837	75,00	15.360.907.171	76,50	15.843.965.272	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Kantor Camat Sangatta Selatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	78		79		80		81		82		7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Kantor Camat Sangatta Selatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	14.883.956.814	72,00	15.356.842.977	73,50	15.853.373.448	75,00	16.374.730.442	76,50	16.922.155.287	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	78		79		80		81		82		7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BENGALON	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	71	72	73	11.023.305.695	74	11.065.813.508	75	11.110.446.711	76	12.157.311.575	77	12.206.519.681	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - Kantor Camat Bengalon
	Nilai Sakip Pemerintah Daerah (Nilai)	71,80	72,50	73,00		74,50		75,00		76,00		77,00		7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - Kantor Camat Bengalon
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KALIORANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	78	4.758.953.127	79	4.960.792.587	80	5.172.724.020	81	5.395.252.025	82	5.628.906.430	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - Kantor Camat Kaliorang
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - Kantor Camat Kaliorang
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	7.156.619.013	72,00	7.472.180.295	73,50	7.803.519.642	75,00	8.151.425.956	76,50	8.516.727.586	7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - Kantor Camat Muara Wahau
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	72	73	73		74		75		76		77		7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - Kantor Camat Muara Wahau
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KOMBENG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	6.091.073.636	72,00	6.344.095.014	73,50	6.609.767.461	75,00	6.888.723.530	76,50	7.181.627.403	7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - Kantor Camat Kombeng
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	76	77		78		79		80		81		7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - Kantor Camat Kombeng
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA ANCALONG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	6.080.951.936	72,00	6.750.473.459	73,50	6.928.471.059	75,00	6.915.368.538	76,50	7.311.610.892	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - Kantor Camat Muara Ancalong
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	72,00	72,25	72,50		72,75		73,00		73,25		73,50		7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - Kantor Camat Muara Ancalong
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BATU AMPAR	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	4.595.645.247	72,00	4.620.388.173	73,50	4.646.368.245	75,00	5.673.647.320	76,50	6.202.290.349	7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - Kantor Camat Batu Ampar



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	78	79		80		81		82		85		7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - Kantor Camat Batu Ampar
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. TELEN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	5.030.628.077	72,00	5.052.670.209	73,50	5.075.814.447	75,00	6.600.115.897	76,50	7.125.632.420	7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - Kantor Camat Telen
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73	74	75		76		77		78		79		7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - Kantor Camat Telen
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BUSANG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	3.885.403.300	72,00	4.046.801.792	73,50	4.216.270.208	75,00	5.094.212.045	76,50	5.581.050.973	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kantor Camat Busang
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	77	79		81		83		85		87		7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kantor Camat Busang
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC TELUK PANDAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	6.194.681.511	72,00	6.452.006.729	73,50	6.722.198.208	75,00	7.005.899.260	76,50	7.503.785.366	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - Kantor Camat Teluk Pandan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	78		79		80		81		82		7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - Kantor Camat Teluk Pandan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. RANTAU PULUNG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	3.384.563.951	72,00	3.479.585.941	73,50	3.537.359.031	75,00	3.998.020.776	76,50	4.261.715.608	7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - Kantor Camat Rantau Pulung
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74	75	76		77		78		79		80		7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - Kantor Camat Rantau Pulung
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KAUBUN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	3.680.870.024	72,00	3.800.845.221	73,50	4.021.819.178	75,00	4.543.841.833	76,50	5.066.965.620	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - Kantor Camat Kaibun
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	32	72	74		75		77		79		80		7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - Kantor Camat Kaibun
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGKULIRANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	72	72	73	5.783.716.542	74	6.023.970.398	75	6.276.236.947	76	6.541.116.823	77	6.819.240.693	7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - Kantor Camat Sangkulirang



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP (Nilai)	63,65	63,65	64,15		64,65		65,15		65,65		66,15		7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - Kantor Camat Sangkulirang
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA BENGKAL	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	8.191.728.612	72,00	9.573.550.271	73,50	9.974.463.013	75,00	10.395.421.391	76,50	10.837.427.689	7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - Kantor Camat Muara Bengkai
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74	75	80		85		85		85		85		7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - Kantor Camat Muara Bengkai
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. LONG MESANGAT	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	5.978.828.050	72,00	6.227.186.780	73,50	6.487.963.446	75,00	6.761.778.946	76,50	7.049.285.220	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - Kantor Camat Long Mesangat
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77	79	80		81		82		83		84		7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - Kantor Camat Long Mesangat
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KARANGAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	3.286.839.333	72,00	3.592.127.465	73,50	3.934.180.004	75,00	4.183.335.169	76,50	4.839.948.093	7.01.0.00.0.00.1 7.0000 - Kantor Camat Karangan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74	75	76		77		78		79		80		7.01.0.00.0.00.1 7.0000 - Kantor Camat Karangan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANDARAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	3.620.514.751	72,00	3.854.293.971	73,50	4.194.762.152	75,00	4.642.253.742	76,50	4.997.119.912	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kantor Camat Sandaran
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	72	73	74		75		76		77		78		7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kantor Camat Sandaran
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR LURAH SINGA GEWEH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	775.000.000	72,00	875.000.000	73,50	900.000.000	75,00	950.000.000	76,50	950.000.000	7.01.0.00.0.00.0 1.0001 - Kantor Lurah Singa Geweh
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	78		79		80		81		82		7.01.0.00.0.00.0 1.0001 - Kantor Lurah Singa Geweh



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	275.000.000	72,00	400.000.000	73,50	450.000.000	75,00	600.000.000	76,50	700.000.000	7.01.0.00.0.00.0 2.0001 - Kantor Lurah Teluk Lingga
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	78		79		80		81		82		7.01.0.00.0.00.0 2.0001 - Kantor Lurah Teluk Lingga
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.963.824.748		10.855.818.924		11.476.787.077		13.113.426.275		13.368.605.028	
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	41	68	71	1.667.793.516	73	1.424.763.608	75	1.682.082.205	77	1.889.766.732	80	1.697.835.486	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Kantor Camat Sangatta Selatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	50	55	75	2.553.609.626	80	2.555.836.554	81	2.558.174.828	82	2.560.630.016	83	2.563.207.964	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	50	55	57	319.587.674	60	320.401.340	65	321.255.690	68	522.152.757	70	523.094.677	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - Kantor Camat Bengalon
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	79	80	82	404.605.751	83	408.951.043	85	413.513.599	87	518.304.283	90	623.334.501	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - Kantor Camat Kaliorang
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	70,4	73	73	450.487.952	74	459.875.985	75	462.383.419	76	575.016.224	77	567.780.670	7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - Kantor Camat Muara Wahau
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	70	75	76	438.707.507	77	444.469.376	78	450.519.337	79	556.871.797	80	563.541.880	7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - Kantor Camat Kombeng
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	12	80	80	360.407.537	80	321.376.673	86	389.718.540	88	467.000.135	90	486.953.404	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - Kantor Camat Muara Ancalong
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	75	76	77	466.356.720	78	467.036.173	79	475.749.599	80	568.498.697	85	570.285.249	7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - Kantor Camat Batu Ampar



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	70	72	74	415.399.745	76	420.193.416	78	475.226.770	80	530.511.792	82	586.061.065	7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - Kantor Camat Telen
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	65	68	70	415.399.745	75	420.193.416	80	475.226.770	85	530.511.792	85	586.061.065	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kantor Camat Busang
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	92	93	94	489.845.013	95	491.500.163	96	593.238.070	97	645.062.873	98	580.978.916	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - Kantor Camat Teluk Pandan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	81	83	87	409.229.940	90	440.859.540	92	442.570.620	94	544.367.254	96	596.253.720	7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - Kantor Camat Rantau Pulung
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	50	50	55	464.088.445	55	484.673.675	57	415.288.166	57	515.933.382	59	566.610.859	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - Kantor Camat Kaubun
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	52	60	65	429.384.264	68	430.604.878	70	481.886.522	80	533.232.249	80	584.645.261	7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - Kantor Camat Sangkulirang
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	75	75	80	404.945.045	80	417.227.446	85	439.623.967	85	582.140.313	85	564.782.478	7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - Kantor Camat Muara Bengkai
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	87	89	90	405.524.327	95	449.492.379	97	473.658.834	97	508.033.611	99	562.627.128	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - Kantor Camat Long Mesangat
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	50	51	52	459.140.745	53	484.511.308	54	508.050.398	55	541.766.443	56	565.668.290	7.01.0.00.0.00.1 7.0000 - Kantor Camat Karangan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	47	48	49	409.311.196	51	413.851.951	52	418.619.743	55	523.625.925	57	578.882.415	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kantor Camat Sandaran



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					45.538.941.882		47.627.493.717		49.688.465.959		54.566.223.706		58.151.053.957	
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	72,17	63,46	65,00	2.075.936.974	67,00	2.452.948.683	69,00	2.848.810.977	71,00	3.764.466.385	73,00	4.200.904.564	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Kantor Camat Sangatta Selatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	50	65	75	3.197.572.403	80	3.828.875.017	81	4.491.742.762	82	5.187.753.894	83	5.918.565.583	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	50,00	55,01	60,02	638.285.000	65,00	639.875.347	70,50	641.545.212	76,00	943.298.570	80,00	1.645.139.596	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - Kantor Camat Bengalon
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	100	100	100	573.215.405	100	578.333.736	100	583.707.984	100	789.350.944	100	1.250.276.052	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - Kantor Camat Kaliorang
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	95,25	97	98	461.771.419	98	468.491.356	98	475.547.289	99	582.956.019	99	790.735.185	7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - Kantor Camat Muara Wahau
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	70	72	74	472.712.486	76	415.287.073	78	428.490.388		542.353.869	81	656.910.525	7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - Kantor Camat Kombeng
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	15,00	15,00	78,57	400.099.396	79,00	440.260.402	79,50	480.079.459	80,00	569.939.469	80,50	587.242.479	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - Kantor Camat Muara Ancalong
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75	77	79	592.899.408	81	593.850.643	83	594.849.439	85	625.898.175	90	650.999.348	7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - Kantor Camat Batu Ampar



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	70,58	72	74	471.601.161	76	472.498.467	78	473.440.638	80	624.429.918	82	675.468.661	7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - Kantor Camat Telen
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	35	45	55	565.957.057	65	620.773.878	70	675.831.541	75	681.142.087	75	736.718.160	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kantor Camat Busang
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	50	55	60	535.668.229	65	564.211.625	70	623.182.192	75	632.601.287	80	642.491.336	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - Kantor Camat Teluk Pandan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	81	81	85	404.285.282	88	627.005.409	90	755.861.543	95	941.160.483	98	1.083.224.371	7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - Kantor Camat Rantau Pulung
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	70	75	77	582.193.610	77	602.700.129	79	613.231.974	80	663.790.411	85	714.376.770	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - Kantor Camat Kaubun
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75	75	75	530.784.039	80	588.293.754	80	646.178.954	80	704.458.415	80	713.151.849	7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - Kantor Camat Sangkulirang
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	45	47	73	541.362.655	75	559.696.728	78	598.947.504	80	649.160.819	80	720.384.800	7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - Kantor Camat Muara Bengkai
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	95	97	98	331.151.002	98	394.906.916	98	429.350.625	98	474.516.520	98	540.440.709	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - Kantor Camat Long Mesangat
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75	80	82	360.864.621	82	417.546.889	85	444.563.271	85	481.930.471	90	589.666.032	7.01.0.00.0.00.1 7.0000 - Kantor Camat Karangan



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	54	75	79	375.303.735	84	434.659.665	92	455.826.207	96	486.301.970	96	507.079.937	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kantor Camat Sandaran
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KANTOR LURAH SINGA GEWEH	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	72,17	63,46	65,00	13.032.604.000	67,00	13.332.604.000	69,00	13.532.604.000	71,00	14.326.040.000	73,00	14.532.604.000	7.01.0.00.0.00.0 1.0001 - Kantor Lurah Singa Geweh
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	50	65	75	19.394.674.000	80	19.594.674.000	81	19.894.674.000	82	20.894.674.000	83	20.994.674.000	7.01.0.00.0.00.0 2.0001 - Kantor Lurah Teluk Lingga
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.481.782.258		8.910.308.560		9.397.590.229		11.977.424.596		12.174.799.195	
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	40	50	60	1.407.500.759	70	1.651.219.161	80	1.664.096.438	90	2.871.021.901	100	2.178.293.636	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Kantor Camat Sangatta Selatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	50	50	55	1.556.353.980	60	1.558.694.908	65	1.561.152.882	70	1.663.733.754	75	1.866.443.671	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	50,00	54,00	59,50	350.684.186	64,50	381.128.004	68,00	481.594.013	70,00	582.083.322	71,00	682.597.097	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - Kantor Camat Bengalon
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	390.920.318	100	394.697.121	100	398.662.764	100	402.826.689	100	507.198.811	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - Kantor Camat Kaliorang
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MJUARA WAHAU	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	95,25	69,5	98	387.328.316	74	388.463.526	75	389.655.496	76	490.907.065	77	492.221.213	7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - Kantor Camat Muara Wahau



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	0	100	403.144.217	100	407.428.796	100	411.927.605	100	516.651.355	100	521.611.292	7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - Kantor Camat Kombeng
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	344.853.208	100	357.506.824	100	372.899.219	100	446.845.525	100	465.937.658	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - Kantor Camat Muara Ancalong
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	75	76	77	311.994.928	78	312.493.194	79	313.016.373	80	463.565.711	90	480.142.516	7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - Kantor Camat Batu Ampar
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	70	100	100	314.217.046	100	314.807.618	100	435.427.718	100	566.078.824	100	586.762.485	7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - Kantor Camat Telen
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	74	78	80	379.969.484	84	383.291.393	87	386.779.396	90	440.441.800	90	494.287.325	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kantor Camat Busang
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	75	78	81	388.095.936	84	391.755.415	88	395.597.867	92	449.632.443	96	503.868.747	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - Kantor Camat Teluk Pandan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	76	78	81	301.918.193	83	338.451.764	87	340.062.013	88	441.752.775	90	483.528.075	7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - Kantor Camat Rantau Pulung
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	90	93	94	357.638.311	95	367.955.604	96	398.288.762	97	430.638.578	98	459.005.884	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - Kantor Camat Kaubun
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	346.818.522	100	348.763.349	100	400.805.418	100	452.949.590	100	475.200.971	7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - Kantor Camat Sangkulirang



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentrman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	320.330.917	100	333.252.442	100	356.320.044	100	499.541.025	100	582.923.056	7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - Kantor Camat Muara Bengkai
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentrman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	305.524.327	100	329.492.379	100	353.658.834	100	408.033.611	100	462.627.128	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - Kantor Camat Long Mesangat
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentrman dan Ketertiban Umum (%)	70	80	82	313.795.210	84	337.276.038	86	360.930.907	88	420.768.520	90	448.798.013	7.01.0.00.0.00.1 7.0000 - Kantor Camat Karangan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentrman dan Ketertiban Umum (%)	0	0	40	300.694.400	45	313.631.024	50	376.714.480	55	429.952.108	55	483.351.617	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kantor Camat Sandaran
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.836.073.208		10.741.080.826		11.341.810.937		12.967.126.811		12.724.266.373	
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,34	90,44	90,83	1.956.492.129	92,15	1.605.454.676	93,87	1.995.365.350	95,71	2.616.271.558	97,66	2.038.223.076	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Kantor Camat Sangatta Selatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	12	15	20	2.571.742.177	25	2.574.722.326	30	2.577.851.482	35	2.581.137.096	40	2.584.586.990	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	60,00	64,55	66,00	796.743.314	67,55	798.685.017	70,00	800.723.805	72,00	802.864.533	72,30	805.112.298	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - Kantor Camat Bengalon
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	60	65	70	428.134.508	75	441.765.118	80	456.077.257	85	571.105.004	85	586.884.138	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - Kantor Camat Kaliorang



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70,4	69,5	70,3	357.427.948	73,5	374.352.383	77,8	392.123.040	80,2	410.782.230	83,4	430.374.379	7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - Kantor Camat Muara Wahau
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70	72	73	327.996.719	75	437.467.635	77	447.412.096	79	557.853.781	80	568.817.549	7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - Kantor Camat KOMBENG
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	55,00	55,50	60,00	385.449.928	60,50	443.153.462	61,00	401.242.173	61,50	509.735.320	62,00	518.653.124	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - Kantor Camat Muara Ancalong
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75	77	79	355.067.624	81	360.656.419	83	384.656.419	85	424.985.160	90	443.143.276	7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - Kantor Camat Batu Ampar
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70	72	75	385.287.437	77	386.753.267	79	388.292.388	81	439.908.465	83	491.605.346	7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - Kantor Camat Telen
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	55	60	65	354.387.292	74	360.800.494	78	367.534.356	85	474.604.911	85	482.028.994	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kantor Camat Busang
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70	75	79	361.959.869	83	376.995.574	87	392.783.064	91	509.359.928	95	526.765.636	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - Kantor Camat Teluk Pandan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	71	72	75	308.459.000	77	312.216.640	78	316.162.162	81	352.304.960	82	406.654.898	7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - Kantor Camat Rantau Pulung
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	20	25	30	320.443.504	35	340.702.023	40	375.123.469	45	438.715.987	50	492.488.131	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - Kantor Camat Kaubun



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90	90	90	392.811.512	90	400.820.844	90	409.230.644	90	418.060.933	90	427.332.736	7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - Kantor Camat Sangkulirang
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	80	85	90	382.665.521	100	394.407.362	100	406.736.296	100	419.681.676	100	433.274.325	7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - Kantor Camat Muara Bengkal
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70	85	85	393.153.143	87	409.484.607	87	426.632.644	90	444.638.083	95	463.543.794	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - Kantor Camat Long Mesangat
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	60	60	65	368.215.406	65	375.203.024	70	382.540.022	70	490.243.871	75	498.332.912	7.01.0.00.0.00.1 7.0000 - Kantor Camat Karangan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	37	38	41	389.636.177	43	347.439.955	44	421.324.270	45	504.873.315	50	526.444.771	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kantor Camat Sandaran
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					8.080.612.257		8.131.105.357		8.530.334.057		9.336.192.030		10.116.921.513	
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	33	67	100	929.455.510	100	921.448.934	100	1.174.542.029	100	1.598.789.778	100	2.124.249.915	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Kantor Camat Sangatta Selatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	50	65	75	2.046.306.639	80	2.048.230.203	81	2.050.249.945	82	2.052.370.674	83	2.054.597.440	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	50,50	55,00	75,00	331.651.901	76,00	332.966.711	78,50	334.347.263	79,00	335.796.841	80,00	337.318.899	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - Kantor Camat Bengalon



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	60	65	80	289.072.671	85	299.003.678	90	309.431.236	100	320.380.171	100	331.876.553	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - Kantor Camat Kaliorang
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70,4	69,5	70,3	277.556.812	73,5	279.532.308	77,8	281.606.579	76	383.784.563	77	386.071.446	7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - Kantor Camat Muara Wahau
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	71	73	76	357.912.054	77	364.471.674	78	371.359.274	79	378.591.255	80	386.184.834	7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - Kantor Camat Kombeng
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	50,00	50,00	60,00	345.091.301	65,00	354.026.129	70,00	333.407.699	75,00	343.258.347	80,00	353.601.528	7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - Kantor Camat Muara Ancalong
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70	71	72	254.592.327	73	227.020.877	74	275.297.656	75	329.889.471	76	343.984.484	7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - Kantor Camat Batu Ampar
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	71	73	75	319.090.795	77	319.883.821	79	320.716.498	81	321.590.810	83	352.508.836	7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - Kantor Camat Telen
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	60	65	70	277.140.062	80	302.006.025	85	327.115.287	90	332.480.011	90	388.112.972	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kantor Camat Busang
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TTELUK PANDAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	60	65	73	331.296.063	78	336.750.062	82	342.476.762	87	348.489.796	97	354.803.482	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - Kantor Camat Teluk Pandan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	56	67	78	292.800.574	89	323.747.703	100	324.742.188	100	375.786.398	100	386.882.818	7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - Kantor Camat Rantau Pulung



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	62,5	75	75	313.304.844	87,5	326.961.490	87,5	338.785.108	87,5	405.966.551	100	423.312.069	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - Kantor Camat Kaubun
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	66	66	73	349.709.321	73	355.928.202	73	362.458.026	80	369.314.342	80	376.513.474	7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - Kantor Camat Sangkulirang
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	95	100	100	372.125.970	100	379.276.031	100	386.783.595	100	394.666.538	100	402.943.628	7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - Kantor Camat Muara Bengkai
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	42	57	57	327.365.770	57	332.656.506	71	338.211.779	85	344.044.815	100	350.169.504	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - Kantor Camat Long Mesangat
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	78	80	82	379.079.206	84	332.364.132	86	355.813.305	88	389.434.937	90	443.237.650	7.01.0.00.0.00.1 7.0000 - Kantor Camat Karangan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	44	44	56	287.060.437	78	294.830.871	89	302.989.828	95	311.556.732	96	320.551.981	7.01.0.00.0.00.1 8.0000 - Kantor Camat Sandaran
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					21.669.672.599		22.765.144.275		24.000.389.534		26.177.397.055		28.078.254.953	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.450.355.210		7.651.311.439		7.857.315.479		8.068.619.722		8.865.489.176	
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50	7.450.355.210	72,00	7.651.311.439	73,50	7.857.315.479	75,00	8.068.619.722	76,50	8.865.489.176	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79	80	80		82		82		84		84		8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					5.665.734.337		5.901.087.248		6.148.207.804		7.407.684.387		7.680.134.801	
MENINGKATNYA KESADARAN MSYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	100	20,53	40,40	5.665.734.337	60,26	5.901.087.248	80,13	6.148.207.804	100	7.407.684.387	100	7.680.134.801	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.348.208.693		2.445.752.580		2.548.173.662		2.655.715.797		2.768.635.040	
MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	72	11,20	28	2.348.208.693	33,50	2.445.752.580	39	2.548.173.662	100	2.655.715.797	100	2.768.635.040	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.324.617.596		1.558.871.965		1.894.839.052		2.132.604.493		2.472.258.206	
MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	128	28	30	1.324.617.596	50	1.558.871.965	70	1.894.839.052	100	2.132.604.493	100	2.472.258.206	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.878.424.889		1.956.454.097		2.038.384.766		2.124.411.968		2.214.740.530	



Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	60,28	2,45	27,00	1.878.424.889	52,78	1.956.454.097	79,78	2.038.384.766	100	2.124.411.968	100	2.214.740.530	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					3.002.331.874		3.251.666.946		3.513.468.771		3.788.360.688		4.076.997.200	
PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	0	0	0	3.002.331.874	0	3.251.666.946	0	3.513.468.771	0	3.788.360.688	0	4.076.997.200	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase penanganan konflik sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					6.348.224.200.000		6.613.381.424.950		6.891.796.511.148		7.184.132.351.655		7.491.084.984.188	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. IKU disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah secara terukur dan akuntabel. Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterukuran, relevansi, dan keselarasan terhadap dokumen perencanaan nasional dan provinsi, termasuk indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Sustainable Development Goals (SDGs). IKU juga dirancang agar dapat diukur secara berkala melalui sistem pelaporan yang terintegrasi dalam kerangka evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sebagai panduan dalam pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menuju Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kutai Timur 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,18	76,6	77,02	77,45	77,87	78,29
2	PDRB per kapita	juta Rp	366,53	389,99	414,94	441,49	469,74	499,8
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	10	10,30	10,60	10,89	11,19	11,9
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	80 (BB)
5	Rasio gini	Indeks	0,278-0,283	0,271-0,281	0,264-0,279	0,257-0,277	0,250-0,275	0,243-0,273
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	61,66	63,5	65,33	67,16	69	70,83
7	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,25-3,45	3,33-3,53	3,41-3,61	3,49-3,69	3,58-3,78	3,67-3,87
8	Tingkat Kemiskinan	%	7,93-8,14	7,16-7,55	6,38-6,97	5,61-6,38	4,83-5,80	4,06-5,21
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44-5,51	5,21-5,31	4,98-5,10	4,76-4,90	4,53-4,70	4,30-4,50

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah seperti dirangkum pada tabel berikut:



Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	-	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68	0,69	
2	Rasio Elektrifikasi	%	89,17	90,53	92,42	94,32	96,21	98,11	100	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	75,85	78,88	79,05	79,33	79,39	79,56	79,73	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	-	83,6	84,14	84,68	85,22	85,76	86,3	
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	173,36	166,36	159,36	152,36	145,36	138,36	131,36	
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	-	0,46	0,49	0,53	0,56	0,60	0,63	
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	-	7,58	7,216	6,852	6,488	6,124	5,76	
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	-	52,65	55,02	57,39	59,75	62,12	64,49	
9	Capaian Akses Air Minum Layak	%	58,53	60	62	64	66	68	70	
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	-	55	56,75	58,5	60,25	62	63,75	
11	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	-	26,31	29,75	33,19	36,62	40,06	43,5	
12	Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif	%	-	20,47	2,04	23,61	25,17	26,74	28,31	
13	Persentase Penurunan Emisi GRK b. Tahunan	%	-	26,31	29,75	33,19	36,62	40,06	43,5	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	-	-	42	44	46	48	50	
2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	-	98	98,2	98,4	98,6	98,8	99	
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	29	21	20,44	20,08	19,57	19,05	18,54	
4	Persentase Desa Mandiri	%	-	21,58	24,46	27,34	31,65	35,97	-	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	-	90	90,5	91	91,5	92	92,5	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	-	67,89	69,4974	71,1028	72,7082	74,3136	75,92	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,75	74,33	74,79	75,25	75,71	76,16	76,61	
8	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	-	64,47	65,73	67	68,26	69,53	7,79	
9	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	-	70	70,25	70,51	70,76	71,01	71,26	
10	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	-	12,5	13,53	14,66	15,79	16,92	18,05	
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	-	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	-	5.44-5.51	5.21-5.31	4.98-5.10	4.76-4.90	4.53-4.70	4.30-4.50	
13	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	31	32,06	33,05	34,04	35,04	36,03	
14	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	-	56	57,2	58,41	59,61	60,81	62,01	
15	Numerasi SMP/Sederajat	%	-	65	65,55	66,1	66,65	67,2	67,75	
16	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	65,56	66,7	67,9	68,9	69,9	70,9	71,8	
17	Proporsi anggaran IPTEK dan Inovasi terhadap APBD	%	-	0,15	0,32	0,49	0,66	0,83	1	
18	Tingkat Kemiskinan (%)	%	-	7.93-8.14	7.16-7.55	6.38-6.97	5.61-6.38	4.83-5.80	4.06-5.21	
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	-	52,05	53,38	54,25	55,13	56	56,87	
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	%	-	52,6	54,47	56,34	58,21	60,08	61,95	
21	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	-	53,95	55,65	57,34	59,04	60,73	62,43	
22	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	-	9,5	13,6	17,7	21,8	25,9	30	
23	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	9,47	9,49	9,51	9,53	9,55	9,57	9,59	
24	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	-	80	80,75	81,5	82,25	83	83,75	
25	Numerasi SD/Sederajat	%	-	55	56,51	58,03	59,54	61,05	62,56	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	-	72	73,32	74,59	75,86	77,13	78,4	
27	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	134	10	10	9	9	8	7	
28	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	-	11	14,8	18,6	22,4	26,2	30	
29	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	-	90	90,45	90,9	91,35	91,8	92,25	
30	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	-	0,75	0,77	0,78	0,8	0,81	0,82	
31	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,03	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08	
32	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,10	79,45	79,86	80,00	80,15	80,50	80,50	
33	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	16,79	21,17	24,82	28,47	32,12	35,77	39,42	
34	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	(%)	95	95	95	95	95	95	95	
35	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	30	35	40	45	50	55	60	
36	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	42,86	66,67	76,19	85,71	90,48	95,24	100	
37	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	6.62:0.82	6.72:0.83	6.81:0.85	6.90:0.86	6.99:0.87	7.07:0.89	7.15:0.90	
38	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
39	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	71	47	44	42	40	38	36	
40	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%	33	33	67	67	75	75	100	
41	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)		98	98,2	98,4	98,6	98,8	99	
42	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	80	82	84	86	88	90	92	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
43	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	58,35	58,74	59,20	59,70	60,20	60,71	66,87	
44	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	%	72	73	74	76	77	78	80	
III ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	24,7	28	32	36	40	44	46	
2	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	%	-	72	73,206	74,41	75,62	76,82	78,02	
3	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	-	0,30	0,52	0,76	0,99	1,23	1,47	
4	Disparitas Harga	%	-	7,1	6,68	6,26	5,84	5,42	5	
5	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	-	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,80	
6	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-	80	80,25	80,5	80,75	81	81,25	
7	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang	%	-	25,06	25,66	26,91	27,56	28,22	28,88	
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	-	21,05	21,75	22,45	23,14	23,84	24,54	
9	Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	%	-	0,862	0,912	0,962	1,012	1,062	1,11	
10	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	-	1.500	1.581	1.662	1.744	1.825	1.906	
11	Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB	Angka	-	70,99	71,69	72,39	73,09	73,79	74,49	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	-	3.25-3.45	3.33-3.53	3.41-3.61	3.49-3.69	3.58-3.78	3.67-3.87	
13	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	-	4,56	5,06	6,9	8,74	10,58	12,42	
14	Jumlah Festival Kerakyatan Tahunan	Kegiatan	-	4	4	5	5	6	6,4	
15	Persentase Penegakan Perda	%	-	73,99	74,79	75,6	76,4	77,2	78,01	
16	Tingkat Inflasi	(%)	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
17	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	-	11,32	14,645	17,97	21,29	24,61	27,94	
18	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	-	3,47	3,67	3,87	4,08	4,28	4,48	
19	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	%	-	53,95	55,65	57,34	59,04	60,73	62,43	
20	Proporsi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi	%	-	0,18	0,19	0,21	0,22	0,24	0,26	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
21	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	-	64,22	66,9	69,7	72,62	75,66	78,82	
22	Return on Aset (ROA) BUMD	%	-	1	1,18	1,36	1,54	1,72	1,9	
23	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Pelaku Usaha	-	90	156,74	227,46	298,19	368,91	439,64	
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	-	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6	
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	-	0,1	0,22	0,34	0,46	0,58	0,7	
26	Persentase perkebunan yang menerapkan standar berkelanjutan	%	-	0,15	0,2002	0,25	0,3	0,35	0,4	
27	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	-	14	15	17	18	20	22	
28	Persentase peningkatan luas ANKT	%	-	-	0,08	0,09	0,09	0,1	0,1	
29	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	-	3,45	4,97	6,48	8	9,52	11,04	
30	Total Kredit/PDRB	(%)	-	1,15	4,559	7,97	11,37	14,78	18,19	
31	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	-	7.89-8.01	8.01-8.13	8.13-8.26	8.26-8.38	0.38-8.50	8.50-9.00	
32	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%)	%	25,06	25,06	25,66	26,91	27,56	28,22	28,88	
33	Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	430.675	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	
34	Produksi perikanan	Ton	9.982,10	9.915,14	9.937,91	9.955,81	9.976,45	9.992,75	10.012,83	
35	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	0	7,89	8,01	8,13	8,26	8,38	8,50	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus	-	0	0	0	0	0	0	
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	-	71,5	73	74,5	76	77,5	
3	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	3	3,4	3,8	4	4,2	
4	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	-	62,13	65,11	68,08	71,05	74,03	77	
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
6	Jumlah kejadian tindak kriminal	Kejadian	-	526	500	473	447	421	394,5	
7	Indeks Merrit	%	-	296,25	317	337,75	358,5	379,25	400	
8	Nilai SAKIP	Nilai	67,65	67,65	70,50	72,00	73,50	75,00	76,50	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kasus	-	0	0	0	0	0	0	
10	Indeks Demokrasi	Indeks	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
11	Indeks Integritas Nasional	Persentase	-	75	76	78	79	81	73	
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	-	4,91	5,01	5,03	5,06	5,08	5,1	
13	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,9	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
14	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,83	64,55	64,78	65,02	65,25	65,49	65,72	
15	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	67,74	73,66	79,57	84,95	90,32	95,16	100	
16	Persentase Masyarakat yang dilayani	%	70	75	76	77	79	81	82	
17	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai	48,6	49	50	51	52	53	54	
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
19	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	%	72	74	75	76	77	78	79	
20	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	81,04	81,04	82	84	86	88	92	
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	89	90	95	97	97	99	
22	Rasio Fatalitas Kecelakaan	Angka	0,25	0,25	0,23	0,20	0,18	0,15	0,13	
23	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	%	73	74	75	76	77	78	79	
24	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	72	73	75	76	77	78	79	
25	Jumlah kejadian tindak kriminal	Kasus	-	526	500	473	447	421	394,5	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	50,71	53,61	56,51	59,41	62,31	65,21	68,11	
2	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57,41	59,91	62,41	64,91	67,41	69,91	72,41	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	71,54	72,54	73,54	74,54	75,54	76,54	77,54	
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,07	63,57	65,07	66,57	68,07	69,57	71,07	
5	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan 7-18 Tahun	Angka	32,40	37,38	42,36	47,34	52,31	57,29	62,27	
6	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	72,60	73,60	74,60	75,60	76,60	77,60	78,60	
7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	34,74	38,35	45,30	54,56	66,14	80,03	93,92	
8	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,45	61,95	64,45	66,95	69,45	71,95	74,45	
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	55,41	59,18	59,93	60,68	61,43	62,18	62,93	
10	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	Angka	65,31	68,51	71,72	74,76	77,80	80,84	83,81	
11	Iklim Keamanan SD	Nilai	73,99	74,89	75,79	76,69	77,59	78,49	79,39	
12	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57,87	60,27	62,67	65,07	67,47	69,87	72,27	
13	Iklim Keamanan SMP	Nilai	71,05	72,55	74,05	75,55	77,05	78,55	80,05	
14	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	Angka	99,97	100	100	100	100	100	100	
15	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,57	72,67	73,77	74,87	75,97	77,07	78,17	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan dasar	%	80	80	80	80	80	80	80	
2	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan rujukan	%	80	80	80	80	80	80	80	
3	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	62	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	85	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	92	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87	100	100	100	100	100	100	
12	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,55	74,67	74,79	75,25	75,71	76,16	76,61	
13	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	67	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	71	100	100	100	100	100	100	
15	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	96	100	100	100	100	100	100	
AC	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	8	10	20	30	40	50	60	
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	2	3	4	5	6	7	7	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan Perkada serta peneylenggaraan Tibumtranmas	%	0	0	90	90	90	90	90	
6	Persentase jumlah sarana dan prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	70	80	80	85	85	85	85	
7	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar	%	20	28	34	39	49	51	56	
8	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	0	26	15	20	35	35	38	
9	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	0	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Infromasi Rawan Bencana	%	0	0,18	1,10	1,47	1,55	1,55	1,55	
11	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	0	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	%	38,89	38,89	50,00	66,67	83,33	99,00	99,00	
14	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	%	98,83	97,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	
15	Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	0	0,67	1,67	1,07	1,08	1,08	1,07	
16	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	0	0	0	100	100	100	100	
17	Persentase Desa/Kelurahan yang tersosialisasi atau edukasi dalam Pencegahan Kebakaran	%	42,55	42,55	60,28	74,47	92,20	99,00	99,00	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AD	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	15,00	16,50	19,97	26,58	38,92	49,67	66,56	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	66,37	68,99	71,73	74,57	77,52	80,59	87,10	
3	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan /Kompetensi	%	88,76	89,65	90,54	91,45	92,36	93,29	94,22	
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/Orang/ Bulan	514,92	542,27	571,85	603,51	637,07	672,67	705,09	
5	Persentase Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	24,33	24,33	26,77	26,78	32,41	43,13	63,14	
AE	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	90	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	10	30	35	40	42	45	45	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
AF	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	105,96	78,00	81,00	84,12	87,36	90,72	94,22	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86,80	89,00	91,20	93,40	95,60	97,80	100,00	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	13,89	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase	96,67	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,50	
AG	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Tingkat Penyelesaian Sengketa Tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AH	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	77,27	50	50	52	53	54	54	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	55,8	56,70	57,60	58,50	59,40	60,30	61,20	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,85	78,88	79,05	79,22	79,39	79,56	79,73	
AI	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	%	100	100	63	63,50	64	64,50	65	
2	Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	%	99,63	99	97	97,50	98	98,50	99	
3	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	%	100	100	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	
4	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan adminduk	%	73,46	62	55	70	80	99	99,99	
5	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	%	100	100	65,50	67	67,50	68	69	
6	Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	%	30,00	30,00	20,00	18,50	16,50	14,50	13,00	
7	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AJ	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	57	60	65	70	75	82	89	
AK	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	%	18,3	17,1	16	15,1	14,2	13,5	12,8	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	52,80	53,10	53,40	53,70	54,00	54,30	54,60	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / IKK	%	16,26	19,51	22,76	26,02	29,27	32,52	35,77	
4	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	7,90	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	0	16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,3	
6	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-Rata Jumlah Anak	2,09	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08	2,07	
AL	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	83,17	58,57	63,96	68,21	73,6	78,5	85,35	
2	Cakupan akses internet desa	%	0	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	0	61,67	70	80	85	90	95	
4	Persentase sistem informasi yang terintegrasi dengan aplikasi layanan publik	%	0	80	80	80	85	90	95	
5	Cakupan Layanan Informasi	%	0	66,24	74	82	89	94	100	
6	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	69,78	75,54	81,29	87,05	92,81	100	
7	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0	67,27	74,55	81,82	89,09	94,55	100	
AM	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	105,03	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Promosi yang Diikuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
AN	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	67,36	67,36	68,75	69,44	70,13	70,83	72,22	
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	45	45	58	62	65	70	75	
3	Persentase Atlet yang Berasal dari Kab/Kota yang Masuk Pelatda Provinsi	%	13,40	13,40	14	14	15	16	19	
4	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	33	33	34	35	36	37	39	
5	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training/ dan Memperoleh Sertifikat	%	4,87	4,87	4,96	5,05	5,14	5,22	5,27	
6	Presentase Prestasi Olahraga	%	44,6	45	58,33	61,66	65	70	73,83	
AO	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	0	1,8	2	2,2	2,3	2,6	2,8	
2	Presentase OPD yang menyediakan Data Statistik Sektoral	%	70	80	90	100	100	100	100	
AP	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0	32	43	54	70	87	92	
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	0	32	43	54	70	87	92	
AQ	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67,59	67,91	68,23	68,55	68,87	69,19	69,59	
2	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	%	0,78	1,11	1,45	1,89	2,23	2,56	2,67	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AR	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	7,41	25,93	37,04	44,44	62,96	81,48	100	
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	0	24,07	29,63	37,04	44,44	50	55	
3	Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Minimal B	Rasio	0,6	0,11	0,19	0,28	0,33	0,37	0,40	
AS	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.726,62	8.797,94	8.799,28	8.802,37	8.804,85	8.806,40	8.809,55	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.255,48	1.117,2	1.138,63	1.153,44	1.171,6	1.186,35	1.203,28	
AT	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	%	28,57	33,61	37,82	46,22	50,42	58,82	58,82	
2	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata	%	25,00	20,00	16,67	14,29	12,50	11,11	9,52	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	72	73	74	75	76	77	78	
4	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0	1,07	1,06	1,05	1,03	0,68	1,02	
5	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	0	1,48	1,21	1,20	1,19	1,17	1,16	
6	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0,08	0,11	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	
AU	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian	%	0	40	45	51	59	69	79	
2	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian	%	0	20	20	26	34	44	54	
3	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	0	0,17	0,17	6	14	24	34	
4	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi	%	0	20	20	26	34	44	54	
5	Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian	%	0	60	60	66	74	84	94	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	0	85	100	100	100	100	100	
7	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	0	0	1,8	2,02	2,28	2,44	2,51	
8	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	0	0	100	100	100	100	100	
9	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	0	0	6,51	4,75	9,19	9,21	9,22	
10	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	0	0	2,32	3,47	3,49	3,7	3,8	
AV	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
AW	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	0	5,24	6,13	7,03	7,92	8,82	9,71	
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	0	6,05	6,5	6,75	6,8	7	7,05	
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	0	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,25	
AX	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Presentase Layanan Elektrifikasi Rumah Tangga	%	84,50	84,50	90,42	96,74	100,00	100,00	100,00	
2	Presentase Penerima Beasiswa	%	91,97	75,57	76,00	77,57	78,00	79,57	79,57	
AY	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Capaian Kinerja Program	Persentase	93,47	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	99,32	100	100	100	100	100	100	
AZ	5.02 - KEUANGAN									
1	Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	75,59	79,09	84,37	90,20	91,37	94,87	96,59	
2	Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40	40	40	40	40	40	40	
3	Presentase Penurunan SILPA	%	-93,57	-94,07	-94,57	-95,07	-95,57	-96,07	-96,57	
4	Presentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	11,98	22,03	30	30	30	30	30	
5	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	30,47	40,47	50,47	60,47	70,47	80,47	90,47	
BA	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	81,88	80,05	80,1	80,15	80,2	80,25	80,3	
BB	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%		14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	14,47	14,81	29,63	44,44	59,26	74,07	88,89	
BC	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	86,20	81,68	83	85	87	89	90	
2	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3	%		50	55	60	65	70	75	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	4	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3	3	3	3	3	3	4	
BD	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Jumlah Konflik Sosial	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	128	28	30	50	70	100	100	
3	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba	%	60,28	2,45	27,00	52,78	79,78	100	100	
4	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	%	72	11,20	28,00	33,50	39,00	100	100	
5	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara	%	100	20,53	40,40	60,26	80,13	100	100	
6	Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, serta RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2036. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu, RPJMD ini juga merupakan arahan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam penyusunan rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Kutai Timur untuk dapat mewujudkan Visi Bupati **“TERWUJUDNYA KUTAI TIMUR TANGGUH, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”**, perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas, dan demokratis; (2) Tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*); (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur; (4) Keberpihakan kepada rakyat (*pro-poor policy*); (5) Partisipasi aktif masyarakat, media massa, dan dunia usaha; serta (6) Mekanisme pengendalian dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas publik yang baik.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah diharapkan masyarakat Kabupaten Kutai Timur menjadi kabupaten yang sejahtera dan berkeadilan bagi semua sesuai dengan Visi Bupati Kutai Timur terpilih.

5.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah hingga akhir periode RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan

pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengingat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sekarang akan berakhir pada tahun 2029, maka pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati periode sekarang atas pelaksanaan RPJMD Kutai Timur 2025-2029 hanya sampai tahun pelaksanaan 2029;
- 2) Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur di tahun 2029, maka penyusunan ranwal RKPD Tahun 2030 tetap berpedoman pada RPJMD 2025-2029 ini atau menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar RPJMD dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Bupati Kutai Timur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
- 3) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan didukung oleh instansi vertikal dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya;
- 4) RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

- 5) Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 setiap tahunnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun berkenaan;
- 6) Sesuai PP Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 7) Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, dan program dalam RPJMD diperlukan instrumen antara lain perangkat daerah dan sumber daya manusia (SDM), maka penyusunan organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dan membagi atau memisahkan secara jelas tanggungjawab perangkat daerah antara sebagai regulator dengan sebagai operator, artinya tidak diperkenankan saat perangkat daerah mempunyai peran ganda sebagai regulator sekaligus operator karena fungsi evaluasi dan pengawasannya menjadi tumpang tindih serta dijalankan oleh SDM yang mempunyai kompetensi;
- 8) Mengingat pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, seperti ketidakpastian fiskal, perubahan iklim, disrupsi teknologi, perubahan sosial-politik, dan keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, maka penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah menjadi suatu kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029. Manajemen risiko pembangunan berperan penting dalam mengantisipasi potensi kegagalan pencapaian tujuan pembangunan, memastikan efisiensi pelaksanaan program, serta memperkuat ketangguhan daerah terhadap dinamika dan ketidakpastian. Hal ini sejalan

dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan proses identifikasi, penilaian, pengendalian, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan yang lebih akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil;

- 9) RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 dapat dilakukan perubahan apabila syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 dan/atau Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) terpenuhi.

EUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

